



# BERJUANG DENGAN UANG

**MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA:  
SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA**

BERJUANG DENGAN UANG  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA:  
SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT  
SUMATERA UTARA

**Penulis**

Darsono  
Siti Astiyah  
Ichwan Azhari  
Enny Tin Suryanti  
Allan Akbar



2017

*Berjuang dengan Uang Mempertahankan  
dan Memajukan Republik Indonesia:  
Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*

Darsono / Siti Astiyah / Ichwan Azhari /  
Enny Tin Suryanti / Allan Akbar

Cetakan Pertama, Oktober 2017  
xxxii + 438 hlm, 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 978-979-8086-75-1

Bank Indonesia Institute  
Jl. Mh Thamrin no 2 Jakarta 10350  
Indonesia  
<http://www.bi.go.id/id/institute/default.aspx>

Tata letak: tinta.creativep@gmail.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## Testimoni

### Buku Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia

#### **Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti**

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya diisi melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Namun juga melalui perjuangan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah perjuangan dengan menggunakan uang. Buku ini sangat menarik karena menjelaskan bagaimana uang digunakan sebagai sarana menegakkan kedaulatan Indonesia. Kiranya hal tersebut masih relevan dengan masa sekarang, di mana saat ini kita sedang berjuang untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa dengan menjadikan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

#### **Prof. Dr. Bambang Purwanto**

Uang memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu negara. Selain dapat digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan alat penyimpan kekayaan, uang juga memiliki fungsi politis yakni sebagai instrumen perjuangan dan salah satu simbol kedaulatan suatu bangsa. Buku dengan judul “Berjuang dengan Uang” ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi memainkan peranan tersendiri dalam upaya bangsa mempertahankan kemerdekaan.

#### **Prof. Dr. Gusti Asnan**

Sebagai sebuah wilayah kajian, Sumatera Utara sangat menarik untuk diteliti dengan beragam tema kajian. Pemilihan tema uang sebagai alat perjuangan merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Tidak banyak peneliti yang membahas mengenai bagaimana peredaran dan peranan moneter dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Buku ini merupakan salah satu sumbangan yang amat berharga untuk memahami dinamika sejarah Su-

matera Utara umumnya dan jejak perjuangan masyarakat Sumatera Utara pada khususnya.

### **Prof. Dr. Mestika Zed**

Sumatera Timur di masa lalu (sekarang Sumatera Utara) pernah disebut “daerah perkebunan”, sementara Sumatera Selatan adalah “daerah produksi, tambang dan perdagangan.” Di kedua daerah itu, uang tidak lagi sekedar alat pembayaran untuk barang dan jasa. Uang pada gilirannya juga memiliki fungsi yang dinamis dan menguasai hampir segala urusan. Buku ini melacak secara rinci tentang dinamika sejarah perkembangan uang dan lembaga keuangan di Sumatera Utara serta peran spesifik yang dimainkannya dalam perjuangan kemerdekaan. Buku ini merupakan jendela dan sekaligus kesaksian tentang peran uang Republik sebagai simbol identitas, kedaulatan dan alat perjuangan, di samping tentunya sebagai *driving force* bagi pengembangan potensi ekonomi. Sebuah buku yang kuat mengenai relasi pembentukan negara dan uang. Buku ini sekaligus merupakan testimoni tentang betapa pentingnya peran uang dalam dinamika sejarah perjuangan bangsa. Dalam arti yang paling murni, uang di mata pendiri bangsa ini mestilah menjadi instrumen bagi penguatan sendi-sendi negara dan bangsa dan bukan sebaliknya menjadi *boomerang* yang memakan tuannya sendiri.

# SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA



*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Perjuangan mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini ditulis lebih banyak dari sudut pandang perjuangan fisik bersenjata, di samping juga perjuangan dalam bentuk diplomasi. Perjuangan dari sisi ekonomi dan moneter yang berkaitan dengan pengedaran uang sebagai bentuk perjuangan mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum banyak diungkap dalam catatan perjuangan bangsa Indonesia. Buku ini mengungkapkan peran penting uang yang bukan saja berfungsi sebagai alat transaksi namun juga sebagai alat perjuangan untuk menunjukkan eksistensi dan kedaulatan negara.

Melalui buku ini diperlihatkan bagaimana provinsi Sumatera Timur – saat ini menjadi Sumatera Utara – yang perekonomiannya paling dinamis pada masa penjajahan, mampu menggunakan uang sebagai alat perjuangan yang efektif dalam melumpuhkan blokade ekonomi dan keuangan oleh Belanda. Ekspor komoditas hutan dan perkebunan dari Sumatera Timur ke Penang dan Singapura yang merupakan wilayah koloni Inggris, sudah berlangsung sejak abad ke 18. Hal ini menyebabkan kuatnya pengaruh Inggris di wilayah ini, terutama dalam bentuk digunakannya uang dolar Straits Settlements

dan British Trade Dollar.

Di Sumatera Timur beredar sembilan jenis uang dari delapan negara, namun penggunaan mata uang didominasi oleh Dolar Spanyol dan Straitsettlement Inggris. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda melakukan program guldenisasi untuk memperluas penggunaan Gulden Belanda sekaligus menegaskan otoritasnya di Sumatera Timur dengan mendirikan lima cabang De Javasche Bank.

Walaupun sudah terdapat lima cabang De Javasche Bank yang didirikan di Sumatera Timur, upaya guldenisasi tidak sepenuhnya berhasil dijalankan. Di samping karena telah beredarnya tujuh mata uang asing di luar gulden Belanda, pada masa tersebut juga ada lebih dari seratus perkebunan di kawasan ini yang menggunakan sistem uang sendiri yakni uang kebon atau token.

Buku ini juga akan bercerita peran uang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah operasi militer untuk menduduki Indonesia berhasil, Pemerintah Jepang melakukan berbagai langkah untuk menggantikan sistem keuangan yang diciptakan Belanda, antara lain dengan membubarkan De Javasche Bank dan mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. NKG mengeluarkan uang yang dikenal dengan uang *Nanpatsu* yang juga beredar di Sumatera Timur sebagai alat pembayaran yang sah.

Setelah proklamasi kemerdekaan, untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional, Pemerintah Republik mencetak dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang berlaku secara resmi pada 30 Oktober 1946. ORI yang merupakan mata uang Republik Indonesia selain digunakan sebagai alat pembayaran, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia kepada dunia. Pada masa ini uang juga berfungsi sebagai alat pemersatu, penggugah rasa nasionalisme, dan sarana politik perjuangan Indonesia.

Penyebaran ORI ke seluruh wilayah Indonesia tidak berjalan mudah, terutama setelah Belanda melakukan agresi militer per-

tama tahun 1947. Pemerintah kemudian memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mencetak uang di wilayah masing-masing, yang kemudian dikenal dengan Uang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Di Sumatera Utara, ORIDA yang beredar adalah Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS), Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara (URIPSU), dan Uang Republik Indonesia Tapanuli (URITA).

Fungsi uang sebagai instrumen perjuangan sebagaimana disampaikan di atas, belum banyak diungkap secara lengkap dalam peta perjuangan bangsa Indonesia. Buku ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada pembaca tentang dinamika fungsi uang. Uang sebagai instrumen perjuangan tetap relevan untuk masa kini dan masa datang. Untuk itu, kami mengajak para pembaca semua bangga dan cinta terhadap Rupiah, yang merupakan simbol kedaulatan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Desember 2016  
Gubernur Bank Indonesia



Agus D. W. Martowardojo

# SAMBUTAN DEPUTI BANK INDONESIA



Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, uang memiliki fungsi yang sangat vital. Selain sebagai instrumen pembayaran dan penggerak roda perekonomian, uang juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi politik, sebagai simbol kedaulatan ekonomi bagi sebuah bangsa.

Salah satu atribut dari kedaulatan itu adalah memiliki mata uang sendiri. Untuk itu, dengan segenap upaya dari semua lapisan masyarakat, Indonesia berusaha untuk memiliki uang sendiri yang digunakan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan uang sebagai simbol kedaulatan suatu negara telah dilakukan di Indonesia sejak masa kolonial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai otoritas politik tertinggi memandang bahwa uang memiliki peranan penting untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan kolonial, terutama hegemoni ekonomi di Indonesia. Salah satu wilayah yang dianggap penting dalam upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda menegakkan kedaulatan ekonomi adalah wilayah Sumatera Timur.

Sumatera Timur merupakan salah satu daerah pusat perdagangan penting di Sumatera yang menjadi basis kegiatan ekspor impor. Perkembangan ekonomi Sumatera Timur disebabkan oleh maraknya pembukaan perkebunan di wilayah ini. Perkebunan-perkebunan ini

pada perjalanannya mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi Sumatera Timur. Akibat dari berkembangnya wilayah Sumatera Timur menjadi daerah tujuan perdagangan, pada daerah ini, beredar beragam mata uang asing yang menjadi alat pembayaran sehari-hari. Sementara penggunaan gulden sebagai mata uang yang sah dari pemerintah kolonial Hindia Belanda kurang digemari oleh masyarakat Sumatera Timur.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memandang bahwa perlu untuk melakukan upaya penegakkan kedaulatan di bidang ekonomi dengan cara mewajibkan penggunaan gulden pada setiap transaksi perdagangan di Sumatera Timur. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah “politik guldenisasi”. Tujuannya adalah untuk menjadikan gulden sebagai satu-satunya alat transaksi yang sah.

Pada masa kemerdekaan, penegakkan kedaulatan ekonomi juga dirasakan sebagai sebuah keharusan bagi pemerintah RI. Segera setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada 1946 pemerintah berupaya membentuk sebuah bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang ke seluruh Indonesia. Namun pada saat itu, kondisi peperangan membuat Indonesia belum segera memiliki uang sendiri.

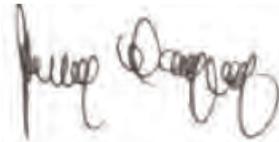
Setahun kemudian, pemerintah RI menerbitkan uang sendiri dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Penerbitan ORI dilakukan guna menghadapi gempuran terhadap sistem moneter dan blokade ekonomi yang dilancarkan oleh Belanda. Pemerintah RI juga menjadikan uang sebagai alat perlawanan dan perjuangan terhadap ekspansi Belanda. Ditambah lagi dengan fungsi uang sebagai atribut atau legitimasi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, menyebabkan kepemilikan mata uang sendiri sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat itu yang tidak hanya sebagai alat tukar semata.

Pada periode kontemporer, upaya menjadikan uang sebagai simbol perjuangan tetap berlangsung. Melalui ketetapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011

tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/ PBI/ 2015 yang menegaskan kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia akan selalu berjuang agar uang Rupiah yang merupakan simbol kedaulatan bangsa Indonesia, tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang digunakan di wilayah Indonesia dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan menjadikan uang sebagai alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi suatu pembahasan menarik yang akan dijelaskan secara lebih terperinci di dalam buku ini. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan khazanah ilmu pengetahuan. Penyusunan buku *Berjuang dengan Uang* merupakan suatu bentuk kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan keilmuan, guna pembelajaran untuk generasi mendatang. Melalui karya ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kearifan yang berguna untuk masyarakat Indonesia serta membawa Bank Indonesia sebagai bank sentral kebanggaan rakyat Indonesia.

Jakarta, Desember 2016  
Deputi Gubernur Bank Indonesia



**Perry Warjiyo**

# PENGANTAR KEPALA DEPARTEMEN RISET KEBANKSENTRALAN



Buku dengan judul "*Berjuang Dengan Uang: Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*" merupakan suatu hasil karya yang berupaya untuk memaparkan bagaimana uang difungsikan tidak hanya sebagaimana fungsi tradisionalnya sebagai alat pendukung kegiatan ekonomi, tetapi fungsinya sebagai alat perjuangan menegakkan kedaulatan negara. Buku ini secara mendalam menjelaskan bahwa uang memiliki peranan penting di dalam perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia sejak masa kolonialisme hingga periode modern. Uang menjadi suatu instrumen penting di dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan saat ini tetap relevan untuk diperjuangkan agar optimal dalam mendukung perekonomian serta menegaskan kedaulatan negara. Bagaimana uang berfungsi sebagai alat revolusi selain perjuangan dengan menggunakan senjata akan lebih jauh dibahas secara komprehensif di dalam buku ini.

Dari hasil penelusuran secara historis, ternyata uang tidak hanya difungsikan sebagai instrumen ekonomi, namun juga difungsikan sebagai simbol eksistensi suatu negara yang berdaulat. Sumatera Timur di abad ke-19 belum memiliki suatu lembaga perbankan yang terpusat, sehingga seluruh peredaran uang diatur berdasarkan persaingan pasar. Mata uang yang beredar saat itu didominasi oleh

mata uang partner dagang utama, seperti mata uang Real Spanyol dan dolar Straits Settlements. Tidak hanya sebatas itu, pada masa itu juga beredar “uang kebon” yang peredarannya terbatas dan hanya berlaku di lingkungan perkebunan tertentu. Tujuan dari dikeluarkannya uang kebon adalah untuk mengikat para buruh dan pekerjanya supaya mereka tidak keluar dan melarikan diri ke tempat lain.

Seiring dengan semakin berkembangnya sektor perkebunan di Kota Medan, sejumlah bank komersial, termasuk bank-bank asing di dalamnya juga tumbuh pesat dengan mata uang dolar Straits Settlements sebagai instrumen utamanya. Sementara itu, mata uang gulden yang merupakan mata uang pemerintah Belanda justru kurang berkembang di Sumatera Timur, sehingga Otoritas Hindia Belanda yang berpusat di Batavia memutuskan untuk membuka kantor cabang DJB di wilayah Sumatera Timur sebagai satu-satunya bank sirkulasi di Kota Medan. Upaya ini tidak sepenuhnya berhasil menjadikan gulden di Sumatera Timur sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah ini, namun setidaknya mampu untuk menunjukkan eksistensi DJB di Sumatera Timur sebagai penegasan kedaulatan pemerintah Hindia Belanda.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, salah satu tantangan besar yang melanda bangsa Indonesia adalah terjadinya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda ke wilayah Indonesia khususnya Pulau Sumatera. Akibatnya salah satu fungsi bank sirkulasi yakni sebagai otoritas peredaran ORI di masa ini tidak berjalan dengan maksimal. Sebagai solusi, pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mencetak uangnya sendiri. Hal ini dilakukan karena ORI yang diedarkan oleh pemerintah RI tidak pernah sampai ke Sumatera. Uang-uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disebut sebagai Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Di Sumatera, ORIDA yang beredar di antaranya adalah URIPS, URIP-SU, URITA, dan lain sebagainya. ORIDA yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu strategi dalam pemenuhan

kebutuhan ekonomi pada tingkat lokal.

Peran penting uang sebagai bagian dari alat perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya terbatas pada masa revolusi kemerdekaan saja. Saat ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia terus berupaya menggunakan uang sebagai instrumen perjuangan penegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penelitian dan penulisan buku ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan buku ini juga dapat menumbuhkan semangat dan memperkuat nilai-nilai perjuangan sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pejuang pendahulu untuk kita jadikan panutan dalam mewujudkan cita-cita perjuangan ke depan.

Jakarta, Desember 2016

**Kepala Departemen Riset Kebanksentralan**



**Darsono**

# PENGANTAR KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA



Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap tim penulis buku Departemen Riset Kebanksentralan atas usaha rekan-rekan dalam memperjuangkan penulisan buku ini berjudul "*Berjuang Dengan Uang: Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia, Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*". Apresiasi juga turut saya haturkan terhadap seluruh tim peneliti yang sudah melakukan riset panjang dalam menghasilkan karya buku ini. Ulasan mengenai peran otoritas dalam mengawal perekonomian negara dewasa ini sangat dibutuhkan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan peredaran uang dan moneter di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Timur, atau lebih dikenal dengan Sumatera Utara saat ini, merupakan sebuah wilayah penting bagi perkembangan ekonomi di Hindia Belanda. Sumatera Timur merupakan wilayah dengan tingkat ekonomi paling tinggi di pulau Sumatera. Bahkan dapat dikatakan kondisi tersebut tetap bertahan hingga masa sekarang. Perkembangan ekonomi Sumatera Timur tidak lepas dari maraknya pembukaan perkebunan yang membawa keuntungan luar biasa bagi Sumatera Timur. Peningkatan ekonomi akibat perkebunan membawa dampak pada peningkatan peredaran uang-uang asing di Sumatera Timur. Sementara gulden sebagai mata uang pemerin-

tah Hindia Belanda tidak digemari oleh masyarakat Sumatera Timur karena nilainya yang lebih rendah dibandingkan dengan Real Spanyol dan dolar Straits Settlements.

Atas kondisi tersebut pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membuka kantor DJB untuk wilayah Sumatera Timur. Sejak pertama kali didirikan dengan nama De Javasche Bank Agentschap Ooskust van Sumatra, DJB telah melaksanakan peran pentingnya sebagai bank sirkulasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan gulden oleh masyarakat Sumatera Timur. Peran penting lainnya yang dipegang oleh DJB adalah sebagai pengatur pengendalian peredaran uang, terutama uang asing. Di Sumatera Timur, DJB adalah instrumen penting yang digunakan pemerintah kolonial dalam menjalankan politik guldenisasi di wilayah ini. Politik guldenisasi dimaksudkan sebagai strategi penting pemerintah Hindia Belanda dalam menyaingi hegemoni mata uang asing yang di periode itu masih dikuasai oleh real Spanyol, dolar Straits Settlements dari Inggris di Semenanjung Malaya.

Memasuki periode kemerdekaan, Sumatera Utara tetap menjadi wilayah penting bagi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah kekalahan Jepang, Belanda berupaya untuk menguasai kembali Indonesia. Berbagai cara yang dilakukan adalah melalui gempuran agresi militer dan blokade ekonomi. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah RI terus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah RI mencetak uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai simbol dari kedaulatan di bidang ekonomi. Akan tetapi akibat dari blokade ekonomi Belanda, ORI kesulitan untuk memasuki Sumatera. Kondisi tersebut membuat pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan uangnya sendiri-sendiri dengan nama Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Di Sumatera, terdapat lebih dari 130 jenis ORIDA yang beredar di wilayah ini. Penerbitan ORIDA merupakan suatu strategi untuk pemenuhan kebutuhan di daerah akibat dari ketidaksediaan ORI di daerah.

Selain itu, uang ini digunakan pula untuk pembiayaan perang.

Pada era modern, Sumatera Utara tetap menjadi wilayah yang memiliki peran tersendiri bagi peningkatan ekonomi Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sumatera Utara yang merupakan kepanjangan dari Bank Indonesia pusat, bersama-sama dengan pemerintah terus berupaya dalam usaha menjaga stabilitas ekonomi di wilayah ini. Bank Indonesia mengambil langkah inovatif untuk mencapai stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Dewasa ini, peran dari KPwBI Sumatera Utara dituntut untuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi Sumatera Utara. Hasil akhir yang diharapkan agar masyarakat dapat merasa terbantu oleh kehadiran KPwBI Sumatera Utara, sebagai kepanjangan tangan dari bank sentral Indonesia di wilayah ini. Bagi KPwBI Sumatera Utara, urgensi akan tugas mulia untuk melayani masyarakat ini menjadi penting mengingat Medan adalah salah satu dari lima kota besar di Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Perputaran uang untuk mendukung kelancaran transaksi barang dan jasa cukup tinggi, sehingga Bank Indonesia dituntut untuk memberikan dukungan agar lembaga keuangan khususnya perbankan dapat memberikan pelayanan yang prima. Peran lembaga keuangan di daerah sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah dan menjadi transmiter kebijakan moneter Bank Indonesia. Harapannya agar seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan, seperti para pelaku jual beli, investor dan masyarakat pada umumnya dapat merasa terlindungi, aman dan merasakan manfaat dalam mempergunakan jasa layanan keuangan perbankan secara maksimal.

Jakarta, Desember 2016  
**Kepala KPwBI Sumatera Utara**

**Difi Ahmad Johansyah**



## **PENGANTAR KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PEMATANG SIANTAR**

Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku "*Berjuang Dengan Uang: Mempertahankan dan Memajukan Republik Inidonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*". Buku ini secara komprehensif mengulas perjuangan para pahlawan di bidang ekonomi dan keuangan yang tidak kalah heroiknya dengan perjuangan fisik bersenjata.

Pada waktu kota Medan berhasil dikuasai oleh tentara NICA, para pejuang memindahkan basis perlawanannya ke Pematang Siantar. Pindahan basis perjuangan ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menunjukkan eksistensi Republik Indonesia yang baru lahir. Dalam kondisi perang dan blokade yang dilakukan oleh NICA yang meningkatkan risiko tertangkap oleh tentara Belanda tidak sedikitpun menyurutkan nyali untuk memindahkan mesin-mesin yang digunakan untuk mencetak uang. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha tetap memperoleh pasokan uang guna menggerakkan roda perekonomian yang akhirnya bermanfaat untuk ikut mendukung pembiayaan kebutuhan logistik dan peralatan perang.

Pematang Siantar yang tercatat sebagai basis perlawanan berhasil terus mengobarkan semangat para pejuang termasuk perjuangan untuk terus menggerakkan roda perekonomian. Strategi ini antara lain dilakukan melalui kolaborasi tentara dan pengusaha serta masyarakat dalam menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh

Belanda agar dapat melakukan transaksi perdagangan terutama ekspor ke Singapura.

Ekskalasi agresi Belanda di beberapa wilayah tanah air ternyata semakin menumbuhkan semangat perlawanan di semua daerah yang merespon dengan berbagai cara yang intinya mempertahankan agar roda perekonomian tetap berjalan di tengah blokade dan sabotase yang dilakukan oleh Belanda, meningkatkan upaya diplomasi dan mengobarkan perlawanan bersenjata. Dengan diterbitkannya buku ini, mudah-mudahan otoritas dan masyarakat secara luas tidak hanya mengambil nilai-nilai dan semangat perjuangan yang diwariskan para pahlawan, tetapi juga dapat mengapresiasi semangat pengorbanan para pejuang di bidang ekonomi dan keuangan yang selama ini dirasakan belum memperoleh tempat yang sejajar dengan para pahlawan yang mengangkat senjata.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus meridai perjuangan bangsa Indonesia.

Pematang Siantar, Desember 2016  
Kepala KPwDN Pematang Siantar

**Elly Tjan**

# DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	v
Sambutan Deputy Gubernur Bank Indonesia	ix
Pengantar Kepala Departemen Riset Kebanksentralan	xiii
Pengantar Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara	xvii
Ringkasan Eksekutif	xxvii
1. PENDAHULUAN	1
2. DINAMIKA SUMBER DAN PERANAN UANG PRA DE JAVASCHE BANK DI SUMATERA TIMUR (1865-1907)	21
Sumatera Timur Awal Abad ke-19	28
Ekspansi Pengusaha Swasta Barat dan Berkembangnya Perkebunan Besar	35
Munculnya Institusi Bank Swasta	74
Sistem dan Peredaran Uang di Sumatera Timur	83
3. DINAMIKA SUMBER DAN PERANAN UANG PADA ERA DE JAVASCHE BANK DI SUMATERA TIMUR (1907-1942)	121

Pembentukan Infrastruktur Bank (De Javasche Bank Agentschappen Oostkust van Sumatera) Sebagai Pendukung Politik Guldenisasi	122
Krisis Ekonomi Dunia dan Masuknya Kembali Mata Uang Asing ke Sumatera Timur	156
<b>4. DINAMIKA SUMBER DAN PERANAN UANG PADA ERA NANPO KAIHATSU GINKO DI SUMATERA TIMUR (1942-1945)</b>	<b>171</b>
Motif Ekonomi Dibalik Invasi Militer Jepang	172
Perubahan Ekonomi Akibat Perang	174
Penutupan De Javasche Bank	181
Pendirian Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG)	185
Dampak dan Peran NKG di Sumatera Utara	190
<b>5. BERJUANG DENGAN UANG MEMPERTAHANKAN REPUBLIK</b>	<b>205</b>
Kemerdekaan Indonesia dan Dekonstruksi Perekonomian Kolonial	207
Arti Penting Bank Sentral Bagi Sebuah Bangsa yang Berdaulat	220
Masa Penuh Tantangan dalam Memenuhi Kebutuhan Uang	224
Strategi Pengelolaan Uang pada Masa Revolusi	235
<b>6. MENJALANKAN MANDAT DENGAN PENUH AMANAH: PERJUANGAN ANAK BANGSA DI SUMATERA</b>	<b>237</b>
Kondisi Ekonomi Sumatera Timur dan Blokade Ekonomi Belanda	238
ORI dan Kendala Distribusi Uang Akibat Perang	240
Strategi untuk Menembus Blokade Ekonomi Belanda	244

ORIDA sebagai Strategi untuk Memenuhi Kebutuhan Alat Pendukung Transaksi Ekonomi Domestik	247
7. PENATAAN EKONOMI PASCA PERANG DI SUMATERA UTARA	305
Penaikan ORIDA (1949-1950)	306
RIS dan Otoritas Pengelolaan Uang Pada Masa Peralihan 1950-1953	308
Pengelolaan Uang Pada Masa Bank Indonesia Periode Awal 1953-1960	311
Pengelolaan Uang Pada Masa Bank Tunggal 1960-1968	318
Penguatan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia	328
8. SUMATERA UTARA DI ERA MODERN	333
Karakteristik Ekonomi Sumatera Utara sebagai Ekonomi yang Terbuka dan Penghasil Utama Komoditas Unggulan	334
Peran KPwDN Sumatera Utara dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Sumatera Utara	347
Peluang dan Tantangan	357
9. HERITAGE KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA	367
Keragaman Heritage Bangunan Eropa di Kota Medan	367
Gedung dan arsitektur BI Medan	391
Upaya Menjadikan Gedung KPwBI Sumatera Utara Menjadi Sebuah Heritage	402
10. EPILOG	419
DAFTAR PUSTAKA	425





## EXECUTIVE SUMMARY

Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, uang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat vital. Eksistensi uang tidak hanya sebatas alat pembayaran yang sah di negara tersebut namun juga merupakan simbol kedaulatan suatu negara. Di suatu wilayah yang belum terdapat otoritas yang mencetak dan mensirkulasikan uang seperti di wilayah Sumatera Timur yang merupakan bagian dari koloni Belanda, mata uang yang beredar didominasi oleh mata uang partner dagang utama. Di samping itu, secara mikro perusahaan beredar uang dan bon yang hanya berlaku di lingkungan perusahaan masing-masing. Di samping sebagai alat pembayaran di lingkungan perusahaan, uang ini juga difungsikan sebagai strategi untuk mengikat para pekerja agar tidak meninggalkan perusahaan.

Seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Sumatera Timur tersebut, jumlah bank komersial, variasi dan jumlah mata uang meningkat namun tetap didominasi oleh mata uang dolar Spanyol dan straitsettlement Inggris. Sementara itu, mata uang gulden yang merupakan mata uang pemerintah Hindia Belanda justru kurang diminati. Otoritas Hindia Belanda yang berpusat di Batavia memandang perlu untuk menegaskan otoritasnya di wilayah Sumatera Timur dengan membuka kantor cabang DJB di wilayah tersebut sebagai bank sirkulasi. Strategi guldenisasi di wilayah Sumatera Timur menghadapi tantangan dominasi mata uang dolar Spanyol dan

straitsettlement Inggris sehingga tidak sepenuhnya berhasil. Namun demikian, strategi ini cukup efektif sebagai bentuk klaim kedaulatan secara politis.

Pada era perekonomian Sumatera Timur yang semakin terbuka dan potensi ekonomi yang dimiliki terutama di bidang perkebunan dan pertambangan, wilayah ini menjadi magnet yang kuat untuk menarik para investor asing dari berbagai negara untuk menanamkan modalnya. Bayangan keuntungan yang jelas di depan mata akibat tingginya harga komoditas pasar global dan besarnya potensi produksi yang dihasilkan mendorong investor untuk terus menambah modal. Apalagi infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, transportasi kereta api, sampai dengan lembaga keuangan juga berkembang pesat.

Sesuai dengan karakteristik produksi di sektor pertanian komoditas ekspor yang tidak fleksibel untuk merespon perkembangan pasar, koreksi terhadap ketidakseimbangan antara produksi dan daya serap pasar tercermin pada perubahan harga. Pada titik tingkat harga yang sudah dianggap terlalu rendah dan tidak menguntungkan bagi investor, mereka mengalihkan pada komoditas-komoditas lain yang harganya masih menjanjikan keuntungan. Masa keemasan investor di Sumatera Timur ikut surut ketika terjadinya resesi global yang dahsyat pada awal 1930an.

Upaya pemulihan ekonomi pasca resesi global tidak berjalan mudah. Masuknya otoritas militer Jepang yang menggantikan pemerintah Hindia Belanda banyak mengalihkan perhatiannya ke sektor-sektor yang mendukung logistik perang seperti bahan pangan dan lain-lain. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan dan monev ala militer Jepang? Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membubarkan De Javasche Bank (DJB) dan pada saat yang bersamaan menggantinya dengan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Militer Jepang membanjiri dengan uang gulden yang dirampas dari DJB dan uang invasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak hanya itu, militer Jepang melalui NKG juga mencetak dan menge-

darkan uang-uangnya. Uang NKG tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana propaganda untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan cara mencetak dengan gambar-gambar yang menampilkan tokoh-tokoh lokal yang dikenal seperti tokoh pewayangan dan lain-lain. Sedemikian banyaknya jumlah dan ragam uang yang beredar sementara sisi produksi banyak terganggu karena dalam kondisi perang, harga-harga cepat melonjak tajam.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah yang baru dibentuk sudah sepenuhnya menyadari disamping perlunya mencapai kedaulatan secara politik juga penting untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Hal ini ditegaskan di dalam konstitusi penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlunya institusi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi. Semua menyadari bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, para pejuang yang melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata perlu didukung oleh dana yang cukup untuk logistik dan pengadaan senjata. Apalagi tentara kolonial Belanda (NICA) yang berupaya menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia menggunakan segala cara termasuk melemahkan perekonomian Indonesia. Hal ini ditempuh melalui cara memblokade wilayah Indonesia agar tidak terkoneksi dengan pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, NICA juga membanjiri dengan uang Gulden maupun ORI yang dipalsukan.

Pada awal berdirinya Republik Indonesia, pemerintah menunjuk Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi. Ditengah blokade ekonomi dan kondisi perang yang terus berkecamuk, BNI menghadapi kendala operasional sehingga ORI tidak dapat disirkulasikan dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama diluar Jawa. Semakin hebatnya gempuran tentara Belanda (NICA) memaksa pemerintah RI memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Dalam waktu yang bersamaan, anak-anak bangsa juga harus berjuang agar ORI tetap dapat dicetak dan diedarkan. Dengan semangat dan keberanian yang tinggi mereka berjuang untuk memindahkan dan

mengamankan mesin-mesin percetakan uang agar tidak direbut oleh Belanda sekaligus tetap bisa mencetak dan mengedarkan ORI. Perjuangan anak-anak bangsa untuk ikut mempertahankan kemerdekaan tersebut tidak kalah heroiknya dengan anak-anak bangsa yang mempertaruhkan jiwa raganya dalam berjuang di medan perang.

Uang sebagai sarana perjuangan sangat strategis untuk mendorong roda perekonomian terus bergerak dan menjadi sumber pembiayaan kebutuhan logistik dan peralatan tempur para pejuang militer. ORI juga merupakan alat untuk mempertahankan nafas perekonomian bangsa dari guyuran Belanda yang berusaha keras menghancurkan fondasi ekonomi antara lain dengan memalsukan ORI dan membanjiri dengan uang Gulden (uang merah). Dijadikannya uang sebagai alat untuk membiayai perjuangan negara (rakyat) melawan Belanda di masa revolusi kemerdekaan juga telah terjadi saat perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat (1775 – 1783). Pada masa itu untuk perjuangan kemerdekaan diterbitkan uang-uang koloni yang disahkan oleh Kongres Amerika. Dengan uang-uang koloni itulah segala biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan perang melawan Kerajaan Inggris. Jelas sudah bahwa uang berfungsi sebagai alat perjuangan revolusi "*an instrument of revolution*". Karena itulah ORI juga dapat dikatakan sebagai senjata kemerdekaan "*an instrument of revolution*" yang kontribusinya sangat besar dalam mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan sangat buruk baik secara makro maupun secara mikro sebagai peninggalan penjajah. Tantangan di bidang ekonomi sangat berat baik dari segi produksi, distribusi, maupun perdagangan. Perekonomian sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, kopi, tembakau, teh dan gula. Merosotnya produksi pertanian dalam berbagai komoditi yang berakibat pada menurunnya ekspor dan cadangan devisa. Selain itu, terjadi inflasi yang tinggi akibat besarnya uang beredar yang terdiri dari tiga mata uang yang digunakan di Indonesia. Tiga mata uang tersebut adalah mata uang NICA yang

biasa disebut dengan uang merah, mata uang Jepang dan uang kertas *De Javasche Bank (DJB)* yang disebut dengan uang federal dan ORI atau uang putih. Inflasi itu terjadi juga karena adanya blokade ekonomi yang melarang adanya aktivitas ekspor dan impor. Belanda melarang hasil bumi atau komoditas barang dagangan Indonesia diekspor, dan melarang negara lain untuk melakukan ekspor ke Indonesia. Hal ini menyebabkan penumpukan barang dagangan di dalam negeri dan adanya kelangkaan barang kebutuhan yang seharusnya di dapat dengan impor. Kondisi itulah yang menyebabkan adanya inflasi, karena ada ketidakseimbangan antara uang yang beredar dengan barang kebutuhan yang tersedia (Parera, 2005: 5-6).

ORI merupakan mata uang pertama bagi Republik Indonesia sekaligus menjadi sarana untuk perjuangan. Uang yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda pada masa ini mempunyai fungsi yang lain. Pada masa revolusi, uang juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggugah rasa nasionalisme serta menunjukkan adanya Indonesia yang berdaulat di mata dunia. Sehingga selain uang mempunyai nilai ekonomis, uang juga berfungsi sebagai sarana politik dan perjuangan.

Otoritas baik pemerintah maupun bank sentral berjuang agar ORI dapat diedarkan untuk menjaga agar roda perekonomian terus berjalan sekaligus memerangi banyaknya mata uang yang diedarkan oleh pihak Belanda. Gayung bersambut dalam pengertian masyarakat sangat antusias dan bangga serta rela berkorban untuk menerima ORI atau yang dikenal dengan uang putih meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan karena memperoleh pembayaran yang lebih kecil. Semangat juang yang pantang menyerah dari semua pihak tersebut berkontribusi dalam memperpanjang nafas kehidupan Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan melalui proklamasi 17 Agustus 1945.

Ditingkat daerah, perjuangan anak-anak bangsa juga menunjukkan heroisme yang sama. Pada waktu ekonomi di Sumatera Utara

diblokade oleh Belanda dan ORI tidak bisa menembus daerah tersebut, anak-anak bangsa di wilayah ini menunjukkan kreativitas dan daya juang yang tinggi untuk mengatasi hal tersebut. Para pengusaha dan petani bergandeng tangan bahu-membahu dengan para pejuang militer guna menerobos blokade perdagangan ke negara lain. Hasil dari kegigihan dan keberanian tersebut sebagian disumbangkan untuk menjadi sumber pembiayaan dalam rangka impor kebutuhan logistik dan persenjataan militer. Sementara itu, keputusan pemerintah untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk mencetak dan mengedarkan uang lokal juga direspon oleh pemerintah daerah dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

Uang sebagai instrumen perjuangan tetap relevan untuk masa kini dan yang akan datang. Uang yang merupakan darah dari suatu sistem perekonomian perlu terus dijaga agar berfungsi secara sehat dan optimal. Disamping itu, uang yang merupakan simbol kedaulatan suatu bangsa harus senantiasa ditegakkan melalui kebanggaan dan kecintaan semua anak bangsa terhadap mata uangnya sendiri.

# 1 Pendahuluan

Dalam sebuah negara, uang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat vital. Dari sisi ekonomi, uang merupakan instrumen penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara sebagai penggerak roda perekonomian, mulai dari peranannya sebagai alat transaksi sampai dengan alat penyimpan kekayaan. Sementara itu, secara politis uang berperan sebagai instrumen perjuangan, penegas otoritas, dan salah satu simbol kedaulatan suatu bangsa.

Di Indonesia, pentingnya uang sebagai instrumen perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus menegaskan kedaulatan tercatat dalam jejak heroisme anak-anak bangsa berjuang mengatasi blokade ekonomi yang dilakukan oleh tentara Belanda (NICA). Perjuangan ini mulai dari upaya menjaga agar uang yang menjadi darah bagi kehidupan perekonomian dapat terus dicetak dan diedarkan sampai dengan mendukung pembiayaan untuk kebutuhan logistik dan peralatan tempur bagi anak-anak bangsa di medan perang.

Uang sebagai instrumen perjuangan dalam kondisi perang juga telah terjadi sebelumnya yaitu saat perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat (1775-1783). Pada masa itu untuk perjuangan kemerdekaan diterbitkan uang-uang koloni yang disahkan oleh Kongres Amerika. Dengan uang-uang koloni itulah segala biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan perang melawan Kerajaan Inggris. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa uang berfungsi sebagai "an instrument of revolution".

Penggunaan uang sebagai simbol kedaulatan suatu negara telah dilakukan di Indonesia sejak masa kolonial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai otoritas politik tertinggi memandang bahwa uang memiliki peranan penting untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan kolonial, terutama hegemoni ekonomi di Indonesia. Salah satu wilayah yang dianggap penting dalam upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda menegakkan kedaulatan ekonomi adalah wilayah Sumatera Timur.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pembagian wilayah administrasi tidak seperti pembagian wilayah kontemporer saat ini. Saat itu, wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi dua keresidenan: Sumatera Timur (*Oostkust van Sumatra*) dan Tapanuli. Sumatera Timur membentang mulai dari titik batas di puncak bukit barisan yang saat itu bernama Wilhelmina Gebergte dan bukit barisan Simanuk-manuk. Berangsur-angsur menurun dari Simanuk-manuk menyentuh pantai timur Danau Toba, terus ke dataran rendah dan rawa-rawa sepanjang pantai Selat Malaka. Luas Sumatera Timur 94.583 kilometer persegi terletak di antara dua barisan bukit yang merupakan bagian dari sistem Bukit Barisan yang membentang dari Banda Aceh di utara sampai Tanjung Cina (Selat Sunda) di selatan.<sup>1</sup>

Wilayah Sumatera Timur yang menjadi pembahasan di dalam buku ini, pada masa kontemporer disebut sebagai Sumatera Utara. Penyebutan Sumatera Utara digunakan pertama kali ketika masa Pendudukan Jepang yang kemudian diteruskan menjadi Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Penyebutan Sumatera Utara pasca kemerdekaan pertama kali disebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948 tertanggal 15 April 1948 yang berisikan tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Propinsi yang terdiri dari: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan Sumatera Utara terdiri

1. Arsip Nasional Republik Indonesia, "Beschrijving van het eiland Sumatra 1824", *Arsip Sumatra Westkust/SWK*, No. 144/11.

beberapa Keresidenan: Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Sumatera Timur merupakan suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat pembukaan perkebunan di wilayah itu. Maraknya pembukaan perkebunan, terutama perkebunan asing membuat Keresidenan Sumatera Timur terkenal hingga ke penjuru Eropa sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan yang laris di pasaran dunia. Namun dari kondisi tersebut, pemerintah belum menaruh perhatian yang besar pada wilayah ini. Pemerintah Hindia Belanda masih fokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Sementara baru pada menjelang akhir abad ke-19 Belanda mulai menaruh perhatian ke wilayah Sumatera, terutama Sumatera Timur akibat dari pertumbuhan sektor perkebunan yang masif.

Di suatu wilayah yang belum terdapat otoritas pencetak dan pengedar uang seperti di wilayah Sumatera Timur, yang merupakan bagian wilayah kolonial Hindia Belanda, mata uang yang beredar didominasi oleh mata uang asing yang menjadi alat pembayaran ekspor impor pada wilayah ini. Di samping itu, secara mikro di wilayah-wilayah perkebunan beredar uang kebon yang hanya berlaku di lingkungan perusahaan masing-masing. Perkebunan-perkebunan berupaya untuk membangun sistem ekonominya sendiri di tiap-tiap wilayah yang mereka kuasai. Sistem ekonomi perkebunan tersebut bersifat independen dan tidak dicampuri oleh pihak luar.

Untuk memudahkan dalam menjalankan sistem perekonomiannya, tiap-tiap perkebunan memiliki mata uangnya sendiri, yang disebut "uang kebon" atau uang token.<sup>2</sup> Uang token hanya berlaku di perkebunan tersebut, khususnya untuk menggaji para buruh. Melalui penggunaan mata uang itu, pengusaha dapat mengikat para buruhnya dari kemungkinan melarikan diri, karena uang yang dipengangnya tidak berlaku di tempat lain. Dengan kata lain mata uang itu dipergunakan oleh pengusaha sebagai alat kontrol agar para

2. Churmatin Nasoichah, "Uang Kebon: Mata Uang Lokal Perkebunan di Tanah Deli", *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, Vol. 13, No.25, 2010, hlm. 14.

buruh tidak melarikan diri setelah menerima upahnya, atau setelah tabungannya cukup untuk melarikan diri. Dengan sistem yang sangat mikro tersebut, pihak perkebunan menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan pekerja, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai dengan tempat hiburan yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan token kebun tersebut.

Bervariasinya mata uang token yang beredar di daerah tersebut. Mengakibatkan beragamnya pula bahan yang dipakai untuk membuat mata uang token tersebut. Bahan-bahan yang dipergunakan oleh perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur untuk dijadikan uang token kebanyakan menggunakan nikel, kuningan, timah, tembaga dan perak. Bentuk dan nilai dari uang token pun bervariasi, tidak hanya bulat seperti uang yang biasa kita pegang sekarang ini. Ada yang berbentuk segitiga, persegi empat, bujur sangkar, persegi lima dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam cakupan yang lebih besar, seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Sumatera Timur, jumlah bank komersial dan peredaran jumlah mata uang meningkat. Uang yang beredar pada abad ke-19 didominasi oleh mata uang Real Spanyol dan Dolar Strait Settlement Inggris. Sementara itu, mata uang gulden yang merupakan mata uang pemerintah Hindia Belanda justru kurang diminati. Otoritas Hindia Belanda yang berpusat di Batavia memandang perlu untuk menegaskan pengaruh politiknya di wilayah Sumatera Timur dengan membuka kantor cabang DJB di wilayah Sumatera Timur. Upaya Belanda untuk menegaskan gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran di wilayah Hindia Belanda, termasuk Sumatera Timur khususnya, disebut sebagai politik guldenisasi. Strategi guldenisasi di wilayah Sumatera Timur menghadapi tantangan dominasi mata uang Real Spanyol dan Straits Settlement Inggris sehingga tidak sepenuhnya berhasil. Namun demikian, strategi ini cukup efektif se-

3. Lihat Lansen, A.J. & L.T. Wells Jr. 2001. *Plantage-, Handels-, en Mijngeld van Nederlands-Indie*, Vriezenveen: Mevius Numisbooks Int. B.V.

bagai bentuk klaim kedaulatan secara politis.

Realitas mengenai lemahnya nilai tukar dan popularitas uang dolar dibandingkan gulden di Sumatera Timur menimbulkan ketakutan dari De Javasche Bank yang ditunjuk oleh Kerajaan Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Uang sebagai simbol kekuasaan dalam sebuah bangsa atau negara menjadi dasar utama dari sikap De Javasche Bank untuk melakukan politik guldenisasi. Apalagi dengan ketiadaan kantor cabang De Javasche Bank di wilayah ini semakin memudahkan berbagai jenis mata uang dolar dan semakin mempersempit ruang bagi kehadiran gulden dalam aktivitas ekonomi masyarakat baik di luar maupun di dalam lingkungan perkebunan.

Kesukaran yang dihadapi oleh gulden dalam menghadapi serbuan uang-uang dolar dari kawasan Semenanjung Malaya dan Strait Settlement, disertai dengan uang yang masuk dari transaksi perdagangan internasional dan juga uang kebon yang beredar terbatas diperkebunan mendorong De Javasche Bank untuk meningkatkan kedaulatan mata uang gulden di Sumatera Timur. "Politik Guldenisasi" akhirnya menjadi jalan satu-satunya yang diambil oleh De Javasche Bank yang didukung penuh oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia dalam mengontrol distribusi mata uang di Pantai Timur Sumatera dan menempatkan gulden sebagai satu-satunya alat transaksi legal di kawasan ini. Guldenisasi dari sisi ekonomi dan moneter tidak cukup efektif, terbukti dari tetap dominannya mata uang selain gulden terutama Dollar Strait Settlement dan Real Spanyol. Namun demikian, guldenisasi cukup berhasil menegaskan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah ini secara politis.

Tujuan dari politik guldenisasi adalah untuk untuk mengontrol peredaran-peredaran uang yang tersebar di wilayah Sumatera Timur, terutama akibat dari beragamanya mata uang asing yang beredar, serta untuk memperluas penggunaan gulden dalam setiap transaksi di Sumatera Timur. Dalam upaya menegaskan kedaulatan ekonominya itu, pemerintah kemudian memutuskan untuk membuka kantor

cabang De Javasche Bank di Sumatera Timur. Pembukaan kantor cabang yang pertama adalah DJB Agentschap Bengkalis pada 27 Juni 1907. Kedua yaitu DJB Agentschap Medan pada 30 Juli 1907. Ketiga, DJB Agentschap Tanjung Balai pada 15 Januari 1908. Dan keempat yaitu DJB Agentschap Tanjung Pura pada 3 Februari 1908, sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, dibuka juga kantor cabang kelima yakni DJB Agentschap Pematang Siantar pada 1 Oktober 1923.<sup>4</sup>

Pendirian kantor-kantor DJB di Sumatera Timur dilakukan berdasarkan laporan dari presiden DJB saat itu yang mengamati adanya penetrasi mata uang asing seperti Yen Jepang, Real Meksiko, Real Spanyol, Dolar Strait Settlement, Poundsterling Inggris, Dolar Hongkong, dan mata uang Serawak begitu kuat. Terlebih lagi terdapat beberapa mata uang asing yang nilainya lebih tinggi daripada Gulden Hindia Belanda. Sebagai contoh \$1 Strait Settlements bernilai f1,40; uang perak dan tembaga pasmunt Strait Settlements bernilai f1,38; 1 Real Meksiko dan uang Dolar lainnya bernilai f1,30; dan berbagai jenis uang berbahan dasar perak lainnya bernilai f1,20.<sup>5</sup>

Oleh karena nilai dari uang gulden Belanda dinilai jauh lebih kecil dari pada uang-uang asing lainnya, maka pendirian kantor-kantor De Javasche Bank di Sumatera Timur bertujuan untuk memfasilitasi Belanda dalam menguatkan peran dan posisinya dalam perekonomian di tanah jajahan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong pengusaha-pengusaha perkebunan untuk menggunakan mata uang gulden sehingga pemasukan Hindia Belanda semakin meningkat. Selain itu penggunaan mata uang gulden adalah untuk mengimbangi penetrasi mata uang dari Straits Settlement milik Inggris di Semenanjung Malaya.

4. Door L. De Bree, *Gedenboek van De Javasche Bank Deel II*, (Weltevreden: G. Kolff, 1928), hlm. 439.
5. Arsip Bank Indonesia. *Notulen Vertrouwelijk Directie Vergaderingen*. 11 Februari 1907 dan 18 Februari 1907.

Terjadinya resesi dunia pada 1930an turut memengaruhi nasib De Javasche Bank di Sumatera Timur. Resesi dunia tersebut membuat DJB Tanjung Pura, Tanjung Balai, dan DJB Bengkalis harus ditutup pada tahun 1930. Dua tahun kemudian, yakni pada 1932, DJB Pematang Siantar bernasib serupa, walaupun baru berumur sembilan tahun sejak dibuka pada 1923. Sementara yang masih bertahan sampai saat ini adalah De Javasche Bank Agentschap Medan yang kemudian menjadi Kantor Bank Indonesia Cabang Medan.

Penutupan kantor-kantor DJB di Sumatera Timur terutama sekali berkaitan dengan merosotnya kondisi ekonomi di Hindia Belanda akibat dari resesi ekonomi dunia. Alasan lainnya adalah untuk memainkan peran bank sentral di wilayah Sumatera Timur cukup dilaksanakan oleh De Javasche Bank Agentschap Medan karena dianggap mampu melaksanakan tugasnya dalam proses guldenisasi di wilayah tersebut tanpa perlu bantuan kantor-kantor cabang yang lain.

Memasuki dekade 1940, peperangan dalam Perang Dunia II yang terjadi di Eropa terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik. Militer Jepang segera melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia menuju Asia Tenggara. Kemudian pada Maret 1942, tentara Jepang berhasil menguasai Indonesia dan memaksa Belanda untuk menyerah kepada Jepang di Kalijati.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Militer Jepang dengan cepat mengubah struktur birokrasi dan ekonomi di Indonesia. Segala hal yang berhubungan dengan Belanda dan Barat diganti dengan model rancangan Jepang yang dianggap lebih memperlihatkan jati diri Asia dan disesuaikan dengan kepentingan perang Jepang. Setelah operasi militer untuk menduduki wilayah Hindia-Belanda terlaksana, berbagai langkah dilakukan oleh Jepang di bidang moneter dan perbankan untuk menggantikan sistem keuangan Belanda. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan melikuidasi beberapa bank milik Belanda dan Inggris dan menggantinya dengan bank-bank Jepang.

Kebijakan lain yang ditempuh oleh pemerintah militer Jepang

adalah membubarkan De Javasche Bank dan menggantikan tugas dan fungsinya dengan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) yang didirikan pada April 1943. NKG didirikan sebagai bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak uang di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia.

Untuk menggantikan uang-uang gulden Belanda yang beredar, Pemerintah Militer Jepang menerbitkan mata uang Jepang yang disebut sebagai mata uang pendudukan (*invasion money*). Ciri dari mata uang ini berupa tanda *De Japansche Regeering Betaalt aan toonder* (Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa) yang di atas uang tersebut. Uang pendudukan ini telah dipersiapkan oleh pemerintah militer Jepang jauh sebelum dilakukannya operasi pendudukan. Uang ini ditujukan untuk mengacaukan mata uang gulden milik Belanda dan menggantikannya dengan uang-uang Jepang.

Selain itu, NKG juga mengeluarkan uang yang dikenal dengan uang *Nanpatsu* yang memiliki tanda *Dai Nippon Teikoku Seifu* (Administrasi Tentara Jepang) dengan nilai satuan rupiah yang terdiri dari pecahan  $\frac{1}{2}$  rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah yang diedarkan keseluruh Indonesia. Khusus untuk daerah Sumatera NKG mengeluarkan uang pecahan 100 dan 1000 rupiah dengan tujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat perang. Pemerintah Jepang juga mengedarkan uang logam pecahan 1 sen, 5 sen, dan 10 sen dalam jumlah terbatas.<sup>6</sup>

Uang-uang Jepang yang dikeluarkan dan dicetak tersebut juga masuk dan beredar di Sumatera Utara sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan peranan gulden milik Belanda. Sampai pertengahan Agustus 1945, telah diedarkan uang pendudukan senilai 2,4 milyar gulden di Pulau Jawa, 1,4 milyar gulden di Sumatera, serta dalam nilai yang lebih kecil di Kalimantan dan Sulawesi. Sejak 15 Agustus 1945, juga masuk dalam peredaran senilai 2 milyar gulden, yang sebagian berasal dari uang yang ditarik dari bank-bank Jepang

6. Tim Penulis Bank Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 34.

di Sumatera serta sebagian lagi diambil dari De Javasche Bank Surabaya dan beberapa tempat lainnya. Hingga Maret 1946, jumlah uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda berjumlah sekitar delapan milyar gulden. Hal tersebut menimbulkan hancurnya nilai mata uang dan memperberat beban ekonomi wilayah Hindia Belanda.<sup>7</sup>

Selain mencetak dan mendistribusikan mata uang, peranan lain yang dilakukan oleh NKG adalah untuk mengawasi peredaran mata uang di daerah pendudukan. Di wilayah Sumatera pengawasan difokuskan NKG pada mata uang gulden dan juga Dollar Strait Settlement di Semenanjung Malaya, di mana pada kedua daerah ini pertukaran kedua mata uang tersebut tidak dapat dihindari. Derasnya arus peredaran Dollar Strait Settlement membuat pemerintah militer Jepang juga memberlakukan proteksi terhadap masuknya uang Dollar Strait Settlement yang dibawa oleh pedagang dari semenanjung dan sebaliknya oleh pedagang Sumatera sendiri.<sup>8</sup>

Proklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta membuat keadaan politik dan ekonomi Indonesia pasca perang ikut membaik. Dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan politik, pemerintah RI melakukan beberapa konsolidasi. Kemudian pemerintah RI melakukan perbaikan perekonomian dan keuangan bangsa Indonesia yang sangat buruk yang merupakan salah satu dampak dari pendudukan Jepang.

Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan juga buruk baik secara makro maupun secara mikro sebagai peninggalan penjajah. Tantangan di bidang ekonomi sangat berat baik dari segi produksi, distribusi, maupun perdagangan. Perekonomian sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, kopi, tembakau, teh dan gula. Merosotnya produksi pertanian dalam berbagai komoditi berakibat pada menurunnya ekspor dan cadangan devisa. Selain itu juga terjadi inflasi yang tinggi akibat beredarnya

7. Museum Bank Indonesia, *loc.cit.*

8. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 186.

tiga mata uang yang digunakan di Indonesia. Tiga mata uang tersebut adalah mata uang NICA yang biasa disebut dengan uang merah, mata uang Jepang dan uang kertas De Javasche Bank (DJB).

Inflasi yang terjadi juga diperparah dengan adanya blokade ekonomi dari Belanda, di mana Belanda menghalangi aktivitas ekspor dan impor di Indonesia. Tujuan dari blokade ini adalah untuk mematikan ekonomi Indonesia dengan cara pelarangan ekspor hasil bumi atau komoditas barang dagangan lain, dan melarang Indonesia melakukan impor dari negara lain. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukkan komoditas ekspor di dalam negeri dan adanya kelangkaan barang kebutuhan yang seharusnya dapat diperoleh dengan impor. Hal itulah yang menyebabkan adanya inflasi, karena ada ketidakseimbangan antara uang yang beredar dengan barang kebutuhan yang tersedia.<sup>9</sup>

Sebagai langkah untuk mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi. Strategi-strategi yang ditempuh antara lain adalah program pinjaman nasional, mendirikan bank sentral, penataan mata uang yang beredar, serta mencetak ORI. Strategi-strategi yang ditempuh oleh Pemerintah RI selain untuk menata fondasi ekonomi Indonesia pasca perang, juga dilakukan untuk menembus blokade ekonomi Belanda bersama para pengusaha dan masyarakat.

Guna menghadapi gempuran terhadap sistem moneter dan blokade ekonomi yang dilancarkan oleh Belanda tersebut, pemerintah Indonesia juga menjadikan uang sebagai alat perlawanan dan perjuangan terhadap ekspansi Belanda. Uang juga merupakan alat yang paling ampuh untuk menstabilkan dan menyehatkan perekonomian bangsa. Ditambah lagi dengan fungsi uang sebagai atribut atau legitimasi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, menyebabkan kepemilikan mata uang sendiri sangat dibutuhkan oleh

9. Tim Penulis, *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1949*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 5-6.

bangsa Indonesia saat itu yang tidak hanya sebagai alat tukar semata.

Sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi dan pembiayaan perang melawan pasukan Belanda, Pemerintah Republik kemudian mengeluarkan kebijakan dengan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diberlakukan secara resmi pada 30 Oktober 1946. Penyebaran ORI ke seluruh wilayah RI mengalami banyak hambatan terutama setelah Belanda melakukan agresi pertama tahun 1947.

ORI merupakan mata uang pertama bagi Republik Indonesia sekaligus menjadi sarana untuk perjuangan. Uang yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda pada masa ini mempunyai fungsi yang lain. Pada masa revolusi, uang juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggugah rasa nasionalisme serta menunjukkan adanya Indonesia yang berdaulat di mata dunia. Sehingga selain uang mempunyai nilai ekonomis, uang juga berfungsi sebagai sarana politik dan perjuangan di wilayah Indonesia.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan di bidang ekonomi di Indonesia, Pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan sebuah otoritas yang berwenang sebagai kas negara sekaligus bertindak sebagai bank sirkulasi yang salah satu tugasnya adalah mengedarkan uang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi di wilayah Republik Indonesia. Atas dasar kebutuhan itu, pemerintah segera membentuk sebuah bank sentral. Untuk melaksanakan mandat tersebut, pemerintah membentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia sebagai cikal bakal berdirinya bank sentral. Tidak lama berselang, didirikan Bank Negara Indonesia yang pada awal pendiriannya dimaksudkan sebagai sebuah bank sentral milik Indonesia. Keputusan mendirikan bank ini sesuai dengan Penjelasan pada Pasal 23 dan Aturan Peralihan pasal 4 dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

ORI yang diedarkan oleh pemerintah pusat ternyata tidak

mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia akibat sulitnya pengangkutan dan adanya blokade ekonomi oleh NICA. Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan uang di daerah, pemerintah Indonesia kemudian memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mencetak uang sendiri. Uang-uang ini dikenal dengan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). ORIDA merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi keuangan negara dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara Indonesia di awal kemerdekaan.

Akibat dari blokade ekonomi Belanda, ORI tidak sepenuhnya dapat menjangkau Pulau Sumatera dan tempat-tempat lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan uang di daerah sekaligus sebagai simbol perjuangan ekonomi melawan uang NICA, di Sumatera beredar banyak jenis ORIDA. Beberapa jenis ORIDA yang beredar di Pulau Sumatera, terutama Sumatera Utara adalah URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera), URIPSU (Uang Republik Indonesia Sumatera Utara), URITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli), Tanda Pembayaran Yang Sah untuk Keresidenan Lampung, Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP), Tanda Pembayaran Yang Sah berlaku untuk Sumatera Selatan, dan lain sebagainya.

Penggunaan ORI dan ORIDA di seluruh wilayah Indonesia berlangsung sampai pada 1949. Pada akhir tahun ini, dilangsungkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang secara resmi mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Pada KMB, dalam bidang ekonomi disepakati bahwa De Javasche Bank ditunjuk sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan keputusan tersebut, uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang RIS yang dicetak dan diedarkan oleh DJB. Untuk itu, pada awal tahun 1950 ORI ditarik dari peredaran. Begitu juga dengan berbagai jenis ORIDA yang tersebar di daerah-daerah. Sebagai uang yang berlaku adalah uang RIS.

Pada perkembangannya pemberlakuan uang RIS tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1950, pemerintah Indonesia menyata-

kan keluar dari RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan uang RIS tidak berlaku kembali. Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia kemudian mencetak dan menyebarkan uangnya ke seluruh Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada 1951, muncul gagasan untuk mengambil alih kepemilikan DJB dari Belanda. Melalui proses Indonesianisasi saham-saham DJB, pemerintah Indonesia mengubah DJB menjadi Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1953, Bank Indonesia ditetapkan menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.

Dari seluruh wilayah Indonesia, wilayah Sumatera Timur memiliki kekhasan dalam menjadikan uang sebagai instrumen perjuangan. Sejak masa kolonial Belanda, di daerah Sumatera Timur telah terdapat beragamnya mata uang asing yang beredar akibat ekonomi terbuka akibat ekspor impor perkebunan di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula bermacam-macam uang kebon yang hanya berlaku pada perkebunan tertentu yang jumlahnya ratusan perusahaan perkebunan. Sementara pada sisi lainnya, penggunaan uang gulden kurang digemari di Sumatera Timur. Hal ini menyebabkan diberlakukannya politik guldenisasi di wilayah ini. Kebijakan ini berupaya untuk menghalau gempuran mata uang asing dan menaikkan penggunaan gulden.

Pada masa revolusi kemerdekaan, daerah Sumatera Timur merupakan wilayah penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wilayah subur perkebunan yang membentang di sepanjang wilayah Sumatera Timur menjadi lumbung pemasukan pemerintah RI pada masa awal kemerdekaan berkat hasil dari penjualan komoditas perkebunan secara sembunyi-sembunyi ke Singapura. Di Sumatera Timur pula terdapat beragamnya mata uang ORIDA yang tersebar di wilayah-wilayah pedalaman Sumatera Timur. Hal ini terjadi akibat dari berbagai hambatan dalam mendistribusikan ORI maupun URIPS, sehingga banyak daerah-daerah di Sumatera Timur yang mencetak uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah

tersebut. Oleh sebab itu, menarik untuk menelaah bagaimana perjuangan pada tingkat lokal, yakni di Sumatera Utara, khususnya mengenai perjuangan anak-anak bangsa yang menggunakan uang sebagai instrumen dalam mendukung kelangsungan republik dan peranan bank sentral sebagai otoritas moneter dalam mengawal perekonomian Sumatera Utara. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai fungsi uang tidak hanya terbatas pada fungsi tradisionalnya, tetapi juga fungsinya sebagai instrumen perjuangan dalam mempertahankan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi uang sebagai instrumen perjuangan tersebut, dapat dikatakan belum dijelaskan secara komprehensif. Masih terdapat bagian-bagian yang perlu dijabarkan lebih lanjut agar menghasilkan sebuah pengetahuan yang komprehensif mengenai dinamika fungsi uang tersebut. Penulisan tentang hal tersebut, khususnya mengenai perjuangan dengan menggunakan uang sebagai salah satu senjatanya memang bukan suatu hal yang baru. Telah terdapat beberapa buku yang telah membahas atau menyinggung tema tersebut di Indonesia terutama mengenai perjuangan dengan uang dari masa ke masa.

Salah satu buku penting yang membahas mengenai sejarah pengelolaan uang di Indonesia adalah *Sejarah Kebijakan Moneter di Indonesia* karya Oey Beng To. Buku ini secara komprehensif membahas mengenai kebijakan moneter dari masa kolonial hingga masa dekade 1950, ketika masa awal berdirinya Bank Indonesia. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai kondisi ekonomi dan politik Indonesia awal kemerdekaan dan upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dalam upaya perbaikan ekonomi Indonesia. Buku ini menjadi buku penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dan pengelolaan uang di Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Buku penting lain yang memberikan informasi tentang ORI dan ORIDA adalah buku "*Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959*" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Buku ini secara detail menje-

laskan mengenai perjalanan sejarah lahirnya Bank Indonesia mulai dari periode pendirian BNI sebagai bank sirkulasi Indonesia hingga terjadinya proses Indonesianisasi De Javasche Bank hingga menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Selain menjelaskan perjalanan sejarah Bank Indonesia, terdapat pula penjelasan mengenai kondisi perekonomian Indonesia awal kemerdekaan serta latar belakang pengeluaran kebijakan pencetakan uang di Indonesia. Terdapat banyak informasi penting mengenai kebijakan moneter Indonesia serta pengelolaan mata uang pada awal kemerdekaan.

Sementara itu, belum terdapat buku-buku yang secara khusus mengulas dengan mendalam mengenai fungsi uang yang tidak terbatas pada fungsi tradisional, tetapi juga fungsinya sebagai instrumen perjuangan dan legitimasi politik suatu bangsa. Sementara itu, penjelasan mengenai peredaran uang-uang di perkebunan di Sumatera Timur telah sedikit disinggung di beberapa buku, seperti di Jan Breman dengan judul *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20* yang membahas mengenai politik kolonial Belanda terkait perkebunan, juga masalah-masalah perburuhan pada masa merebaknya pembukaan perkebunan di Sumatera Timur. Di dalam buku ini Breman juga menyinggung mengenai uang-uang kebon sebagai politik untuk mengikat buruh-buruh perkebunan. Karya lain yang juga membahas tema perkebunan Sumatera Timur adalah Ann Laura Stoler dengan karyanya yang berjudul *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979* yang juga menyinggung mengenai perekonomian perkebunan di mana masing-masing perkebunan menciptakan sistem ekonominya sendiri-sendiri.

## **Maksud dan Tujuan**

Buku ini hadir untuk melengkapi pengetahuan tentang penggunaan berbagai fungsi uang baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi perjuangan dalam mempertahankan dan memajukan pereko-

mian bangsa. Buku ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang komprehensif dalam penggunaan uang yang bukan saja sebagai alat transaksi namun juga berfungsi sebagai alat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan oleh anak-anak bangsa khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Otoritas moneter telah hadir di wilayah Indonesia sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui De Javasche Bank. Di wilayah Sumatera Timur, keberadaan otoritas moneter sebagai pihak yang berwenang mencetak dan mengontrol peredaran uang dilaksanakan oleh De Javasche Bank Agentschap Oostkust van Sumatra yang didirikan di beberapa kota, yakni di Medan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Bengkalis, dan Pematang Siantar. Fungsi pengawasan peredaran uang di wilayah Sumatera Timur menjadi permasalahan yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Di Sumatera Timur, dilaksanakan upaya guldenisasi sebagai kebijakan politik-ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui De Javasche Bank. Pada masa Jepang hingga masa revolusi kemerdekaan, persoalan tentang alat pembayaran yang sah masih menjadi hal yang krusial karena pada masa-masa peralihan kekuasaan yang cepat terjadi persaingan peredaran uang antar otoritas yang mewakili penguasa.

Maka menarik untuk melihat bagaimana dinamika perjuangan di bidang moneter di Indonesia, baik secara nasional, maupun regional khususnya Sumatera Utara. Untuk membantu menjelaskan mengenai perjalanan perjuangan di bidang tersebut, maka ditetapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dapat membantu dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya adalah bagaimana dinamika otoritas moneter di wilayah Sumatera Utara dari masa ke masa? Dan bagaimana perjuangan mencapai dan mempertahankan kedaulatan ekonomi melalui mata uang berlangsung di Sumatera Utara?

Penulisan buku mengenai dinamika perjuangan di bidang moneter di Sumatera Utara, sejak masa De Javasche Bank, Nanpo Kaihatsu

Ginko, hingga masa Bank Indonesia, bertujuan untuk mengetahui peranan otoritas dan berbagai komponen bangsa di Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan ekonomi regional dan global. Penulisan ini juga bertujuan untuk melengkapi historiografi perjalanan ekonomi lokal di Indonesia mengingat penulisan dengan topik ini masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti sejarah ekonomi Indonesia.

Selain penulisan sejarah kelembagaan dalam konteks perkembangan ekonomi, penulisan sejarah gedung bekas De Javasche Bank Agentschap Medan pun dilakukan dengan maksud menjadi landasan untuk pelestarian gedung kantor eks-De Javasche Bank tersebut untuk diusulkan menjadi sebuah bangunan heritage yang dilindungi. Hal ini berguna sebagai warisan dari masa lalu kepada generasi mendatang. Melalui penulisan buku ini juga diharapkan dapat dipetik sebuah pelajaran berharga dari masa lalu (*lesson learned*) yang mampu digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi generasi mendatang agar mampu bertindak dengan lebih bijak.

## **Metode Penelitian**

Penulisan buku ini menggunakan metode sejarah sebagai landasan penelitian. Proses dari metode penelitian ini mencakup: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian terutama upaya untuk menekan subjektivitas dalam penelitian dan penulisan guna tercapainya hasil yang dapat diuji keilmiahannya.

Tahapan pertama, heuristik, ialah tahap pengumpulan sumber mengenai tema yang akan diteliti. Sumber-sumber yang dikumpulkan diharuskan sesuai dengan tema yang diangkat. Penggunaan sumber utama dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa arsip baik dari arsip De Javasche Bank maupun arsip Bank Indonesia.

Dokumen merupakan salah satu kunci sejarawan dalam mengungkap masa lalu. Dokumen dan arsip menurut Ranke sangat pen-

ting bagi sejarawan, karena dengan dokumen dan arsip, masa lalu dapat direkonstruksi secara cermat dan ditampilkan sebagaimana terjadi di masa lalu. Seberapa penting penggunaan dokumen dan arsip ditegaskan oleh Ranke dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa sejarawan harus menggunakan sumber-sumber primer (primary resources) atau sumber-sumber asli (original resources) yang mana sumber-sumber itu dihasilkan saat peristiwa terjadi. Akan tetapi, penggunaan dokumen dan arsip tidaklah serta merta dapat digunakan begitu saja, sejarawan harus tunduk pada pengawasan yang ketat, dan hanya “dengan mengumpulkan, mengkritisi, dan memverifikasi semua sumber-sumber yang tersedia,” dapat membuat sejarawan berada dalam posisi yang bisa merekonstruksi masa lalu dengan akurat.

Arsip-arsip yang digunakan dalam penelitian ini terdapat di beberapa tempat, terutama sekali terdapat di Khazanah Arsip Bank Indonesia yang berlokasi di Kantor Bank Indonesia. Untuk memperkaya data, digunakan juga arsip-arsip yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sumber arsip ini digunakan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kiprah Bank Indonesia beserta peranannya di Indonesia. Selain itu, digunakan juga sumber lain berupa surat kabar sezaman yang tersedia di Perpustakaan Nasional, serta beberapa buku laporan Presiden De Javasche Bank. Adapun sumber sekunder adalah berbagai buku sejarah ekonomi, sejarah perang dunia, perang kemerdekaan, artikel atau terjemahan artikel, dan berbagai terbitan resmi lainnya yang dapat digunakan untuk memperkaya data penulisan.

Tahapan selanjutnya adalah kritik, yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern terutama dalam kritik terhadap sumber-sumber mengenai De Javasche Bank hingga periode Bank Indonesia. Sumber-sumber yang telah didapat tidak diolah begitu saja, tetapi dilakukan terlebih dahulu kritik terhadap sumber-sumber tersebut, serta dilakukan pengecekan ulang kebenarannya dengan cara membandingkan dengan sumber-sumber sezaman lainnya. Kritik intern

digunakan untuk melihat nilai intrinsik dari sebuah sumber seperti misalnya tahun sumber itu diterbitkan dan membandingkannya dengan sumber lain yang sezaman atau memiliki pembahasan yang sama. Ini digunakan untuk membantu sejarawan memperkuat validitas dari sebuah sumber. Sementara kritik ekstern digunakan untuk melihat hal-hal di luar isi sumber tersebut, seperti misalnya apakah sumber tersebut sesuai dengan situasi zaman pada saat itu, atau apakah sumber itu primer atau merupakan reproduksi ulang.

Lalu tahapan yang selanjutnya adalah interpretasi, yaitu upaya untuk menganalisis dan menafsirkan fakta sejarah yang berasal dari sumber untuk menghasilkan sebuah analisis sejarah. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan sebuah horison yang kaya dalam upaya rekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Interpretasi mengenai sumber-sumber yang ada dilakukan secara hati-hati dan cermat, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang komprehensif dan sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu.

Tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi dilakukan penulis dengan merekonstruksi kembali peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta temuan yang berasal dari sumber-sumber yang didapat. Penulisan dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan panduan sumber-sumber yang didapat untuk menghindari adanya kekeliruan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan jalannya sejarah yang telah terjadi. Penulisan ini dilakukan sebagai tahap akhir dari tahapan penelitian sejarah.

## 2

# Dinamika Sumber dan Peranan Uang pra De Javasche Bank di Sumatera Timur (1865-1907)

Wilayah Sumatera Timur merupakan penghasil komoditas ekspor yang menarik minat investor asing terutama setelah pemerintah Hindia Belanda membuka sistem ekonomi terbuka. Beragam komoditas dikembangkan sehingga secara keseluruhan perekonomian Sumatera Timur terus dapat berkembang meskipun terjadi krisis di salah satu komoditas akibat daya serap pasar yang terbatas menghadapi lonjakan produksi. Berkembangnya perekonomian Sumatera Timur di samping mengundang hadirnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor riil, juga mendorong masuknya bank-bank komersial. Mata uang yang banyak digunakan selain Real Spanyol juga Dolar Strait Settlement Inggris. Sementara itu, mata uang gulden tidak begitu signifikan. Politik guldenisasi tidak sepenuhnya berhasil karena partner dagang utama bukan ke negeri Belanda. Di tingkat mikro perusahaan, untuk mengikat pekerja di sektor perkebunan para pengusaha selain menggunakan kontrak kerja dan upaya-upaya yang memaksa juga mengeluarkan alat pembayaran yang hanya berlaku di lingkungan perusahaan perkebunan tertentu atau yang dikenal dengan "*oeang kebon*". Selain sebagai alat pembayaran yang terbatas di dalam wilayah perkebunan, uang ini lebih bersifat sebagai alat untuk memaksa para pekerja untuk terus bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini diindikasikan uang kebon yang diterimanya tersebut tidak disediakan tempat penukarannya di luar kebun menjadi uang yang berlaku secara umum. Selain

uang kebun yang berupa koin, pemilik perkebunan juga mengeluarkan uang bon yang berbahan kertas dan juga hanya berlaku di lingkungan perusahaan perkebunan itu sendiri.

## **Gambaran Umum Kondisi Ekonomi dan Keuangan Sumatera Timur**

Nama Sumatera Timur sebagai sebuah keresidenan di Hindia-Belanda pada awal abad ke-19 mungkin tidak terlalu dikenal oleh masyarakat di daratan Eropa. Namun siapa yang tak kenal dengan “Deli” negeri subur penghasil daun tembakau terbaik di dunia yang dalam sekejap berhasil menyulap kawasan Pantai Timur Sumatera menjadi ladang uang bagi para pengusaha perkebunan (*onderneming*). Di pasar tembakau dunia pada pertengahan abad ke-19, kualitas tembakau Deli dihargai dengan nilai jual 15 gulden per pon,<sup>1</sup> tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau Jawa yang hanya mencapai 5 gulden per ponnya. Besarnya keuntungan dari penjualan tembakau Deli inilah yang kemudian menjadikan budidaya tembakau tidak hanya diupayakan di daerah Deli, namun menyebar ke seluruh kawasan Pantai Timur Sumatera kala itu. Besarnya potensi yang dimiliki oleh kawasan Pantai Timur Sumatera sebagai sumber kekayaan baru bagi pemerintah kolonial menjadikan Sumatera Timur tidak hanya terkenal sebagai “Negeri penghasil daun emas”, tetapi juga “Zamrud terindah di tengah untaian permata Hindia”.<sup>2</sup>

Kemasyhuran Deli dalam peta perdagangan tembakau internasional saat itu tidak hanya menyangkut perannya sebagai penghasil daun tembakau terbaik yang menghasilkan pundi-pundi uang bagi pengusaha perkebunan, pemerintah kolonial, dan raja-raja ke-

1. Satu pon = 500 gr.
2. Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke-20*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 5.

sultan, tetapi juga menampilkan sebuah realitas yang menempatkan uang sebagai otoritas tertinggi yang tidak hanya berperan sebagai alat tukar (alat ekonomi dan moneter), namun juga sebagai alat politik dan legitimasi kekuasaan (*money power*) untuk memperebutkan kekayaan di Pantai Timur Sumatera.

*Sumatera Timur sebagai penghasil komoditas ekspor*



Gambar 2.1

### Peta Pantai Timur Sumatera

Sumber: Rice (1996)

Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi geografis Pantai Timur Sumatera yang letaknya berhadapan langsung dengan kawasan Semenanjung Melayu dan Straits Settlements<sup>3</sup> yang menjadi daerah

3. Straits Settlement (negeri-negeri selat) adalah kelompok daerah koloni Inggris di

kolonisasi Inggris menyebabkan daerah Pantai Timur Sumatera di sisi ekonomi hingga awal abad ke-20 tetap menjadi rebutan antara Belanda dan Inggris karena besarnya potensi yang dihasilkan dari sektor perkebunan dan juga eksplorasi minyak bumi yang bernilai jual tinggi. Meskipun secara politik Inggris bukanlah pemilik otoritas atas Sumatera Timur pasca disetujuinya Traktat London (1824) dan Traktat Siak (1858),<sup>4</sup> hegemoni ekonomi Inggris di daerah ini pada saat itu tidak mampu dikalahkan oleh Belanda.

Keterlibatan Sumatera Timur dalam jaringan perdagangan internasional sebagai penghasil komoditas tanaman ekspor sejak dimulainya “Era perkebunan” (1863) dengan segera menempatkan daerah ini sebagai bagian dari jaringan ekonomi internasional yang profitabel. Sibuknya lalu lintas ekspor-impor antara Pantai Timur Sumatera dengan pusat-pusat perdagangan dunia di Eropa dan Amerika mendorong masuknya berbagai mata uang asing ke Sumatera Timur. Ditambah lagi dengan kedekatan geografis dengan Singapura, Malaka, dan Penang sebagai pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional Inggris semakin menguatkan eratnya hubungan ekonomi antara wilayah Strait Settlement dengan Pantai Timur Sumatera yang telah dimulai jauh sebelum hadirnya Inggris dan Belanda. Jarak yang sangat jauh antara Batavia dengan kawasan Pantai Timur Sumatera semakin mempersulit Belanda untuk menahani gempuran hegemoni ekonomi Inggris kala itu yang sebarannya hingga ke kawasan pesisir pantai dan terus masuk ke pedalaman Sumatera.

Kokohnya hegemoni ekonomi Inggris di kawasan Semenanjung Melayu menyebabkan tidak berfungsinya kontrol ekonomi uang Belanda di daerah-daerah yang terletak dekat dengan koloni Inggris. Hingga penghujung paruh pertama abad ke-20 sebelum dilak-

Semenanjung Melayu (1824 – 1926). Negeri-negeri selat ini terdiri dari Penang, Malaka, dan Singapura.

4. Robert Cribb & Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 603.

sanakannya politik guldenisasi oleh De Javasche Bank, kekuasaan Belanda di Sumatera Timur hanyalah sebatas legitimasi politik yang tidak diikuti dengan penguasaan di sektor ekonomi dan moneter.

Rendahnya peredaran mata uang gulden di kawasan Pantai Timur Sumatera yang berkebalikan dengan tingginya animo masyarakat untuk menggunakan berbagai jenis uang dolar dari semenanjung sebagai alat tukar menjadi bukti legitimasi Belanda atas Pantai Timur Sumatera hanyalah simbol politis. Ditambah lagi sebelum guldenisasi Belanda sama sekali tidak menetapkan regulasi apa pun untuk mengontrol perekonomian serta menjadikan gulden sebagai satu-satunya alat tukar yang sah untuk dipergunakan di Pantai Timur Sumatera. Kondisi ini memberi peluang kepada Inggris untuk mengambil keuntungan melalui Penang, Malaka dan Singapura (Straits Settlements) sebagai ujung tombak perekonomian di kawasan Semenanjung Melayu. Dominasi peredaran mata uang dolar menjadi bukti kuat bahwa Inggris berhasil menjadi pengendali utama aktivitas ekonomi di Pantai Timur Sumatera, yang seharusnya menjadi hak dan kekuasaan pemerintah kolonial yang ada di Batavia sebagai pusat politik dan ekonomi di Hindia Belanda.

Selain itu, kekuasaan mutlak dari pemilik perkebunan (tuan kebun) atas lahan perkebunan dan juga para kuli mereka, memberi peluang mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri "token (uang kebon)" untuk membayar upah kuli di ratusan perkebunan yang ada di Pantai Timur Sumatera demi keuntungannya sendiri yang sama sekali luput dari perhatian pemerintah kolonial Belanda. Realitas inilah yang menyebabkan sebelum hadirnya De Javasche Bank dan kebijakan guldenisasi, kolonialisasi Belanda atas Pantai Timur Sumatera memiliki keunikan berbeda dengan daerah jajahan Belanda lainnya saat itu. Hegemoni kekuasaan Belanda di Sumatera Timur hanya berada dalam tataran politis tanpa menyentuh ranah ekonomi dan moneter yang menjadi mesin penggerak kapitalisasi modern yang mulai berkembang dengan cepat di daerah ini sejak 1860an.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa pertumbuhan dan perkembangan kawasan Pantai Timur Sumatera sebagai wilayah penghasil beragam komoditas ekspor terpenting di luar Pulau Jawa sejak dekade ke-7 abad ke-19 tidak terlepas dari kondisi politik yang terjadi di Hindia Belanda pada masa tersebut. Peralihan kekuasaan dari VOC kepada Pemerintah Kerajaan Belanda dipermulaan abad ke-19 mendorong terjadinya perubahan politik yang berdampak secara langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya sebagai daerah jajahan yang harus memberikan keuntungan materil bagi negeri induk. Berbagai kebijakan bidang ekonomi dan politik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanyalah dipusatkan pada tuntutan agar daerah jajahan dapat mengisi kas negeri induk. Selain itu, pemerintah kolonial juga selalu menganalogikan daerah jajahan sebagai "Gabus tempat mengapungnya kesejahteraan negeri induk".<sup>5</sup> Prinsip *how to manage a colony for money* akan selalu menjadi tujuan utama dari kekuasaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda hingga dekade keempat abad ke-19. Faktor inilah nantinya yang menyebabkan permulaan abad ke-19 dijadikan sebagai tonggak awal dimulainya penjajahan Belanda yang sesungguhnya di Indonesia.<sup>6</sup>

Demi merealisasikan tujuan kolonialisme tersebut, pemerintah kolonial pada awalnya hanya memfokuskan eksploitasi di Pulau Jawa saja, terkecuali beberapa daerah yang telah dikuasai seperti Kepulauan Maluku, daerah-daerah kecil sekitar Makassar, Banjarmasin, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa lainnya termasuk Pantai Timur Sumatera yang dianggap tidak memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan saat itu, sama sekali tidak dilibatkan.<sup>7</sup> Bagi pemerintah kolonial, Pantai Timur Sumatera pada

5. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 12.
6. A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 4.
7. Dirk A. Buiskool, "Medan: A Plantation City on the East Coast of Sumatra 1870–

masa itu hanyalah sebuah daerah hutan belantara dengan sedikit keuntungan ekonomi untuk menambah pundi-pundi uang Belanda.<sup>8</sup>

Pada periode selanjutnya orientasi ekonomi dan politik Belanda yang sebelumnya abai dengan kawasan Pantai Timur Sumatera akhirnya berbalik arah.<sup>9</sup> Hal ini terjadi setelah tembakau Deli dalam waktu singkat populer di pasar tembakau Eropa sebagai pembungkus cerutu terbaik di dunia yang bernilai jual tinggi. Tidak hanya itu, penemuan ladang-ladang minyak bumi dan barang tambang lainnya dengan seketika mengubah lahan-lahan kosong di kawasan Pantai Timur Sumatera menjadi daerah paling sibuk dengan aktivitas perkebunan komoditas ekspor dan eksplorasi minyak bumi. Perubahan dari daerah yang sama sekali tidak produktif secara ekonomi di awal tahun 1800 menjadi daerah dengan lompatan ekonomi yang sangat luar biasa pada dekade kedua pertengahan abad ke-19, menjadikan daerah Sumatera Timur layak dijuluki sebagai “Si Kuda Hitam dari Sumatera”.

Kebijakan politik dan ekonomi Belanda atas tanah jajahan juga dilatarbelakangi oleh berbagai gejolak politik dan ekonomi yang terjadi pada permulaan abad ke-19. Dengan adanya kesepakatan Traktat London tahun 1824 yang menukar Bengkulu milik Inggris dengan Malaka yang dikuasai oleh Belanda, serta Traktat Siak 1858 yang melegitimasi hak penuh Belanda atas wilayah Pantai Timur Sumatera. Selanjutnya kebijakan *Batig slot* (siswa anggaran) bagi kas pemerintah kolonial oleh parlemen dan diberlakukannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 yang mengatur kepemilikan tanah di Hindia Belanda ikut mendorong masuknya investor asing

1942”, dalam Freek Colombijn, *et al.* (ed)., *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 274.

8. Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863–1942*, (Jakarta: National Institute of Economic and Social Research, 1977), hlm. 1.
9. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 9.

yang menanamkan modalnya di seluruh wilayah Hindia Belanda. Pengusaha perkebunan, pertambangan, dan industri swasta merupakan pihak-pihak yang melanjutkan tradisi pemerintah kolonial Belanda dalam menikmati keuntungan dengan sistem *batig slot* tersebut demi kepentingan mereka sendiri.<sup>10</sup>

Pada akhirnya, kehadiran bangsa Belanda sebagai negeri induk kemudian diikuti oleh pihak pengusaha swasta dari daratan Eropa dan Amerika. Mereka mengembangkan usaha perkebunan, pertambangan, dan industri di Sumatera Timur hingga 1940an sama sekali tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan bagi masyarakat pribumi kebanyakan. Kuasa ekonomi yang mereka miliki hanya bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang semata-mata memperkaya diri sendiri tanpa terkecuali. Kondisi ini tentu saja tidak hanya terjadi di Sumatera Timur, namun juga di seluruh Hindia Belanda yang hanya dijadikan sebagai mesin pengeruk uang pemerintah kolonial.

## **Sumatera Timur Awal Abad ke-19**

Secara politis kawasan Pantai Timur Sumatera pada abad ke-19 terdiri dari beberapa kesultanan: Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, dan Kesultanan Serdang yang berkuasa penuh di teritorial kerajaan mereka masing-masing. Eksistensi dari keempat kesultanan tersebut di kawasan Pantai Timur Sumatera ada setelah mereka berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Aceh dan Siak pada awal abad ke-19. Aneksasi kekuasaan Belanda di seluruh kawasan di Pantai Timur Sumatera mulai 1862 berhasil menempatkan keempat kesultanan tersebut langsung berada di bawah supremasi politik kolonial Belanda. Kesultanan tetap dipertahankan hak monarkinya oleh Belanda dengan jaminan bahwa keempat kesultanan tersebut akan tunduk dengan kekuasaan pemerintah kolonial. Dua tahun ke-

10. *Ibid.*, hlm. 3; 15.

mudian ekspansi politik pemerintah kolonial di kawasan Pantai Timur Sumatera semakin kokoh dengan dibangunnya pusat pemerintahan kolonial di Laboehan pada 1864.<sup>11</sup>

Inggris merupakan bangsa Eropa pertama yang memiliki perhatian sungguh-sungguh terhadap kawasan pantai Timur Sumatera

sebelum Belanda. Besarnya produksi lada dari kawasan Sumatera Timur menjadikan daerah ini sebagai penghasil komoditas dagang yang sangat penting bagi Inggris. Selain sebagai basis ekspor komoditas ke luar negeri, Pantai Timur Sumatera juga sebagai pintu masuk produk yang diimpor dari Penang, Malaka, dan Singapura. Komoditas ekspor tersebut sebagian besar dijadikan sumber bahan baku industri Inggris, sehingga keberadaan Sumatera Timur di kawasan Semenanjung Malaya dinilai sangat penting. Untuk membuktikan keseriusannya dalam menjajaki kawasan Pantai Timur Sumatera ini, Inggris kemudian mengutus John Anderson pada Desember 1822 hingga April 1823 untuk menyelidiki dan menghimpun berbagai informasi mengenai wilayah Pantai Timur Sumatera.<sup>12</sup>

Deskripsi tentang perjalanan John Anderson ke Sumatera Timur yang memuat bagaimana bentang alam dan juga potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah ini ia uraikan dalam bukunya yang sangat fenomenal, *Mission to The East Coast of Sumatra* (1826). Gambaran geografis Sumatera Timur dalam buku tersebut berupa sebuah kawasan dataran rendah aluvial yang dialiri oleh beberapa sungai, salah satunya adalah Sungai Deli yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Timur sebelum dan setelah 1800. Kawas-

*Selain sebagai basis ekspor komoditas ke luar negeri, Pantai Timur Sumatera juga sebagai pintu masuk produk yang diimpor dari Penang, Malaka, dan Singapura*

11. Dirk A. Buiskool, *op.cit.*, hlm. 274.

12. Karl. J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863–1947*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 18.

an dataran rendah ini sangat subur dan dipenuhi dengan hamparan hutan hujan tropis yang lebat. Meskipun hutan belukar masih mendominasi di kawasan ini, masyarakatnya telah mengupayakan pembukaan lahan untuk areal pertanian padi ladang dan sayur-mayur. Selain itu, masyarakat Pantai Timur Sumatera juga menjadikan tanah mereka sebagai perkebunan kelapa, tebu, tembakau, dan lada sejak awal abad ke-19.<sup>13</sup> Sistem pertanian yang umumnya dikembangkan oleh masyarakat setempat pada masa ini adalah penanaman di tanah kering atau disebut juga dengan sistem pertanian berhuma.<sup>14</sup>

Catatan Anderson selama menyusuri sungai-sungai dan mengunjungi kawasan perkampungan di Sumatera Timur saat itu mengungkapkan bahwa masyarakat setempat telah mampu menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, kelapa<sup>15</sup> yang ditanam hampir di setiap pekarangan rumah penduduk,<sup>16</sup> sayur-sayuran, buah-buahan khas Sumatera seperti jambu, pinang, durian, *champedo* (nangka), manga, *lanseh* (duku), *rusip*, *machang* (sejenis mangga), jambu biji, rambutan, sukun, pepaya, pisang raja, dan buah-buahan khas Sumatera lainnya.

Lada, tembakau, tebu, dan pisang raja merupakan tanaman komoditas dagang yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Sumatera Timur pada awal abad ke-19 yang dari segi kuantitas masih jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan masa setelah dibukanya Sumatera Timur oleh pemodal asing untuk perkebunan tembakau setelah 1860. Di beberapa tempat Anderson sempat menyaksikan luasnya hamparan perkebunan tebu yang sangat subur.<sup>17</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada tanaman lada sebagai komodi-

13. John Anderson, *Mission to The East Coast of Sumatra*, (London: William Blackwood & T. Cadell, Strand, 1826), hlm. xxvi; 22.

14. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 79.

15. Anderson menyebut kelapa dengan nama *kalamber*.

16. Saat memasuki Sungai Bulu Cina atau Kuala Belawan dan menyusuri beberapa perkampungan di sana, Anderson dihadaahi oleh masyarakat setempat banyak sekali buah kelapa.

17. John Anderson, *op.cit.*, hlm. 41.

tas unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat Sumatera Timur saat itu. Saat lada masih menjadi komoditas unggulan dalam perniagaan internasional di awal 1800, kawasan Pantai Timur Sumatera dari Deli dan Langkat di utara hingga Siak di selatan adalah “Pelabuhan-pelabuhan lada terpenting” pada masa itu.<sup>18</sup> Anderson melihat sendiri saat Sultan Deli memuat penuh sebuah kapal dengan lada yang siap dikirim keluar Sumatera Timur saat musim panen lada terjadi di Langkat, Deli, dan Serdang.<sup>19</sup> Penanaman lada di Langkat pertama kali dilakukan sejak peralihan abad ke-18. Statistik impor Penang menunjukkan bahwa pada tahun 1814 hasil produksi lada dari Langkat berjumlah 3.000 pikul,<sup>20</sup> dan kemudian meningkat sepuluh kali lipat menjadi 30.000 pikul pada tahun 1822. Jumlah ini menunjukkan bahwa penanaman lada di Langkat telah diupayakan dalam skala yang besar.<sup>21</sup>

*Real Spanyol/pillar dollar/peseta merupakan alat tukar yang lazim digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di kawasan Semenanjung Melayu dan juga Pantai Timur Sumatera saat itu*

Kesuksesan budidaya tanaman lada di wilayah Pantai Timur Sumatera yang terus mengalami peningkatan secara bertahap sejak 1800an tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat Batak Karo dalam aktivitas pertanian. Petani-petani Karo ini telah memulai penanaman lada dengan sistem berhuma melalui pembuatan petak-petak lahan pertanian lada yang dapat terus berproduksi selama 15 hingga 20 tahun.<sup>22</sup> Namun karena keterbatasan jumlah tenaga kerja,

18. Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe dari Marcopolo sampai Tan Malaka*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 276.

19. *Ibid.*, hlm. 25.

20. Satu pikul = 62.5 kg.

21. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 20.

22. *Ibid.*, hlm. 79.

produksi pertanian yang dilakukan oleh petani-petani karo tersebut masih terbatas dalam jumlah yang kecil dan belum mencapai tingkat perkebunan besar seperti pada era kapitalisasi yang dikembangkan pada periode selanjutnya. Hasil produksi lada milik petani Karo tersebut akan dipasarkan ke daerah Penang dan juga ke Padang yang terletak di Pantai Barat Sumatera.<sup>23</sup>

Selain mengupayakan di lahan sendiri, masyarakat Batak Karo yang memang terkenal dengan keahlian mereka dalam bertani juga bermigrasi dari kawasan dataran tinggi Karo ke dataran rendah di Deli dan Langkat untuk bekerja pada "orang kaya"<sup>24</sup> yang membutuhkan tenaga mereka dalam membuka dan mengelola perkebunan lada. Orang kaya pemilik perkebunan lada ini akan menyediakan beras, garam, serta alat-alat pertanian yang dibutuhkan berupa cangkul besar, sekop, parang, dan keranjang. Apabila pohon lada telah berbunga, petani-petani Karo tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar tiga Real Spanyol (*peseta*) sepikul untuk dua pertiga hasil panen dan lima *peseta* sepikul untuk selebihnya.<sup>25</sup>

Mata uang Real Spanyol/pillar dollar/*peseta* merupakan alat tukar yang lazim digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di kawasan Semenanjung Melayu dan juga Pantai Timur Sumatera saat itu. Belum adanya otoritas kekuasaan Belanda pada dasawarsa pertama abad ke-19, disertai dengan jalinan lalu lintas perdagangan yang intens dengan Semenanjung Melayu<sup>26</sup> menyebabkan masyarakat di Sumatera Timur memakai mata uang Real Spanyol yang berlaku di semenanjung saat itu, bukan uang gulden Belanda/*Nederlandsche rijksdaalders*.

23. *bid.*, hlm. 80 dan 84.

24. Sebutan untuk orang-orang elite yang buka bangsawan.

25. *Ibid.*, hlm. 22.

26. Kawasan Semenanjung Melayu (Penang, Malaka, dan Singapura) adalah satu-satunya daerah yang menjalin kontak dagang dengan berbagai daerah di Pantai Timur Sumatera. Meskipun jalinan ekonomi dengan kawasan Pantai Barat Sumatera juga telah ada, tapi jumlahnya sangat kecil.

Pengolahan tanah untuk perkebunan tembakau di Sumatera Timur juga sudah ada pada permulaan abad ke-19 bersamaan dengan penanaman lada. Saat lada pertama kali dikenal oleh masyarakat Sumatera Timur, petani-petani ladang hutan baik itu petani Karo maupun Melayu menggabungkan cara penanaman lada dengan sistem pertanian tradisional mereka. Jika lahan pertanian tanaman padi selesai di panen, tanah akan diolah untuk penanaman lada dan tembakau hingga masa tanam padi selanjutnya. Secara bergiliran lahan pertanian diberdayakan untuk penanaman padi, sayur-mayur, jagung, lada, dan tembakau.

Dalam budidaya tembakau, masyarakat Melayu dan Batak Karo telah mengenal teknik penanaman tembakau yang baik sebagaimana uraian Anderson berikut ini:

“Para petani tembakau akan menaburkan bibit tembakau di lahan khusus persemaian yang berukuran kecil, dan kemudian memindahkannya setelah dua puluh hari pada deretan-deretan yang memiliki jarak dua kubit. Dalam tempo empat bulan daun tembakau akan siap panen. Setelah dua bulan pucuk tanaman tembakau akan dipotong untuk memberi kekuatan dan membuat daun-daunnya bertambah lebar. Apabila tanaman tembakaunya telah mempunyai tujuh helai daun, daun-daun tembakau itu akan dipanen. Tanda-tanda daun tembakau siap untuk dipanen yaitu, daun sudah mulai layu terkulai dan berwarna kecoklat-coklatan. Dalam sekali panen para petani memetik satu atau dua daun, terutama untuk daun yang mendekati kondisi siap panen. Daun-daun tersebut dibiarkan disinari matahari selama empat hari, dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang kecil yang menjadi wadah tembakau tersebut untuk diekspor.”<sup>27</sup>

Selain pertanian, perkebunan dan perikanan, aktivitas ekonomi lainnya yang diupayakan oleh masyarakat di Sumatera Timur pada

27. John Anderson, *op.cit.*, hlm. 380.

awal 1900an adalah peternakan. Hewan ternak yang mereka pelihara biasanya adalah hewan jenis unggas seperti ayam dan bebek, serta kambing, sapi, dan kerbau.<sup>28</sup>

Hasil penelitian potensi alam dan ekonomi yang dimiliki oleh Pantai Timur Sumatera tersebut, Anderson kemudian menganjurkan Perusahaan Dagang Timur Inggris (EIC) untuk mendirikan serangkaian pos perdagangan kecil sepanjang pantai Sumatera Timur seperti yang ia uraikan dalam surat rekomendasi berikut ini:

*Produksi lahan-lahan perkebunan swasta pada tanaman komoditas ekspor dalam jumlah yang sangat besar dan nilai profit yang tinggi. Sumatera Timur akhirnya muncul sebagai sumber kekayaan baru*

“Kantor-kantor dagangan seperti itu, di bawah pimpinan orang-orang yang mampu dan berpengalaman, mengenal adat-istiadat dan bahasa penduduk setempat, secara konkret akan cenderung menguntungkan kepentingan-kepentingan perniagaan di daerah ini. Mereka akan mendorong minat pribumi-pribumi terhadap barang kerajinan, dan membangkitkan selera untuk membuat berbagai jenis barang. Suatu sistem pemerintahan yang lebih baik akan diperkenalkan di sana, perselisihan dan permusuhan yang banyak itu antara kerajaan kecil akan berkurang, kemantapan dan ketertiban akan terselenggara. Para pedagang dari Penang dan Singapura akan merasa bahwa perlindungan harta milik mereka lebih terjamin, tidak ayal lagi bahwa akan terjadi peningkatan yang lumayan dalam perniagaan kita”.

Surat rekomendasi yang disampaikan oleh Anderson di atas membawa suatu kesimpulan bahwa potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh kawasan Pantai Timur Sumatera pada awal abad ke-19

28. *Ibid.*, hlm. 17.

akan semakin memperkuat hegemoni ekonomi Inggris di daerah Semenanjung Melayu dan Sumatera. Besarnya keuntungan yang akan diraup dari Pantai Timur Sumatera telah terbaca oleh Inggris sebagai pemegang kendali perdagangan dunia saat itu, meskipun hasil bumi yang dihasilkan oleh wilayah ini masih dalam skala yang kecil dan dari segi nominal keuntungan jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Langkah yang diambil oleh Inggris tersebut berbeda dengan politik kolonisasi Belanda sebelum 1860an yang memandang Sumatera Timur sebagai sebuah daerah yang tidak bernilai ekonomi tinggi seperti Jawa. Kurangnya minat Belanda akan ekonomi Pantai Timur Sumatera tersebut terbukti dengan lambatnya usaha Belanda untuk memperluas kepentingan ekonominya di daerah ini hingga pertengahan abad ke-19. Setelah kedatangan Nienhuys membuka perkebunan tembakau pada 1863, daerah Pantai Timur Sumatera dalam sekejap disesaki dengan lahan-lahan perkebunan swasta yang memproduksi tanaman komoditas ekspor dalam jumlah yang sangat besar dan nilai profit yang tinggi. Sumatera Timur akhirnya muncul sebagai sumber kekayaan baru dan harapan baru bagi pemerintah Hindia Belanda dan juga pengusaha-pengusaha perkebunan berbagai bangsa dari daratan Eropa dan Amerika. Berbagai kebijakan politik dan strategi ekonomi kemudian ditempuh oleh berbagai pihak yang sangat berkepentingan dengan sumber daya ekonomi Sumatera Timur yang membentuk ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Hindia Belanda.

### **Ekspansi Pengusaha Swasta Barat dan Berkembangnya Perkebunan Besar**

Pembukaan perkebunan tembakau dalam skala besar di Sumatera Timur pertama kali dilakukan oleh Jacobus Nienhuys. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai peletak dasar budaya perkebunan di Pantai Timur Sumatera. Nienhuys adalah seorang pengusaha tembakau asal

Belanda yang sengaja datang ke Pantai Timur Sumatera untuk menyelidiki perkebunan tembakau milik masyarakat setempat. Dari seorang keturunan Arab, Said Abdullah Bilsagih yang bekerja pada Sultan Deli, Nienhuys memperoleh informasi bahwa masyarakat Deli telah mampu menghasilkan daun tembakau yang bermutu tinggi dan Sultan Deli membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha asing untuk membuka perkebunan tembakau di Deli. Demi membuktikan kebenaran informasi Said tersebut, Nienhuys dan beberapa wakil JF van Leeuwen & Co., kemudian berlayar ke Sumatera Timur pada 1863 untuk melihat secara langsung bagaimana budi daya perkebunan tembakau yang berkembang di sana.<sup>29</sup>

Setelah mengunjungi Deli dan melihat langsung kondisi alam serta kehidupan masyarakatnya, Nienhuys berkesimpulan bahwa informasi mengenai "Tingginya kualitas tembakau Deli" bukanlah isapan jempol belaka. Namun berita mengenai produksi tembakau milik Kesultanan Deli yang produksinya mencapai 30.000 pikul per tahun tidak bisa dipercaya. Dalam pengamatan Nienhuys budidaya tembakau di Deli masih berupa perkebunan-perkebunan kecil yang jumlah produksinya sangat rendah. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh tembakau Deli dan peluang yang dimiliki oleh Nienhuys dalam mengembangkan bisnis tembakau di Deli akhirnya menarik minat Nienhuys untuk membuka perkebunan tembakau di Sumatera Timur.<sup>30</sup>

Langkah pertama yang dilakukan oleh Nienhuys untuk merealisasikan rencananya tersebut adalah dengan meminta hak konsesi tanah dari Kesultanan Deli seluas 75 ha untuk melakukan uji coba penanaman tembakau.<sup>31</sup> Hak konsesi tanah dari Raja Sultan Mahmood Perkasa Alam Shah tersebut diperluas setahun kemudian (1864). Dalam perjanjian konsesi tanah 1864 ini disepakati beberapa

29. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 18; Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 51–52.

30. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 53; Dirk A. Buiscool, *op.cit.*, hlm. 274.

31. *Ibid.*, hlm. 53.

pasal yang menyatakan bahwa Sultan Deli memberikan hak pengelolaan tanah kepada Nienhuys seluas 4.000 bau<sup>32</sup> di sepanjang sungai untuk jangka waktu 20 tahun dengan catatan sepuluh tahun pertama bebas sewa dan sepuluh tahun berikutnya dikenakan sewa sebesar 200 dolar pertahun.<sup>33</sup> Nienhuys kemudian mulai membuka perkebunan tembakau di selatan Laboehan yang berada tepat di muara Sungai Deli.<sup>34</sup>



**Foto Jacobus Nienhuys**

Sumber: KITLV

Satu tahun setelah pembukaan perkebunan di Laboehan (1865)

32. Satu bau = 0.7 hektar.
33. Dolar yang dimaksud di sini adalah uang dolar selat (*dollar pillar* atau dolar Spanyol dan dolar Meksiko atau *Mexican dollar*) yang berlaku saat itu sebagai alat pembayaran di kawasan semenanjung dan Sumatera Timur.
34. R.Z. Leirissa, *et al.*, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 274.

Nienhuys telah dapat melakukan panen tembakau pertama yang mampu menghasilkan 189 bal<sup>35</sup> daun tembakau yang kemudian dikirim ke Rotterdam dengan kisaran harga 0.42 sampai 2.51 gulden per setengah kg (rata-rata pengiriman 1.485 kg). Menurut Pelzer<sup>36</sup> angka penjualan tersebut adalah “Suatu harga yang menggairahkan tetapi masih terlalu sedikit untuk satu kali pengapalan”. Tahun 1867 Nienhuys kembali mengirimkan hasil produksi tembakau perkebunan miliknya ke Rot-

terdam dan mendapatkan keuntungan bersih mencapai 35 ribu gulden. Dalam waktu singkat, kemasyhuran nama “tembakau Deli” menjadi terkenal di pasar tembakau Eropa saat itu.<sup>37</sup>

Budidaya perkebunan tembakau dengan kualitas terbaik yang telah dirintis oleh petani-petani Karo dan Melayu menjadi komponen yang paling esensial dalam menunjang kesuksesan pengembangan perkebunan tembakau setelah kedatangan Nienhuys dan era kapitalisasi di Pantai Timur Sumatera. Sebelum diberlakukannya *Agrarische Wet* 1870 yang membuka seluas-luasnya Pantai Timur Sumatera untuk investor asing, ekspor tembakau Kesultanan Deli tahun 1863 hanya mencapai 373 pikul.<sup>38</sup> Saat periode “ledakan perkebunan tembakau”, produksi tembakau tahun 1884 ada sekitar 115.496 bal, dengan nilai jual di pasar tembakau dunia 1.44 gulden per 0.5 kg. Nilai jual tembakau terus naik pada tahun 1889 yang mencapai 1.46 gulden per 0.5 kg. Harga tembakau tahun 1889 ini merupakan

*Penanaman tembakau yang sangat menguntungkan disertai dengan tersedianya tenaga yang murah berhasil menarik pemodal asing dalam jumlah yang besar untuk masuk ke Sumatera Timur*

35. 1 bal = 158 kg.

36. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 55.

37. R.Z. Leirissa (2012), *op.cit.*, hlm. 71.

38. Satu pikul = 62.5 kg.

nilai jual tertinggi dalam sejarah perkebunan tembakau Deli.<sup>39</sup>

Rahasia dari kualitas tembakau Deli yang dikenal sebagai daun pembungkus cerutu terbaik di dunia terletak pada kondisi tanah, alam, dan siklus penanamannya. Tembakau yang kualitasnya sama dengan Deli hanya dapat dihasilkan di lahan-lahan yang membentang di sepanjang Pantai Timur Sumatera, khususnya tanah di sekitar Deli yang terletak di antara Sungai Wampu dan Sungai Ular.<sup>40</sup> Upaya pemerintah kolonial untuk mengembangkan perkebunan tembakau bermutu tinggi seperti Deli pada daerah lainnya di Pulau Sumatera, ternyata tidak pernah menyamai kualitas daun tembakau Deli. Faktor inilah yang menjadikan tembakau Deli memiliki keunikan tersendiri dibandingkan budidaya tembakau lainnya yang ada di Hindia Belanda. Fakta ini juga berarti bahwa hanya di Deli tembakau dengan kualitas paling bagus dapat dihasilkan dan tidak ada yang mampu menyainginya di pasar tembakau dunia saat itu.

Keberhasilan Nienhuys dalam menghasilkan tembakau Deli dengan kualitas terbaik dan bernilai jual tinggi di pasar Eropa dengan cepat menarik minat pengusaha-pengusaha besar Belanda dan Eropa untuk menanam modal mereka pada perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Gelombang pertama yang mengikuti jejak Nienhuys dalam usaha perkebunan di Deli adalah dua orang pengusaha asal Swiss, Mots dan Breker, serta seorang pemodal asal Jerman B. von Mach yang datang sekitar tahun 1865 hingga 1866. Lima pengusaha lainnya yang datang kemudian juga mendirikan perkebunan di Deli.<sup>41</sup> Penanaman tembakau yang sangat menguntungkan disertai dengan tersedianya tenaga yang murah berhasil menarik pemodal asing dalam jumlah yang besar untuk masuk ke Sumatera Timur. Dalam waktu singkat semakin banyak para pengusaha asing

39. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 79.

40. Dari seluruh wilayah Sumatera Timur, hanya tanah yang terletak di antara kedua sungai tersebut yang cocok untuk budidaya tembakau. Lebih jauh lihat Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 38.

41. *Ibid.*, hlm. 56.

yang berlomba-lomba datang ke Deli dan daerah-daerah lainnya di Pantai Timur Sumatera seperti Langkat, Asahan, Serdang serta Simalungun untuk mendirikan perkebunan.

Badan Usaha Dagang Belanda atau *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) yang didirikan oleh Raja Willem I pada 7 Februari 1825 juga memiliki minat besar terhadap keuntungan yang dihasilkan oleh perkebunan tembakau Nienhuys. Tahun 1869 perusahaan ini menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang diberi nama Badan Usaha Deli (*Deli Maatschappij*) yang dipimpin oleh Nienhuys sendiri.<sup>42</sup> Tidak lama setelah Nienhuys dan NHM, pengusaha-pengusaha dari Inggris, Swiss, Jerman, Amerika, dan Belgia semakin banyak yang menanamkan modalnya untuk membuka usaha perkebunan tembakau di Sumatera Timur hingga penghujung abad ke-19.<sup>43</sup>

Keseriusan pemerintah kolonial dalam mengkapitalisasikan tembakau Sumatera Timur dibuktikan dengan dijadikannya perkebunan tembakau sebagai *Cultuurgebied ter Oostkust van Sumatra* (wilayah khusus perkebunan di Pantai Timur Sumatera) yang mendorong animo yang besar dalam pengembangan perkebunan tembakau. Dari Deli, Langkat, dan Serdang yang menjadi kawasan inti, perkebunan terus diperluas ke arah selatan, yakni kawasan Simalungun, Asahan, dan juga daerah bagian pedalaman Sumatera Timur.

Sumatera Timur mengalami suatu perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan memiliki keistimewaan dalam sejarah kolonial mana pun juga saat itu. Breman menegaskan bahwa masyarakat perkebunan yang terbentuk di Sumatera Timur memiliki sifat yang paling unik. Industri perkebunan daerah ini berkembang paling belakangan, wilayahnya terletak di zona pinggiran jajahan Belanda, tumbuh dengan cepat sebagai faktor dominan, serta keberadaan

42. *Ibid.*, hlm. 57 – 58.

43. J.S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 326.



Gambar 2.3  
**Peta Cultuurgebied ter Oostkust van Sumatra**  
**(wilayah perkebunan di Pantai Timur Sumatera)**

Sumber: KITLV

buruh dan majikan yang sifatnya sementara (kontrak).<sup>44</sup> Lebih kurang 25 tahun setelah Nienhuys pertama kali membuka perkebunan tembakau di Deli, topografi Sumatera Timur sama sekali berubah dari awalnya hutan belantara yang luas menjadi penuh dengan hamparan perkebunan tembakau dalam skala besar yang menyusuri seluruh kawasan Pantai Sumatera Timur sepanjang 200 km.<sup>45</sup>

Keberhasilan dalam menarik modal asing untuk menanamkan modal dalam pengembangan perkebunan tembakau di Sumatera Timur mulai dasawarsa keenam abad ke-19 tersebut, tidak hanya dilatarbelakangi oleh jaminan keuntungan yang besar dari harga jual

44. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 189.

45. Ann Laura Stoler, *In the Company's Shadow: Labor Control and Confrontation and Sumatra's Plantation History 1870 – 1979*, (New York: Columbia University, 1983), hlm. 29–30.



Gambar 2.4  
**Pemilik perkebunan dan *contoleur* sedang mengawasi  
perkebunan tembakau (c.a 1883 – 1888)**

Sumber: Tropenmuseum

tembakau Deli di pasar dunia, namun juga akibat kemudahan yang diberikan oleh para sultan kepada para pemodal asing untuk memperoleh hak konsesi tanah di Sumatera Timur. Selain itu, tidak adanya aturan-aturan yang mempersulit para pengusaha asing dalam berinvestasi oleh pemerintah kolonial semakin merangsang proses kapitalisasi Sumatera Timur masa itu. Harus diingat bahwa politik liberal yang dijalankan oleh Belanda mulai 1870 yang mengutamakan prinsip “tidak campur tangan” menjadi faktor utama kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Belanda bagi para investor yang akan menanamkan modal. Pesatnya aktivitas pengembangan perkebunan tembakau di Sumatera Timur ini dalam beberapa tahun

telah mampu menyaingi tembakau Jawa dari segi angka produksi.<sup>46</sup> Terlepas dari kemasyhuran tembakau Deli yang menjadi magnet bagi para pemodal asing untuk berinvestasi dalam usaha agroindustri di Sumatera Timur tidaklah berjalan tanpa hambatan. Data statistik menunjukkan bahwa selama 76 tahun (1884–1940) perkembangan perkebunan tembakau di Sumatera Timur mengalami pasang surut. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti krisis harga tembakau akibat kelebihan produksi yang menyebabkan harga tembakau turun drastis 0.72 gulden per 0.5 kg di tahun 1890 dan 0.82 gulden per 0.5 kg di tahun 1899. Resesi ekonomi dunia (*malaise*), dan naiknya popularitas tanaman karet yang berdampak pada perluasan dan penciutan usaha perkebunan tembakau seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

#### Perluasan dan Penciutan Perkebunan Tembakau di Sumatera Timur

Tahun	Jumlah Onderneming Tembakau	Keterangan
1864	1	Masa perluasan: - Nienhuys merintis onderneming. - Masa jaya tembakau yang ditandai dengan ledakan pembukaan perkebunan. - Perubahan dalam bea AS mendorong krisis tembakau tahun 1890.
1872	22	
1880	49	
1888	148	
1896	120	
1904	114	Masa penciutan: - Terjadi peralihan penanaman tembakau kepada kopi, karet, dan kelapa sawit. - Masa <i>malaise</i> 1930 – 1933 menyebabkan penutupan perkebunan-perkebunan tanah tinggi di Langkat dan Deli.
1912	97	
1920	82	
1928	72	
1931	67	
1932	61	
1934	45	
1940	45	

Sumber: Karl J. Pelzer (1985)

46. A. Daliman, *op.cit.*, hlm. 51.

Selain pembukaan perkebunan tembakau, dasawarsa keenam abad ke-19 juga ditandai dengan penanaman kopi di kawasan Sumatera Timur oleh perusahaan-perusahaan perkebunan gelombang pertama setelah Nienhuys. Ekspansi penanaman kopi ini pertama kali diupayakan di daerah Serdang tahun 1872. Penanaman kopi umumnya dilakukan di lahan-lahan yang tidak cocok untuk budidaya tembakau. Usaha penyebarluasan perkebunan kopi ini terus meningkat hingga periode krisis tembakau tahun 1891. Tahun 1900 tercatat ada 45 perkebunan kopi di Sumatera Timur, di mana 31 di antaranya terdapat di Serdang.<sup>47</sup> Namun secara perlahan jumlah perkebunan kopi di Sumatera Timur ini terus menurun akibat kalah saing dengan kopi Brazil. Selain itu, terjadinya resesi ekonomi dunia tahun 1930 ikut menambah sulitnya perkembangan perkebunan kopi di Sumatera Timur. Fluktuasi pertumbuhan dan perkembangan perkebunan kopi di Sumatera Timur tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

#### Ekspansi dan Kontraksi Perkebunan Kopi di Sumatera Timur

Tahun	Jumlah perkebunan kopi	Penjelasan
1864	1	---
1872	22	Periode ekspansi
1880	49	---
1888	148	---
1896	120	Krisis harga 1891
1904	114	---
1912	97	---
1920	82	---
1928	72	----
1931	67	Periode kontraksi
1932	61	---
1934	45	---
1940	45	---

Sumber: Thee Kian Wie (1989)

47. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 66.

Dibukanya kebebasan pada investor asing untuk mengelola dan menanamkan modalnya pada perkebunan di Hindia-Belanda tidak terlepas dari penetapan Undang-Undang Agraria 1870. Dalam teorinya Undang-Undang Agraria bertujuan untuk melindungi hak milik petani pribumi atas tanah mereka terhadap pengusaha asing. Di lain pihak undang-undang tersebut membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat pribumi bagi kepentingan usaha-usaha perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, pengusaha asing dapat menyewa (*pachten*) tanah-tanah pemerintah yang belum digarap (*woeste gronden*) oleh penduduk dengan hak *erfpacht* selama 75 tahun. Bidang tanah yang disewa ini luasnya tidak boleh lebih dari 500 bau (335 ha) dan satu orang hanya boleh menyewa satu persil<sup>48</sup>. Penyewa persil tanah yang luasnya tidak melebihi 25 bau diberikan izin sewa untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.<sup>49</sup>

Masuknya modal-modal asing ke Hindia-Belanda pada pertengahan abad ke-19 ini menandai dimulainya “politik pintu terbuka” yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian sejak 1870, gelombang industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Hindia-Belanda khususnya di Sumatera Timur yang bernilai profit sangat tinggi. Persaingan para pengusaha dalam menanamkan modal di Sumatera Timur ini terus mengalami peningkatan hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1913 ada sekitar 206 juta gulden modal yang ditanamkan dalam pertanian di Sumatera Timur. Dari seluruh jumlah tersebut Belanda hanya memiliki sekitar 109 juta gulden.

Besarnya jumlah pemodal Eropa lainnya sebagai kompetitor, menimbulkan kekhawatiran di antara pengusaha-pengusaha Belanda, terutama sejak berpindah beberapa perusahaan swasta besar (*particuliere landerijen*) yang awalnya dimiliki Belanda ke tangan Inggris dan Prancis pada 1910. Namun perang di dataran Eropa mem-

48. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu (untuk perkebunan atau perumahan).

49. A. Daliman, *op.cit.*, hlm. 45–46.

berikan Belanda cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan dengan memotong suplai modal asing. Setelah 1920an Belanda akhirnya berhasil menjadi pemilik modal terbesar di Hindia-Belanda dengan mengandalkan potensi Sumatera Selatan sebagai daerah baru yang proporsi modal yang lebih besar dari pada di Sumatera Timur.<sup>50</sup>

Perbandingan jumlah investasi di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20 dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

### Modal Pertanian (f juta) di Hindia-Belanda Tahun 1929

Kebangsaan	Wilayah		
	Jawa	Sumatera Timur	Sumatera Selatan
Belanda	1.118,0	360,7	57,2
Britania	142,0	124,7	11,2
Prancis-Belgia	35,9	72,5	3,2
Amerika	---	53,0	---
Jepang	5,9	13,7	---
Jerman	5,1	8,1	4,0
Swiss	---	4,4	0,7
Italia	2,1	---	---
Lain-lain, diketahui dan tidak	22,3	4,9	13,8
<b>Total</b>	<b>1.332,4</b>	<b>642,2</b>	<b>90,4</b>
Persentase modal asing	16,1%	44,1%	36,8%

Sumber: J.S. Furnivall (2009)

Pertumbuhan industri perkebunan di Hindia-Belanda juga dipacu oleh pembukaan Terusan Suez pada 1869 yang memiliki andil besar dalam memperpendek jarak tempuh antara Hindia-Belanda dengan pasar dunia yang terpenting di Eropa dan Amerika. Selain itu, kemajuan teknik perkapalan juga ikut mempercepat proses transportasi antara daerah produsen dengan konsumen hasil perkebunan, serta

50. J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 326.

mendorong terjadinya pembaharuan dalam bidang transportasi Hindia-Belanda.<sup>51</sup>

Pesatnya perkembangan kapitalisasi modal asing di Hindia-Belanda pada dekade pertama abad ke-20 mendorong semakin besarnya aliran emas ke negeri Belanda. Eksploitasi perkebunan di daerah-daerah luar Jawa yang kaya dengan sumber daya alam berhasil menaikkan nilai ekspor Belanda ke pasar dunia dari 74 juta gulden menjadi 305 juta gulden per tahun. Jumlah terbesar berasal dari produksi industri perkebunan tembakau Deli yang meningkat secara signifikan.<sup>52</sup> Selain tembakau pembukaan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar juga mulai diupayakan di Deli pada awal abad ke-20. Tahun 1913, fokus investasi Belanda hanya ditujukan pada penanaman tembakau, sementara Inggris memonopoli budidaya perkebunan teh. Penanaman karet umumnya diupayakan oleh perkebunan-perkebunan Amerika, sedangkan komoditas kelapa sawit dikembangkan oleh pengusaha Prancis-Belgia.<sup>53</sup>

Distribusi modal asing yang berkembang di Sumatera Timur pada awal abad ke-20 dapat diamati pada tabel 2.4 halaman berikutnya.

Eksploitasi perkebunan tembakau di daerah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang perlahan mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-19. Hal ini disebabkan sejak 1891 mulai tampak tanda-tanda adanya kelebihan produksi tembakau yang mencapai 50.000 bal per tahun. Suatu angka yang jauh melampaui jumlah produksi di tahun-tahun sebelumnya. Akibat kelebihan produksi ini terjadi suatu krisis yang mengakibatkan harga tembakau di pasar dunia jatuh lebih dari 50% dari tingkat harga terbawah di tahun sebelumnya.

Faktor penyebab dari krisis tembakau ini antara lain: *Pertama,*

51. A. Daliman, *op.cit.*, hlm. 51 – 52.

52. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 25.

53. Ann Laura Stoler, *op.cit.* hlm. 35.

Tabel 2.4  
Investasi Modal Menurut Kebangsaan di Sumatera Timur 1913 dan 1932

Kebangsaan / Tahun	Tembakau %	Karet %	Teh %	Kelapa Sawit %	Serat %	Jumlah
<b>Belanda</b>						
1913	16,7	34,3	97	-	-	29,4
1932	96,4	36,2	63,3	56,9	100	53,7
<b>Inggris</b>						
1913	-	16,1	-	-	-	10,0
1932	-	26,6	31,5	4,0	-	18,1
<b>Amerika</b>						
1913	-	15,0	-	97,0	-	10,2
1932	-	18,0	-	-	-	11,0
<b>Prancis-Belgia</b>						
1913	2,1	1,0	-	-	-	1,2
1932	3,0	12,1	-	33,8	-	12,0
<b>Swiss</b>						
1932	1,0	1,0	-	-	-	1,0
<b>Jepang</b>						
1932	-	2,6	-	2,6	-	1,7
<b>Jerman</b>						
1913	1,6	1,0	-	-	-	1,0
1932	-	1,0	1,0	3,6	-	1,6
<b>Lain-lain</b>						
1913	79,5	33,0	3,0	-	-	48
1932	-	2,0	-	-	-	1,0

Sumber: Ann Laura Stoler (1983)

kelebihan penawaran tembakau di pasar dunia akibat kenaikan produksi tembakau Deli. *Kedua*, adanya UU Tarif Bea Masuk Mc. Kinley (tarif bea masuk atas impor tembakau ke Amerika Serikat) yang sangat tinggi pada 1891. Realitas ini menunjukkan adanya perbandingan yang besar antara kelebihan produksi dengan kecilnya jumlah permintaan pasar sehingga krisis tembakau tidak dapat dihindari. Faktor lainnya adalah merosotnya mutu tembakau Deli yang tidak sebagus kualitas seperti di masa awal kapitalisasi. Kemunduran kualitas tembakau tersebut karena sifat khas yang dimiliki oleh tembakau Deli yang hanya dapat menghasilkan daun tembakau berkualitas jika

di tanam di Deli yang memiliki kombinasi iklim dan tanah yang khas yang tidak terdapat di tempat-tempat lain di Sumatera Timur.<sup>54</sup>

Krisis harga tembakau tahun 1891 berdampak langsung pada penutupan beberapa perkebunan tembakau di Sumatera Timur seperti yang telah diuraikan dalam tabel 1 di atas. Tidak kurang dari 34 perusahaan tembakau terpaksa ditutup antara tahun 1888 dan 1894.<sup>55</sup> Krisis ini juga menjadi simbol berakhirnya tahap pertama dari sejarah ekonomi Pantai Timur Sumatera yang ditandai dengan pertumbuhan pesat dari produksi tembakau hingga akhirnya melewati batas serapan pasar tembakau dunia. Para spekulan yang banyak bergiat dalam perusahaan-perusahaan tembakau selama tahap pertama ini akhirnya meninggalkan Sumatera Timur.

Fluktuasi jumlah produksi dan nilai jual tembakau Deli di masa kapitalisasi perkebunan Sumatera Timur dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.5  
Produksi Tembakau Sumatera Timur 1864 – 1900

Tahun panen	Jumlah (satuan bal)	Harga (satuan gulden)	Nilai Jual
1864	50	0.48	4.000,-
1869	1.381	1.29	250.000,-
1874	12.895	1.50	2.850.000,-
1879	57.596	1.19	10.350.000,-
1884	115.496	1.14	27.550.000,-
1889	184.322	1.46	40.600.000,-
1890	236.323	0.72	26.000.000,-
1892	144.682	1.26	26.700.000,-
1894	193.334	1.19	35.000.000,-
1899	264.100	0.82	33.300.000,-
1900	223.731	1.11	38.000.000,-

Sumber: Breman (1997)

54. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 391-392.

55. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 73.

Perkebunan-perkebunan tembakau yang tetap bertahan hanyalah perkebunan yang dipimpin oleh pengusaha-pengusaha yang benar-benar berkepentingan untuk investasi yang sehat dalam perkebunan tembakau. Perusahaan tembakau tersebut di antaranya adalah Senembah Maatschappij, Deli Batavia Maatschappij, Tabaks Maatschappij Arendburg, dan Deli Maatschappij. Pengusaha-pengusaha ini kemudian giat mengadakan rasionalisasi dalam penanaman tembakau dengan cara perbaikan metode-metode produksi dan juga mengadakan penelitian-penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memperbaiki mutu tembakau. Dalam hal ini, perhimpunan pengusaha perkebunan Deli (*Deli Planter's Vereniging*) mendirikan lembaga penelitian Deli (*Deli Proef Station*) untuk meningkatkan mutu tembakau Deli. Perbaikan dalam pemasaran tembakau juga dilakukan untuk mendorong "Tembakau Deli" dikenal kembali kualitasnya di pasar internasional.<sup>56</sup>

Komoditas ekspor yang juga diupayakan di Sumatera Timur pasca krisis tembakau adalah karet jenis *Hevea Brasiliensis* yang ternyata mempunyai prospek yang sangat baik. Penanaman karet ternyata menguntungkan sekali sehingga banyak perkebunan kopi dan tembakau kemudian dijadikan perkebunan karet. Dalam waktu singkat daerah Serdang menjelma sebagai pusat penanaman karet, layaknya Deli yang menjadi pusat penanaman tembakau. Karet menjadi komoditas andalan penggerak ekonomi Sumatera Timur setelah krisis tembakau di akhir dasawarsa 1880-an.<sup>57</sup>

Para pemilik perkebunan karet di Sumatera Timur ternyata tidak belajar dari krisis tembakau yang memukul nilai jualnya hingga titik terendah akibat kelebihan produksi. Tingginya harga karet akibat besarnya permintaan dari pasar Amerika mendorong pemilik perkebunan berlomba-lomba memperluas budidaya karet. Pada tahun

56. R.Z. Leirissa (1985), *op.cit.*, hlm. 32.

57. M.R. Fernando dan William J. O' Malley dalam Anne Booth, *op.cit.*, hlm. 259.



Gambar 2.5

**Kuli sedang menyadap karet di Batang Serangan *Onderneming* (1901)**

Sumber: Tropen Museum

1920-an perkebunan karet Sumatera Timur mengalami kelebihan produksi yang berujung pada krisis harga karet. Situasi ini terus berlanjut hingga Depresi Besar (1929-1932) yang menurunkan nilai ekspor karet Hindia-Belanda dari 587 juta gulden tahun 1925 menjadi 34 juta gulden pada 1932.<sup>58</sup>

Rincian pertumbuhan perkebunan karet di Sumatera Timur di awal abad ke-20 dapat diamati pada tabel 2.6.

Tabel di bawah memperlihatkan bahwa dalam waktu singkat (1902-1932) terjadi penambahan yang sangat besar terhadap jumlah area perkebunan yang ditanami karet. Dalam jangka waktu 30

58. *Ibid.*, hlm. 267.

Tabel 2.6  
Pertumbuhan Perkebunan Karet di Sumatera Timur

Tahun	Luas areal perkebunan (Ha)	Areal produktif
1902	176	---
1904	651	---
1906	2.078	---
1908	13.090	---
1910	29.471	---
1915	103.112	36.453
1920	150.156	101.428
1925	188.875	146.773
1930	273.094	172.905
1932	284.213	178.438
1935	---	---
1940	---	---

Sumber: Karl J. Pelzer (1985)

tahun, 284.037 hektar perkebunan karet berhasil diupayakan di Sumatera Timur mengalahkan luasnya perkebunan tembakau. Nilai jual dan permintaan karet yang lebih menjanjikan di saat lesunya industri tembakau, menjadi jalan alternatif yang dipilih oleh berbagai *onderneming* saat itu. Karet juga dijadikan sebagai komoditas pengganti kopi Sumatera Timur yang ikut merosot harga penjualannya dipenghujung 1890an.

Krisis harga tembakau tahun 1891 yang diikuti oleh karet mulai 1920an berdampak langsung pada budidaya tanaman komoditas ekspor lainnya seperti kelapa sawit, teh, dan serat manila atau *abacca* yang terus mengalami peningkatan. Pembukaan perkebunan kelapa sawit mulai diupayakan di Sumatera Timur sejak 1891 dan ternyata cukup menjanjikan. Oleh karena itu mulai 1921 penanaman kelapa sawit terus meningkat secara signifikan seperti yang tampak pada tabel 2.7.

Pengusaha Inggris dan Jerman mulai membuka perkebunan teh di kawasan pegunungan Simalungun sejak 1910 dan 1920. Pada

Tabel 2.7  
Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Timur

Tahun	Luas areal perkebunan (Ha)
1911/12	414
1913	1.309
1914	2.551
1915	3.018
1917	3.911
1918	4.972
1919	6.004
1920	8.462
1921	9.810
1922	12.188
1923	157.985
1924	18.801

Sumber: Karl J. Pelzer (1985)

periode selanjutnya perusahaan Belanda *Handels Vereniging Amsterdam* (HVA) ikut menanamkan modalnya dalam pembukaan perkebunan teh di Simalungun. Selain teh, di daerah Simalungun juga diupayakan untuk penanaman tali manila atau *abacca* dalam jumlah besar. Selanjutnya tali manila juga mulai diusahakan pada 1917 di wilayah Laras.<sup>59</sup> Pertumbuhan dan perkembangan perkebunan teh di Sumatera Timur pada awal abad ke-20 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Pada suatu usaha perkebunan, khususnya dalam skala yang besar tidak akan dapat beroperasi jika tidak dilengkapi dengan jumlah tenaga kerja yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain modal, suplai tenaga kerja juga menjadi motor penggerak dari sebuah industri khususnya tenaga kerja berbiaya murah. Para pekerja ini dibutuhkan untuk membuka lahan, membajak tanah, menabur benih, mencabut rumput-rumput liar di sekitar tanaman, memanen,

59. R.Z. Leirissa (2012), *op.cit.*, hlm. 73.

Tabel 2.8  
Pertumbuhan Perkebunan Teh di Sumatera Timur

Tahun	Luas areal perkebunan (Ha)
1915	3.237
1920	10.099
1925	12.835
1930	21.273
1935	n.a
1938	21.588
1945	n.a

Sumber: Karl J. Pelzer (1985)

dan pengemasan.

Sejak eksploitasi perkebunan tembakau di Sumatera Timur dimulai tahun 1860an oleh Nienhuys, tenaga kerja telah menjadi ancaman yang serius bagi usaha perkebunan. Langkah yang diambil Nienhuys dalam mendatangkan buruh perkebunan dari Penang dan Singapura ternyata berhasil mengatasi masalah tersebut yang kemudian juga diikuti oleh pengusaha perkebunan lainnya di Sumatera Timur. Dengan cepat gelombang kuli Cina yang sangat besar dari Semenanjung Malaya (Malaysia dan Singapura) berhasil didatangkan oleh calo-calo atau dikenal juga sebagai *broker* ke berbagai perkebunan di Sumatera Timur.<sup>60</sup>

Kesuksesan calo-calo perkebunan dalam mempopulerkan Deli sebagai “Daerah yang kaya dengan sumber uang” dan “Negeri dolar” berhasil menarik minat orang-orang dari luar untuk bekerja sebagai kuli perkebunan di Sumatera Timur. Secara harfiah, konsep kuli berasal dari kata “koeli” dalam bahasa Belanda, dan *coelie* dalam bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Cina yang artinya “tenaga kasar”. Orang Melayu menolak sistem ini karena sifatnya sebagai “kerja upahan”, sedangkan orang Batak yang masih berpola

60. Ann Laura Stoler, *op.cit.* hlm. 45.



Gambar 2.6

**Kuli Cina di perkebunan Sumatera Timur (c.a 1905 – 1915)**

Sumber: KITLV

kegotongroyongan dan menjunjung tinggi prinsip komunal menganggap sistem ini tak layak dan bertentangan dengan adat istiadat mereka. Kuli Cina lebih disukai karena keterampilan dan ketekunannya, sementara itu kuli Jawa lebih penurut. Kuli Jawa biasanya datang bersama keluarga yang bisa dimanfaatkan oleh tuan kebun sebagai tenaga tambahan pada musim sibuk.<sup>61</sup>

Sistem calo dalam mendatangkan tenaga kerja ke Sumatera Timur di tahap awal kapitalisasi banyak menimbulkan masalah dan penyelewengan dari para *broker* atau disebut juga dengan *werver*. Untuk mendapatkan tenaga kerja dalam jumlah besar *broker* atau *werver* tidak jarang memberikan janji palsu kepada calon kuli perkebunan yang sangat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya di Sumatera Timur seperti pembayaran dalam upah yang tinggi.

61. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 95-98.



Gambar 2.7

**Perempuan Jawa berbagai usia di gudang fermentasi tembakau**

Sumber: Tropenmuseum

Bahkan yang paling ekstrim, para calo ini berani untuk melakukan penculikan demi mendapatkan calon buruh yang akan mereka kirim ke perkebunan. Usaha penculikan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang terjadi di Malaka, di mana kuli-kuli Cina akan diundang untuk menonton pertunjukan kesenian dan di tengah pertunjukan orang-orang bersenjata akan menyergap dan mengapalkan mereka ke Deli.<sup>62</sup>

Selain itu, para calo biasanya menuntut komisi yang sangat tinggi atas keberhasilan mereka mendatangkan tenaga buruh ke Su-

62. *Ibid.*, hlm. 142.

63. Meskipun pembiayaan buruh Sumatera Timur lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa, hal ini tidak mengurangi besarnya keuntungan dari bisnis perkebunan di Sumatera Timur di abad ke-19 hingga awal abad ke-20. *Ibid.*, hlm. 141–

matera Timur.<sup>63</sup> Para calo dari Penang biasanya akan meminta imbalan sebesar 40–50 dolar Straits Settlements kepada agen perkebunan di Deli untuk setiap kuli yang mereka bawa.<sup>64</sup> Berbagai permasalahan tersebut kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk menetapkan “*Koeli Ordonantie*” mulai 1880 yang bertujuan untuk mengatur sistem penyediaan tenaga buruh di perkebunan Pantai Timur Sumatera.

*Koeli ordonantie* mengharuskan pengusaha perkebunan di Sumatera Timur untuk mempekerjakan buruh yang telah didaftarkan petugas. Di dalam ordonansi ini termuat pasal-pasal yang mengatur hak serta kewajiban dari majikan dan buruh. Selain itu, ordonansi ini juga memberikan wewenang kepada pengusaha perkebunan untuk memberikan hukuman apabila buruh dengan sengaja melanggar kontrak kerja seperti melarikan diri sebelum masa kontrak habis, malas bekerja, menghina, memberontak dan mengancam pengawas, berkelahi, mabuk-mabukan, serta melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap mengganggu ketertiban di lingkungan *onderneming*.<sup>65</sup>

Kontrak akan mengikat antara tuan perkebunan dan kuli secara sah dan biasanya tidak boleh diakhiri oleh para buruh. Hak untuk mengakhiri kontrak hanya dimiliki oleh pemilik *onderneming* yang populer dengan sebutan “tuan kebon”. Hukuman yang diterima oleh buruh yang melanggar kontrak kerja ini dikenal sebagai *poe-*

*Pemilik perkebunan di Sumatera Timur memiliki otonomi yang begitu luas dalam perkebunan mereka diibaratkan seperti negara dalam negara yang sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah kolonial Belanda*

142.

64. Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 208.

65. *Ibid*, hlm. 42–43.

*nalie sanctie* (sanksi pidana). Tidak adanya kontrol dari pemerintah dalam kontrak, memberikan peluang kepada majikan untuk menjalankan *poenalie sanctie* dengan sewenang-wenang dan di luar batas kemanusiaan.

*Poenalie sanctie* membuat ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa ke perkebunan dengan cara apapun termasuk kekerasan jika kuli mengadakan perlawanan. Hukuman lain yang dimuat dalam *poenalie sanctie* berupa kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa pembayaran atau perpanjangan masa kerja yang melebihi ketentuan kontrak kerja. Hukuman yang lebih kejam tidak jarang diberlakukan oleh tuan kebun pada kuli mereka seperti hukum cambuk, dipukul hingga dibunuh.<sup>66</sup>

Breman menyebutkan bahwa Nienhuys pernah menghukum cambuk 7 orang kuli hingga meninggal. Tindakan Nienhuys ini akhirnya memaksanya harus keluar dari Sumatera Timur. Hukuman lain diterima oleh dua orang kuli perempuan yang berhasil ditangkap setelah melarikan diri dari perkebunan. Tanpa pakaian mereka berdua diarak mengelilingi barak kuli laki-laki sambil dipukuli dengan tongkat. Satu orang gantung diri karena malu atas perlakuan yang dia terima. Satu orang lagi dicambuk sampai mati dan digantung di pohon kopi yang tumbuh di depan rumah administrator.<sup>67</sup> Hukuman-hukuman yang sangat kejam tersebut menunjukkan bahwa pemilik pekebunan di Sumatera Timur memiliki otonomi yang begitu luas dalam perkebunan mereka diibaratkan seperti negara dalam negara yang sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah kolonial Belanda.

Selain memberikan sanksi kepada buruh yang melanggar kontrak, *koeli ordonantie* juga memuat pasal-pasal yang melindungi para pekerja dari tindakan sewenang-wenang dari sang majikan.

66. Ann Laura Stoler, *op.cit.* hlm. 45.

67. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 237.

Berdasarkan kontrak yang diatur oleh ordonansi ini setiap buruh berhak untuk mendapatkan upah secara teratur, makanan, fasilitas perumahan, rumah sakit dan pengobatan, serta pengangkutan kembali ke daerah asal mereka secara bebas. Sistem perburuhan berdasarkan *koeli ordonantie* ini kemudian dikenal dengan istilah kuli kontrak.<sup>68</sup> Ordonansi kuli terbukti tidak hanya membantu pengusaha perkebunan dalam memecahkan masalah kurangnya jumlah tenaga kerja perkebunan, tetapi juga memberikan akses yang sangat luas dalam mendapatkan tenaga kerja berbiaya murah. Leirissa menegaskan bahwa sistem kuli kontrak di Sumatera Timur tidak jauh berbeda dengan sistem kerja paksa.

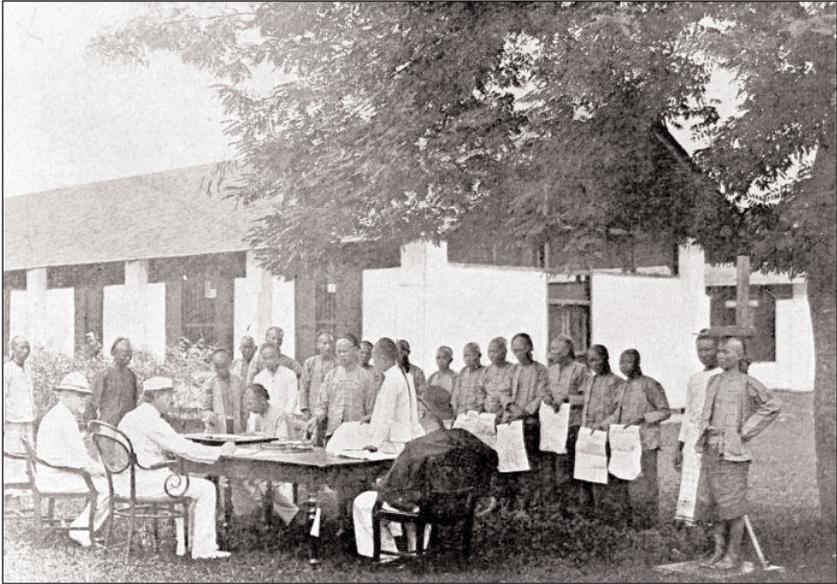
Keberadaan *Koeli Ordonantie* di atas tentu saja menjadi solusi yang paling logis bagi pengusaha perkebunan Sumatera Timur untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan para kuli untuk dapat bekerja selama beberapa tahun. Di lain pihak, para pekerja tentu saja berhak atas perlindungan yang memadai karena mereka pergi ke suatu tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Mereka berhak atas keadaan kerja dan lingkungan hidup yang layak, serta berhak atas jaminan bahwa mereka tidak akan dikeluarkan begitu saja dari perkebunan.

*Koelie Ordonantie* 1880 kemudian diikuti oleh *ordonantie-ordonantie* dari tahun 1884 dan 1893 yang memberi jaminan hak pengawasan hukum pada para majikan atas kuli-kuli kontrak mereka. Berbagai regulasi dan ordonansi kuli di Sumatera Timur sama sekali tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan para buruh, bahkan yang terjadi malah sebaliknya semakin memperluas eksploitasi tuan kebun dengan atas kuli-kuli mereka.

Selain *poenale sanctie*, pengusaha-pengusaha perkebunan juga mempunyai cara lain untuk mengikat para kuli dengan mengizinkan praktek pelacuran, membolehkan kuli berjudi, serta memakai madat. Pada hari pembayaran gaji pemilik perkebunan biasanya akan men-

68. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 395.

adakan berbagai acara seperti pasar malam yang diisi oleh praktek perjudian, pelacuran, dan transaksi jual beli madat. Tipu muslihat melalui pasar malam ini ternyata sangat efektif, karena para kuli sering terjerat hutang yang begitu besar jika kalah berjudi dan membeli candu. Kuli yang kehabisan uang akan dengan mudah menandatangani kontrak kerja baru dengan majikan-majikan mereka untuk



Gambar 2.8

**Kuli Cina sedang mengurus kontrak dengan pihak *onderneming***

Sumber: <http://tembakaudeli.blogspot> (diakses 31 Juli 2016)

memperpanjang masa kerja.<sup>69</sup>

Strategi lainnya ditempuh oleh para pengusaha perkebunan Sumatera Timur yang tergabung dalam perhimpunan pengusaha perkebunan Deli (*Deli Planters Vereniging* atau DPV) yang dibentuk pada 1879 untuk mendapatkan tenaga buruh dalam jumlah yang besar

69. *Ibid.*, hlm. 394–395.

dan murah melalui pendirian biro imigrasi (*Immigratie Bureau*) pada 1888. Pembentukan biro imigrasi bertujuan untuk mengurus secara langsung seleksi calon pekerja dan juga pengangkutan pekerja yang lolos seleksi dari negeri Cina ke Sumatera Timur. Selain itu, biro imigrasi ini juga bertanggung jawab dalam hal alokasi (pembagian) kuli yang baru tiba di perkebunan yang tersebar di berbagai daerah Sumatera Timur. Biro imigrasi ini juga memberikan pertolongan transfer simpanan dari kuli kepada keluarga mereka di negeri Cina. Pihak biro imigrasi sangat menganjurkan para kuli untuk memiliki transfer simpanan sebagai sumber penghasilan tambahan mereka. Sistem kontrak yang ditawarkan oleh biro imigrasi perburuhan Sumatera Timur dalam waktu singkat berhasil merekrut pekerja-pekerja Cina dalam jumlah yang besar dan terus bertambah secara signifikan. Pada 1888 terdapat sekitar 1.152 pekerja didatangkan dari Cina. Setahun kemudian angka ini sudah meningkat hampir lima sampai enam kali lipat menjadi 5.167 dan 6.666 orang dalam tahun 1890.<sup>70</sup>

Mulai 1890 kekurangan tenaga buruh pada perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur terpenuhi oleh kedatangan kuli-kuli dari Pulau Jawa.<sup>71</sup> Rombongan pekerja dari Jawa ini jumlahnya terus meningkat dengan cepat setiap tahunnya. Gelombang pertama kuli Jawa tahun 1884 hanya berjumlah 1.771 orang. Tahun 1900 dan 1920, terjadi ledakan kedatangan kuli Jawa ke Sumatera Timur yang jumlahnya mencapai 25.224 (1900) dan 212.400 selama 1920. Kuli perkebunan dari Jawa pada periode ini tidak lagi datang sendirian, tetapi juga membawa serta istri dan anak mereka sehingga membentuk semacam kelompok sosial yang terikat oleh segala jenis perlakuan dari tuan perkebunan kepada kulinya.

Besarnya jumlah kuli Jawa yang berdatangan ke Sumatera Timur berdampak pada penurunan jumlah kuli dari Cina secara signifikan. Tahun 1900 jumlah kuli Cina ada sekitar 58.516 orang dan tahun

70. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 393–394.

71. R.Z. Leirissa (2012), *op.cit.*, hlm. 71.

1929 jumlah kuli Cina perkebunan yang tersisa hanya berjumlah 26.800 orang. Selain kuli Cina dan Jawa, kelompok kuli dari India dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) lainnya juga ikut meramaikan pasar tenaga kerja di industri perkebunan Sumatera Timur seperti yang tercatat dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

### Komposisi Buruh Perkebunan di Sumatera Timur

Tahun	Cina	Jawa	Timur Asing
1884	21.136	1.771	1.528
1900	58.516	25.224	2.460
1916	43.689	25.224	n.a
1920	23.900	212.400	2.000
1925	26.800	168.400	1.500
1929	25.938	239.281	1.019

Sumber: Thee Kian Wie (1989)

Dalam sistem pemberian upah, kuli perkebunan akan menerima upah dalam bentuk upah borongan atau per potong. Upah harian dan upah bulanan pada dasarnya adalah jumlah beban kerja sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kuli Cina di perkebunan tembakau antara lain: menyiapkan ladang, menanam, merawat, dan memanen tembakau. Semua pekerjaan tersebut dibayar secara borongan sebagai pengganti upah bulanan. Pemberian upah tersebut biasanya dilakukan tanggal 1 dan tanggal 15 atau 16 setiap bulannya.

Sistem pembayaran borongan juga berlaku untuk tahapan pengerjaan daun tembakau yang telah dipanen, seperti mengeringkan, memberi ragi, serta menyortir sesuai jenis dan kualitas. Sistem upah borongan ini dilakukan oleh tuan kebun dengan tujuan agar kuli dapat bekerja maksimal baik dari segi beban kerja maupun target waktu. Aturan ini secara langsung memaksa para kuli untuk bekerja jauh lebih lama melebihi sepuluh jam yang ditetapkan dalam kontrak demi mencapai target yang telah ditetapkan oleh tuan kebun. Sistem

kerja borongan dengan pengawasan yang keras dan disiplin menjadi ciri khas para kuli perkebunan tembakau di Sumatera Timur pada masa kapitalisme awal.<sup>72</sup>

Selain gaji pokok, para kuli Cina biasanya akan mendapatkan upah tambahan sebesar 2.50 gulden per bulan untuk beberapa kerja tambahan, seperti menyetorkan bibit pohon tembakau, menyisihkan dan mengikat daun tembakau di gudang pengeringan, memisahkan tembakau halus ditempat fermentasi, dan membuat jalan serta parit di sekitar tanaman. Selain itu, mereka juga menerima uang muka 2 dollar sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Pada akhir musim tanam (satu kali musim tanam = 8 bulan) kuli-kuli Cina mampu mengumpulkan 50 sampai 60 dolar.<sup>73</sup>

Sementara itu, upah bulanan yang diterima oleh kuli Jawa jauh lebih rendah dibandingkan kuli Cina, yaitu sekitar 7 dolar untuk pria dan 4 ½ dolar untuk buruh perempuan. Dengan upah sekecil itu kuli Jawa memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat kurang dibandingkan dengan kuli Cina yang hidup sangat pas-pasan. Selain harga bahan pokok yang mahal dan gaji yang tidak mencukupi, kemelaratan hidup kuli juga disebabkan oleh tingginya harga kebutuhan pokok di Deli yang tidak sesuai dengan besarnya gaji yang diterima. Praktek penipuan terhadap kuli juga terjadi dalam hal upah dari tuan kebun kepada mandor yang berbeda dengan upah yang diberikan kepada kuli (mandor juga mengambil keuntungan dengan memotong upah kuli).<sup>74</sup>

Di dalam kontrak kuli perkebunan diharuskan bekerja minimal sepuluh jam per hari. Pukul 05.00 pagi setelah gong dibunyikan para kuli harus berkumpul untuk mengadakan apel pagi. Setelah itu secara berombongan pergi menuju ladang yang telah ditetapkan untuk masing-masing kuli. Istirahat hanya bisa dinikmati dari pukul

72. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 110 – 116.

73. *Ibid.*, hlm. 112.

74. *Ibid.*, hlm. 120.

11.00 hingga pukul 13.00 siang. Setelah istirahat mereka akan melanjutkan pekerjaan hingga sore harinya, yakni 17.30 sampai 18.00. Dalam praktiknya para kuli ini harus bekerja lebih dari waktu yang disepakati dalam kontrak, terutama jika memasuki masa panen. Tidak jarang para kuli ini harus bekerja hingga malam hari. Kuli-kuli Cina biasanya sering bertahan di ladang hingga malam hari dengan diterangi cahaya bulan atau lampu minyak.<sup>75</sup> Kerajinan para kuli Cina inilah yang menjadikan tenaga mereka sangat diandalkan oleh pemilik perkebunan.



Gambar 2.9

**Kuli Cina sedang menyortir daun tembakau**

Sumber: <http://tembakaudeli.blogspot> (diakses 31 Juli 2016)

Di perkebunan tembakau para pengusaha yang tergabung dalam DPV akan memberikan upah sebesar delapan dolar untuk satu

75. *Ibid.*, hlm. 103.

batang pohon tembakau kepada masing-masing kuli. Tidak stabilnya harga tembakau dan karet akibat krisis dan persaingan di pasar dunia di awal abad ke-20 juga berdampak pada pengurangan upah kuli oleh para pemilik perkebunan.<sup>76</sup>

Pengaturan dan penguasaan para kuli di perkebunan, khususnya kuli kontrak dari Jawa dengan cara kekerasan melalui pembentukan jaringan polisi perkebunan ternyata tidak berjalan efektif. Jumlah personil polisi perkebunan yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kuli menyebabkan banyak kuli yang berhasil melarikan diri dari perkebunan. Untuk itu, tuan kebun melakukan strategi jerat utang, yaitu membebaskan kuli untuk bermain judi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Para pengusaha perkebunan biasanya akan mengadakan pasar malam di hari kuli menerima upah. Di pasar malam tersebut akan diadakan berbagai pertunjukan seni dan perjudian. Jika kuli kehabisan uang dalam berjudi tuan kebun dengan senang hati akan meminjamkan uang melalui jaringan lintah darat (*woeker*) yang dia ciptakan. Strategi ini terbukti sukses dalam mengikat para kuli untuk tetap bekerja di perkebunan.<sup>77</sup>

Berbagai penipuan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kuli perkebunan di Sumatera Timur pada akhirnya memicu timbulnya protes di Parlemen Belanda. Tahun 1902 sebuah pamflet berjudul *De Millioenen van Deli* (Jutaan dari Deli) yang dikarang oleh J. Van Den Brand, seorang pengacara Belanda dipublikasikan kepada publik Belanda. Dalam pamflet ini tergambar dengan jelas bagaimana buruknya lingkungan kerja serta perlakuan yang diterima oleh kaum buruh di Sumatera Timur yang tidak jauh berbeda dengan praktik perbudakan.

Tindakan Van De Brand tersebut tentu saja menimbulkan kemarahan besar di kalangan masyarakat Belanda yang kemudian memaksa pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha perbaikan

76. *Ibid.*, hlm. 111.

77. *Ibid.*, 114-115.

lingkungan dan juga sistem kerja para kuli perkebunan di Sumatera Timur. Menjelang dasawarsa kedua abad ke-20 beberapa perbaikan dalam peraturan perburuhan diperkenalkan. Sebagai permulaan langkah perbaikan bagi buruh ini menyangkut tiga hal, yaitu: *pertama*, Definisi dan regulasi yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban buruh dan majikan. *Kedua*, Inspeksi dan pengawasan keadaan buruh. Dan *ketiga*, menggantikan sistem kerja kontrak dengan sistem kerja bebas.<sup>78</sup>

Diberikannya kebebasan kepada buruh untuk lepas dari ikatan kontrak di penghujung 1890an menciptakan dua klasifikasi buruh perkebunan yang ada di Sumatera Timur, yakni buruh bebas dan buruh kontrak. Dalam realisasinya sangat sedikit sekali jumlah kuli yang mendapat hak kemerdekaan dari tuan kebun. Pemilik *onderneming* merasa sangat dirugikan dengan aturan ini dan menggunakan berbagai cara agar kuli-kuli mereka tetap terikat dalam kontrak. DPV bahkan melarang para anggotanya untuk mempekerjakan kuli yang tidak terikat dengan kontrak. Tekanan dari persekutuan pengusaha tembakau Deli ini tentu saja sangat menyulitkan para kuli yang akhirnya memutuskan untuk kembali terikat dengan kontrak dari pada menjadi kuli bebas.

Meskipun demikian, usaha memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh ini tidak seluruhnya berhasil. Kerja merdeka berarti keharusan membayar pajak bagi kesultanan di Sumatera Timur. Berbeda dengan kuli kontrak yang tidak diwajibkan membayar pajak. Faktor inilah yang kemudian mendorong para kuli Cina maupun Jawa lebih banyak memilih memperpanjang kontraknya dengan pemilik perkebunan dari pada hidup merdeka. Hingga dekade ketiga abad ke-20, jumlah buruh kontrak di Sumatera Timur masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan buruh bebas seperti yang tampak pada tabel 2.10.

Usaha perbaikan yang diperjuangkan golongan humanis tidak

78. *Ibid.*, hlm. 377.

Tabel 2.10  
Kuli Perkebunan di Provinsi-Provinsi Luar (1931)

	Cina	Jawa	Lain-lain	Total
Buruh Kontrak	30.426	172.181	759	203.366
Buruh Bebas	13.990	133.848	8.429	156.267
<b>Total</b>	<b>44.416</b>	<b>306.029</b>	<b>9.118</b>	<b>359.633</b>

Sumber: J.S. Furnivall (2009)

hanya menyangkut kontrak kuli dengan perkebunan tetapi juga tingkat upah gaji minimum. Pada akhir abad ke-19 upah buruh minimum ditetapkan 42 sen untuk laki-laki dan 37 sen untuk perempuan, dan pada 1930 perkebunan tembakau membayar 57.5 sen untuk laki-laki dan 44 sen untuk perempuan. Nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang didapatkan oleh buruh pabrik gula di Jawa yang hanya dibayar sebesar 46 sen untuk laki-laki dan 37 sen untuk perempuan.

Sering kali kuli perkebunan ditipu upahnya dengan praktik curang di kedai-kedai yang ada di dalam perkebunan dengan dalih demi kepentingan kuli. Praktik kedai perkebunan yang hanya merugikan para kuli ini juga menjadi tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk segera dibenahi. Selain melakukan perbaikan dalam sistem kontrak dan upah, pemerintah kolonial juga mengangkat inspektur pertama di Pantai Timur Sumatera yang disertai tanggung jawab dalam pengawasan perekrutan dan pelaksanaan Ordonansi Kuli yang diyakini lebih pro-buruh mulai 1908.<sup>79</sup>

Kontroversi nasib buruh di Sumatera Timur terus mengemuka hingga dekade ketiga abad ke-20. Munculnya gugatan akan perbaikan nasib kuli dan penghapusan *poenalie sanctie* yang dianggap melanggar hak azazi manusia mendorong gugatan dari ILO (*International Labour Organization*) yang mempersoalkan sistem perburuhan di Sumatera Timur. Undang-Undang Tarif di Amerika Serikat

79. J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 377.

tahun 1930 yang melarang impor hasil perkebunan yang menggunakan tenaga kontrak akhirnya berhasil menghapus *poenalie sanctie*. Akhirnya tahun 1931 dan 1936 pemerintah kolonial Belanda menetapkan berlakunya undang-undang penghapusan sistem kuli kontrak secara bertahap di Sumatera Timur.<sup>80</sup>

Kapitalisasi modal asing dengan singkat berhasil mengubah Sumatera Timur menjadi kawasan yang paling produktif dan paling awal mengenal penanaman modal asing untuk wilayah luar Pulau Jawa. Selain jenis tanah yang sangat potensial untuk industri perkebunan, daerah Sumatera Timur ternyata juga kaya dengan berbagai mineral tambang dalam jumlah yang besar, salah satunya adalah minyak bumi.

Krisis tembakau yang terjadi pada 1891 dan penemuan sumber minyak bumi di Langkat pada awal abad ke-20 yang lebih bernilai jual tinggi, dijadikan sebagai pemasukan alternatif Kesultanan Langkat ditengah lesunya perdagangan tembakau.<sup>81</sup> Kandungan minyak bumi di daerah Langkat pertama kali diketahui tahun 1860-an oleh A.J. Zijlker.

Percobaan pengeboran minyak bumi pertama dilakukan setelah Zijlker mendapat persetujuan dari Pangeran Langkat untuk konsesi lahan eksplorasi tahun 1883. Meskipun proses pengeboran ini menghadapi berbagai kendala dalam hal tenaga kerja, keuntungan, medan, iklim, serta kebakaran sumur, kandungan minyak bumi jumlah yang besar akhirnya berhasil didapatkan pada 1888.

Pada 1890, Zijlker mendirikan *Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum-bronnen in Nederland-sch-Indie* (Perusahaan Kerajaan Belanda bagi Eksploitasi Sumber-sumber Minyak Bumi di Hindia-Belanda) atau lebih dikenal dengan sebutan 'de Koninklijke'. Mulai 1892 produksi minyak de Koninklijke dalam jumlah yang besar diupayakan di Langkat. Eksplorasi ini terus

80. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 31.

81. R.Z. Leirissa (2012), *op.cit.*, hlm. 72.

berlanjut hingga dekade awal abad ke-20. Pada 1900 de Koninklijke telah mampu mengeksplor minyak bumi Langkat ke kawasan-kawasan Asia lainnya mulai dari pelabuhan-pelabuhan Cina di timur sampai pelabuhan-pelabuhan India di barat.<sup>82</sup>

Perusahaan perminyakan pertama di Hindia-Belanda adalah *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (Perusahaan Perminyakan Dordt) yang dibentuk oleh Andriaan Stoop di Surabaya tahun 1887. Setelah itu, sejumlah perusahaan serupa juga didirikan di Hindia-Belanda yang menandai maraknya eksplorasi minyak bumi dan bahan tambang di negeri jajahan. Pemerintah kolonial dan elite tradisional mengeluarkan perizinan atau konsesi-konsesi atas pengusahaan sumber daya mineral itu di daerah-daerah yang berada di bawah wewenangnya, termasuk di Sumatera Timur. Pada tahun 1890 perusahaan *Koninklijke Nederlandsch Indie Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indie*, atau dalam bahasa Inggris disebut *Royal Dutch*—yang lebih dikenal dengan sebutan *de Koninklijke*, mulai menggarap ladang minyak Telaga Said yang berada di daerah Kesultanan Langkat dengan modal 1.3 juta gulden.<sup>83</sup>

Ladang minyak eksplorasi de Koninklijke di Sumatera Utara selanjutnya dialihkan ke Pangkalan Brandan dan pelabuhan Pangkalan Susu. Pada 1914 pengilangan di Pangkalan Brandan mampu menyerap sekitar 3.000 buruh tambang yang berasal dari Cina, Jawa, dan juga 125 pengawas berkebangsaan Eropa. Tahun 1929 jumlah pekerja tambang di Pangkalan Brandan terus bertambah hingga 8.200 orang dan 350 pengawas Eropa. Selain itu, di ladang pengeboran juga terdapat 1.500 buruh yang berasal dari masyarakat setempat.<sup>84</sup>

Menjelang abad ke-20, de Koninklijke mengangkut minyak hasil pengeboran dengan kapal-kapal tanker. Sistem pengangkutan ini

82. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 229.

83. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 197.

84. *Ibid.*



Gambar 2.10

**Aktivitas pengeboran minyak di Telaga Said 1890**

Sumber: Tropenmuseum

mengharuskan perusahaan untuk membangun jaringan fasilitas tanker bagi pasar dalam negeri, yaitu kawasan di sekitar Selat Malaka dan Pantai Timur Sumatera. Jaringan pelayaran tersebut dalam waktu singkat ikut melibatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Cina. Kemajuan dalam jalur transportasi laut ini mendorong peningkatan nilai ekspor minyak mentah. Krisis sesaat dalam mengolah minyak mentah segera tertutup dengan pembukaan ladang minyak di Aceh. Setelah itu de Koninklijke semakin berkembang menjadi perusahaan multinasional.<sup>85</sup>

Serupa dengan perkebunan tembakau yang menjanjikan keuntungan yang besar, eksplorasi minyak bumi di Hindia-Belanda juga menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Persaingan antara berbagai perusahaan asing pun terjadi dalam aktivitas penambangan

85. *Ibid.*, hlm. 198.

minyak. Perusahaan yang bersaing dalam bisnis eksplorasi minyak bumi di Hindia-Belanda ini antara lain: *Shell Trading and Transport Company* (Perusahaan Perdagangan dan Pengangkutan Shell), *South Perlak Oil Company* (Perusahaan Minyak Perlak Selatan), *Tarakan Mining* (Pertambangan Tarakan), *Standar Oil* (milik Amerika), *Muara Enim Oil Company* (Perusahaan Minyak Muara Enim), dan de Koninklijke.

Persaingan sengit timbul antara de Koninklijke dan Shell dalam memperebutkan ladang minyak di daerah muara Sungai Mahakam di Kalimantan yang kemudian menghasilkan "Persetujuan Borneo" tahun 1902. Kesepakatan ini antara lain mengatur kemungkinan pengolahan minyak mentah hasil pengeboran de Koninklijke ke kilang minyak Shell di Balikpapan. Sebelumnya minyak mentah konsesi de Koninklijke dikapalkan ke Pangkalan Berandan di Sumatera Utara.<sup>86</sup>

Pada 1907 de Koninklijke dan Shell membentuk perusahaan gabungan (*merger company*), yaitu BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*) atau Perusahaan Perminyakan Batavia. BPM merupakan perusahaan pengolahan perminyakan yang memiliki modal 80 juta gulden, termasuk kilang dan pabrik penyulingan. BPM berhasil memonopoli seluruh produksi dan ekspor perminyakan di Hindia-Belanda dengan mengambil alih Dordtsche Petroleum pada 1911.

BPM adalah satu-satunya perusahaan perminyakan yang beroperasi di kepulauan Indonesia yang memiliki 44 konsesi, yaitu 19 di Sumatera, 18 di Jawa, dan 7 di Kalimantan. Keseluruhan produksi BPM pada tahun 1911 adalah 1.700.000 metrik ton yang terdiri atas 22% produksi Sumatera Utara, 10% dari Jawa Timur, dan 34% asal Kalimantan, dan Pulau Tarakan sebesar 4%. Pada masa itu jumlah tersebut adalah 3.7% dari produksi perminyakan dunia. Kerjasama Shell dan de Koninklijke menjadikan perusahaan eksplorasi minyak

86. *Ibid.*

bumi ini tampil sebagai perusahaan penghasil perminyakan tunggal di Hindia-Belanda sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama.<sup>87</sup>

Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksplorasi minyak bumi di Hindia-Belanda, wilayah Sumatera Timur, Langkat dan juga Pangkalan Brandan ikut mengalami perkembangan. Selain berfungsi sebagai pangkalan utama BPM, Pangkalan Brandan juga dijadikan pusat pengumpulan dan pengilangan minyak di Pantai Sumatera Timur sejak 1900. Dengan bantuan pipa-pipa khusus, hasil penambangan minyak di Aceh Timur yang diupayakan oleh BPM berhasil dikapalkan ke seluruh dunia melalui pelabuhan Pangkalan Brandan.<sup>88</sup>



Gambar 2.11

**Kilang minyak Pangkalan Brandan 1916**

Sumber: Tropenmuseum

87. *Ibid.*, hlm. 199.

88. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 44; 242.

Krisis ekonomi *malaise* yang terjadi pada 1930 tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan industri minyak bumi di Sumatera Timur. Industri yang padat modal dalam proses eksploitasinya ini baik dalam penemuan sumber pengeboran, penyulingan, dan pendistribusiannya sepenuhnya dikuasai oleh modal raksasa asing dan pemerintah kolonial. Kendala keuangan akibat krisis 1930-an memaksa pemberlakuan pengurangan tenaga kerja. Menjelang 1933, tidak lebih dari 3.300 pekerja seluruhnya ada di pengeboran BPM Sumatera Timur.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tergambar bahwa besarnya aliran modal asing yang tertarik dengan sumber-sumber ekonomi Sumatera Timur berupa tanah yang subur dan mineral tambang seperti minyak bumi di Langkat, ditambah lagi penanaman kembali hasil keuntungan pengusaha perkebunan ke dalam sektor industri lainnya, sukses menginternasionalisasikan ekonomi Sumatera Timur melalui jaringan ekspor-impor komoditas yang laku di pasar dunia. Kapitalisasi perkebunan dan eksplorasi minyak bumi membuka seluas-luasnya sektor ekonomi Sumatera Timur untuk dimasuki pemodal-pemodal asing dari seluruh penjuru dunia.

Kapitalisasi juga menjadi magnet bagi para pekerja dari luar Sumatera Timur untuk ikut mengambil keuntungan dari pembukaan perkebunan dan penambangan minyak bumi. Kegairahan ekonomi ini menyebabkan Sumatera Timur di penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mengalami pembangunan ekonomi yang maju pesat, disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi yang paling baik dibandingkan dengan daerah mana pun di seluruh Sumatera saat itu.<sup>90</sup> Sumatera Timur, "Negeri dolar dari Hindia" berhasil menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa dengan potensi ekonomi yang paling strategis dan terhitung sebagai penyumbang terbesar bagi pundi-pundi keuangan pemerintah kolonial di Hindia-Belanda.

89. *Ibid.*, hlm. 261-262.

90. Karl. J. Pelzer, *op.cit.*, hlm. 89.

## Munculnya Institusi Bank Swasta

Pembukaan industri perkebunan oleh para investor asing juga ikut berpengaruh pada perkembangan dunia moneter dan perbankan di Sumatera Timur. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa “Era kapitalisasi” perkebunan menandai terbukanya Sumatera Timur untuk dimasuki oleh jaringan ekonomi dan perdagangan internasional. Kemasyhuran tembakau Deli di bursa pasar tembakau dunia menjadi magnet utama yang berhasil menarik jutaan dolar modal asing untuk masuk ke Sumatera Timur. Dalam beberapa dekade, ratusan pengusaha perkebunan asal Eropa dan Amerika tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Hutan belantara yang menyelimuti kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera dengan Deli sebagai pusatnya berubah menjadi hamparan perkebunan tembakau yang diupayakan secara massal. Sibuknya aktivitas ekspor-impor berbagai komoditas tanaman ekspor dari dan ke Sumatera Timur juga menjadi ciri utama berlangsungnya kapitalisasi ekonomi di daerah ini yang terus tumbuh dan berkembang secara signifikan hingga berakhirnya periode kolonial Belanda.

Industri perkebunan dan eksplorasi minyak bumi yang padat modal sangat membutuhkan kehadiran institusi bank dalam menjaga kelancaran lalu lintas uang dan modal. Kebutuhan inilah yang kemudian menjadi penarik utama hadirnya berbagai institusi bank-bank swasta di Sumatera Timur sejak 1880an. Pembukaan berbagai institusi bank di daerah-daerah pusat perkebunan dan juga pusat pemerintahan ini pada dasarnya bertujuan untuk melayani berbagai aktivitas keuangan dan perbankan yang dibutuhkan oleh para pengusaha dan masyarakat di Sumatera Timur.

Di samping kehadiran bank-bank Eropa yang memiliki jaringan keuangan yang mapan dalam skala internasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Timur juga memicu pendirian bank swasta lokal yang memiliki aktivitas perbankan lebih kecil dan bersifat. Di masa krisis bank-bank lokal ini sangat rentan terkena dampak resesi eko-

nomi di tahun 1930an. Dalam kompetisi untuk menarik para pengusaha perkebunan, pihak bank ini biasanya dengan mudah akan memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha-pengusaha perkebunan tanpa jaminan yang kuat.<sup>91</sup> Kemunculan bank-bank swasta Eropa dan bank-bank lokal ini menjadi bukti bahwa Sumatera Timur memiliki posisi yang sangat penting dalam jaringan ekonomi nasional dan internasional.

Namun hal yang paling penting dari kehadiran bank-bank swasta ini di Sumatera Timur adalah besarnya peran dan kekuasaan yang dimainkan oleh bank-bank swasta yang jauh melebihi otoritas politik pemerintah kolonial dalam mengendalikan sirkulasi mata uang dolar dan gulden di Sumatera Timur. Gempuran kehadiran bank-bank swasta ini memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah kolonial Belanda dengan mata uang guldenya untuk melawan dominasi penggunaan dolar di Sumatera Timur. Meskipun kedudukan Belanda sebagai penguasa utama yang mengatur kendali ekonomi serta berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan industri perkebunan, Belanda gagal dalam menempatkan gulden sebagai alat pembayaran utama di Sumatera Timur. Sebelum dasawarsa pertama abad ke-20, otoritas Belanda sebagai penguasa di Sumatera Timur sama sekali tidak mampu melawan dominasi kekuasaan asing dalam hal kebijakan moneter dan sirkulasi mata uang. Faktor inilah yang kemudian menempatkan pertumbuhan ekonomi dan moneter di Sumatera Timur pada abad ke-19 hingga abad ke-20, memiliki karakter yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Hindia-Belanda.

Bank swasta pertama yang dibuka di Sumatera Timur adalah Standard Chartered Bank of India, Australia, and China atau lebih dikenal dengan Standard Chartered Bank. Bank ini merupakan salah satu bank yang sangat berpengaruh di Inggris pada abad ke-19. Standard Chartered Bank didirikan oleh James Wilson tahun 1853

91. A. Daliman, *op.cit.*, hlm. 52.

melalui pemberian Royal Charter oleh Ratu Victoria. Modal awal pendirian bank ini sebesar tiga juta pound. Chartered Bank memiliki kantor pusat di London, dan telah memiliki cabang di berbagai tempat seperti di Eropa, Asia, serta Amerika. Pembukaan cabang Standard Chartered Bank di berbagai kawasan tersebut akibat perkembangan komoditas ekspor perkebunan dan pertambangan di daerah koloni Inggris seperti teh, opium, kapas, kopi, tembakau, karet, dan logam mulia yang sangat membutuhkan layanan perbankan.<sup>92</sup>

Di Sumatera Timur, ledakan pembukaan ratusan perusahaan perkebunan mulai pertengahan abad ke-19 memberi peluang besar kepada lembaga perbankan Inggris ini untuk mendapatkan keuntungan. Tahun 1888 kantor cabang Standard Chartered Bank of India, Australia, and China dibuka di Medan dengan tujuan melayani kebutuhan perbankan perusahaan perkebunan Sumatera Timur. Sebagai bank umum, aktivitas perbankan yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank cabang Medan sama dengan aktivitas Standard Chartered Bank lainnya seperti: transaksi valuta asing, penukaran uang, pemberian pinjaman dan kredit, serta melakukan pengiriman dan pengedaran uang. Hingga akhir kekuasaan kolonial tahun 1940-an eksistensi Standard Chartered Bank of India, Australia, and China dalam dunia perbankan Sumatera Timur masih tetap kuat.<sup>93</sup>

Besarnya keterlibatan pengusaha perkebunan Inggris setelah Belanda dalam penanaman modal untuk budidaya teh, karet, dan kelapa sawit menjadi pertimbangan utama Standard Chartered Bank membuka kantor cabangnya di Sumatera Timur. Dekatnya posisi geografis Sumatera Timur dengan Semenanjung Malaya dan Straits Settlements yang merupakan koloni Inggris juga menjadi alasan lain dilakukannya pendirian kantor cabang Standard Chartered Bank di daerah ini. Posisi kawasan semenanjung sebagai jalur transit pe-

92. Zhaojin Ji, *History of Modern Shanghai Banking*, (New York: An East Gate Book, 2003), hlm. 43–44.

93. *Deli Courant*, 8 Maret 1927.



Gambar 2.12

**Gedung *Chartered Bank of India, Australia, and China* cabang Medan**

Sumber: *Deli Courant* 1927

angkutan komoditas tanaman ekspor dari Pantai Timur Sumatera menuju pasar Eropa dan Amerika sangat penting dalam aktivitas industri dan perdagangan Inggris. Hingga dekade ketiga abad ke-20, modal yang dimiliki Inggris dalam industri perkebunan di Sumatera Timur mencapai 125 juta gulden.<sup>94</sup>

Bank swasta selanjutnya yang ada di Sumatera Timur adalah de Nederlands-Indische Handelsbank (NIHB) yang didirikan di Amsterdam 14 Juli 1863. Pada 1914, bank yang berkantor pusat di Amsterdam ini membuka kantor cabangnya di Medan untuk melayani aktivitas perbankan perusahaan perkebunan Belanda dan Eropa. Sebelum membuka de Nederlands-Indische Handelsbank *agentschap* Medan, bank ini terlebih dahulu membuka kantor cabang di berba-

94. Inggris menduduki peringkat kedua terbesar dalam menanamkan modalnya pada industri perkebunan di Sumatera Timur setelah Belanda. J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 327.

gai kota di Hindia-Belanda, yakni: Weltevreden (1900), Indramayu (1900), Bandung (1904), Besuki (1911), Probolinggo (1911), Cirebon (1913), Cilacap (1912), Pekalongan (1913). Di tahun yang sama dengan pembukaan cabang Medan (1914), de Nederlands-Indische Handelsbank juga membuka kantor cabangnya di Kalibuntu. Hingga penghujung dekade keempat abad 20, de Nederlands-Indische Handelsbank telah membuka cabang di 29 kota di Hindia-Belanda mulai dari Jawa, Sumatera, Lombok, Kalimantan, serta Sulawesi yang memiliki industri perkebunan dan eksplorasi tambang.<sup>95</sup>

De Nederlands-Indische Handelsbank pada awal abad ke-20 adalah sebuah lembaga keuangan dengan jaringan internasional yang mantap. Hal ini terbukti dengan dibukanya kantor cabang di berbagai kota penting di Asia seperti: Singapura (1901), Hongkong (1906), Shanghai (1919), Kobe (1920), Bombay (1920), Calcutta (1920), Swatow (1924), Amoy (1924), Tokyo (1926), Yokohama (1926), dan Manila (1937). Tahun 1940 bank ini juga membuka kantor cabang di New York dan Kanada.<sup>96</sup>

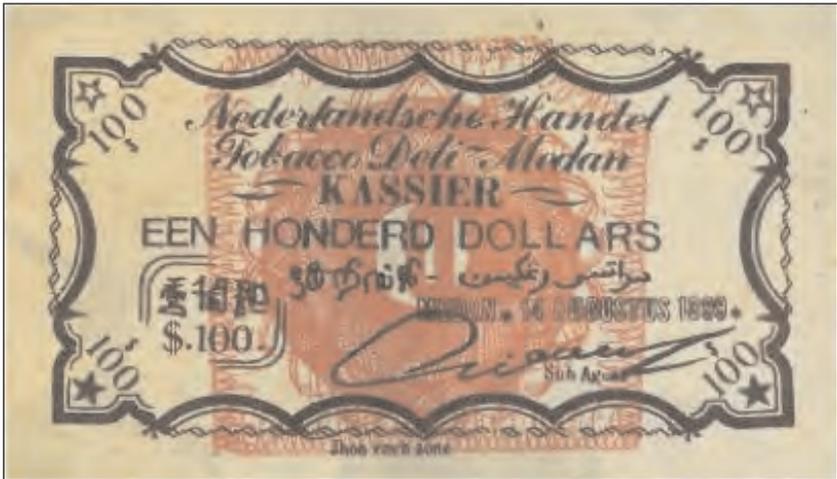
Selain melakukan pelayanan perbankan dalam pembukaan rekening serta pengedaran dan penukaran mata uang, de Nederlands-Indische Handelsbank juga memberikan kredit kepada berbagai pengusaha perkebunan dan industri milik Belanda. Sama dengan latar belakang pendirian kantor cabang Chartered Bank akibat tingginya aktivitas ekonomi dan perbankan ratusan perusahaan perkebunan dan eksplorasi minyak bumi di Langkat, de Nederlands-Indische Handelsbank juga menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama membuka kantor cabangnya di Medan.

Institusi bank swasta lainnya yang ikut meramaikan lalu lintas moneter dan perbankan di Sumatera Timur adalah perusahaan dagang Belanda *Nederlandsche Handel Maatscappij* yang menjadikan kegiatan perbankan sebagai fokus utamanya sejak dasawarsa per-

95. *National Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, "de Nederlands-Indische Handelsbank (1863–1965)"*., (Den Haag: 1972), hlm. 9 – 14.

96. *Ibid.*, hlm. 15.

tama abad ke-20. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan di Sumatera Timur, *Nederlandsche Handel Maatscappij sub-agentschap Medan* sempat mencetak dan mengedarkan uang kertas yang dikenal dengan bilyet/kasorder NHM dengan nilai pecahan: 1, 2.50, 5, 10, 25, 100 dollar seperti yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.13

### Bilyet/SPM NHM 100 Dollar

Sumber: Koleksi Ichwan Azhari

Gambar 2.13 di atas adalah bilyet/kasorder dengan nilai 100 dollar yang dikeluarkan oleh NHM *sub-agentschap* Medan tanggal 14 Agustus 1899 sebagaimana yang tertulis pada alat pembayaran tersebut. Di Pulau Sumatera, Bilyet NHM khusus Medan ini hanya berlaku sebagai alat pembayaran untuk kawasan Sumatera Timur. Untuk daerah di luar Sumatera Timur, Bilyet NHM ini juga diterima sebagai alat pembayaran dan hanya dapat ditukarkan di bank-bank yang ada di kawasan *Straits Settelement* dengan nilai kurs yang lebih rendah 1%.<sup>97</sup>

97. G. Vissering, *Muntwezen en Circulatie-Banken in Nederlandsch-Indie*, (Amster-

Pada bilyet ini juga tertulis *Kassier Nederlandsch Handel Tobacco Deli-Medan* sebagai pihak yang mengeluarkannya. Besarnya nilai dari bilyet NHM ditulis dalam empat aksara, yaitu: Belanda, Latin, Cina, Tamil, dan Arab-Melayu sehingga bebas dipergunakan oleh berbagai kalangan di Sumatera Timur. Penggunaan empat aksara tersebut juga menyiratkan bahwa NHM ingin menjadikan bilyet dengan kurs dolar ini sebagai alat pembayaran yang populer digunakan oleh berbagai kalangan baik itu oleh pengusaha asing, masyarakat pribumi dan timur asing, serta orang-orang Eropa dan Amerika yang bermukim di Sumatera Timur.

Bilyet NHM adalah sebuah alat pembayaran yang unik pada akhir abad ke-19 di Hindia-Belanda, di mana NHM sebagai perusahaan dagang milik Belanda tidak mengeluarkan alat pembayaran dengan nilai satuan gulden tetapi malah memakai nilai satuan mata uang dolar yang lebih disukai penggunaannya oleh masyarakat Sumatera Timur saat itu. Nilai dolar yang tercantum dalam alat pembayaran ini adalah nilai uang dolar di Sumatera Timur yang harga kursnya sama dengan uang-uang dolar yang berlaku di Straits Settlements. Fakta ini menunjukkan bahwa di Sumatera Timur baik itu di lingkungan perkebunan maupun di luar perkebunan yang dimiliki oleh Belanda ataupun bangsa Barat lainnya, dolar memiliki nilai dan gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gulden. Mata uang dengan satuan dolar seperti *dollar Straits*, *dollar Meksiko*, *dollar Jepang* ataupun *dollar pillar* lebih dominan dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat luas di Sumatera Timur.<sup>98</sup>

Bank swasta Eropa lainnya yang beroperasi di Sumatera Timur pada awal abad ke-20 adalah Chartered Mercantile Bank of India, London, & China dan Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij yang membuka kantor cabang di Medan tahun 1916. De

dam: J.H De Bussy, 1920), hlm. 121.

98. Semua mata uang dolar ini adalah alat pembayaran yang sah di kawasan Straits Settlements yang kemudian juga didistribusikan ke Pantai Timur Sumatera.



Gambar 2.14

**Kantor NHM dan Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij Medan**

Sumber: Tropenmuseum

Javasche Bank sebagai bank swasta terkemuka di Hindia-Belanda yang juga merupakan bank milik Belanda membuka kantor cabang pertamanya di Medan tahun 1907. Kantor cabang De Javasche Bank kemudian juga didirikan di Bengkalis (1907), Tanjung Pura (1908), Tanjung Balai (1908), dan Pematang Siantar (1923) dalam upaya “guldenisasi” Pantai Timur Sumatera.

Selain bank-bank swasta Eropa, beberapa bank-bank modern milik pengusaha Cina juga dibuka di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Bank-bank Cina ini dikategorikan sebagai bank-bank lokal yang ada di Sumatera Timur. Bank swasta Cina tersebut di antaranya adalah Deli Bank yang didirikan pada 1915 dan Bataviasche Bank yang didirikan oleh Tjong A Fie bersama dengan Khouw Kim An, seorang mayor di Batavia.<sup>99</sup> Selain itu juga ada Kong Siong Bank dan Chung Hwa Shang Yeh Bank milik Khoe Tjin Tek yang beraktivi-

99. Dirk A. Buiskool, *op.cit.*, hlm. 287.

tas di Medan, serta Batakche Bank.<sup>100</sup>

Kehadiran berbagai institusi bank swasta di atas memperlihatkan tingginya aktivitas moneter dan perbankan di Sumatera Timur sebagai bagian dari jaringan perdagangan dunia. Posisi Pantai Timur Sumatera sebagai kawasan strategis yang berhadapan langsung dengan pusat-pusat ekonomi Inggris di Straits Settlements semakin menguatkan besarnya eksistensi daerah ini dalam peta perekonomian internasional. Selain itu, keberadaan bank-bank swasta tersebut juga memperlihatkan bagaimana institusi bank tidak hanya difungsikan untuk melayani berbagai transaksi dan aktivitas moneter perusahaan perkebunan asing, namun juga sebagai alat perjuangan untuk memperluas hegemoni ekonomi melalui kendali mata uang. Lemahnya hegemoni ekonomi Belanda dalam ekonomi internasional dibandingkan dengan Inggris dan Amerika di abad ke-19 hingga abad ke-20, sukses melemahkan eksistensi gulden Belanda dibandingkan dengan dolar yang berhasil menjadi mata uang internasional.

Kehadiran Standard Chartered Bank milik Inggris (1888) sebagai bank swasta pertama yang dibuka di Pantai Timur Sumatera, mengindikasikan bahwa Inggris lebih dahulu menangkap potensi yang menguntungkan dari aktivitas ekonomi dan moneter industri perkebunan di kawasan ini dibandingkan bangsa Barat lainnya. Di tengah lemahnya kedudukan Belanda dalam kompetisi ekonomi dunia serta ketiadaan regulasi dan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi dan moneter, kehadiran Standard Chartered Bank memberi peluang yang sangat besar kepada Inggris untuk mengontrol peredaran mata uang dolar semenanjung (*dolar Spanyol/pillar dollar*, dolar Meksiko, dolar Jepang, dan dolar Straits) sehingga menjadi alat pembayaran utama yang digunakan oleh masyarakat di Sumatera Timur masa itu.

Rendahnya popularitas gulden dibandingkan dolar dan pener-

100. J.S. Furnivall, *op.cit.*, hlm. 353.

bitan Bilyet NHM dalam satuan hitung dolar, semakin membuktikan bahwa kolonisasi Belanda atas wilayah Sumatera Timur tidak berlaku dalam bidang moneter dan perbankan. Hegemoni Belanda di Sumatera Timur hanya sebatas kekuasaan politik dengan tujuan utama untuk merangsang masuknya aliran modal asing ke Sumatera Timur, tanpa adanya strategi dan regulasi untuk menjadikan gulden sebagai alat pembayaran yang sah di berbagai perusahaan perkebunan, institusi bank milik Belanda, dan masyarakat luas. Perkembangan ekonomi Sumatera Timur hingga diberlakukannya politik guldenisasi memperlihatkan besarnya ketergantungan daerah ini dengan perkembangan ekonomi-moneter di kawasan Straits Settlements dan juga sistem perdagangan dunia.

### **Sistem dan Peredaran Uang di Sumatera Timur**

Aktivitas perkebunan tembakau yang kemudian diikuti dengan penanaman kopi, teh, karet, kelapa sawit serta eksplorasi minyak bumi dengan seketika membuka seluas-luasnya Sumatera Timur untuk pemodal asing. Berkaitan dengan bidang moneter, industri perkebunan yang berkembang di Hindia-Belanda dengan tumpuan investasi modal asing berhasil memperkenalkan ekonomi uang masuk hingga ke tingkat desa. Pada masa ini uang mulai diperkenalkan secara luas sebagai alat tukar.<sup>101</sup> Pengenalan uang kepada masyarakat melalui aktivitas perkebunan juga terjadi di Pantai Timur Sumatera melalui pembukaan ratusan perkebunan-perkebunan asing yang membawa perubahan mencolok dalam peningkatan ekonomi dan laju peredaran uang. Internasionalisasi ekonomi Sumatera Timur saat itu berhasil merangsang peningkatan jumlah dan jenis mata uang yang masuk ke daerah ini, khususnya mata uang dolar yang menjadi alat pembayaran internasional. Internasionalisasi ekonomi terbukti ikut

101. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 4.

mendorong internasionalisasi moneter di Pantai Timur Sumatera.

Industri perkebunan juga mendorong peningkatan arus perdagangan dari dan ke luar Sumatera Timur, terutama lalu lintas perdagangan dengan kawasan Semenanjung Malaya yang telah terbentuk jauh sebelum adanya kekuasaan Belanda. Berbagai komoditas dagang dan barang kebutuhan masyarakat Sumatera Timur di angkut dari Penang, Malaka, dan Singapura. Begitupun sebaliknya dengan ekspor hasil perkebunan dari Pantai Timur Sumatera yang dipasarkan ke daerah tersebut. Tingginya jumlah barang-barang impor yang didatangkan dari luar Sumatera Timur di awal abad ke-20 menyebabkan harga berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat seperti pakaian, makanan, perkakas rumah tangga, dan beras menjadi lebih murah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kapitalisasi modal asing terbukti berhasil memperkenalkan ekonomi barang dan uang untuk masuk ke kehidupan masyarakat di Sumatera Timur.

Di samping berbagai aktivitas perdagangan internasional dari dan ke Pantai Timur Sumatera, kedekatan geografis daerah ini dengan Semenanjung Malaya dan Straits Settlements sebagai ujung tombak hegemoni ekonomi Inggris di Asia Tenggara menjadi faktor utama masuknya berbagai mata uang internasional sejak masa awal kapitalisasi perkebunan hingga abad ke-20. Ketiadaan regulasi pemerintah kolonial dalam hal keuangan semakin memudahkan pendistribusian uang-uang dolar yang kemudian menjadikan Pantai Timur Sumatera dijuluki sebagai "Negeri dolar dari Hindia".

Jika ditelisik lebih jauh, penamaan Sumatera Timur sebagai negeri dolar menunjukkan betapa lemahnya eksistensi Belanda dalam jaringan perdagangan internasional. Berbanding terbalik dengan saingannya Inggris yang berhasil menjadi pengendali ekonomi dan perdagangan dunia pada abad ke-19 yang kemudian diikuti oleh Amerika pada abad ke-20. Otoritas politik yang dimiliki oleh Belanda atas seluruh wilayah Pantai Timur Sumatera tidak menjadi jaminan berhasilnya Belanda dalam menanamkan kekuasaan dalam bidang ekonomi dan moneter melalui mata uang gulden di daerah

ini. Hingga awal abad ke-20, Pantai Timur Sumatera tetap menjadi daerah yang sangat terbuka dengan ekonomi asing dan juga berbagai jenis uang dolar yang lebih dominan dipilih masyarakatnya sebagai alat pembayaran dibandingkan dengan gulden Hindia. Jika realitas tersebut direlasikan dengan fungsi uang dalam ekonomi modern yang tidak hanya sebagai alat pembayaran namun juga sebagai simbol kekuasaan dan alat perjuangan, otoritas Belanda yang hanya dalam tataran politis atas Pantai Timur Sumatera jauh lebih kecil dibandingkan hegemoni ekonomi Inggris yang berhasil menanam kuat melalui mata uang dari Semenanjung Melayu dan Straits Settlements.

Semenjak kedatangan John Anderson ke pedalaman Pantai Timur Sumatera pada 1822, hingga permulaan 1900 wilayah Semenanjung Melayu dan Straits Settlements tetap menjadi orientasi utama dari ekonomi dan moneter yang berkembang di Pantai Timur Sumatera. Hal ini tampak dalam jenis mata uang yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Timur dalam kegiatan ekonomi sehari-hari yang menggunakan uang-uang yang beredar dari kawasan tersebut. Mata uang yang pernah beredar di Pantai Timur Sumatera dari antara lain: dollar Pillar/pisseta/dolar Spanyol (1819-1826), dolar Meksiko/Mexican dollar (1826-1867), dolar Jepang, Hongkong trade dollar, dan American trade dollar (1867-1903), serta dollar Straits (1903-1939).<sup>102</sup> Perubahan kebijakan moneter yang berlaku di Straits Settlement secara langsung akan ikut berdampak pada sistem moneter di Pantai Timur Sumatera. Saat pemerintah Straits Settlements menetapkan berlakunya Straits dolar untuk menggantikan penggunaan dolar Meksiko mulai 1897, sistem moneter di Sumatera Timur pada masa ini juga telah menggunakan dolar Straits.<sup>103</sup>

Sistem moneter yang terbentuk di Pantai Timur Sumatera awal abad ke-19 hingga dasawarsa keempat abad ke-20 memiliki

102. <http://eresources.nlb.gov.sg> ., diakses 7 Oktober 2016.

103. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 116-117.

kekhasan tersendiri dan sangat unik. Keunikan ini tidak hanya dari segi perkebunan sebagai sendi perekonomian yang menarik modal-modal asing untuk masuk ke Sumatera Timur, serta gelombang kedatangan kuli-kuli Cina, Jawa, dan India yang memadati kawasan perkebunan, tetapi juga distribusi mata uang yang berbeda antara lingkungan di dalam perkebunan dengan luar perkebunan.

Dikenalnya sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang sesungguhnya telah dikenal oleh masyarakat Pantai Timur Sumatera sejak digiatkannya usaha perkebunan lada di permulaan abad ke-19. Dalam ekspedisi ke pedalaman Pantai Timur Sumatera, Anderson menemukan petani-petani Karo yang bermigrasi dari dataran tinggi dibayar sebesar tiga dolar Spanyol (peseta) sepikul untuk dua pertiga dari hasil panen dan lima peseta sepikul untuk selebihnya atas usaha mereka mengusahakan perkebunan lada milik "orang kaya" Sunggal. Perkembangan perkebunan lada yang lebih awal dibandingkan dengan tembakau dan komoditas tanaman ekspor lainnya di Sumatera Timur yang telah menggunakan mata uang dolar Spanyol sebagai alat pembayaran membuktikan bahwa sebelum periode kapitalisasi Pantai Timur Sumatera telah masuk dalam jaringan perdagangan internasional sebagai eksportir lada. Perkebunan lada yang menjadi komoditas primadona perdagangan dunia saat itu telah memperkenalkan mata uang internasional kepada masyarakat pribumi Pantai Timur Sumatera.

Lazimnya penggunaan uang dolar Spanyol sebagai alat tukar di Sumatera Timur sebelum abad ke-20 juga tampak saat Nienhuys pertama kali menjajaki kawasan ini pada Juli 1863. Atas saran dari Residen Sumatera Timur, Netscher Nienhuys dan rombongannya disarankan untuk membeli persediaan secukupnya dolar pilar atau dolar Spanyol agar dapat dijadikan sebagai alat tukar saat tinggal di Deli.<sup>104</sup> Hingga permulaan abad ke-20 dolar Spanyol ini masih beredar di

104. Karl. J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863–1947*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 52.

masyarakat Sumatera Timur sebagai alat tukar.

Tradisi menunaikan ibadah haji ke Mekah oleh masyarakat muslim di Sumatera Timur hingga penghujung abad ke-19 juga memperlihatkan beragamnya jenis alat pembayaran yang digunakan. Dalam laporan jurnalistik Dja. Endar Moeda, wartawan asal Padang Sidempuan yang melakukan perjalanan haji ke Mekah pada 1892-1893 menuliskan dengan rinci berbagai jenis mata uang yang diperlukan jika hendak pergi haji masa itu. Uang-uang tersebut adalah ringgit nona 1892 (Wilhelmina koningin) senilai 10 sen, ringgit burung (dolar Meksiko), uang mas Inggris (poundsterling), uang mas Belanda (gulden), dan wang/duit ayam (rooster keeping).<sup>105</sup> Dja. Endar Moeda dalam laporannya juga menyebutkan bahwa nilai tukar Pounsterling Inggris lebih tinggi dari pada gulden Belanda. Dimana nilai tukar 1 poundsterling sama dengan 10 ringgit burung (dolar Meksiko). Sementara nilai kurs 1 gulden hanya dihargai sebesar 8 ringgit burung. Perbandingan nilai tukar ini juga berlaku jika poundsterling Inggris dan gulden Belanda ditukar di Mekah atau Madinah.<sup>106</sup>

Jika masyarakat Sumatera Timur di luar perkebunan biasa menggunakan mata uang yang berlaku di kawasan Semenanjung Melayu

105. Koin, wang/duit ayam (rooster keeping) adalah mata uang yang dicetak oleh pedagang Inggris di Singapura, Mr. Christopher Ridout Read yang tergabung dalam firma A.L. Johnstone & company. Di bagian depan uang ini tertulis nama CR. READ yang menandai bahwa uang ini dicetak dan diedarkan oleh Mr. Christopher Ridout Read. Dibolehkannya penerbitan uang oleh individu maupun perusahaan oleh Inggris pada masa itu menyebabkan mata uang ini legal untuk dijadikan sebagai alat tukar. Penamaan uang ayam berasal dari gambar ayam yang terdapat pada uang ini. Selain itu di uang ini juga terdapat inskripsi Bugis bertuliskan "Tanah Melayu satu keping", dan bagian belakangnya "Tanah Bugis satu keping". Uang ayam atau rooster keeping ini sangat unik, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan inskripsi Bugis dan juga peredarannya yang sangat luas dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Pantai Timur Sumatera.
106. Suryadi, "Perjalanan ke Tanah-Tjoetji" dalam *Images orang Nusantara Tentang Ibadah Haji*, naskah tidak diterbitkan (Jakarta: Ecole francaise d'Extreme-Orient).



Gambar 2.15

### Jenis-jenis mata uang berhaji tahun 1800an

dan Straits Settlements seperti dollar Pillar/*peseta*/dolar Spanyol (1819-1826), dolar Meksiko/Mexican dollar (1826-1867), dolar Jepang, Hongkong trade dollar, Inggris trade dollar dan American trade dollar (1867-1903), dollar Straits (1903-1939), ringgit nona 1892 (Wilhelmina koningin) senilai 10 sen, uang mas Inggris (poundsterling), uang mas Belanda (gulden), dan wang/duit ayam (rooster keeping). Kuli-kuli perkebunan di Sumatera Timur malah memakai uang kebon atau token yang bernilai jauh lebih rendah.

Praktik penggunaan token (uang kebon) di perkebunan Sumatera Timur adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan besarnya otoritas tuan kebun di lingkungan perkebunan mereka masing-masing. Melalui uang kebon atau token ini kuli Cina dan Jawa di perke-

bunan tembakau, kopi, dan karet dieksploitasi dan ditindas hak-haknya. Dengan berbagai macam cara, tuan kebun menjadikan uang kebon sebagai perangkap untuk membatasi kebebasan para kuli dalam membelajakan upah mereka di luar perkebunan. Uang kebon menjadi rantai yang kokoh untuk mengikat kuli agar tidak bisa lari dari perkebunan. Selain itu, dengan menggaji kuli menggunakan uang buatan sendiri berupa kertas bon atau kepingan logam yang hanya dapat dibelanjakan di kedai perkebunan, tuan perkebunan dapat mengontrol peredaran uang kuli hanya untuk keuntungannya sendiri.

Pemakaian uang kebon semakin memperlihatkan kegagalan Belanda dalam perebutan hegemoni ekonomi dan moneter di Pantai Timur Sumatera. Di luar perkebunan, gulden Belanda tidak mampu menyaingi uang dolar yang menjadi mata uang internasional. Sedangkan di dalam perkebunan pemerintah kolonial tidak mampu mengendalikan kekuasaan tuan kebun untuk mencetak dan mengedarkan uang kebon. Eksistensi pemerintah kolonial Belanda di perkebunan Sumatera Timur hanya terbatas pada penetapan regulasi-regulasi yang mengatur sistem kontrak kuli yang lebih manusiawi. Namun dalam berbagai tindakan eksploitasi uang kebon sama sekali jauh dari jangkauan pemerintah kolonial Belanda yang seakan menutup mata atas berbagai praktik sadis tuan kebun tersebut.

Jika dikaitkan dengan fungsi uang sebagai simbol kekuasaan, praktik uang kebon tersebut merupakan tindakan perlawanan terhadap hegemoni pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Timur. Selain ketidakmampuan untuk mengendalikan peredaran mata uang dolar dan uang kebon, pemerintah kolonial juga gagal dalam memperjuangkan kesejahteraan kuli perkebunan. Pembayaran gaji kuli dengan uang dolar dan gulden merupakan sebuah kerugian besar bagi para pemilik *onderneming*. Oleh karena itu, tuan kebun kemudian melakukan pencegahan masuknya uang dolar dan gulden ke lingkungan perkebunan dengan mencetak dan mengedarkan uang sendiri yang nilainya sangat rendah dibandingkan uang dolar dan

gulden. Berbagai alasan dan tipu daya tuan kebun berhasil menempatkan uang kebon sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di lingkungan perkebunan.

Dalam industri perkebunan dunia penggunaan token sebagai alat pembayaran pertama kali diperkenalkan oleh Inggris tahun 1820 untuk membayar upah buruh perkebunan kopi dan teh di Ceylon. Ketika kawasan Pantai Timur Sumatera dibuka untuk perkebunan tembakau dan tanaman komoditas ekspor, uang kebon juga dipergunakan sebagai alat pembayaran oleh pemilik *onderneming* kepada para pekerjanya. Pada masa ini uang kebon tidak hanya dikenal di wilayah Pantai Timur Sumatera saja, tetapi juga beredar di perkebunan-perkebunan lainnya yang ada di Kalimantan, Maluku, dan Jawa (di Priangan dan Pasuruan).<sup>107</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jaringan ekonomi yang terbentuk antara kawasan semenanjung dan Straits Settlements dengan Pantai Timur Sumatera menjadikan daerah tersebut sebelum abad ke-20 sangat bergantung pada kegiatan ekonomi serta sistem perkebunan di kedua daerah tersebut. Ketergantungan ini salah satunya tampak pada sumber modal dan penggunaan mata uang untuk membayar upah kuli-kuli Cina.

Pada periode awal era perkebunan, uang yang digunakan untuk membayar upah para kuli adalah mata uang yang umumnya berlaku di Sumatera Timur saat itu, yakni dolar Meksiko yang juga dipakai di semenanjung. Sebelum dolar Meksiko, mata uang yang berlaku di Semenanjung Melayu adalah dolar Spanyol (*pillar dollar*). Uang dolar Spanyol ini telah dipakai oleh "orang kaya" Sunggal untuk membayar petani-petani Karo dalam mengelola perkebunan lada di Sumatera Timur sejak permulaan abad ke-19. Mulai 1860-an EIC (East India Company) sebagai perwakilan pemerintah Inggris yang berkuasa di Straits Settlements menetapkan dolar Meksiko sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan dolar Spanyol. Tingginya

107. [www.plantagegeld.nl](http://www.plantagegeld.nl), diakses 10 Juni 2016.

transaksi dagang yang terjadi antara Pantai Timur Sumatera dengan Straits Settlements menyebabkan masyarakat Sumatera Timur kala itu juga beralih menggunakan dolar Meksiko.<sup>108</sup>

Nilai 1 (satu) dolar Meksiko sama dengan 2.20 gulden Hindia. Setelah tahun 1890 nilai tukar dolar Meksiko ini turun menjadi 1.25 gulden Hindia untuk nilai 1 dolar Meksiko. Kuli-kuli Jawa seringkali tertipu oleh para calo yang menyebutkan bahwa uang panjar dan upah akan dihitung dengan nilai tukar 2 gulden Hindia<sup>109</sup> per satu dolar, padahal nilai tukar sebenarnya lebih rendah dari janji yang diberikan oleh calo. Tahun 1897 pemerintah Straits Settlements menetapkan berlakunya Straits dolar untuk menggantikan penggunaan dolar Meksiko. Aturan ini kemudian mendorong beredarnya dolar Straits di Sumatera Timur.<sup>110</sup>



Gambar 2.16 Dollar Pillar/peseta/dolar Spanyol

Sumber: <http://m.ebay.com> (diakses 20 Juli 2016)

Tidak seimbangny jumlah pecahan uang kecil (dolar) yang tersedia dengan kebutuhan untuk membayar upah ribuan kuli perkebunan dijadikan alasan oleh para pemilik *onderneming* untuk membuat mata uang sendiri. Tiap-tiap perkebunan mengeluarkan uang kebon sendiri dengan nilai satuan yang berbeda seperti dolar, dolar reis, sen, duit, gantang bras, mark, dan pfennige. Nilai mata uang tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemilik perkebunan

108. <http://eresources.nlb.gov.sg>, diakses 7 Oktober 2016.

109. Kuli Jawa biasa menyebut gulden Hindia dengan ringgit.

110. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 116-117.



Gambar 2.17

### Uang Straits Settlements Tahun 1894 senilai 20 sen

Sumber: <http://blog.slcollectors> (diakses 20 Juli 2016)

tanpa didasarkan pada aturan kurs mata uang di luar perkebunan. Pada masa ini satu dolar disamakan nilainya oleh pemilik perkebunan dengan 100 “kupang” atau 1.000 “duit”. Baik kupang dan duit oleh kuli kedua nilai uang ini populer dengan sebutan duit.<sup>111</sup>

Meskipun memiliki fungsi yang sama dengan mata uang dollar straits dan gulden Hindia yang dipergunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar, uang kebon hanya berlaku di dalam perkebunan saja dan tidak dapat dipakai di lingkungan masyarakat umumnya, bahkan di perkebunan lain.<sup>112</sup> Hal ini berarti kuli perkebunan yang bekerja di *onderneming* Tanjung Radja di Asahan tidak akan bisa membelanjakan uang yang diberikan oleh tuan kebunnya kepada masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kuli yang bekerja perkebunan Bandar Poeloe tidak bisa membelanjakan uangnya di perkebunan Binjei Estate yang juga terletak di Asahan.

Uang kebon (token) yang dipakai di perkebunan Sumatera Timur memiliki jenis, bentuk, ukuran, dan nilai satuan yang berbeda.<sup>113</sup> Secara umum ada dua jenis uang kebon yang beredar di dalam

111. *Ibid.*, hlm. 117.

112. Churmatin Nasoichah, *Uang Kebon: Mata Uang Lokal di Perkebunan Deli*, (BAS No. 25., 2010), hlm. 14.

113. *Ibid.*, hlm. 15.

perkebunan, yakni: uang logam (lebih populer dengan sebutan duit) dan uang bon (bon kedai/*bon estate*) yang terbuat dari kertas.<sup>114</sup>

### Uang logam

Uang logam merupakan alat tukar yang lazim digunakan di Sumatera Timur dan daerah-daerah lainnya di Hindia-Belanda sebelum berkembangnya penggunaan uang kertas. Uang kebon dalam bentuk logam adalah jenis paling banyak digunakan di perkebunan. Uang dari logam memiliki beberapa keunggulan, seperti mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak, tahan lama, dan dapat dipecah ke dalam bentuk yang paling kecil.<sup>115</sup> Faktor inilah yang menyebabkan uang-uang kebon yang pernah digunakan di perkebunan Sumatera Timur semenjak kapitalisasi perkebunan (1860an) hingga dekade ketiga abad ke-20 yang masih ada wujudnya sampai saat ini didominasi oleh uang logam.

Dari segi bahan, material logam yang dipakai untuk pembuatan uang logam perkebunan Sumatera Timur berbeda dibandingkan dengan uang logam yang beredar di luar perkebunan. Jika di luar perkebunan uang logam yang digunakan oleh masyarakat terbuat dari emas dan perak, maka logam yang digunakan untuk membuat uang kebon ini umumnya yang bernilai lebih rendah, seperti kuningan, kuningan-seng, tembaga, tembaga merah, timah, nikel, nikel-seng, ebonite, dan kaleng alumunium. Rendahnya mutu bahan logam yang digunakan dalam pembuatan uang kebon tersebut menyebabkan nilai tukarnya sangat rendah dibandingkan dengan uang logam yang umumnya beredar di luar perkebunan Sumatera Timur. Keragaman material logam ini juga menyebabkan warna uang kebon berbeda antara satu dengan yang lain.

Dari segi wujudnya uang kebon (logam) yang beredar di

114. Jan Breman, *op.cit.*, hlm. 118.

115. Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm. 5.

Sumatera Timur memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berupa persegi empat, persegi delapan, oval, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, bulat seperti bentuk uang logam pada umumnya, bulat segi empat, segi lima, dan persegi empat sama sisi dengan atau tanpa bulatan di tengahnya. Di setiap kepingan uang tertulis nama *onderneming* yang mengeluarkan uang tersebut serta berapa nilai nominalnya yang ditulis dalam aksara latin, Cina, dan Jerman (sesuai dengan bangsa asal pemilik perkebunan). Dengan bentuk dan tulisan yang ada di uang tersebut masing-masing perkebunan akan mengetahui mana uang yang sah dan tidak sah digunakan di perkebunan mereka. Seperti uang kebon perkebunan Binjei Estate senilai 1 dolar tertulis inskripsi "UNTERNEHMUNG GUT FÜR 1890 1 DOLLAR BINDJEY". Dicantumkan nama perkebunan dalam inskripsi ini menjadi simbol di perkebunan mana uang ini beredar.

Berbagai jenis pecahan uang kebon (logam) yang beredar di Sumatera Timur, di antaranya berupa pecahan 1 dolar, 1 dolar reis, ½ dolar, 1/5 dolar, 1/10 dolar, 50 sen, 20 sen, 25 sen, 10 sen, 5 sen, 1 sen, 500 duit, 100 duit, 50 duit, 4 gantang bras, 3 gantang bras, 2 gantang bras, 1 mark,<sup>116</sup> 50 Pfennige, 25 Pfennige, dan 10 Pfennige. Semua pecahan-pecahan mata uang kebon ini dikeluarkan oleh masing-masing perkebunan dalam tahun yang berbeda mulai dari tahun 1876, 1879, 1880, 1890, 1891 hingga dasawarsa kedua abad 20.

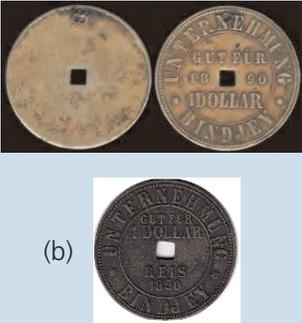
Jenis uang kebon (token) yang beredar di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur sejak pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20 adalah sebagai berikut:

### Uang Bon Kertas

Sama dengan kasus yang terjadi pada uang kebon yang terbuat dari logam yang diproduksi sendiri oleh pemilik perkebunan, uang bon

116. Mark adalah satuan alat tukar yang berlaku di Jerman. 1 mark = 100 pfennige (pfennig) yang sama dengan sen.

**Tabel 11**  
**Jenis-jenis Uang kebon di Sumatera Timur**

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
1	Baumann Wetter & Co.	Deli	Kopi	Material: Nikel-tembaga  Tahun: ± 1900-1914  Nilai mata uang: 20 sen
				
2	Binjai	Asahan	Tembakau	Material: (a) Nikeltembaga (b) Nikeltembaga  Tahun: 1890  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 1 dollar reis - ½ dollar - 20 sen - 10 sen
				
3	Blimbing	Batubara (Asahan)	Kopi	Material: - Kuningan - Timah - Tembaga - Tembaga merah (gambar)  Tahun: ± 1888/1889-1903  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 20 sen (a) 10 sen (b) 1 sen
				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
4	Dolok Estate	Batu bara	---	Material: Nikel  Tahun: ± 1888/1889 – 1903  Nilai mata uang: 1 dollar
				
5	Gallia	Serdang	---	Material: (a) Kuningan-seng (b) Kuningan-seng  Tahun: 1890 – ± 1896/97  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 50 sen (c) 20 sen – 5 sen
<p>(a)</p>  <p>(b)</p>  <p>(c)</p> 				
6	Goerach Batoe	Gorah Batu	---	Material: (a) Nikeltembaga (b) Tembaga merah (c) Nikel tembaga (d) Kuningan seng (e) Nikel tembaga (f) Nikel tembaga (g) Kuningan seng
<p>(a)</p>  <p>(b)</p> 				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
	<p>(c) </p> <p>(e)  </p> <p>(f)  </p> <p>(g) </p>	<p>(d) </p> <p>(h) </p>		<p>Tahun: 1890</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 1 dollar                      (b) 1 dollar                      (c) 1 dollar reis                      (d) 1 dollar reis                      (e) 1 dollar reis                      (f) ½ dollar                      (g) 20 sen                      (h) 10 sen</p>
7	Hessa	Tanjung Balai (Asahan)	Tembakau	<p>Material:                      (a) Nikel tembaga                      (b) Nikel tembaga                      (c) Nikel tembaga                      (d) Nikel tembaga                      (e) Nikel tembaga                      (f) Nikel tembaga                      (g) Nikel tembaga</p>
	<p>(a) </p> <p>(b) </p>		<p>(c) </p> <p>(d) </p>	

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
(e)				<p>Tahun:</p> <p>(a) 1888 (b) 1888 (c) 1890 (d) 1890 (e) 1888 (f) 1890 (g) 1888 (h) 1890 (i) 1890</p> <p>Nilai mata uang:</p> <p>(a) 1 dollar 1888 (b) 1 dollar reis 1888 (c) 1 dollar reis 1880 (d) 1 dollar reis 1890 (e) ½ dollar 1888 (f) ½ dollar 1890 (g) 20 sen 1888 (h) 10 sen 1890 (i) 10 sen 1890</p>
(f)				
(g)				
(g)				
(h)				
(i)				
8	Hüttenbach & Co.	Langkat	Tembakau	
(a)				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
	(b)			Tahun: ± 1887 – 1889  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen (a) 20 sen (b) 10 sen - 5 sen
9	Kisaran	Tanjung Balai	Tembakau	Material: (a) Nikel-tembaga (b) Nikel-tembaga (c) Nikel-tembaga (d) Nikel-tembaga (e) Tembaga merah  Tahun: 1888  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 1 dollar reis (c) ½ dollar (d) 20 sen (e) 10 sen
	(a)	(b)		
	(c)			
	(d)			
	(e)			
10	Kwala Begoemit	Langkat	Tembakau	Material: (a) Kuninganseng (b) Kuninganseng  Tahun: ± 1880-1896
	(a)			

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
(b)			Nilai mata uang: - 1 dollar bras - 50 sen (a) 20 sen - 10 sen (b) 5 sen	
11	Lingga	Langkat	---	Material: (a) Kuningan seng (b) Kuningan seng (c) Kuningan seng (d) Kuningan seng  Tahun: ± 1890 – 1905  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 50 sen (c) 20 sen (d) 10 sen
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				
12	The Netherlands India Sumatra Tobacco Company Limited	Langkat	Tembakau	Material: (a) Nikel tembaga (b) Tembaga merah (c) Tembaga (d) Tembaga merah
(a)				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
				<p>(b) </p> <p>(c) </p> <p>(d) </p> <p>Tahun: ± 1886 – 1892</p> <p>Nilai mata uang: (a) 50 sen (b) 50 sen (c) 25 sen - 20 sen (d) 10 sen</p>
13	Padang Tjermin (Doerian Moelan)	Deli	Tembakau	<p>Material: Ebonit (karet vulkanisasi yang keras berwarna hitam, campuran dari karet dan belerang)</p> <p>Tahun: ± 1885 – 1895</p> <p>Nilai mata uang: 50 sen</p>
				<p></p>
14	Poeloe Radja	Asahan	---	<p>(a) </p> <p>(b) </p> <p>Material: (a) Nikel-tembaga (b) Kuningan-seng (c) Tembaga (d) Kuningan-seng (e) Tembaga (f) Nikel (g) Nikel (h) Nikel</p>

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang	
(c)				<p>Tahun: 1890</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 1 dollar                      (b) 1 dollar                      (c) 1 dollar                      (d) 1 dollar reis                      (e) ½ dollar                      (f) ½ dollar                      (g) 20 sen                      (h) 10 sen</p>	
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
15	Rimboen	Medan (Deli)	Tembakau		Material:
(a)					(a) Tembaga merah (b) Tembaga merah (c) Tembaga merah (d) Tembaga merah

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
				<p>Tahun: ± 1889 - 1904</p> <p>Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 50 sen (c) 20 sen (d) 10 sen</p>
16	Asahan Tabak Maatschappij Silau	Sungai Silau (Asahan)	Tembakau	
				<p>Material: (a) Nikel-tembaga (b) Nikel-tembaga (c) Nikel-tembaga (d) Nikel-tembaga (e) Nikel-tembaga (f) Nikel-tembaga (g) Nikel-tembaga</p> <p>Tahun: ± 1902 - 1913</p>

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
	<p>(e) </p> <p>(f) </p> <p>(g) </p>			<p>Nilai mata uang:</p> <p>(a) 1 dollar                      (b) 1 dollar                      (c) 1 dollar                      (d) 1 dollar                      (e) ½ dollar                      (f) 1/5 dollar                      (g) 1/10 dollar</p>
17	Kedeh China Onderneming Simpang-Tiga	Asahan	Tembakau	
	<p>(a) </p> <p>(b) </p> <p>(c) </p> <p>(d) </p>			<p>Material:</p> <p>(a) Kuningan-seng                      (b) Tembaga merah                      (c) Tembaga merah                      (d) Tembaga merah                      (e) Tembaga-Nikel                      (f) Kuningan-seng</p>

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
	(e) 			Tahun: ± 1890 - 1895  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 1 dollar - 50 sen (c) 20 sen (d) 10 sen (e) 10 sen (f) 5 sen
18	Malay Kedeh Onderneming Simpang-Tiga	Asahan	---	
	(a)   (b)   (c)   (d)   (e) 			Material: (a) Tembaga merah (b) Kuningan-seng (c) Tembaga merah (d) Kuningan-seng (e) Kuningan-seng  Tahun: ± 1890 - 1895  Nilai mata uang: - 1 dollar (a) 50 sen (b) 20 sen (c) 10 sen (d) 10 sen (e) 5 sen

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
19	Soengy Diskie Estate	Deli	Tembakau	<p>Material:                      (a) Kuningan-seng                      (b) Kuningan-seng                      (c) Kuningan-seng</p> <p>Tahun:                      1890 - 1912</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 1 dollar                      (b) 50 sen                      (c) 50 sen</p>
<p>(a) </p> <p>(b) </p> <p>(c) </p>				
20	Soengai Serbangan	Asahan	Tembakau	<p>Material:                      (a) Nikel-tembaga                      (b) Nikel-tembaga                      (c) Kuningan-seng                      (d) Kuningan-seng</p> <p>Tahun:                      (a) 1891                      (b) 1894</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 1 dollar                      (b) ½ dollar                      (c) 1 dollar reis                      (d) 1 dollar reis</p>
<p>(a) </p> <p>(b) </p> <p>(c) </p> <p>(d) </p>				
21	Tanah Radja	Kisaran (Asahan)	Tembakau	<p>Material:                      (a) Nikel-tembaga</p>
<p>(a) </p>				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
				<p>(b) Nikel-tembaga (c) Kuningan-seng (d) Kuningan-seng</p> <p>Tahun: (a) 1891 (b) 1894</p> <p>Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) ½ dollar (c) 1 dollar reis (d) 1 dollar reis</p>
22	Unternehmung Tandjong Alam	Asahan	Tembakau	
				<p>Material: Kuningan seng</p> <p>Tahun: (a) 1891 (b) 1892</p> <p>Nilai mata uang: (a) 1 dollar reis (b) 1 dollar reis</p>
23	Tandjong Kuba	Batu Bara	Tembakau	
				<p>Material: Kuningan seng (gambar) Nikel</p> <p>Tahun: ± 1888 - 1898</p> <p>Nilai mata uang: - 100 sen - 50 sen - 20 sen - 10 sen (gambar)</p>

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
24	Tjinta Radja Estate	Deli	---	<p>Material:                      (a) Kuningan seng                      (b) Tembaga merah                      (c) Tembaga perunggu</p> <p>Tahun:                      ± 1876 - 1883</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 20 sen (b) 10 sen                      - 5 sen - 3 sen</p>
<p>(a) </p> <p>(b) </p>				
25	Wampoe	Deli	Tembakau	<p>Material:                      (a) Kuningan seng                      (b) Kuningan seng                      (c) Kuningan seng</p> <p>Tahun:                      ± 1888 - 1892</p> <p>Nilai mata uang:                      (a) 1 dollar                      (b) 1 dollar                      - 50 sen                      - 20 sen                      (c) 10 sen</p>
<p>(a) </p> <p>(b) </p> <p>(c) </p>				
26	Tanah Radja	Kisaran (Asahan)	Tembakau	<p>Material:                      (a) Kuningan-Seng                      (b) Tembaga Nike</p>
<p>(a) </p>				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
				Nilai mata uang: - 1 dollar (a) 50 sen - 20 sen (b) 10 sen - 5 sen
				
27	Unternehmung Tandjong Alam	Asahan	Tembakau	Material: (a) Kuningan (b) Nikel-Tembaga  Tahun: (b) 1892  Nilai mata uang: (a) 1 dollar (b) 50 sen - 20 sen - 10 sen - 5 sen
				
				
28	Bedagei	Padang Bedagei	---	Material: - Kuningan - Timah  Nilai mata uang: - 1 dollar - 20 sen - 5 sen
				Gambar tidak tersedia
29	Begerpang Estate	Serdang	Tembakau	Material: - Kuningan  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 20 sen - 10 sen - 5 sen
				Gambar tidak tersedia
30	Begagei Tobacco Plantation Ltd	Deli	Tembakau	Material: - Kuningan - Timah  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 20 sen - 10 sen - 5 sen
				Gambar tidak tersedia

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
31	Jeloek Dalem	Asahan	---	Material: - Kuningan - Nikel - Tembaga  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 20 sen - 10 sen - 5 sen
Gambar tidak tersedia				
32	Lima Poeloe	Batu Bara	---	Material: - Kaleng  Nilai mata uang: - 500 duit - 100 duit - 50 duit
Gambar tidak tersedia				
33	Roema-kinangkong	Deli	---	Material: - Nikel-seng  Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 20 sen - 10 sen
Gambar tidak tersedia				
34	Saentis-Estate	Deli	---	Material: - Kuningan  Nilai mata uang: - 1 dollar reis
Gambar tidak tersedia				
35	Semaian Rotterdam Estate	Deli	---	Material: - Timah Tahun: 1889  Nilai mata uang: - 5 sen - 1 sen
Gambar tidak tersedia				
36	Soengei Boenoet	Asahan	---	Material: - Kuningan - Nikel - Tembaga  Tahun: 1891  Nilai mata uang: -1 dollar - 50 sen - 20 sen - 10 sen - 5 sen
Gambar tidak tersedia				

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang	
37	Soengei Sidkie	Deli	---	Material: - Tembaga Nilai mata uang: - 1 dollar - 1 dollar - 50 sen - 25 sen	
Gambar tidak tersedia					
38	Soengei Sikambang	Deli	---	Material: - Kuningan Nilai mata uang: - 4 gantang bras <sup>127</sup> (gambar tidak tersedia) (a) 3 gantang bras (b) 2 gantang bras	
(a)			(b)		
39	Tandem Estate	Deli	---	Material: - Kaleng Nilai mata uang: - 500 duit (½ dollar) - 100 duit (1/10 dollar) - 50 duit (1/20 dollar)	
Gambar tidak tersedia					
40	Tanjung Kasau	Batu Bara	---	Material: - Nikel Nilai mata uang: - 1 dollar - 50 sen - 25 sen - 10 sen - 5 sen	
Gambar tidak tersedia					
41	Titian-oerat	Serdang	---	Material: - Kuningan Nilai mata uang: - 1 mark - 50 Pfennige - 25 Pfennige - 10 Pfennige	
Gambar tidak tersedia					
42	Toentoengan	Deli	---	Material: (a) Kuningan seng (b) Kuningan seng (c) Kuningan seng	
(a)					

117. Bras berasal dari kata *brass* yang berarti kuningan

No	Onderneming	Daerah	Jenis Perkebunan	Keterangan Mata Uang
				Nilai mata uang: (a) 20 sen (b) 10 sen (c) 5 sen
43	Laut Tador & Mendaris Estate	Batu bara	---	Material: (a) Kuningan seng (b) Kuningan seng  Nilai mata uang: (a) 25 sen - 10 sen (b) 5 sen

Sumber: Lansen (1992), Scholten (1951), koleksi Ichwan Azhari,  
[www.plantagegeld.nl](http://www.plantagegeld.nl)

(bon kedai) yang berbahan kertas juga diproduksi oleh tuan kebun. Bon kedai ini berupa bon dengan nilai nominal tertentu dan juga bon beras (berupa searik kertas kecil berukuran segi empat) yang hanya dapat ditukar di kedai-kedai perkebunan yang dimiliki oleh tuan kebun. Pada bon beras biasanya tertulis nilai berupa angka untuk ditukar dengan beras dalam jumlah tertentu sehingga bon kedai ini lebih dikenal dengan sebutan bon beras. Berbagai alasan digunakan oleh tuan kebun untuk memberlakukan aturan penggunaan bon beras ini, salah satunya adalah untuk mencegah para kuli membelanjakan penghasilan mereka membeli madat. Tuan kebun juga

membohongi kuli dengan mengatakan bahwa harga beras yang mereka beli di luar perkebunan harganya lebih tinggi dari pada harga jual mereka kepada para kuli di dalam perkebunan.<sup>118</sup>

Salah satu alat pembayaran yang diperkirakan adalah uang kebon yang digunakan oleh kuli perkebunan Sumatera Timur adalah bon Bindjey Estate<sup>119</sup> senilai 1 dolar. Pada Bon Bindjey Estate ini ber-corak ornamen yang indah dengan aksara Arab-Melayu, Cina, dan



Gambar 2.18

**Uang Bon Bindjey Estate**<sup>120</sup> Uang ini diragukan keasliannya.

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

Latin. Dalam huruf latin berbahasa Belanda nilai yang tertera di uang ini tertulis "GOED VOOR EEN 1 DOLAAR". Sedangkan dalam tulisan Arab-Melayu disebut "Ini Satu Ringgit". Tahun yang tertera di uang ini adalah 1890 seperti yang tampak pada gambar di atas.

Fenomena tuan kebun yang menggaji kuli dengan uang buatan sendiri ini bukanlah hal yang aneh di Sumatera Timur saat itu. Dalam

118. Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 118.

119. Ejaan Ophuysen.

120. Uang ini diragukan keasliannya.

sebuah kasus ada seorang majikan yang menggunting kaleng biskuit menjadi keping-keping bulat pipih yang di atasnya tertulis nominal harga uang tersebut. Uang kaleng biskuit ini kemudian diberikan kepada para kuli Cina. Tuan kebun memastikan kepada para kuli bahwa uang kaleng biskuit tersebut dapat ditukar di Malaka. Namun beberapa hari kemudian para kuli Cina tersebut akhirnya kembali lagi ke perkebunan dengan perasaan sangat kecewa karena uang kaleng tersebut sama sekali tidak bisa ditukar di Malaka. Dengan segala tipu muslihat tuan kebun berhasil mendapatkan mata uang logam dan dolar yang ia perlukan.<sup>121</sup>

Dapat dipahami bahwa apa pun bentuk dan jenis uang kebon yang berlaku di perkebunan dan praktik peredarannya Sumatera Timur sejak dimulainya “Era Perkebunan” hingga awal abad ke-20 merupakan sebuah alat pasungan dan rantai bagi para kuli agar tidak dapat keluar dari perkebunan. Dengan uang kebon para pengusaha dapat mengikat tubuh para kuli untuk tetap terikat dan bekerja di perkebunan mereka. Penggunaan uang kebon yang semata-mata hanya untuk kepentingan pengusaha ini mendapat dukungan dari pemerintah Hindia-Belanda yang membiarkan saja penindasan tersebut terjadi di semua perkebunan yang ada di Sumatera Timur. Kuasa dari seorang tukang kebun yang sangat absolut di dalam perkebunan miliknya sangat jelas terlihat pada peredaran uang kebon ini. Dengan berbagai cara pemilik perkebunan berhasil menciptakan sebuah otoritas yang menindas para kuli dan memperkaya diri mereka sendiri tanpa memilirkan nasib para kuli.

Tindakan para pemilik perkebunan yang memproduksi sendiri dan mengedarkan uang kebon yang khusus berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diperkebunan tersebut merupakan hal yang legal dan tidak melanggar hukum untuk dilakukan pada masa itu. Sebelum uang kertas menggantikan penggunaan uang logam yang umumnya terbuat dari emas atau perak, siapa saja boleh membuat

121. R. Boersma, *Ooskust van Sumatra, Jilid I: De Ontluiting van Deli*, (Batavia, 1919), hlm. 147.

uang sendiri asalkan ukuran timbangan, bentuk, dan mutu logamnya sesuai dengan aturan (tidak dikurangi). Bagi pihak yang membuat uang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan baik dari segi mutu ataupun ukuran, hal tersebut dapat dianggap sebagai penipuan. Akibat dari kurangnya kontrol dari pemerintah, penipuan uang sering kali terjadi sebelum abad ke-20. Untuk mengatasi hal tersebut negara kemudian membuat pabrik uang negara yang menjamin mutu, timbangan, dan bahan uang logam dari mata uang yang dipesan sesuai dengan aturan yang ada. Pabrik uang hanya menerima upah, sementara bahan akan disediakan sendiri oleh pihak pemesan uang.<sup>122</sup>

Jika regulasi produksi mata uang di atas dihubungkan dengan mata uang yang dibuat dan diedarkan sendiri oleh pemilik perkebunan, tampak jelas adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh para tuan kebun untuk mendapatkan keuntungan dari kuli-kuli mereka. Lemahnya pengawasan dari pemerintah Hindia-Belanda akhirnya semakin memberi peluang kepada para tuan kebun untuk bebas memproduksi dan mengedarkan uang perkebunan demi keuntungan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditanggung oleh para kuli.

Kehidupan nyata di perkebunan ternyata berbanding terbalik dengan apa yang bayangkan oleh para kuli saat masih di daerah asal. Janji-janji manis para calo bahwa mereka akan dengan cepat mendapat kekayaan dengan bekerja di perkebunan ternyata hanyalah isapan jempol belaka. Dengan gaji yang tidak mencapai lebih dari 75 dolar untuk satu kali masa tanam (delapan bulan) bagi para kuli yang terlibat dalam kegiatan penanaman tembakau, dan 20 sen perhari bagi buruh yang tidak dilibatkan dalam kegiatan penanaman, tentu saja akan memaksa para buruh tersebut untuk hidup dengan biaya yang sangat pas-pasan. Kuli perempuan Jawa

122. Sjafruddin Prawiranegara, *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama*, (Jakarta: Pustaka Antara, tt), hlm. 13–14.

malah hanya diberi upah tiga dolar perbulan, sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap bulannya para kuli perempuan ini mencapai 13 dolar.<sup>123</sup> Semua upah yang mereka dapatkan selama bekerja dengan segera akan habis atau bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>124</sup>

Kedai perkebunan menjadi bagian dari mata rantai jaringan hutang yang memerangkap para kuli. Dengan izin dari tuan kebun, pemilik kedai (biasanya orang Cina) dengan mudah akan memberikan kredit berbagai barang kebutuhan kuli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga di kota terdekat. Para kuli ini juga dapat menukar bon atau keping logamnya di kedai dengan nilai tukar yang sangat rendah. Penukaran bon dan uang kebon di kedai merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh uang kontan yang bisa dibelanjakan di luar perkebunan.

Di samping monopoli uang kebon dan mahalnnya harga barang kebutuhan, praktik penipuan yang dilakukan oleh tuan kebun dalam pemotongan upah para kuli semakin menambah beban hidup kuli. Jika seorang buruh bekerja selama 28 hari dalam satu bulan, ia akan menerima upah sebesar 9.80 gulden. Jumlah ini kemudian harus dipotong dengan membayar uang panjar (*vorschoot*) yang nantinya hanya menyisakan 2.40 gulden saja. Buruknya kinerja dan hasil kerja para kuli juga dijadikan alasan bagi tuan kebun untuk memotong gaji para kuli. Berbagai acara yang digelar oleh tuan kebun saat buruh menerima gaji seperti pasar malam, pertunjukan seni (wayang dan tari), pelacuran, dan judi sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada para kuli menabung sisa upah mereka.<sup>125</sup>

Penindasan juga dilakukan oleh para mandor untuk memaksa para kuli agar membeli barang dagangan mereka dengan harga

123. Hal inilah yang menyebabkan banyak kuli perempuan Jawa yang menjadi pelacur.

124. Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 112.

125. *Ibid.*, hlm. 117.

126. R. Boersma, *Ooskust van Sumatra, Jilid II: De Ontluiking van Deli*, (Deventer,



Gambar 2.18

**Pertunjukan seni di perkebunan karet Goodyear (kiri)  
dan para kuli sedang berjudi (kanan)**

Sumber: (diakses 3 Agustus 2016)

yang lebih tinggi.<sup>126</sup> Tidak hanya itu, kesengasaan para kuli semakin bertambah dengan praktek lintah darat yang dijalankan oleh kepala pengawas yang memaksa para kuli untuk menyerahkan sebagian besar gaji mereka untuk membayar hutang.

Berbagai tekanan dan eksploitasi dari tuan kebun, mandor, dan pengawas lambat laun akhirnya menimbulkan rasa tidak puas dan perlawanan dari para kuli. Pada 1902 kuli di sebuah perkebunan menyerang administratur karena membayar upah hanya dengan uang kedai, tidak seperti biasanya sebagian dengan uang tembaga dan sebagian lagi dengan kertas bon. Serangan para kuli terhadap kedai perkebunan juga selalu saja terjadi jika kuli tidak puas dengan berbagai perlakuan yang menindas mereka. Desakan dari pemerintah agar para pemilik perkebunan membayar upah kuli dengan mata uang yang berlaku sama sekali tidak dihiraukan. Dengan mengeluarkan bon kedai atau "bon estate" (perkebunan) para tuan kebun berhasil memperkokoh cengkraman kekuasaan mereka atas para kuli yang sama sekali tidak terjamah oleh pemerintah kolonial.<sup>127</sup>

1922), hlm. 237.

127. *Ibid.*, hlm. 118.

Tuan kebun tetaplah menjadi orang pertama yang menyita dan memotong upah kuli yang kemudian dilanjutkan oleh pengawas untuk menagih hutang. Potongan terpenting adalah angsuran untuk melunasi uang muka yang pernah diterima kuli saat kontrak awal disepakati. Sulitnya hidup di perkebunan membuat banyak kuli akhirnya tidak bisa membebaskan diri dari hutang selama masa kontrak kerja tiga tahun.<sup>128</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ekonomi di dalam perkebunan Sumatera Timur yang identik dengan peredaran berbagai jenis mata uang khusus perkebunan (uang kebon) merupakan dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, uang hanya memberikan keuntungan kepada pemilik perkebunan dan aparatnya. Sementara di pihak kuli eksploitasi uang kebon tersebut sangat merugikan para kuli dan merampas hak-hak mereka sebagai pekerja perkebunan. Peredaran uang kebon pada akhirnya melahirkan suatu sistem yang membentuk ikatan yang kuat antara si pembuat dan pemegang uang, yang mana si pemegang uang akan selalu menjadi pihak yang lemah dan tidak dilindungi oleh payung hukum yang memadai. Dengan berbagai cara si pembuat uang (dalam hal ini adalah tuan kebun) akan mengedarkan uang buatan mereka sendiri kepada para kuli perkebunan.

Sejarah industri perkebunan Pantai Timur Sumatera menemukan uang sebagai alat utama dalam memperebutkan keuntungan dari penanaman komoditas ekspor yang sangat laku di pasar dunia saat itu. Berbagai bangsa dan pihak yang berkepentingan dengan kekayaan dari industri perkebunan memanfaatkan uang sebagai senjata dalam memperluas hegemoni ekonomi dan moneter yang mendorong terjadinya *currency war* (perang mata uang) di Sumatera Timur. Ketidakberdayaan Belanda sebagai penguasa dalam mengontrol peredaran berbagai mata uang di Sumatera Timur sebelum abad ke-20 mempertegas eksistensi uang sebagai alat kekuasaan di era ekonomi modern yang pengaruhnya jauh melebihi dominasi politik.

128. *Ibid.*

# 3

## Dinamika Sumber dan Peranan Uang pra De Javasche Bank di Sumatera Timur (1907-1942)

Kondisi perekonomian Sumatera Timur berkembang semakin pesat, uang yang beredar pun semakin besar didominasi dolar Spanyol dan Strait Settlement Inggris. Hal ini mendorong pemerintah kolonial Belanda memandang perlu untuk mengatur sirkulasi uang yang beredar dengan membuka kantor cabang De Javasche Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dalam sistem ekonomi yang semakin liberal, perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Sumatera Timur semakin meningkat yang menghasilkan komoditas ekspor. Negara-negara tujuan ekspor sebagian besar justru terjadi di luar Belanda sehingga politik guldenisasi hanya dapat menghasilkan untuk ekspor ke negeri tersebut. Sementara itu, ekspor ke negara-negara di luar Belanda tetap menggunakan mata uang Real Spanyol dan Dolar Strait Settlement karena nilai tukar yang lebih tinggi. Namun demikian, politik guldenisasi dinilai berhasil dalam menempatkan gulden sebagai simbol kedaulatan Belanda atas ekonomi dan moneter di Sumatera Timur dan memperkokoh supremasi Belanda secara politis.

## **Pembentukan Infrastruktur Bank (De Javasche Bank Agentschappen Oostkust van Sumatra) Sebagai Pendukung Politik Guldenisasi**

Kapitalisasi ekonomi Sumatera Timur melalui pembukaan perkebunan-perkebunan besar untuk memenuhi permintaan pasar dunia akan tembakau, karet, kopi, teh, nila, *abaca* (serat), dan kelapa sawit menciptakan kegairahan ekonomi yang belum pernah terjadi di periode sebelumnya. Penemuan minyak bumi di Langkat pada awal abad ke-20 semakin membawa kawasan Sumatera Timur ke dalam jaringan perdagangan internasional saat itu. Industri perkebunan terbukti menjadi motor penggerak ekonomi yang sangat menguntungkan para investor, terutama pemodal asing dari Eropa dan Amerika. Otoritas pemerintah kolonial Belanda dan elite kesultanan juga ikut memetik keuntungan dari hasil bumi Sumatera Timur melalui eksploitasi perkebunan yang kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi minyak bumi.

Internasionalisasi ekonomi yang diiringi dengan internasionalisasi moneter Pantai Timur Sumatera yang mencapai titik kulminasi melalui eksploitasi perkebunan swasta asing pada akhirnya menimbulkan permasalahan sendiri bagi Belanda sebagai penguasa di daerah jajahannya ini. Realitas mengenai lemahnya nilai tukar dan popularitas uang dolar dibandingkan gulden di Sumatera Timur menimbulkan ketakutan dari De Javasche Bank yang diberi otoritas oleh Kerajaan Belanda sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Hindia-Belanda pada masa itu. Vitalnya relasi mata uang sebagai simbol dari kekuasaan dalam sebuah bangsa atau negara menjadi dasar utama dari sikap De Javasche Bank tersebut. Apalagi dengan ketiadaan kantor cabang De Javasche Bank di wilayah ini semakin memudahkan berbagai jenis mata uang dolar yang semakin mempersempit ruang bagi kehadiran gulden dalam aktivitas ekonomi masyarakat baik di luar maupun di dalam lingkungan perkebunan.

Gagasan pendirian kantor cabang De Javasche Bank di kawasan

Pantai Timur Sumatera dilakukan oleh Direksi DJB terkait dengan kebijakan “Politik Guldenisasi” di wilayah ini. Guldenisasi adalah kebijakan moneter yang diberlakukan oleh De Javasche Bank dengan persetujuan dari pemerintah kolonial untuk menyeragamkan penggunaan gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di kawasan Pantai Timur Sumatera.

*Ekspansi DJB di Sumatera Timur untuk mendukung politik guldenisasi sebagai respon lemahnya eksistensi gulden dibandingkan mata uang lainnya*

Politik guldenisasi terjadi akibat lemahnya eksistensi gulden dibandingkan dengan dolar di luar perkebunan dan uang kebon (token) untuk di dalam perkebunan Sumatera Timur. Situasi ini akhirnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan Dewan Direksi De Javasche Bank berkaitan dengan status Sumatera Timur sebagai jajahan Belanda yang bisa saja diambilalih oleh bangsa lain melalui ekonomi dan moneter. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi ekonomi perkebunan dan eksplorasi minyak bumi menjadikan Pantai Timur Sumatera tampil sebagai sumber keuangan baru setelah Pulau Jawa menarik minat yang besar bagi pengusaha asing dan juga bangsa asing untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atas daerah ini.

Kapitalisasi ekonomi Sumatera Timur yang diikuti dengan “Ledakan peredaran dolar” yang berada di luar kontrol DJB akhirnya ditanggapi oleh Dewan Direksi DJB sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak *octrooi* De Javasche Bank tertanggal 28 Oktober 1887 No. 897. Masalah ini kemudian dilaporkan oleh Dewan Direksi De Javasche Bank kepada Residen Sumatera Timur untuk diperiksa lebih lanjut mengenai kebenaran peredaran dolar yang berada di luar kontrol De Javasche Bank tersebut.<sup>1</sup>

Laporan yang diajukan oleh Direksi De Javasche Bank tersebut,

1. L. de Bree, *Gedenboek van De Javasche Bank Deel II*, (Weltevreden: G. Kolff, 1928), hlm. 319-321.

kemudian dijawab oleh Residen Sumatera Timur melalui surat resmi tertanggal 26 November 1987 No. 5286/3 bahwa peredaran uang kertas tak dikenal tidak terlalu banyak karena lalu lintas uang di masyarakat menggunakan cek yang kemudian diserahkan pada bank-bank di Singapura dan Penang lalu ke Sumatera Timur di rumah perdagangan uang (*money changer*).<sup>2</sup> Tanggapan dari residen Sumatera Timur ini ternyata tidak

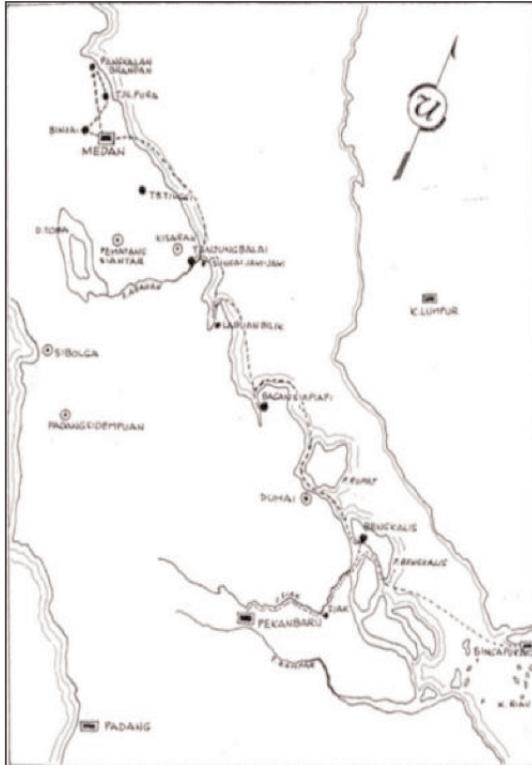
cukup menghapuskan kerisauan dari Dewan Direksi De Javasche Bank atas peredaran mata uang dolar di Pantai Timur Sumatera. Oleh karena itu, selama satu bulan (September sampai Oktober 1906) Presiden De Javasche Bank G. Vissering mengadakan perjalanan ke Pantai Timur Sumatera untuk membuktikan kebenaran rendahnya popularitas gulden Hindia dibandingkan dengan dolar.

Perjalanan tersebut dimulai Vissering dari Medan menuju bagian utara ke kota Pangkalan Brandan dan kembali lagi ke Medan melalui Tanjung Pura dan Binjai. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut SS. "Brouwer" menuju Tanjung Balai (Asahan), Sungai Jawi jawi, Labuan Bilik (Paneh), Bagan Siapi-api, Bengkalis. Vissering juga melalui Sungai Siak untuk mengunjungi Kota Siak dan Pekan Baru. Dari Pekan Baru perjalanan dilanjutkan terus ke semenanjung dan berakhir di Singapura seperti yang tampak pada peta berikut ini.<sup>3</sup>

*Di wilayah  
Sumatera Timur  
selain beraneka ragam  
dan nilai mata uang  
juga beredar semacam  
bilyet yang dikeluarkan  
oleh perusahaan-  
perusahaan  
dagang  
dan uang kebon*

2. *Ibid.*

3. Arsip Bank Indonesia, *Sekilas Sejarah Kantor-kantor Cabang Medan, Tanjung Balai, dan Tanjung Pura*. (Jakarta: Bank Indonesia, karya tidak diterbitkan, 1990), hlm. 2-3.



Gambar 3.1

### Rute perjalanan Mr. C. Vissering ke Pantai Timur Sumatera 1906

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1991)

Realitas peredaran uang yang berhasil diamati oleh Vissering di Sumatera Timur saat itu adalah peredaran mata uang yang beraneka ragam jenis dan nilainya. Keadaan ini tidak terlepas dari kapitalisasi daerah Sumatera Timur untuk industri perkebunan dan pertambangan. Pada saat itu, wakil Pemerintah Hindia-Belanda baru ada di Kerajaan Siak, sehingga keadaan ekonomi di wilayah utara sangat dipengaruhi oleh Semenanjung (Malaka) dengan segala sarannya, termasuk alat pembayaran yang berupa penggunaan mata uang dolar Meksiko. Selain beranekaragam mata uang yang beredar,

perubahan-perubahan sistem moneter di kawasan semenanjung ikut membawa perubahan ekonomi dan perbankan di Sumatera Timur.

Gambaran dari peredaran uang di berbagai daerah di Sumatera Timur berdasarkan hasil perjalanan Vissering adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Pantai Timur: Karena daerah ini berhadapan langsung dengan jazirah (Malaka) terjalin hubungan kegiatan kehidupan sehari-hari dengan jazirah ini yang menganut tata-uang dolar Semenanjung.
- b. Daerah pedalaman: di daerah ini masih beredar jenis-jenis mata uang lama seperti dolar Meksiko, dolar Inggris, dolar Hongkong, mata uang Serawak, bahkan mata uang Spanyol dan Yen juga masih berlaku.
- c. Daerah Pantai Barat: daerah di sisi Samudera Hindia ini mengikuti peraturan mata uang pemerintah Hindia-Belanda.

Oleh karena perbedaan dominasi jenis-jenis mata uang yang beredar antara satu tempat dengan tempat lainnya, menyebabkan tidak ada kesamaan nilai tukar sekalipun jarak antara dua tempat tidak begitu jauh. Kecenderungannya adalah bahwa semakin ke arah timur yang lebih didominasi mata uang dolar maka nilai dolar terhadap gulden semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya yang selisih nilai tukarnya mencapai 40%.

Dalam catatan Vissering<sup>4</sup> mata uang dolar yang beredar di Sumatera Timur beragam jenisnya seperti dolar Meksiko, dolar Hongkong, dolar Straits, dolar Amerika, dolar Jepang, dolar Inggris, dan dolar Spanyol. Berdasarkan laporan lembaga keuangan *Straits Settlements*, selama tahun 1895 hingga 1901 dollar Inggris yang masuk ke Sumatera Timur jumlahnya mencapai 200.107.879 dollar. Dan dari semua jumlah tersebut hanya 170.732.168 dolar yang terkontrol oleh pemerintah.

Selain di Sumatera Timur juga beredar semacam bilyet yang di-

4. G. Vissering, *Muntwezen en Circulatie-Banken in Nederlandsch-Indie*, (Amsterdam: J.H de Bussy, 1920), hlm. 112-113.

namakan "kasorder" (Surat Perintah Membayar = SPM) yang dikeluarkan oleh sub-cabang dari de *NederlandscheHandelMaatschappaj* (NHM) di Medan dalam valuta dolar. SPM yang berisi perintah kepada kasir NHM untuk membayar sejumlah uang dolar sebagaimana yang tertera ini dikeluarkan dalam pecahan-pecahan: \$1, \$2<sup>1/2</sup>, \$5, \$10, \$25, \$50, dan \$100. SPM ini juga diterima sebagai alat pembayaran di Deli dan Langkat dan bahkan juga di wilayah seberang (Malaka) meskipun dengan kurs 1% lebih rendah.



Gambar 3.2

**Bilyet atau Kasorder NHM senilai 5 dolar**

Sumber: G. Vissering (1920)

Meskipun di satu segi SPM ini serupa sifatnya dengan uang kertas bank yang dikeluarkan oleh suatu bank sirkulasi, namun dari segi lain tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang uang kertas bank. Yang jelas ketentuan pokok tentang penyediaan jaminan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang tentang pengedaran uang tidak dipenuhi oleh SPM ini. Terlebih-lebih SPM ini tidak ditandatangani oleh Direksi NHM melainkan hanya oleh Kepala dari kantor Sub-Cabang NHM di Medan. Dari sifatnya SPM ini sebenarnya

lebih cocok digolongkan sebagai “Surat dagang jangka pendek” yang memang telah dibubuhi materai secukupnya sebesar 0,10 gulden sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bea Materai.

Oleh karena teknik cetak SPM ini sangat sederhana, sehingga tidak luput dari kejahatan pemalsuan sebagaimana yang pernah terjadi. Cara pemalsuan bukan dilakukan dengan membuat SPM tiruan, tetapi dengan cara mengubah nilai uang yang tertera menjadi angka nilai uang yang lebih tinggi, misalnya dari angka 25 menjadi 100. Karena rapinya cara pemalsuan, maka SPM bernilai palsu ini tanpa menjumpai kesulitan untuk diterima menurut nilai palsunya.<sup>5</sup>

Menonjolnya nilai uang dalam satuan dolar juga melanda kawasan perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur yang didominasi oleh pemakaian uang kebon yang juga dalam nilai satuan dolar. Meskipun uang kebon hanya digunakan untuk membayar upah para kuli, keberhasilan tuan kebun untuk menjadikan uang kebon sebagai satu-satunya alat pembayaran di lingkungan perkebunan juga berpengaruh terhadap pegawai-pegawai Eropa yang ada. Pegawai Eropa yang bekerja di perkebunan terpaksa menukar gaji dari pemilik *onderneming* dalam hitungan gulden dengan dolar (dolar Straits dan dolar Meksiko yang dominan dipakai di perkebunan) agar dapat dibelanjakan untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup> Untuk memfasilitasi penukaran uang tersebut pihak perkebunan menyediakan kedai perkebunan (*kedeh*) sebagai satu-satunya tempat untuk menukar uang di lingkungan perkebunan. Kedai ini hanya membolehkan penukaran uang kebon dengan dolar Straits yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan gulden Hindia. Tingginya kurs dolar dibanding gulden ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi pemilik perkebunan, di mana mereka bisa membayar

5. Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Kantor Cabang Bank Indonesia Bengkulu 27 Juni 1907-31 Maret 1932, (Jakarta: Bank Indonesia, karya tidak diterbitkan: 1991), hlm. 5-6.

6. *Ibid.*, hlm. 123.

lebih murah untuk gaji pegawai Eropa dengan uang gulden. Sistem jual-beli di perkebunan yang dihitung dengan dolar (uang kebon untuk kuli dan dolar Straits untuk karyawan Eropa) menyebabkan para pegawai Eropa harus menukar uang gulden mereka dengan dolar agar dapat digunakan sebagai alat tukar membeli berbagai kebutuhan.

Para kuli cina yang ingin mengirimkan uang ke kampung halaman masing-masing juga harus menukar uang kebon mereka dengan dolar Straits. Praktik penukaran uang kuli-kuli Cina di kedai perkebunan ini sangat menguntungkan. Oleh karenanya, kedai perkebunan dan biro imigrasi yang bertugas menyediakan dan mengalokasikan kuli-kuli perkebunan ke Sumatera Timur sangat menganjurkan para kuli untuk memiliki transfer simpanan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi para kuli.<sup>7</sup>

TALON.		NOT TRANSFERABLE.		人別與轉得不	
		B. N <sup>o</sup> _____		行洋發祥港香到去	
		MONEY-ORDER.		CHINESE.	
JE _____		Please pay to _____		Name. _____	
Name _____		Dollars _____ (Hongkong currency)		Amount _____	
Estate _____		MEDAN _____ 19 _____			
Date _____		The Immigration Office,			
\$ _____ (Straits)		To Mess <sup>rs</sup> LAUTS WEGENER & Co.,			
\$ _____ (Hong curr.)		HONGKONG.			
		No. 27.			

Gambar 3.3  
Blangko transfer uang kuli Cina di Sumatera Timur

Sumber: G. Vissering (1920)

7. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 395.

Pada blangko transfer uang kuli Cina tersebut tertulis dengan jelas bahwa uang dolar Hongkong yang berlaku di Cina hanya bisa ditukar dengan dolar Straits, bukan dengan gulden. Fakta ini semakin menguatkan besarnya otoritas dolar dalam sistem moneter di perkebunan Sumatera Timur yang tidak mampu dikalahkan oleh gulden Belanda sebelum politik guldenisasi dicanangkan.

Popularitas uang dolar yang melebihi gulden ini tentu saja sangat mengkhawatirkan Dewan Direksi De Javasche Bank dan juga gubernur jenderal Hindia-Belanda. Ditambah lagi dengan beredarnya kasorder atau bilyet NHM dalam valuta dolar semakin melemahkan eksistensi gulden Hindia dalam sistem moneter di dalam dan luar perkebunan Sumatera Timur.

Berdasarkan hasil penelitian Mr. C. Vissering pada September sampai Oktober 1906 yang memperlihatkan peliknya persoalan moneter di Sumatera Timur. C. Vissering kemudian melaporkan hasil penelitiannya tersebut kepada Gubernur Jenderal dan Direktur Keuangan di Batavia. Melalui pertukaran pendapat serta surat-menyurat beberapa kali, baik dengan Gubernur Jenderal maupun dengan Direktur Keuangan (Menteri Keuangan), di samping dibicarakan secara intern di dalam rapat direksi sebanyak tidak kurang dari tujuh kali, khususnya yang berkaitan dengan tata cara yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter.

Diskusi antara Dewan Direksi DJB dengan Gubernur Jenderal dan Direktur Keuangan tersebut akhirnya memperkuat gagasan untuk menjadikan gulden Hindia sebagai satu-satunya alat pembayaran di Sumatera Timur. Akhirnya tanggal 26 Januari 1907 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda No. 3 tentang larangan memasukkan uang dolar ke seluruh wilayah Keresidenan Sumatera Timur. Surat keputusan tersebut menandai dimulainya "Politik guldenisasi" di Sumatera Timur. Aturan pelarangan penggunaan uang dolar ini juga berlaku untuk seluruh wilayah Bengkalis mulai tanggal 1 Mei 1907. Selain itu, di dalam surat keputusan tersebut juga tertulis bahwa di wilayah Sumatera Timur akan didirikan

beberapa kantor kas, seperti di Medan, Tanjung Pura, Tanjung Balai, dan Bengkalis. Perlunya keberadaan kantor cabang DJB untuk mendukung kesuksesan politik guldenisasi inilah yang menjadi latar belakang pembukaan kantor cabang Medan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, dan juga Bengkalis<sup>8</sup> sebagaimana yang termuat dalam laporan DJB berikut ini:

*“De Javasche Bank is dit jaar voorgegaan met de uitbreiding van het aantal vestigingen in Nederlandsch-Indië. Op 30 Juli 1907 kon het Agentschap te Medan worden geopend; daarop volgde 1 Augustus de opening van het Agentschap te Bandjarmasin. Terwijl op 27 Juni het Correspondentschap Bengkalis, op 15 Januari en 3 Februari 1908 de Correspondentschap te Tandjong Balei in Asahan en Tandjong Poera in Langkat voor het publiek worden open gesteld. Het vestige van nieuwe kantoren te Samarinda en op Bangka is in onderzoek. Uitbreiding tot nog meer plaatsen is in overweging genomen. De questie Bandung, waarvan in ons vorig jaarverslagsprake was, was nog steeds op eene oplossing.”<sup>9</sup>*

“De Javasche Bank dalam tahun ini telah membawa kemajuan dengan perluasan pendirian beberapa kantornya di Hindia Belanda. Pada tanggal 30 Juli 1907 dapat diresmikan pembukaan cabang Medan; kemudian menyusul pada 1 Agustus pembukaan cabang Banjarmasin. Sedangkan pada 27 Juni kantor koresponden di Bengkalis, pada 15 Januari dan 3 Februari kantor-kantor koresponden di Tanjung Balai di Asahan, Tanjung Pura di Langkat dinyatakan dibuka untuk umum. Penetapan kantor-kantor baru di Samarinda dan di Bangka sedang dalam penelitian. Perluasan ke tempat-tempat lainnya sedang dipertimbangkan. Persoalan Bandung yang disebut dalam laporan tahunan yang lalu masih menanti penyelesaian.”

8. Arsip Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1.

9. Arsip Bank Indonesia, *Jaarverslag van de Javasche Bank, 1907/1908.*

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 43 tanggal 13 Maret 1907, De Javasche Bank diizinkan untuk mendirikan Kantor Cabang di Medan sebagai “Kantor induk” dan “Kantor koresponden” di Bengkalis. Setelah pendirian Kantor Cabang di Medan ini barulah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dalam wilayah Asahan dan di Tanjung Pura dalam wilayah Langkat yang menjadi kota-kota penting dalam industri perkebunan di Sumatera Timur. Permohonan pendirian bagi kedua kantor ini diajukan kepada Gubernur Jenderal dengan surat No. 796 tanggal 20 September 1907 yang persetujuannya diberikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 17 tertanggal 9 November 1907.<sup>10</sup>

*DJB bertindak  
sebagai bank sirkulasi  
sekaligus sebagai  
bank niaga  
yang secara langsung  
ikut membiayai  
perusahaan-perusahaan*

Sebagai sebuah bank sirkulasi, tugas utama De Javasche Bank adalah mengeluarkan uang DJB untuk digunakan di Hindia Belanda. Namun baru pada tahun 1914, tahun pertama meletusnya PD-I, uang kertas DJB secara resmi diakui sebagai alat pembayaran yang sah untuk wilayah Hindia Belanda. Selain sebagai sebuah bank sirkulasi, DJB juga sekaligus bertindak sebagai bank niaga yang turut serta secara langsung membiayai perusahaan-perusahaan dagang dan perusahaan pertanian.<sup>11</sup>

Pada dekade 1920an, terjadi sebuah perubahan pada landasan hukum DJB. Sejak 1922, landasan hukum DJB tidak lagi bersandar pada oktroi (perpanjangan terjadi pada 2 Januari 1906 yang berlaku hingga 31 Maret 1921). Sejak 1922, landasan operasionalnya ber-

10. Arsip Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 5.

11. Van Laanen, “Di antara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina,” dalam Booth, dkk. (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, hlm. 346.

sandar pada Undang-Undang De Javasche Bank 1922 (*De Javasche Bankwet 1922*). Secara garis besar isi De Javasche Bankwet tidak jauh berbeda dengan oktroi-oktroi sebelumnya menjadi landasan hukum DJB,<sup>12</sup> yaitu:

- Menerbitkan uang kertas bank.
- Memperdagangkan logam mulia dan alat-alat pembayaran luar negeri.
- Memberikan kredit kepada perusahaan dan perorangan.
- Memberikan uang muka kepada perusahaan-perusahaan dengan jaminan surat berharga atau barang dagangan.
- Bertindak sebagai kasir pemerintah dan memberikan uang muka jangka pendek kepada pemerintah Hindia Belanda sampai sejumlah 6 juta gulden tanpa bunga.
- Menyelenggarakan kliring antar bank-bank.<sup>13</sup>

Akan tetapi jika disimak secara lebih mendalam pasal 2, terlihat jelas bahwa pemerintah Belanda secara formal menjadikan DJB, bank swasta, sebagai satu-satunya bank sirkulasi di Hindia Belanda untuk masa 15 tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis selama setahun jika masa berlakunya berakhir. Selain fungsinya sebagai bank sirkulasi, bank ini juga diberi hak untuk bertindak sebagai bank niaga atau komersial. Ketetapan ini sekaligus menempatkan DJB berada di kontrol pemerintah.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang tersebut terdapat juga pasal-pasal yang bersifat larangan terhadap DJB terlibat ke dalam ekonomi praktis

12. Terjemahan Undang-Undang DJB 1922, oleh R. Hardjo Santoso, 12 November 2003.
13. Lihat risalah (notulen) rapat Direksi DJB No.47, 22 Februari 1909 pukul 11.45; dikemukakan bahwa penyelenggaraan kliring pertama di Indonesia berlangsung di Batavia pada 15 Februari 1909. Peserta kliring diikuti oleh enam bank, yaitu Nederlandsche Handel Mij Factorij, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, The Chartered Bank of India, Australia and China, Nederlandsch Indische Escompto Mij, Nederlandsch Indische Handelsbank, dan DJB. Lihat selengkapnya Bank Indonesia, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, *Sejarah Kliring di Indonesia* (Januari 2002), hlm. 2.
14. Wardhana, "The Indonesian Banking System," hlm. 339.

yang dinilai dapat membuat pimpinan DJB terperangkap ke dalam konflik kepentingan. Ada tiga larangan terhadap DJB, yaitu: melakukan penyertaan modal DJB pada perusahaan lain, memberikan kredit tanpa agunan yang mencukupi serta menjual dan membeli saham-sahamnya sendiri.

Sebagai kasir pemerintah, DJB diberi tugas untuk melayani pemerintah tanpa memungut biaya, dan bertindak sebagai perantara ketika pemerintah ingin menerbitkan obligasi perbendaharaan negara. Demikian pula diadakan perubahan-perubahan terhadap ketentuan permodalan cadangan serta pembagian keuntungannya. Setelah berlakunya *Javasche Bankwet* 1922, ada upaya yang dilakukan oleh DJB untuk mengembalikan nilai mata uang dengan jaminan standar emas yang pamornya merosot selama PD-I, antara lain dengan menetapkan bahwa harga emas adalah *f*1.653 per kilogram emas murni.<sup>15</sup>

### **De Javasche Bank Agentschap Bengkulu (27 Juni 1907)**

Pembukaan De Javasche Bank Agentschap Bengkulu bertujuan untuk mendukung politik guldenisasi DJB di Sumatera Timur. Bengkulu merupakan sebuah kota penting pada masa kolonial Hindia Belanda. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur pada abad ke-19. Sebelum akhirnya menjadi Ibu kota Keresidenan Sumatera Timur, Bengkulu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Siak. Ekspansi kekuasaan kolonial atas Kesultanan Siak dimulai setelah disepakatinya Traktat Siak pada 1 Februari 1858. Isi Traktat Siak ini antara lain:

1. Raja Siak menyatakan bahwa kerajaan menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda di bawah kedaulatan Belanda.
2. Pemerintah Belanda diizinkan mendirikan pos di Bengkulu.
3. Pengganti Raja atau Raja Muda harus bersumpah setia kepada Jenderal.

15. Hartono, "Bank Indonesia," hlm. 27.

4. Tanpa izin dari Residen Riau Sultan tidak dibolehkan berhubungan dengan pemerintah asing dan melarang orang asing menetap di wilayah kekuasaannya.
5. Pemerintah Hindia Belanda jika berkeinginan dapat mengambil alih pajak atau pendapatan sultan dengan diberi ganti rugi.<sup>16</sup>

Perjanjian tersebut menyebabkan peranan Bengkalis semakin penting bagi Belanda, yakni sebagai pos terdepan Belanda di ???? untuk menghalau ekspansi politik dan ekonomi Inggris yang berada di Semenanjung Melayu. Posisi strategis yang dimainkan oleh Beng-



Gambar 3.4

### Peta Bengkalis berhadapan langsung dengan Selat Malaka

Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

16. Budi Agustono, dkk., *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Timur*, (Bandung: Wahana Informasi Masyarakat dan AKATIGA, 1997), hlm.22

kalis sebagai garda terdepan dari otoritas kekuasaan Belanda yang langsung berhadapan dengan koloni Inggris di Semenanjung Melayu tersebut tampak pada gambar 3.4.

Pada 15 Mei 1873 pemerintah Hindia Belanda menjadikan Sumatera Timur sebagai sebuah keresidenan dengan Bengkalis sebagai ibukota. Penetapan Bengkalis sebagai Ibukota Keresidenan Sumatera Timur dikarenakan pelabuhan alam Bengkalis yang strategis membuat Belanda menekan Siak agar Bengkalis diserahkan kepada Belanda. Sebagai ganti rugi Belanda akan membayar f8000 per tahun kepada Kesultanan Siak.<sup>17</sup>

Berawal dari sebagai pos terdepan Belanda, peranan Bengkalis sebagai pintu akses lalu lintas perekonomian antara Sumatera Timur dengan Semenanjung Melayu dan Straits Settlements semakin besar setelah dijadikannya kota tersebut sebagai ibukota Keresidenan Sumatera Timur pada 1873. Setelah semua wilayah Pantai Timur Sumatera berhasil jatuh ke tangan Belanda, ibukota Keresidenan Sumatera Timur kemudian dipindahkan ke Medan yang dianggap lebih strategis karena dekat pusat ekonomi perkebunan. Pemindahan ibukota keresidan Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan tersebut dilakukan oleh pemerintah kolonial pada 1887.

Walaupun Ibukota Keresidenan Sumatera Timur dipindahkan dari Bengkalis ke Medan, hal tersebut tidak mengurangi sisi strategis yang dimiliki oleh Bengkalis. Bengkalis tetap menjadi pos terdepan Belanda untuk membendung ekspansi ekonomi Inggris di Selat Malaka. Sisi strategis Kota Bengkalis inilah yang membuat De Javasche Bank tertarik untuk membuka kantor cabangnya di kota tersebut. Selain alasan politis seperti yang telah dijelaskan di atas, pembukaan kantor cabang De Javasche Bank Bengkalis terkait juga dalam upaya

17. Datuk Abdul Hamid, *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*, (Medan: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, 2011), hlm. 12.
18. Arsip Bank Indonesia, Sekilas Sejarah Kantor Cabang Bengkalis, *Karya Tidak Diterbitkan*, 1990.



Gambar 3.5  
Peta kota Bengkulu awal abad ke-20.

Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

besar Belanda untuk menegaskan kedaulatan ekonomi di Sumatera Timur melalui kebijakan “Politik guldenisasi” seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.<sup>18</sup>

Masalah peredaran uang di Bengkulu dan sekitarnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mengingat posisinya yang langsung berhadapan dengan Semenanjung Melayu dan Straits Settlements (Singapura sebagai kota yang terdekat dengan Bengkulu) menempatkan vitalnya kedudukan daerah ini bagi pemerintah kolonial. Upaya guldenisasi dengan menjadikan Bengkulu sebagai ujung tombak terutama sekali bertujuan untuk menghadang derasnya arus dolar dari semenanjung masuk ke wilayah Sumatera Timur melalui Bengkulu. Disinilah keistimewaan yang dimiliki oleh Bengkulu dalam mendukung keberhasilan politik guldenisasi Belanda meskipun se-

cara ekonomis letaknya jauh dari pusat industri perkebunan Sumatera Timur.

Meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang larangan memasukkan uang-uang dolar ke bagian daratan Sumatera Timur sejak tanggal 26 Januari 1907 No. 3, aturan ini baru berlaku seluruh wilayah Bengkalis mulai 1 Mei 1907.<sup>19</sup> Keterlambatan pemberlakuan regulasi pelarangan uang dolar tersebut terjadi karena belum dibukanya kantor cabang DJB sebagai infrastruktur pendukung politik guldenisasi. Oleh karena itu, DJB kemudian melakukan peninjauan di kalangan masyarakat untuk mencari tahu tanggapan mengenai rencana guldenisasi ini. Hasil dari peninjauan tersebut diperoleh rencana untuk mendirikan kantor-kantor DJB di beberapa tempat, yakni Bengkalis, Siak, dan Pakan Baroe (Pekanbaru).

*Bij de Directeur van Financiën er op aan te dringen dat van Gouvernementswege gezord wordt voor behoorlijke bewaking van de eigendommen en waarden bij onze aanstaande vestigingen te Bengkalis, Siak en Pakan Baroe. Wordt hierbij aangeteekend dat bij een mondelinge onderhoud van de President met den genoemden Directeur, deze de verzekering heft gegeven, dat hij het noodige zal verrichten om aan ons verlangen te voldoen.*

Direktur Keuangan bersikeras bahwa Pemerintah memantau kepemilikan dan nilai-nilai pendirian kantor De Javasche Bank yang akan dibangun di Bengkalis, Siak dan Pekanbaru. Berdasarkan dengar pendapat dari Presiden dan Direktur Keuangan, bahwa Presiden akan memberikan jaminan untuk melakukan pendirian kantor sesuai yang kami inginkan.<sup>20</sup>

19. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 74 dan 75, 1907.*
20. Arsip Bank Indonesia, *Notulensi Rapat Direksi De Javasche Bank, 11 Februari 1907.*

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan akhirnya diputuskan untuk sementara akan didirikan kantor di Bengkulu terlebih dahulu, sedang untuk kedua tempat lainnya akan dilihat perkembangan selanjutnya. Pembukaan DJB *agentschap* Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 Tanggal 13 Maret 1907 yang memberikan izin kepada De Javasche Bank untuk mendirikan Kantor Koresponden (semacam kantor kas) di Bengkulu dan Kantor Cabang di Medan serta Banjarmasin.<sup>21</sup>

*De Javasche Bank  
agentschap Bengkulu  
adalah alat politik  
Belanda dalam  
membentengi Pantai  
Timur Sumatera dari  
gempuran dolar  
Semenanjung  
Melayu*

De Javasche Bank *agentschap* Bengkulu adalah alat politik Belanda dalam membentengi Pantai Timur Sumatera dari gempuran dolar Semenanjung Melayu yang selama ini digunakan oleh Inggris dalam memperluas hegemoni ekonominya di Pulau Sumatera, terutama Pantai Timur Sumatera sebagai penghasil tanaman ekspor yang laku di pasar dunia saat itu. Pendirian kantor cabang DJB Bengkulu mengharuskan lalu lintas ekspor-impor hasil perkebunan yang melewati Bengkulu menggunakan gulden, bukan dolar seperti yang lazimnya terjadi sebelum politik guldenisasi diberlakukan. DJB *agentschap* Bengkulu juga dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan gulden dalam transaksi ekspor-impor perkebunan di kawasan Bengkulu. Dewan Direksi DJB telah menyiapkan pengiriman uang-uang gulden beserta pecahan uang kecil lainnya untuk diedarkan ke Sumatera Timur melalui kantor cabang DJB.<sup>22</sup>

Pada tahap pembukaan DJB *agentschap* Bengkulu, Direksi De Javasche Bank dalam rapatnya tertanggal 4 Februari 1907 telah memikirkan masalah personel yang akan disertai tugas-tugas di kan-

21. Arsip Bank Indonesia, *Notulensi Rapat Direksi De Javasche Bank, 18 Maret 1907*.

22. Arsip Bank Indonesia, *op.cit.*, hlm. 6.



Gambar 3.6  
**Kantor DJB Agentschap Bengkalis (1915-1925)**

Sumber: Tropenmuseum

tor-kantor yang segera dibuka (Bengkalis dan Medan). Persiapan pendirian kantor koresponden Bengkalis ini dilakukan oleh Von Hemert bersama D.J Ledebouer (kasir pembantu di kantor pusat), R.H.A. van der Zweep (pegawai sukarela), dan Lim Peng Bo (kasir) serta Minggu (penghitung uang) yang berasal dari cabang Pontianak.

Satu bulan menjelang pembukaan kantor koresponden Bengkalis, L. von Hemert membeli sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai gedung kantor. Demi menjamin keamanan, gedung kantor koresponden Bengkalis ini beserta seluruh inventarisnya didaftarkan dalam asuransi kebakaran sebesar f5.000. Setelah semua persiapan selesai dan Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal turun, pada tanggal 21 Juni 1907 kantor koresponden cabang Bengkalis akhirnya dibuka.

Tabel 3.1

## Data Personalis Kantor Cabang/ kantor koresponden DJB Bengkulu

No	Nama	Jabatan	Masa Dinas	Gaji
1	L. von Hemert	Pejabat	9 th. 8 bl.	f 600,-
2	B.J. Ledeboer	Pejabat	3 th. 7 bl.	f 350,-
3	R.K.A. van der Zweep	Pegawai	1,5 bl.	f 100,-
4	Lim Peng Bo	Kasir	2 th. 7 bl.	f 135,-
5	Minggo	Penagih hutang	6 th. 5 bl.	f 18,-

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1991)

Para pegawai yang ditempatkan di kantor koresponden Bengkulu tersebut diberi tunjangan harian sebesar 6 gulden bagi pegawai bangsa Eropa, 2 gulden bagi pegawai Cina, dan 1 gulden bagi pegawai pribumi. Rincian masa jabatan dan gaji yang diterima oleh pegawai DJB kantor koresponden Bengkulu dapat diamati pada tabel 3.1.



Gambar 3.7

Pegawai DJB *Agentschap* Bengkulu (1915-1925)

Sumber: Tropenmuseum

Tabel 3.2  
Pemimpin De Javasche Bank cabang Bengkulu

No	Nama	Tahun Menjabat
1	C. Reijgers	16 Mei 1907 – 15 Mei 1909
2	E. Congrijp	15 Mei 1909 – 21 Juni 1910
3	L.D. Termijtelen	21 Juni 1910 – 25 Juni 1913
4	H.E.L.S. Binnendijk	25 Juni 1913 – 20 Juni 1914
5	P.J.F van Twisk	20 Juni 1914 – 29 Juni 1915
6	R.K.A van Der Zweep	29 Juni 1915 – 27 Juli 1916
7	W.G Dumas	27 Juli 1916 – 30 Juni 1917
8	C.M. Kamerling	30 Juni 1917 – 30 Juni 1919

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1991)

Tanggal 24 Juni 1907, C. Reijgers (juru tulis di kantor cabang Solo) diangkat oleh Direksi De Javasche Bank sebagai pemimpin kantor kas cabang Bengkulu. Atas tugasnya ini C. Reijgers diberikan gaji sebesar 150 gulden dan tunjangan sebanyak 50 gulden.

### **De Javasche Bank Agentschap Medan (30 Juli 1907)**

Kebijakan “guldenisasi” Sumatera Timur menempatkan kota Medan tempat didirikannya kantor cabang *De Javasche Bank* yang ke-11 di Hindia-Belanda melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 43 tanggal 13 Maret 1907. Untuk aktivitas moneter dan perbankan saat ini di Sumatera Timur, kantor Cabang Medan difungsikan sebagai “Kantor induk” sementara kantor cabang Bengkulu menjadi “Kantor koresponden” atau semacam kantor kas.

Pada saat dibuka tanggal 30 Juli 1907 kantor cabang *de Javasche Bank agentschap* Medan menempati sebuah bangunan sementara yang berada dekat dengan kantor pusat pemerintahan Belanda di Medan. Untuk gedung kantor yang permanen pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan kantor DJB *agentschap* Medan di Esplanade (lapangan umum). Pembangunan kantor permanen ini akan dilakukan sesegera mungkin dan diharapkan dapat terlaksana sebelum selesainya kegiatan “guldenisasi”.

November 1907 Pemimpin Cabang Medan diberi kuasa untuk melakukan pembelian sebidang tanah dari Sultan Langkat bagi pembangunan gedung kantor di Tanjung Balai dengan anggaran dana sebesar 1.000 gulden.

Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen di Kantor Cabang Medan ini dilakukan bersamaan dengan perluasan gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) tahap ke-2 pada 1912 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung kantor beberapa kantor cabang lainnya di Hindia Belanda, antara lain gedung-gedung Kantor Cabang di Ujung Pandang (gedung lama tahun 1912), Solo (tahun 1912), Bandung (tahun 1915), Yogyakarta (tahun 1915), Manado (tahun 1916, sebelum direnovasi), Cirebon (1918), serta Banda Aceh (tahun 1918). Kesemua bangunan gedung kantor cabang *de Javasche Bank* tersebut menunjukkan ciri-ciri arsitektur



Gambar 3.8  
Kondisi gedung DJB Agentschap Medan saat pertama dibuka (1909)

Sumber: Tropenmuseum



Gambar 3.9  
Foto Pegawai DJB *Agentschap* Medan (1915 – 1925)

Sumber: Tropenmuseum



Gambar 3.10  
Kantor DJB *Agentschap* Medan (1930)

Sumber: Arsip Nasional Belanda

yang sama dengan ciri arsitektur gedung klasik di Eropa masa itu.

Dalam menjalankan aktivitas perbankan, De Javasche Bank *agentschap* Medan juga mengalami pergantian pimpinan dalam jangka waktu tertentu, seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Pemimpin De Javasche Bank cabang Medan

No	Nama	Tahun Menjabat
1	L.von Hemert	16 Mei 1908 – 21 Juni 1910
2	L.W. van Suchtelen	21 Juni 1910 – 25 Juni 1913
3	P.F.van den Berg (Sm)	25 Juni 1913 – 31 Mei 1914
4	P.F.van den Berg	31 Mei 1914 – 30 Juni 1918
5	K.W.J. Michielsen	30 Juni 1918 – 31 Juli 1920
6	F.H.Westerling (Pj)	31 Juli 1920 – 31 Juli 1921
7	K.W.J. Michielsen	31 Juli 1921 – 1 Juni 1926
8	M.H.A. de Rooy	1 Juni 1926 – 15 Juni 1929
9	L.C. Wiemans	15 Juni 1929 – 15 Juni 1933
10	M.H.A. de Rooy (Pj)	15 Juni 1933 – 1 Juni 1934
11	L.D. Termytelen	1 Juni 1934 – 15 Mei 1938
12	R.W.C.B.R. Wagner	15 Mei 1938 <sup>23</sup>

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1990)

### **De Javasche Bank Agentschap Tanjung Balai (15 Januari 1908)**

Tanjung Balai ibukota dari *Afdeeling* Asahan yang menjadi salah satu dari daerah administratif di Keresidenan Sumatera Timur. Tanjung Balai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan. Eksistensi Tanjung Balai dalam perekonomian Sumatera Timur semakin vital setelah pembangunan Jembatan Kisaran dan pembukaan jalur kereta api Medan-Tanjung Balai. Semakin lancarnya jalur transportasi tersebut mendorong lancarnya pengangkutan hasil-hasil perkebunan dari wilayah Asahan ke pasar internasional. Posisi strate-

23. Selama masa pendudukan Jepang De Javasche Bank dilikuidasi dan tidak ada laporan hingga dibuka kembali Kantor Cabang Medan pada 11 Maret 1946.

gis inilah yang menyebabkan daerah ini sangat penting artinya bagi Belanda, terutama sekali dalam menyukseskan kebijakan guldenisasi Pantai Timur Sumatera.

Sementara itu kantor kas Tanjung Balai saat pertama dibuka dipimpin oleh L.C. Wiemans. Tanggal 31 Maret 1938 kantor cabang Tanjung Balai ditutup.



Gambar 3.11

**Kantor DJB Agentschap Tanjung Balai (1915 – 1925)**

Sumber: Tropenmuseum

Tabel 3.4

**Pemimpin De Javasche Bank cabang Tanjung Balai**

No	Nama	Tahun Menjabat
1	L.C Wiemans	16 Mei 1908 – 21 Juni 1910
2	H.R. Delachaux	21 Juni 1910 – 21 Juni 1911
3	W.C. Dumas	21 Juni 1911 – 25 Juni 1913
4	E. Conggrijp	25 Juni 1913 – 27 Juli 1917
5	L.D. Termytelen	27 Juli 1927 – 30 Juni 1919
6	F.J.A. Blokbergen	30 Juni 1919 – 31 Juli 1921

No	Nama	Tahun Menjabat
7	J.Z. Mewe	31 Juli 1921 – 15 Juli 1922
8	E.H. ter Bruggen Hugenholtz	15 Juli 1922 – 15 Mei 1924
9	C. J. Persijn	15 Mei 1924 – 15 Juni 1925
10	J. Rens	15 Juni 1925 – 15 Juni 1928
11	J.C.A. Roberts	15 Juni 1928 – 15 Juni 1929
12	J. Looman	15 Juni 1929 – 15 Juni 1932
13	A.F.Ohlenschlager	15 Juni 1932 – 1 Juni 1935
14	H.C.Hordijk	1 Juni 1935 – 1 Juni 1936
15	J. Willemsz Ceeroms	1 Juni 1936 – 1 Juni 1937
16	L. Swaan	1 Juni 1937 – 15 Mei 1938

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1990)



Gambar 3.12

Foto pegawai DJB Agentschap Tanjung Balai (1915 – 1925)

Sumber: Tropenmuseum

### **De Javasche Bank Agentschap Tanjung Pura (3 Februari 1908)**

Tanjung Pura saat ini merupakan sebuah kota yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sejarah mencatat, di kota ini pernah berdiri kantor cabang De Javasche Bank. Pendirian kantor DJB di suatu kota tidak lepas dari tingginya tingkat ekonomi di kota tersebut. Pembukaan perkebunan tanaman komoditas ekspor dalam skala besar oleh berbagai *onderneming* dan juga eksplorasi minyak bumi di awal abad ke-20 menjadikan Langkat tumbuh sebagai kota dengan pergerakan ekonomi yang sangat tinggi. Besarnya potensi ekonomi yang berkorelasi dengan sistem peredaran uang masa itu menyebabkan distribusi uang di Langkat sebelum politik guldenisasi didominasi oleh mata uang dolar. Karena itulah pemerintah kolonial kemudian menetapkan pembukaan kantor cabang DJB di Tanjung Pura sebagai bagian dari politik guldenisasi Sumatera Timur.

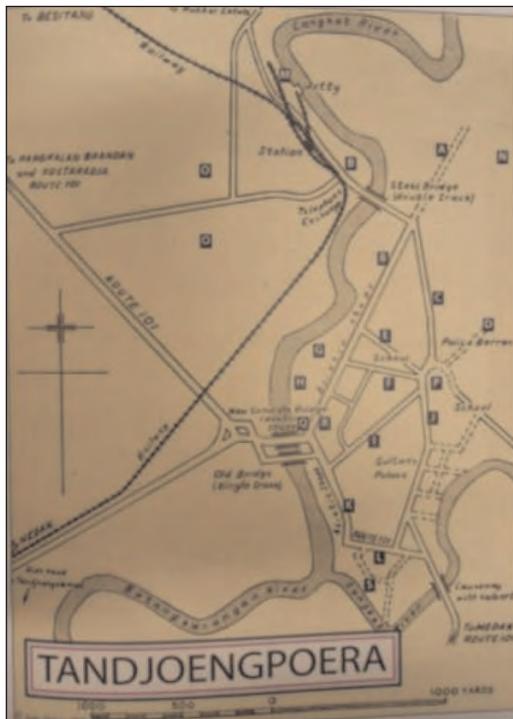


Gambar 3.13

#### **Peta Tanjung Pura tahun 1925**

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Di awal masa Kesultanan Langkat, perekonomian daerah ini terutama berasal dari hasil pertanian, kehutanan (kayu, rotan, damar, nibung), hasil laut, dan perkebunan (tembakau, karet, kelapa, kopi, lada, dan pinang). Setelah ditemukannya minyak bumi di Pangkalan Brandan (Sei Lapan) pada tahun 1880, kemajuan Kesultanan Langkat meningkat dengan sangat cepat. Pertambangan minyak bumi terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Langkat setelah sektor perkebunan.<sup>24</sup>



Gambar 3.14

**Peta Tanjung Pura tahun 1925**

Sumber: Perustakaan Nasional Republik Indonesia

24. Datuk Abdul Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Perekonomian Kesultanan Langkat semula bertumpu pada dari hasil konsesi perkebunan perusahaan-perusahaan swasta asal Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dll. Namun setelah ditemukannya potensi minyak yang luar biasa, perekonomian kota Tanjung Pura sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Langkat mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan Kesultanan Langkat pada masa kejayaannya, hanya Sultan Langkat satu-satunya Sultan di Indonesia yang memiliki kapal tanker minyak untuk menjual minyak-minyak dari Langkat. Selain itu, Sultan Langkat juga merintis lapangan terbang untuk penerbangan sipil, namun kini dibekas landasan tersebut telah menjadi perkampungan, yang tersisa hanya menara airnya saja yang tidak terawat.<sup>25</sup>

Perkembangan ekonomi Tanjung Pura yang menjanjikan tersebut kemudian membawa berdampak pada banyaknya peredaran mata uang asing di wilayah ini. Hal ini terjadi akibat dari maraknya perdagangan antar wilayah – terutama dengan asing – dalam rangka perdagangan minyak bumi dan hasil perkebunan yang menggunakan mata uang selain gulden. Peredaran mata uang asing yang beragam di wilayah ini membuat khawatir pemerintah Belanda. Untuk itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam menegakkan kebijakan guldenisasi di wilayah Sumatera Timur.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Presiden De Javasche Bank, Vissering, melakukan perjalanan selama satu bulan di kawasan Keresidenan Sumatera Timur pada 1906 untuk melihat besarnya peredaran mata uang dolar dibandingkan gulden. Dalam kunjungan tersebut, Vissering melakukan perjalanan dari Medan, menyusuri Pantai Timur Sumatera dan mengakhiri perjalanan di Singapura. Di wilayah Kesultanan Langkat sendiri, perjalanan Vissering dari Kota Medan menuju bagian utara mengunjungi Kota Pangkalan Brandan sebagai pusat pertambangan minyak di Langkat, kemudian menuju Tanjung Pura, lalu mengunjungi sebelum Binjai kemudian

25. *Ibid.*, hlm. 104.

akhirnya kembali ke Medan.

Dari perjalanan tersebut Vissering menemukan fakta bahwa dominasi gulden atas mata uang asing lain terutama dolar sangat lemah. Untuk itu dalam laporannya, ia menyarankan untuk membuka kantor-kantor DJB untuk mengawasi peredaran mata uang, juga untuk mengawasi perekonomian di wilayah Sumatera Timur. Di dalam rekomendasinya itu, ia juga menyarankan untuk membuka kantor cabang di Kota Tanjung Pura sebagai pusat perekonomian di Kesultanan Langkat.

Pendirian Kantor Cabang De Javasche Bank Tanjung Pura tidak jauh waktunya dengan pendirian Kantor Cabang De Javasche Bank Tanjung Balai di Asahan. Pendirian kedua kantor cabang itu hanya berbeda sekitar satu bulan. Bahkan pendirian gedungnya dikerjakan oleh arsitek yang sama, yakni Biro Perancang Hulswit. Hingga akhirnya pada 3 Februari 1908 Kantor Cabang DJB Tanjung Pura secara resmi dibuka. Kantor DJB Tanjung Pura merupakan kantor cabang ke-14 dari De Javasche Bank.



Gambar 3.15

**Kantor DJB Agentschap Tanjungpura (1915 – 1925)**

Sumber: Tropenmuseum

Sama seperti cabang-cabang de Javasche Bank lainnya di Sumatera Timur, Kantor De Javasche Bank cabang Tanjung Pura juga mengalami beberapa kali pergantian pemimpin seperti yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.5  
Pemimpin De Javasche Bank cabang Tanjung Pura

No	Nama	Tahun Menjabat
1	W.C. Dumas	16 Mei 1908 – 21 Juni 1910
2	E. Conggrijp	21 Juni 1910 – 31 Mei 1914
3	R.K.A.van der Zweep (PJ)	31 Mei 1914 – 29 Juni 1915
4	H.L.E.S. Binnendijk	29 Juni 1915 – 30 Juni 1917
5	J. van Hasselt	30 Juni 1917 – 30 Juni 1919
6	J.H.van Lidth de Jeude	30 Juni 1919 – 31 Juli 1920
7	H. Rademaker	31 Juli 1920 – 31 Juli 1921
8	J. Rens	31 Juli 1921 – 30 Juni 1923
9	C.B. van Vooren	30 Juni 1923 – 15 Mei 1924
10	H.D. Canne	15 Mei 1924 – 15 Juni 1925
11	J. Looman	15 Juni 1925 – 1 Juni 1926
12	R.W.C.B.R. Wagner	1 Juni 1926 – 15 Juni 1927

Sumber: Arsip Bank Indonesia (1990)

Saat pertama kali di buka tahun 1908, DJB Tanjung Pura berperan sebagai kantor koresponden semacam kantor kas dari De Javasche Bank di wilayah utara Sumatera Timur. Kantor kas Tanjung Pura dipimpin pertama kali oleh W.C Dumas. Kantor Cabang DJB Tanjung Pura tidak berumur panjang, yakni persis hanya sekitar 19 tahun sejak didirikan pada 1908. Penutupan kantor cabang ini terkait dengan merosotnya kondisi ekonomi Sumatera Timur, khususnya Tanjung Pura akibat resesi ekonomi dunia yang berdampak hingga ke Sumatera Timur. Kantor Cabang De Javasche Bank Tanjung Pura ditutup pada 1 April 1927 ketika kepemimpinan diemban oleh R.W.C.B.R. Wagner.



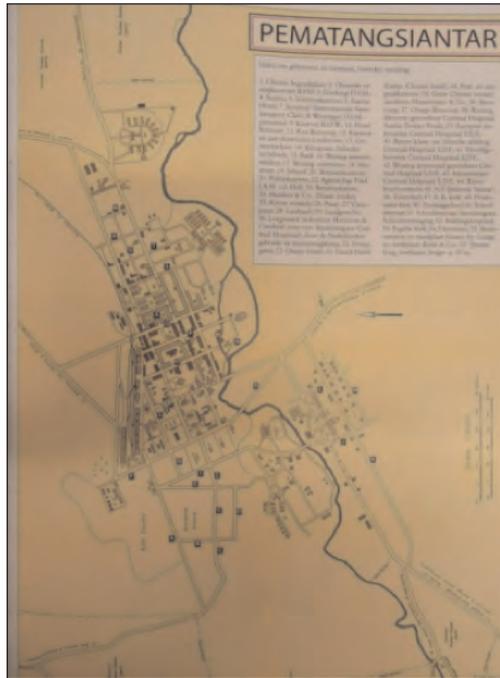
Gambar 3.16

Foto pegawai DJB Agentschap Tanjung Pura (1915 – 1925)

Sumber: Tropenmuseum

### **De Javasche Bank Agentschap Pematang Siantar (1 Oktober 1923)**

Setelah mendirikan De Javasche Bank Agentschap Kediri, DJB kemudian mendirikan De Javasche Bank Agentschap Pematang Siantar. Pendirian kantor cabang yang berada di Pantai Timur Sumatra ini dilakukan juga karena alasan yang sama dengan pendirian kantor-kantor cabang lain yang berada di Sumatra Timur, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan uang kertas di Sumatra Timur dan juga untuk guldenisasi di wilayah tersebut. De Javasche Bank Agentschap Pematang Siantar didirikan pada 1 Oktober 1923. Hanya saja kantor cabang ini kemudian ditutup oleh DJB setelah sembilan tahun beroperasi, 31 Maret 1932. Penutupan kantor cabang ini dilakukan karena untuk wilayah Pantai Timur Sumatra, cukup dilaksanakan oleh De Javasche Bank Agentschap Medan karena dianggap mampu melaksanakan tugasnya dalam proses guldenisasi di wilayah Pantai



Gambar 3.17

### Peta Pematang Siantar

Sumber: Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Timur Sumatra tanpa perlu bantuan kantor-kantor cabang yang lain. Selain itu, *malaise* juga menjadi faktor lain dari penutupan kantor cabang ini.

Kantor ini didirikan di tempat yang sangat strategis, tepat di jantung kota Pematang Siantar. Gedung Kerapatan, *InlandseRechtbank* (14) berdiri persis di sebelah utara gedung ini, yang kemudian disambung oleh bangunan kantor *geemente*(13) Pematang Siantang tepat di sebelahnya. Jika terus ke arah utara akan bertemu dengan jalan *societeitweg* dan *Wihelmina Straat*. Di sebelah timur Kantor de *Javasche Bank Agentschap* Pematang Siantar (no.20) adalah kantor pemerintahan. Sementara di depannya (arah selatan) berdiri rumah



Gambar 3.18

**Proses Pembangunan Gedung DJB  
*Agentschap* Pematang Siantar (April 1923)**

Sumber: Tropenmuseum

*Asistent Resident* dan terdapat juga lapangan bola. Rumah *controleur* (17) juga berada di arah selatan kantor ini, bersebelahan dengan rumah *Asistent Resident*.

Pada 31 Maret 1932 kantor cabang Pematang Siantar ditutup karena kantor cabang Medan dianggap sudah cukup untuk menjalankan tugas melayani kegiatan perbankan masyarakat Sumatera Timur saat itu.



Gambar 3.19  
Gedung DJB *Agentschap* Pematang Siantar (1907)  
Sumber: Tropenmuseum

### **Krisis Ekonomi Dunia dan Masuknya Kembali Mata Uang Asing ke Sumatera Timur**

Memasuki akhir dekade kedua abad ke-20, perekonomian dunia secara mengalami kemunduran yang luar biasa akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat yang turut menyeret kemunduran ekonomi di berbagai belahan dunia. Peristiwa krisis ekonomi global ini kemudian dikenal dengan sebutan *Great Depression*. Penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia tersebut terjadi karena kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed yang menurunkan suku bunga demi mendukung bank sentral Inggris (Bank of England) menerapkan

standar emas. Penurunan suku bunga ini bersamaan dengan kegairahan bursa efek (*bullish*) yang mendorong masyarakat Amerika untuk berbondong-bondong meminjam uang di bank dan menginvestasikannya di bursa saham. Situasi ini mendorong terjadinya ledakan spekulatif yang mendorong terciptanya gelembung ekonomi (*economic bubble*) berupa peningkatan yang sangat tajam akan harga saham yang mencapai puncaknya pada 3 September 1929.<sup>26</sup>

*Great Depression yang melanda perekonomian global mengakibatkan jatuhnya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas ke tingkat yang paling dalam*

Namun hal tersebut ternyata tidak bertahan lama, di mana pada 24 Oktober 1929 terjadi penurunan harga saham yang sangat drastis di pasar bursa saham *Wall Street* New York. Angka penurunan tersebut terus terjun bebas hingga mencapai titik kulminasi terburuk dalam sejarah Amerika pada 29 Oktober 1929. Ambruknya harga saham di bursa saham *Wall Street* ini kemudian dikenal sebagai *The Black Thursday* atau Kamis kelabu (24 Oktober 1929) yang menjadi awal keruntuhan bursa saham, dan *The Black Tuesday* atau Selasa kelabu (29 Oktober 1929) sebagai hari kehancuran yang membuat panik para pelaku ekonomi hingga lima hari setelah titik puncak kejatuhan harga saham *Wall Street* tersebut.<sup>27</sup>

*The Black Thursday* dan *The Black Tuesday* menyebabkan Amerika mengalami kerugian sebesar 30 miliar dolar dalam satu minggu. Anggaran belanja tahunan pemerintah Amerika naik 10 kali lipat yang jumlahnya lebih besar dari pada biaya perang yang dikeluarkan oleh Amerika pada Perang Dunia II. Di bidang perbankan, kejatuhan harga saham *Wall Street* menyebabkan banyak bank di Amerika

26. <http://romeo90245.wordpress.com>, diakses 11 November 2016.

27. Marwati Djoened Poespongoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 252.

yang terpaksa menghentikan operasinya. Hingga awal 1930 ada sekitar 60 bank yang tutup, disusul 254 bank di bulan November, dan 344 bank pada bulan Desember. Salah satu bank yang ditutup pada masa itu adalah bank keempat terbesar di New York, yakni Bank of the United States dengan 450.000 depositor.<sup>28</sup>

Perekonomian Amerika seketika menjadi bergerak sangat lambat. Penutupan bank tersebut ternyata berefek domino terhadap perekonomian Amerika yang ditandai dengan pada bangkrutnya berbagai perusahaan, merosotnya harga barang, dan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja. Hingga tahun 1933 jumlah pengangguran di Amerika mencapai 25%. Sementara itu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menurun hingga 29% dan harga saham kehilangan nilainya hingga hampir 90%. Deflasi (kejatuhan) harga barang di Amerika kala itu mencapai angka 30%.<sup>29</sup> Kemunduran ekonomi Amerika ini adalah kasus paling besar dalam sejarah ekonomi Amerika yang berdampak pada *Great Depression* yang melanda dunia internasional saat itu.

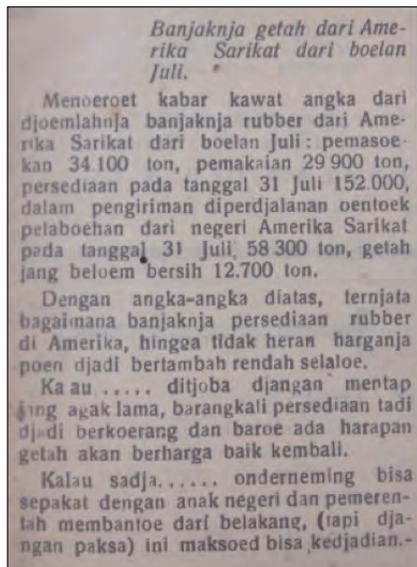
Krisis ekonomi global menyebabkan lesunya perdagangan dunia yang berdampak sangat besar bagi negara produsen komoditas pertanian dan perkebunan. Hal ini terjadi karena pemerintah Amerika sebagai pemimpin ekonomi dunia saat itu menaikkan tarif impor hingga 50%. Kebijakan ini tentu saja berimbas langsung kepada Hindia-Belanda yang menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tumpuan utama roda perekonomiannya. Apalagi dengan gitanya usaha untuk memperbesar jumlah ekspor hasil perkebunan ke pasar internasional sejak awal 1920-an berdampak luar biasa bagi perusahaan perkebunan komoditas ekspor Hindia-Belanda saat itu yang menjadikan Amerika dan Eropa sebagai pasar utama. Pasar untuk hasil perkebunan Hindia-Belanda sangat sulit didapatkan pada masa itu, sementara jumlah produksi sangat besar, ditambah lagi de-

28. <http://romeo90245.wordpress.com.>, diakses 11 November 2016.

29. *Ibid.*

ngan keharusan untuk bersaing dengan negara ekspor baru dalam komoditas gula, teh, tembakau, nila, dan karet.<sup>30</sup>

Dalam harian *Pewartar Deli* edisi Selasa, 19 Agustus 1930 No. 192 disebutkan bahwa jumlah karet yang masuk ke Amerika pada Juli 1930 mencapai 34.100 ton. Sementara itu total pemakaian 29.900 ton dan hingga 31 Juli jumlah persediaan mencapai 152.000 ton. Sedangkan jumlah karet yang sedang dalam proses pengiriman ke Amerika pada 31 Juli 1930 sebesar 58.300 ton getah bersih siap pakai dan 12.700 ton getah yang belum bersih.



Gambar 3.20

*Pewartar Deli*, 19 Agustus 1930

30. Marwati dalam Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 252.

Seperti yang disinggung dalam artikel di atas, bahwa besarnya jumlah persediaan karet Amerika serta banyaknya ekspor karet dari Amerika akan semakin mendorong rendahnya harga karet dunia. Sebagai daerah yang mengandalkan karet sebagai salah satu sektor pendapatan utama, krisis karet tersebut tentu saja sangat merugikan industri perkebunan karet di Sumatera Timur. Kemunduran harga karet mendorong penurunan jumlah pendapatan pengusaha karet yang berimplikasi langsung kepada lambannya geliat perekonomian.

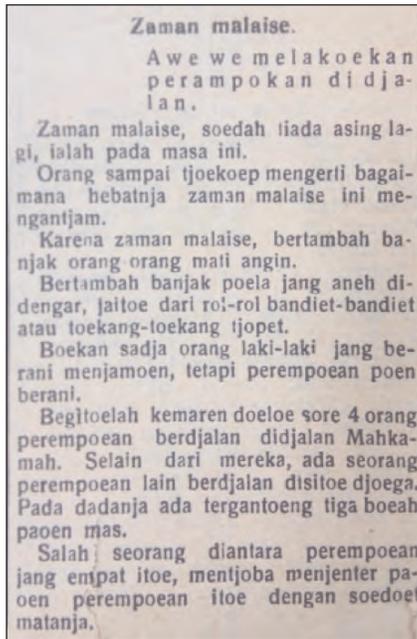
*Krisis global yang berlarut-larut juga menyebabkan anjloknya kegiatan ekonomi wilayah Sumatera Timur yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat*

Menjelang awal 1930an keadaan ekonomi Hindia-Belanda menunjukkan kondisi yang semakin memburuk akibat tidak kunjung pulihnya ekonomi internasional. Masa ini populer di masyarakat pribumi Hindia-Belanda dengan sebutan “zaman meleset” (asal kata dari malaise). Malaise menyebabkan pengurangan kesempatan kerja (satu dari empat orang terpaksa menganggur), pemotongan gaji, turunnya harga-harga hasil pertanian, rendahnya upah, Produk Domestik Bruto negara-negara merosot menjadi hanya 2/3nya antara tahun 1929 dan 1933, dan masyarakat tidak lagi percaya pada bank dan pasar uang.<sup>31</sup>

Kemunduran ekonomi akibat malaise yang ditandai dengan sulitnya mendapatkan uang mendorong peningkatan yang tajam dari angka pengangguran dan juga kriminalitas di Sumatera Timur seperti yang dimuat dalam *Perwata Deli*, Senin, 1 September 1930.

Berita tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa malaise sangat besar sekali dampaknya terhadap masyarakat, khususnya angka kriminalitas dari perampokan yang bertambah secara signifikan.

31. Boediono, “Kelesuan Ekonomi dan Sektor Industri” dalam *Prisma* No. 3 Maret 1983 tahun XII. LP3ES: Jakarta), hlm. 15.



Gambar 3.21

***Pewarta Deli*, 1 September 1930**

Yang lebih menariknya, para “perampok malaise” tersebut bukan hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi juga oleh perempuan secara berkelompok. Sasaran utama dari kelompok perampok perempuan ini adalah kaum sesama perempuan yang memakai perhiasan emas. Fakta ini menunjukkan bahwa malaise telah benar-benar menghancurkan sendi-sendi perekonomian rakyat sehingga mereka rela melakukan cara apapun untuk mendapatkan uang, meskipun harus melanggar hukum.

Sartono (1990) menegaskan bahwa berlarut-larutnya krisis ini di Hindia-Belanda akibat dari politik ekonomi yang pada satu pihak menjalankan penghematan secara besar-besaran dan dipihak lainnya ingin mempertahankan pendapatan dari komoditas ekspor perkebunan, sementara nilai gulden yang dipertahankan memicu pengu-

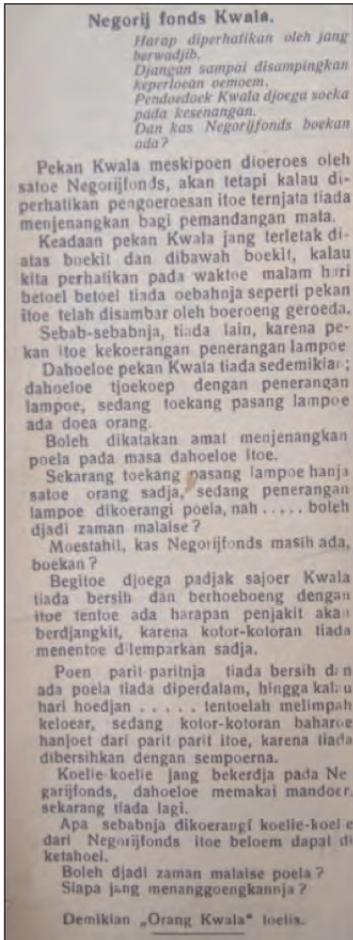
rangan daya beli negara-negara pengimpor (Amerika menjadi salah satu negara pengimpor terbesar seperti yang telah disinggung sebelumnya).<sup>32</sup>

Salah satu tindakan penghematan besar-besaran yang terjadi di Sumatera Timur pada masa depresi 1930 tampak dari berita tentang lampu penerangan yang berkurang drastis jumlahnya, serta sampah yang makin menumpuk dan membahayakan kesehatan masyarakat di Pekan Kwala yang dimuat dalam *Pewartu Deli* pada 21 Agustus 1930. Dalam berita tersebut ditegaskan bahwa Pekan Kwala yang secara administratif diurus oleh sebuah *Negorigfonds* ternyata kekurangan dalam penerangan lampu jalan di malam hari. Kegelapan yang meliputi seluruh wilayah Pekan Kwala di malam hari pada masa itu oleh penulis diibaratkan dengan "...seperti pekan itoe telah disambar oleh boeroeng geroeda". Situasi ini berbeda dengan masa sebelum malaise "Dahoeloe Pekan Kwala tidak sedemikian; dahoeloe tjoekoep dengan penerangan lampoe, sedang toekang pasang lampoe ada doea orang. Boleh dikatakan amat menjenangkan poela pada masa dahoeloe itoe.

Setelah malaise terjadi dan pemerintah menerapkan kebijakan penghematan anggaran, jumlah pekerja untuk memasang lampu jalan di Pekan Kwala hanya tinggal satu orang. Pengurangan jumlah pekerja ini juga diikuti dengan pengurangan jumlah lampu jalan yang juga dilakukan oleh pemerintah di Pekan Kwala. "...sedang penerangan lampoe dikoerangi poela, nah..... boleh jadi zaman malaise? Moestahil, kas Negorijfonds masih ada, boekan?". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa krisis malaise yang menjadi penyebab utama pengurangan jumlah lampu penerangan jalan raya dan jumlah pekerja yang bertugas memasang lampu.

Zaman malaise tidak hanya berakibat pada pengurangan jumlah pegawai dan konsumsi listrik di jalan raya, namun juga pada ke-

32. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 179.



Gambar 3.22

**Pewarta Deli, 21 Agustus 1930**

bersihkan lingkungan terutama sampah-sampah yang harus diangkut oleh petugas ke tempat pembuangan. Pemerintah kemungkinan juga mengurangi jumlah petugas kebersihan yang mengangkut sampah sehingga sampah-sampah menumpuk di parit-parit jalan yang akan menyebabkan banjir jika musim hujan. Meskipun Pekan Kwala memiliki pajak sayur, namun tetap saja kebersihan lingkungan diabaikan begitu saja. Tidak hanya itu, para kuli perkebunan yang dahulunya bekerja diawasi oleh mandor, sekarang tidak lagi. Zaman malaise terbukti tidak hanya berdampak pada lesunya industri perkebunan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat secara luas di Sumatera Timur saat itu.

Dalam bidang ekspor impor, data statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1929 hingga 1930 nilai ekspor Hindia-Belanda menurun sebesar 28%. Tahun berikutnya jumlah ini semakin menurun menjadi 25% yang disusul kejatuhan berturut-turut sebesar 21% dan 11%. Pada 1933, harga-harga tersebut hanya mampu naik menjadi 35% dari keadaan tahun 1929 dan kurang dari 31% terhadap harga rata-rata masa 1923 – 1927. Hingga tahun 1939 nilai ekspor beberapa komoditas perkebunan terpenting terus menurun meskipun pemerintah kolonial

menerapkan kebijakan devaluasi nilai gulden. Kejayaan di tahun 1920 yang merangsang dinamisnya gerak perekonomian Hindia-Belanda, tidak mampu dihidupkan kembali oleh pemerintah kolonial pasca depresi 1929.<sup>33</sup> Kehidupan ekonomi dan keuangan terus memburuk dan berdampak ke segala bidang.

*Kebijakan depresiasi mata uang tidak cukup untuk mengangkat kembali anjloknya ekspor komoditas*

Masalah yang dihadapi oleh industri gula Hindia-Belanda pada masa depresi bukanlah pada rendahnya harga, tetapi besarnya jumlah produksi gula yang tidak dapat dijual dengan harga berapapun. Tidak ada importir yang membeli gula yang jumlah produksi meningkat dengan signifikan akibat perluasan areal penanaman tebu demi menyaingi gula tebu Philipina, Kuba, dan gula bit Eropa. Untuk mengatasi kemunduran bisnis gula ini, pemerintah kemudian mendorong pengusaha gula Hindia-Belanda untuk ikut serta dalam persetujuan Chadbourne, mengenai pembentukan kartel di antara negara-negara pengekspor gula demi menjaga harga gula tetap di batas penawaran. Di dalam negeri, setiap pengusaha gula wajib menjadi anggota Perserikatan Gula Hindia-Belanda (NIVAO) yang bertanggung jawab dalam produksi, penimbunan, dan penjualan gula Hindia-Belanda. Berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah kolonial tersebut sama sekali tidak mampu memulihkan harga gula sebagai komoditas ekspor utama saat itu.<sup>34</sup>

Jika di Pulau Jawa gula menjadi komoditas unggulan, di luar Pulau Jawa perkebunan teh, tembakau, kopi, kopra, dan karet tidak mampu ditandingi pertumbuhannya oleh industri gula di Jawa. Jumlah produksi komoditas ekspor perkebunan luar Pulau Jawa tersebut

33. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 254 – 255.

34. *Ibid.*, hlm. 255.

pada 1936 berhasil mengalahkan popularitas produksi gula. Pertumbuhan perkebunan tanaman ekspor tersebut terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera dengan Pantai Timur Sumatera sebagai perkebunan utama di luar Pulau Jawa. Kawasan ini sejak 1860an berhasil mengubah rimba raya tak terbatas menjadi tempat perkebunan nomor satu di dunia.<sup>35</sup>

Tabel 3.6

### Areal Perkebunan yang Ditanami di Sumatera Timur 1938

Komoditi	Perkebunan	Areal (ha)
Karet	207	260.184
Kelapa Sawit	35	56.595
Teh	16	21.891
Kelapa	9	5.581
Gambir	1	1.225
Cokelat	1	77
Serat nanas	5	10.000
Tembakau	46	112.000 <sup>36</sup>
Karet Lembaran	2	180
<b>JUMLAH</b>	<b>332</b>	<b>468.000</b>

Sumber: van der Waal dalam William J. O' Malley (1988)

Karet menjadi komoditas yang paling merasakan dampak dari depresi ekonomi 1930an. Perkebunan besar memperlihatkan *over-head cost* dan biaya lainnya yang tinggi. Sementara itu, perkebunan rakyat menunjukkan biaya yang lebih rendah karena lebih bertumpu pada tenaga kerja mereka sendiri dengan skala yang lebih kecil sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih besar. Ditambah lagi dengan masuknya karet Amerika dalam jumlah besar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya semakin menyulitkan pertumbuhan industri

35. William J. O' Malley, "Perkebunan 1830 – 1940: Ikhtisar" dalam Anne Booth, et al., *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 224.

36. Hanya 14.000 ha yang benar-benar digarap tahun 1938 karena siklus penanaman tembakau hanya satu kali setiap 8 tahun. Jumlah tambahan perkebunan tembakau adalah 8x14.000 ha. William J. O' Malley, *op.cit.*, hlm. 229.

karet Sumatera Timur. Demi mengatasi masa sulit ini para pengusaha perkebunan menuntut pemerintah Hindia-Belanda untuk menetapkan kuota ekspor bagi setiap perusahaan karet agar menekan jumlah produksi demi mendongkrak harga jual karet. Bagi perkebunan rakyat, pemerintah membebaskan pajak penjualan dan biaya pabrik perantara sehingga antusiasme rakyat untuk menanam karet menurun.<sup>37</sup>

*Depresi ekonomi global berdampak pada anjloknya kegiatan ekonomi di wilayah Sumatera Timur yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun tajam*

Perkebunan yang menjadi tumpuan utama perekonomian Hindia-Belanda di abad ke-20 berhasil memperluas jenis dan daya serap tenaga kerja. Industri ini memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat pribumi seperti tukang pedati di perkebunan gula, pembuat gudang di perkebunan tembakau, pembuka lahan, pengemasan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Peningkatan yang signifikan dari serapan tenaga kerja pribumi di perkebunan yang terus bertambah sebelum masa depresi berdampak langsung terhadap pemutusan hubungan kerja besar-besaran setelah krisis *malaise* demi menekan biaya produksi. Situasi ini berdampak pada penurunan penghasilan masyarakat pribumi yang pada awalnya mencapai 8.3 juta gulden menjadi 2.3 juta gulden pada tahun 1933.<sup>38</sup> Angka tersebut jelas memperlihatkan bagaimana besarnya peran dari perkebunan sebagai pilar utama perekonomian Hindia-Belanda.

Hebatnya kemunduran ekonomi yang diakibatkan oleh *malaise* sangat dirasakan sekali oleh Sumatera Timur, bahkan melebihi

37. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm.

38. *Ibid.*, hlm. 255; 258.

daerah lainnya di Hindia-Belanda saat itu. Kemerosotan harga dan kelesuan permintaan komoditas perkebunan di pasar internasional saat itu telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian Sumatera Timur yang dibangun oleh perkebunan tembakau, kopi, teh, karet, kelapa sawit, dan tanaman ekspor lainnya. Demi memperkecil ongkos produksi, pemilik perkebunan mengadakan pengurangan tenaga kuli sebesar 80% (335.000 orang) pada tahun 1930. Pengurangan tenaga pegawai administrasi dan pengawas sebesar 42% juga dilakukan. Amandemen Blaine dari Kongres Amerika tahun 1929 yang mulai berlaku pada 1 Juni 1932 menyebabkan pemulangan kuli secara besar-besaran ke Pulau Jawa.<sup>39</sup>

Depresi ekonomi juga dirasakan oleh orang-orang Cina yang bermukim di Sumatera Timur. Mereka ini tidak hanya para kuli yang bekerja di perkebunan, tetapi juga yang tinggal di luar perkebunan sebagai pedagang. Orang-orang Cina atau Tionghoa di luar perkebunan ini umumnya tinggal dan membuka toko di sepanjang jalan Kesawan yang menjadi jantung perekonomian Kota Medan. Jumlah toko orang-orang Cina ini mencapai ratusan. Sulitnya zaman malaise menyebabkan para pemilik toko menaikkan harga sewa. Kenaikan ini tentu saja adalah akan berdampak buruk pada usaha pedagang-pedagang Cina yang bergerak lambat di masa krisis. Akibatnya, 200 kedai Tionghoa yang dianggap sebagai "Korban zaman malaise" mengajukan protes kepada pemilik toko dan pemilik rumah yang menaikkan harga sewa. Dan jika protes tersebut tidak diindahkan para penyewa rumah dan toko tersebut akan mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagaimana yang tertulis dalam harian *Pewartu Deli* 13 Agustus 1930.

Jika disektor keuangan malaise menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat pribumi secara umum, depresi ekonomi dalam bidang moneter mendorong

39. William Joseph O' Malley, "Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi Kasus terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930-an" dalam *Ibid.*, hlm. 259.

Korban „zaman malaise“.

200 Kedai Tionghoa  
minta toeroenkan  
sewa roemah.

Beberapa hari jang laloe, toke-toke kedai Tionghoa di Belawan, dan orang-orang jang menjewa roemah soedah mengadakan vergadering oentek memprotest kenaikan sewa roemah, dan sewa roemah jang masih tetap mahal dalam zaman malaise ini.

Vergadering ini terdiri dari kebanyakan bangsa Tionghoa.

Telah dipoatoeskan, meminta dan memvoostelkan kepada eigenaar-eigenaar roemah, soepaja menoeroenkan sewa roemah dan mengoerangi dari ketentoean biasa.

Beberapa pengoeroesnja mendjalankan lijst kepada orang-orang jang menjewa roemah, soepaja menjatakan keberatan oentoek menoeroenkan wang sewa roemah.

Menoeroet kabar jang disampaikan kepada kita, kira kira 200 orang-orang jang menjewa roemah soedah menjatakan protest kepada eigenaar-eigenaar roemah, meminta soepaja sewa-sewa roemah itoe terli roenkan.

Saxophonist ini djoega tiada berhasil, kabar „Belwit“ mereka akan mengadakan soetoe tindakan, sampai kepada pemerintah Inggris. (In p e r a).

Gambar 3.23

*Pewarta Deli*, 13 Agustus 1930

kembalinya penggunaan mata uang asing menggantikan gulden dalam transaksi ekspor impor hasil perkebunan. Kejatuhan harga saham *wall street* di Amerika langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda seluruh negara mulai 24 Oktober 1929. Berbagai penyelamatan ekonomi dilakukan oleh masing-masing negara secara bersama atau sendiri-sendiri kala itu. Salah satunya adalah kebijakan Bank of England yang melepaskan mata uang poundsterling dari standar emas mulai 20 September 1931.

Langkah ini ternyata berhasil meminimalisasi dampak buruk dari malaise terhadap perekonomian Inggris baik secara nasional maupun internasional. Tindakan Inggris ini kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti Amerika, Australia, India, daerah-daerah koloni

Inggris lainnya, Skandinavia, dan Jepang di penghujung 1931. Aksi pelepasan mata uang dari standar emas di berbagai negara kala itu dikenal dengan "Blok sterling". Dengan melakukan devaluasi mata uang, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dapat bertahan menghadapi pukulan jatuhnya harga jual dan menekan besarnya biaya produksi. Di samping itu, karena dapat mempertahankan kepercayaan pada mata uang baru, kenaikan harga dapat dicegah. Inilah yang menyebabkan negara-negara yang paling awal melakukan devaluasi mata uang dapat segera keluar dari tekanan krisis<sup>40</sup>

*Depresi ekonomi telah mendorong berbagai negara melepaskan mata uang mereka dari standard emas diikuti dengan kebijakan devaluasi mata uang domestik*

Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda ternyata tidak melakukan penndevaluasian nilai gulden dan masih mempertahankan standar emas terhadap nilai mata uangnya. Hal ini semakin membawa kemunduran ekonomi di Hindia-Belanda. Harga-harga komoditas perkebunan dengan standar gulden yang umumnya digunakan setelah dicanangkannya "Politik guldenisasi (1908)" mencapai titik terendah. Tidak sejalannya penurunan harga jual dengan biaya produksi menciptakan ketegangan faktor biaya dan harga produksi yang memperlambat sulitnya Hindia-Belanda keluar dari krisis.<sup>41</sup>

Kuatnya tekanan yang diberikan oleh golongan *Vaderlandsche Club* (VC) sebagai partai yang sangat berkepentingan untuk mempertahankan *status quo* di parlemen Belanda demi kepentingan eksploitasi daerah jajahan oleh negeri Induk menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Hindia-Belanda semakin berlarut-larut. Ke-

40. *Ibid.*, hlm. 253.

41. *Ibid.*, hlm. 253.

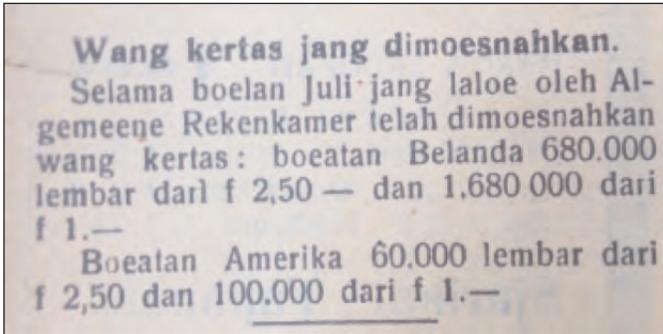
pentingan pengusaha asing menjadi prioritas kebijakan Belanda saat itu dalam menghadapi krisis, sehingga tetap mempertahankan standar emas gulden dan tidak ikut mendevaluasi mata uang. Strategi bertahan ini akhirnya harus dihentikan Belanda pada tahun 1936 dengan ikut mendevaluasi gulden seperti negara lainnya dan berhasil membawa angin segar terhadap perekonomian Hindia-Belanda.<sup>42</sup>

Krisis ekonomi dunia menyebabkan kantor cabang DJB di Sumatera Timur dihentikan operasinya dengan menyisakan DJB *agentschap* Medan sebagai satu-satunya kantor cabang yang masih menjalankan aktivitas moneter dan perbankan diakhir 1930-an. DJB Tanjung Pura berhenti beroperasi pada 1 April 1927. DJB Pematang Siantar ditutup pada 31 Maret 1932 dan diikuti DJB Bengkalis pada 31 Maret 1932. 31 Maret 1938 kantor cabang Tanjung Balai tidak lagi menjalankan aktivitas perbankannya dan menyisakan DJB *agentschap* Medan sebagai satu-satunya perwakilan DJB di Pantai Timur Sumatera.

Situasi ini berdampak langsung terhadap lemahnya kontrol DJB dan pemerintah kolonial dalam menahan penetrasi uang dolar yang kembali masuk Sumatera Timur. Rendahnya nilai tukar gulden terhadap dolar saat itu menyebabkan pengusaha berbondong-bondong meninggalkan penggunaan gulden sebagai alat transaksi perdagangan. Penggunaan berbagai dolar yang telah didevaluasi menyebabkan harga jual komoditas ekspor perkebunan di pasar dunia lebih tinggi jika dibandingkan dengan gulden yang tetap mempertahankan standar emasnya. Faktor inilah yang menyebabkan gulden kembali tersingkir dalam lalu lintas ekspor impor komoditas perkebunan di Sumatera Timur.

Selain rendahnya nilai tukar gulden terhadap dolar yang sangat merugikan pengusaha perkebunan, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap uang dan lembaga perbankan, dalam hal ini adalah gulden dan De Javasche Bank milik Belanda turut mendorong ke-

42. Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 179 – 180.



Gambar 3.24

*Pewarta Deli*, 21 Agustus 1930

murahan gulden dan DJB dalam sistem moneter di Sumatera Timur pasca Depresi Besar.

Satu fakta menarik dari kondisi moneter di Hindia-Belanda pada masa krisis 1930 adalah pemusnahan uang kertas oleh pemerintah kolonial Belanda yang dimuat dalam *Pewarta Deli* edisi Kamis, 21 Agustus 1930. Dalam surat kabar tersebut tertulis bahwa selama bulan Juli 1930 Gemeene Rekenkamer telah memusnahkan uang kertas buatan Belanda sebesar 680.000 lembar dengan nominal 2.50 gulden dan 1.680.000 lembar pecahan 1 gulden. Selain itu, pemerintah juga memusnahkan uang buatan Amerika (diasumsikan bahwa uang ini adalah dolar Amerika) sebesar 60.000 lembar dengan pecahan f 2.50 dan 100.000 lembar uang dengan nilai f 1. Namun dalam artikel ini tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang melatarbelakangi pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan tersebut dan apa tujuannya terhadap sistem moneter Hindia-Belanda.



# 4

## Dinamika Sumber dan Peranan Uang Pada Era Nanpo Kaihatsu Ginko di Sumatera Timur (1942-1945)

Strategi awal di bidang ekonomi dari militer Jepang adalah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik pengusaha asing. Jenis komoditas yang diproduksi difokuskan pada komoditas-komoditas yang mendukung operasi militer Jepang. Oleh karena itu, produksi komoditas-komoditas ekspor mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari sisi keuangan, militer Jepang membuat kebijakan untuk menutup De Javasche Bank dan fungsinya digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Pemerintah militer Jepang juga menutup bank-bank asing (terutama Eropa) yang telah berdiri sebelumnya dan digantikan oleh bank-bank Jepang yang telah ada di Indonesia. Selain itu, militer Jepang hanya memberikan izin kepada bank-bank Cina dan serikat pengkreditan untuk kembali beroperasi di Sumatera Timur. Pemerintah militer Jepang sudah jauh hari menyiapkan uang pendudukan (*invasion money*) sebelum menginvasi Hindia Belanda. Setelah NKG berdiri, mulai diedarkan uang Nanpatsu dengan menggunakan satuan rupiah. Namun demikian, mata uang lainnya seperti gulden, dolar Spanyol, straitsettlement Inggris tetap diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat, NKG mengedarkan mata uang yang menggunakan simbol dan gambar lokal seperti wayang dan lain-lain. Secara lebih luas, kebijakan moneter Jepang yang tetap menggunakan gulden bertujuan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit di Indonesia.

## Motif Ekonomi Dibalik Invansi Militer Jepang

Masa pendudukan Jepang yang berlangsung sejak 9 Maret 1942 merupakan periode yang paling menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bagi Belanda, serbuan Jepang pada masa ini merupakan tantangan yang paling serius terhadap otoritas mereka atas jajahannya Hindia-Belanda.<sup>1</sup> Operasi pendudukan atas Hindia-Belanda dilakukan oleh Jepang setelah Semenanjung Malaya, Singapura, dan Filipina berhasil dikuasai. Serangan pertama dilancarkan pada 11 Januari 1942 di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Pada hari yang sama pasukan payung (parasut) Angkatan Laut Jepang berhasil mendarat di Manado. Pasukan payung Angkatan Darat Jepang juga berhasil mendarat di Palembang tanggal 14 Februari.<sup>2</sup>

Menjelang 1 Maret 1942 Tentara Jepang ke-16 berhasil mendarat di Banten, Eretan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Dalam waktu singkat kota-kota penting di Pulau Jawa berhasil diduduki oleh Jepang. Puncak dari kemenangan Jepang terhadap Belanda adalah ditandatangani dokumen penyerahan diri tanpa syarat Angkatan Perang Hindia-Belanda kepada Jepang di Kalijati pada 9 Maret 1942 yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten dan Letnan Jenderal Imamura.<sup>3</sup> Kapitulasi Kalijati ini menjadi babak baru dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan berakhirnya periode kolonisasi Belanda dan dimulainya era pendudukan pemerintah militer Jepang di Indonesia.

Meskipun Panglima Tentara Hindia Belanda telah menyerah kepada Jepang melalui penandatanganan perjanjian Kalijati, daerah bagian utara dan barat Pulau Sumatera masih belum sepenuhnya diduduki Jepang. Oleh sebab itu, pemerintah militer Jepang kemudian mengirimkan pasukan ke Pantai Cermin di dekat Kota Medan

1. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 297.
2. Aiko Kurasawa, *Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang tak Terceritakan*, (Depok: Komunitas Bambu, 2016), hlm. 20 – 21.

dan Labuan Ruku yang tidak jauh dari Tanjung Balai pada 12 Maret 1942. Untuk operasi pendudukan utara dan barat Sumatera ini, pasukan militer Jepang juga membentuk tim khusus Divisi Konoe-Daini dari Angkatan Darat Divisi ke-25 yang disebar di sepanjang pantai barat Kutaraja hingga ke Medan guna menjaga seluruh wilayah barat dan Selat Malaka. Pendaratan pasukan Jepang di Tanjung Siram memaksa pasukan Belanda yang ada di Medan mundur ke Kebonjahe yang disertai dengan aksi pembumihangusan beberapa instalasi industri di Kota Medan. Dalam waktu singkat beberapa kota penting di Sumatera Timur berhasil jatuh ke tangan tentara Jepang.<sup>4</sup>

*Aksi gerak cepat yang dilakukan oleh Jepang di atas berhasil menumbangkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda yang kaya akan sumber daya alam hanya difokuskan guna mendukung kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya melawan sekutu*

Strategi lanjutan untuk memukul mundur pasukan Belanda di Sumatera Timur yang dilakukan oleh Jepang adalah memecah Divisi Konoe-Daini menjadi tiga bagian, yaitu: satu unit menuju Medan, kemudian satu pasukan ke Pematang Siantar, dan unit pasukan lainnya diarahkan ke Rantau Prapat. Selain itu, dipersiapkan juga satu pasukan dari Asahan menuju Labuhan Batu dengan tujuan utama Kota Rantau Prapat yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal *controleur* Belanda. Tentara Jepang yang diarahkan ke Medan akhirnya berhasil masuk dan menduduki Kota Medan pada 13 Maret 1942.<sup>5</sup>

Operasi selanjutnya adalah pendudukan atas Tanah Karo dan

3. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.7 – 12.
4. Anthony Reid, *Sumatera; Revolusi dan Elite Tradisional*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 164.
5. *Sumatera Utara dalam Lintas Sejarah*, (Medan: Pemerintahan Provinsi Sumatera

Simalungun pada Maret 1942. Peralihan kekuasaan di Tanah Karo dari Belanda diwakili oleh Mr. R.M. van Rhee, sementara pihak Jepang oleh Letnan Genda. Tapanuli berhasil dimasuki dan dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang pada 24 Maret 1942. Gempuran terus menerus yang dilakukan oleh Jepang sukses menghancurkan pertahanan pasukan yang dikomandoi oleh Mayor Jenderal Overaker di Kutacane dan menyerah pada akhir Maret 1942. Jepang juga berhasil menduduki Lembah alas, dan Aceh tanggal 29 Maret (dua minggu setelah penaklukan Kota Medan). Pendudukan atas ketiga daerah tersebut menjadikan seluruh wilayah Pantai Timur Sumatera sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Jepang.<sup>6</sup>

Aksi gerak cepat yang dilakukan oleh Jepang di atas berhasil menumbangkan kekuasaan Belanda dan merebut daerah Hindia-Belanda yang kaya dengan berbagai sumber bahan mentah dan potensi ekonomi yang sangat menguntungkan. Segala aktivitas politik, militer, serta ekonomi di Sumatera Timur semata-mata hanya difokuskan guna mendukung kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya melawan sekutu.

## Perubahan Ekonomi Akibat Perang

Pendudukan Jepang atas seluruh daerah Hindia-Belanda menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat baik itu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada bidang pemerintahan sipil dan struktur birokrasi di Sumatera Timur, Jepang tidak melakukan terlalu banyak perubahan. Eksistensi elite-elite tradisional seperti raja-raja dan tokoh adat tetap dipertahankan.<sup>7</sup> Setelah operasi penaklukan, Kolonel Nakagawa ditugaskan menjabat sebagai gubernur di Sumatera Timur. Jabatan ini kemudian dilan-

Utara, 1995), hlm. 168.

6. Anhar Gonggong dan Sutrisno Kutoyo (ed), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 69.
7. Anthony Reid, *Op.cit.*, hlm. 164.

jutkan oleh Jenderal Nakashima setelah seluruh daerah Sumatera Timur sepenuhnya berada dalam kekuasaan Jepang. Saat menjabat sebagai gubernur Sumatera Timur, Jenderal Nakashima menghimbau kepada raja dan elite tradisional untuk menggunakan kekuasaan mereka dalam upaya mendukung kekuasaan dan kepentingan Jepang di Sumatera Timur.<sup>8</sup>

Di samping itu, masyarakat sipil Belanda dan bangsa asing lainnya di Sumatera Timur yang terbukti ikut berperang melawan Jepang dijadikan sebagai tahanan. Oleh karena Jepang kekurangan tenaga administrasi yang cakap, sebagian kecil dari pengusaha *onderneming* masih dipertahankan oleh pemerintah militer Jepang sebagai administratur perang di Sumatera Timur hingga akhir tahun 1943. Setelah masa ini, tugas yang dijalankan administratur Barat tersebut digantikan oleh orang-orang Jepang dan masyarakat pribumi.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pemerintahan sipil yang tidak mengalami perubahan yang berarti, pemerintahan militer Jepang di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Secara umum Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu: (1) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera yang berpusat di Bukittinggi; (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta.<sup>10</sup> (3) Pemerintah Militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk daerah Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku yang dipusatkan di Makassar.<sup>11</sup> Pemerintahan Militer

8. *Sumatera Utara dalam Lintas Sejarah, Op.cit.*, hlm. 165.

9. Karl. J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863 – 1947*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 152.

10. Tentara ke-25 dan ke-16 berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura.

11. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*, hlm. 14.

Pemerintahan Militer Angkatan Darat Jepang ini disebut dengan *Gunseikanbu* yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di daerah pendudukan, khususnya Indonesia bagian Barat. Sementara Pemerintahan Militer Angkatan Laut yang popu-

Angkatan Darat Jepang ini disebut dengan *Gunseikanbu* yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di daerah pendudukan, khususnya Indonesia bagian Barat. Sementara Pemerintahan Militer Angkatan Laut yang populer juga dengan sebutan *Kaigun Minseifu* lebih dominan kekuasaannya di Indonesia bagian timur yang lebih bercorak kelautan.

Untuk pemerintahan militer Sumatera Timur yang termasuk ke dalam Angkatan Darat ke-25, Jepang membagi menjadi lima daerah konsentrasi militer yakni: Binjai/Padang Berahrang, Sungai Karang (Gelang), Dolok melangir, Kisaran, dan Perkebunan Wingfoot.<sup>12</sup>

Di sektor ekonomi, Jepang melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur ekonomi Indonesia. Segala hal yang berhubungan dengan Belanda dan Barat diganti dengan model rancangan Jepang yang dianggap lebih memperlihatkan jati diri Asia dan disesuaikan dengan kepentingan perang Jepang. Pentingnya kawasan Sumatera dan Semenanjung Malaya bagi strategi militer dan ekonomi Jepang menempatkan kedua daerah ini sebagai “Zona inti rencana kekaisaran untuk kawasan selatan” hingga pertengahan 1943.<sup>13</sup> Besarnya kandungan minyak bumi dan industri karet di Sumatera adalah faktor utama pentingnya Sumatera di mata Jepang yang dianggap sebagai harta yang sangat berharga.<sup>14</sup> Aktivitas ekonomi Sumatera Timur yang bercorak perkebunan dan eksplorasi minyak bumi sejak pertengahan abad ke-19 adalah sumber ekonomi potensial untuk mendukung kemenangan Jepang dalam medan pertempuran di Asia Pasifik. Oleh sebab itu, segala kebijakan dan strategi ekonomi yang dijalankan oleh Jepang di Sumatera Timur akan selalu diorientasikan untuk kepentingan perang.

ler juga dengan sebutan *Kaigun Minseifu* lebih dominan kekuasaannya di Indonesia bagian timur yang lebih bercorak kelautan.

12. *Sumatera Utara dalam Lintas Sejarah, Op.cit.*, hlm. 163.

13. Anthony Reid, *Op.cit.*, hlm. 149.

14. Anthony Reid, *Sumatera Tempo Doeloe: dari Marco Polo sampai Tan Malaka*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 350.

Masa perang menyebabkan hancurnya berbagai instalasi industri dan perkebunan yang telah dibangun oleh Belanda, di samping jatuhnya ribuan korban jiwa dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, pendudukan Jepang juga ditandai dengan penyitaan terhadap perkebunan-perkebunan asing, bank-bank, pabrik, dan perusahaan-perusahaan vital milik Belanda serta bangsa asing yang ada di Hindia-Belanda.<sup>15</sup> Harus diingat bahwa kapitalisasi Sumatera Timur sejak dibukanya perkebunan tembakau oleh Nienhuys tahun 1863 berhasil menarik minat pengusaha-pengusaha asing untuk membuka perkebunan, membangun pabrik, mendirikan bank swasta, melakukan eksplorasi minyak bumi, serta berbagai bidang industri dan jasa produktif lainnya.

Pada periode awal pendudukan Jepang, pengelolaan ekonomi dan kebijakan keuangan ditetapkan oleh *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer Pusat). Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Sumatera Timur adalah memperkenalkan konsep “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang melibatkan seluruh daerah Asia Tenggara dan Asia Timur di bawah kepemimpinan Jepang.<sup>16</sup> Konsep kemakmuran bersama ini mencakup segala bidang kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Timur. Pada dasarnya kebijakan tersebut hanyalah sebuah propaganda yang dilancarkan oleh Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan pengeksploitasian seluruh kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia guna mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.<sup>17</sup> Sebagai salah satu daerah yang produktif dalam mengasilkan karet dan minyak bumi di Pulau Sumatera, tujuan utama Jepang di balik gerakan propaganda di Sumatera Timur adalah untuk menguasai kedua sumber potensial tersebut demi kepentingan perang Jepang.

15. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Op.cit.*, hlm. 12; 77.

16. Aiko Kurasawa, *Op.cit.*, hlm. 57.

17. R.Z. Leirissa, et al., *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 89.

Untuk bidang pertanian, realisasi dari “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” ditandai dengan penetapan kebijakan *Kinkyu Shokuryo Taisaku* (Tindakan-tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) pada November 1943.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan karena pasokan bahan makanan bagi pasukan militer adalah prioritas utama dari kebijakan ekonomi Jepang di daerah pendudukannya.<sup>19</sup> Program *Kinkyu Shokuryo Taisaku* ini berupa pengenalan jenis padi varietas baru, inovasi teknik penanaman, peningkatan infrastruktur pertanian, perluasan sawah, dan latihan untuk para petani.

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang mengenai budidaya perkebunan di Sumatera Timur di antaranya adalah dikeluarkannya Undang-undang No. 332/1942 yang khusus mengatur tentang pengelolaan perkebunan. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkebunan kopi, kina, karet, dan teh langsung berada di bawah pengawasan *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer). Tugas pengawasan tersebut akan diserahkan kepada badan pengawas *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKK). Selain bertugas mengawasi perkebunan, badan ini juga bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga penjualan hasil perkebunan tersebut. Selain itu, *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKK) juga diberi tugas tambahan sebagai pemberi kredit kepada perkebunan-perkebunan yang diizinkan untuk direhabilitasi.<sup>20</sup>

Panglima Militer Jepang di Sumatera Timur, Kolonel Namura membentuk dewan penasihat perkebunan *Noyen Renggo Kai* bulan Mei 1942 yang berfungsi sebagai konsultan Jepang dalam rancangan manajemen industri perkebunan di Sumatera Timur. Lembaga ini merekrut beberapa administratur perkebunan-perkebunan besar seperti H.A.P.M, SOCFIN, dan H.V.A sebagai konsultan. *Noyen Renggo Kai* berkantor pusat di Medan yang dijalankan oleh beber-

18. Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942 – 1945*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 4.

19. *Ibid*, hlm. 3.

20. Oendang-Oendang No. 322/1942, 5 Juli 1942.

apa orang Jepang beserta sejumlah staf berkebangsaan Eropa sebagai penasehat.<sup>21</sup> Akibat peralihan kekuasaan dari pemerintah militer kepada pemerintahan sipil, pada akhir tahun 1942 tugas *Noyen Renggo Kai* digantikan oleh sebuah badan organisasi administratif baru, yaitu *Shonan Gomu Kumiai* yang berkantor pusat di Singapura yang sepenuhnya dijalankan oleh orang-orang Jepang.<sup>22</sup>

Bulan Mei 1943 Kolonel Namura (Panglima militer Jepang di Sumatera Timur) menghimbau para administratur *onderneming* untuk memberikan laporan mengenai kondisi perkebunan mereka. Laporan ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah militer untuk merencanakan manajemen perkebunan selama masa pendudukan.<sup>23</sup> Pemerintah militer Jepang juga menggiatkan penanaman tanaman bahan baku sandang seperti kapas, rami, yute, rosella, dan sisal.<sup>24</sup> Untuk tanaman perkebunan yang telah dirintis oleh pengusaha-pengusaha Belanda, Inggris, Jerman, Swiss dan Amerika berupa: teh, kopi, tembakau, karet, serta tanaman ekspor lainnya yang tergolong *cash crop* tidak begitu diupayakan oleh Pemerintah Jepang sehingga mengalami kemunduran produksi. Tindakan ini dilakukan oleh Jepang dengan dalih ketiadaan pasar yang nantinya akan memicu kelebihan produksi.

Kebijakan Jepang mengenai budidaya tanaman perkebunan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya "Era kemunduran perkebunan di Sumatera Timur" yang pada masa kolonial terkenal sebagai penghasil daun tembakau terbaik di dunia. Pemutusan kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dengan Belanda dan Amerika

21. Ann Laura Stoler, *In the Company's Shadow: Labor Control and Confrontation and Sumatra's Plantation History 1870 – 1979*, (New York: Columbia University, 1983), hlm. 168.

22. Karl. J. Pelzer, *Op.cit.*, hlm. 157. Stoler (1983) dan Pelzer (1985) tidak menjelaskan lebih jauh apakah lembaga bentukan Pemerintah Jepang yang termuat dalam Undang-Undang No. 322/142 tersebut juga dibentuk di Sumatera Timur pada masa pendudukan.

23. *Ibid.*

24. Aiko Kurasawa, *Op.cit.*, hlm. 4.

oleh Jepang menyebabkan pasar untuk komoditas perkebunan hanya terbatas pada kawasan yang dikuasai oleh Jepang dan sekitarnya.<sup>25</sup> Kebijakan keputusan ekspor-impor tersebut semakin memperburuk industri perkebunan dan ekonomi di Indonesia, khususnya Sumatera Timur yang sangat bergantung dengan hasil penjualan komoditas seperti tembakau, teh, kopi, dan karet. Selain itu, kebijakan Jepang yang tidak memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia dalam menentukan jenis tanaman apa yang akan diupayakan di lahan pertanian mereka semakin memperburuk produksi pertanian rakyat, khususnya penanaman padi dan bahan makanan pokok lainnya yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Diprioritaskannya semua hasil pertanian rakyat untuk pasokan militer Jepang<sup>26</sup> dan kemerosotan jumlah produksi, menyebabkan munculnya wabah kelaparan di mana-mana.

Ketatnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang berkaitan dengan keberadaan perkebunan-perkebunan di Indonesia yang harus diselaraskan dengan tujuan ekonomi Jepang, merupakan pukulan yang sangat merugikan bagi perekonomian Sumatera Timur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kapitalisasi perkebunan oleh pemodal asing sejak abad ke-19 sukses mengantarkan Sumatera Timur sebagai daerah yang kaya dan makmur di Hindia-Belanda hingga masuknya kekuasaan Jepang. Industri perkebunan telah menjadi tumpuan roda perekonomian masyarakat di Sumatera Timur.

Kopi, teh, dan tembakau adalah tanaman ekspor yang selama ini mendominasi perkebunan-perkebunan Sumatera Timur ditetapkan oleh pemerintah Jepang sebagai barang kenikmatan yang kurang berguna bagi kepentingan perang sehingga produksinya akan dikurangi. Penanaman tanaman ini diupayakan secara terbatas dan

25. *Ibid.*

26. Lebih dari 40% hasil panen padi rakyat harus diserahkan kepada pemerintah militer Jepang.

diganti dengan jenis tanaman bahan makanan dan tanaman jarak untuk pelumas.<sup>27</sup> Kebijakan tersebut berdampak pada pengalihan ribuan hektar kebun tembakau di Sumatera Timur menjadi lahan pertanian padi.<sup>28</sup> Pengurangan lahan pertanian untuk tanaman tembakau tersebut sangat berdampak pada penurunan drastis produksi tembakau Sumatera Timur, di mana tahun 1942 saat berbagai regulasi penanaman tembakau belum diberlakukan, jumlah produksi tembakau Sumatera Timur ada sebanyak 34.000 bal. Tahun 1943 jumlah tersebut naik menjadi 40.000 bal. Ketika kebijakan pengalihan lahan tembakau menjadi pertanian padi diberlakukan, Jepang produksi tembakau Sumatera Timur langsung turun pada tahun 1944. Selain pengalihfungsian lahan budidaya tembakau, aturan pemerintah militer Jepang hanya mengizinkan maskapai Deli Tua untuk menanam tembakau ikut mendorong merosotnya produksi tembakau. Tahun 1945 dan 1946 sama sekali tidak ada tembakau yang dihasilkan oleh Sumatera Timur.<sup>29</sup>

### **Penutupan De Javasche Bank**

Setelah operasi militer untuk menduduki wilayah Hindia-Belanda terlaksana, berbagai langkah dilakukan oleh Jepang di bidang moneter dan perbankan untuk menggantikan sistem keuangan Belanda. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan melikuidasi beberapa bank milik Belanda dan Inggris berdasarkan Undang-undang No. 13/1942.<sup>30</sup> Dalam aturan tersebut Jepang memberi kesempatan kepada bank-bank milik Belanda seperti: *De Javasche Bank*, *Nederlandsche Handels Maatschappij*, *Nederlands-Indische Escompto*

27. *Kan Po*, (Jakarta: 1944), hlm. 5.

28. M.C. Ricklefs, *Op.cit.*, hlm. 300.

29. Karl. J. Pelzer, *Op.cit.*, hlm. 154.

30. Mengawali kebijakan likuidasi ini pemerintah militer Jepang pada bulan Maret 1942 mengumpulkan direksi semua bank yang ada di Hindia-Belanda untuk mengeluarkan laporan resmi penyerahan seluruh aset yang mereka miliki kepada Jepang (Kusuma, 2014: 66).

*Bank*, dan *Batavia Bank*, serta beberapa bank asing, yakni: *The Chartered Bank of India, The Hong Kong and Shanghai Corporation Ltd, Overseas Chinese Banking Corporation Ltd*, dan bank-bank lainnya untuk menyelesaikan utang mereka hingga 20 November 1942.<sup>31</sup>

Penetapan likuidasi ini otomatis menghentikan segala aktivitas perbankan yang selama ini dijalankan oleh *De Javasche Bank*. Bulan Maret 1942 tercatat sebagai laporan terakhir *De Javasche Bank* (laporan ke-114) sebelum akhirnya dibekukan oleh Jepang. Meskipun demikian, pemerintah Jepang tetap mempekerjakan beberapa pegawai *De Javasche Bank* untuk menyelesaikan proses likuidasi dan membantu Jepang dalam melaksanakan berbagai kegiatan perbankan di Indonesia. Selama proses likuidasi ini aktivitas perbankan *De Javasche Bank* hanya ditujukan untuk menyelesaikan proses administrasi likuidasi yang berlangsung hingga tahun 1945.

Beberapa pegawai dan juga Presiden *De Javasche Bank*, Buttingha Witchers ditahan oleh pemerintah militer Jepang. Witchers ditahan oleh tentara *Kempetai* di Bandung, Jakarta, dan Bogor selama lebih kurang 10 bulan. Sebagian besar pegawai *De Javasche Bank* yang ditawan Jepang tersebut meninggal dunia akibat melawan kepada Jepang dan juga karena beratnya kehidupan di kamp interniran. Kondisi yang berbeda terjadi pada Direktur *De Javasche Bank*, R.E. Smith yang ikut melarikan diri bersama rombongan pemerintah Hindia-Belanda ke luar negeri. Selama di luar negeri, Smith diperintahkan untuk membangun kantor cabang *De Javasche Bank* di luar Hindia-Belanda, seperti di Australia dan Amerika Serikat. *De Javasche Bank* juga berhasil menyelamatkan cadangan emas miliknya yang tersisa dari *De Javasche Bank* Bandung ke Australia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Emas yang jumlahnya mencapai 60 ton atau senilai 120 juta *gulden* ini dibawa oleh tujuh kapal dari pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan Cilacap. Emas-emas tersebut kemudian disimpan di khazanah *Commonwealth Bank of Aus-*

31. *Kan Po*, (Jakarta: 1942), hlm. 8.

*tralia, De Reserve Bank van Zuid Afrika, dan Federal Reserve.*<sup>32</sup>

Tindakan likuidasi bank-bank asing di atas juga mengakibatkan penutupan bank-bank asing yang telah berdiri sejak abad ke-19 di Sumatera Timur, seperti *De Javasche Bank Agentschap Medan, Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM), *Nederlands-Indische Es-compto Bank, Nederlands-Indische Handelsbank, The Chartered Bank of India, The Hong Kong and Shanghai Corporation Ltd*, dan juga bank perkreditan rakyat. Selain itu, pemerintah Jepang juga menutup koperasi (perserikatan kredit) dan 2 bank Cina yang ada di Kota Medan.<sup>33</sup> Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam bidang ekonomi dan perbankan tersebut menyebabkan kendali sektor perbankan di Sumatera Timur dan Indonesia sepenuhnya berada di tangan pemerintah militer Jepang.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Yokohama Ginko*, aset milik *De Javasche Bank agentschap* Medan yang berhasil disita oleh Jepang pada 12 Maret 1942 adalah uang tunai senilai 6.091 juta *gulden* dan simpanan sebesar 5.784 juta *gulden*. Bank-bank swasta lainnya di Sumatera Timur yang dilikuidasi juga oleh Jepang memiliki uang tunai sebesar 1.283 juta *gulden*, 28.786 juta *gulden* simpanan, dan 6.091 juta *gulden* pinjaman.<sup>34</sup>

Kerugian yang diderita oleh *De Javasche Bank* selama masa pendudukan Jepang secara keseluruhan adalah berupa: a) uang kertas yang tersimpan diambil dan diedarkan oleh Jepang sebesar 87 juta *gulden*, b) uang logam yang diambil dari khazanah bank dan dibawa oleh Jepang sebesar 20 juta *gulden*, c) uang yang dirampas tentara Jepang sebesar 107 juta *gulden*, d) klaim hutang milik *De Javasche Bank* oleh *Nampo Kaihatsu Ginko* (NKG) sebesar 8 juta *gulden*.<sup>35</sup>

Dari semua bank yang dilikuidasi, pemerintah Jepang hanya

32. Wimple dalam Ervien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 62 – 65.

33. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 184.

34. Laporan YSB dalam *Ibid.*, hlm.184 – 185.

35. Ervien Kusuma, *Op.cit.*, hlm. 75 – 76.

memberikan izin bank-bank Cina dan sarikat perkreditan untuk kembali beroperasi di Sumatera Timur.<sup>36</sup> Sementara itu, bank-bank Belanda dan Eropa tetap dilarang beraktivitas kembali. Hal tersebut dilakukan oleh Jepang dengan tujuan untuk mematikan segala aktivitas keuangan dan perbankan milik Belanda dan negara Eropa lainnya yang notabene adalah musuh Jepang. Selain dengan serangan militer, strategi lain yang ditempuh oleh Jepang untuk memenangkan peperangan di kawasan Pasifik adalah dengan menghancurkan sistem ekonomi dan keuangan musuh. Jika kondisi keuangan negara Eropa tidak stabil, hal ini tentu saja akan berdampak pada alokasi dana untuk kebutuhan militer.

Aktivitas perbankan yang dilakukan oleh bank-bank Belanda dan Eropa yang telah dilikuidasi Jepang di atas digantikan oleh bank-bank Jepang yang ada di Indonesia yaitu: *Yokohama Ginko* (*Yokohama Specie Bank*), *Mitsui Ginko*, *Taiwan Ginko*, dan *Ka'nan Ginko* (*The China and Southern Bank*) mulai 10 dan 20 Mei 1942.<sup>37</sup> *Yokohama Ginko* yang didirikan tahun 1899 adalah bank yang khusus mendukung kegiatan keuangan pemerintah Jepang. *Yokohama Ginko* membuka kantor cabang di Surabaya tahun 1918 untuk tujuan ekspansi bisnis Jepang di Hindia-Belanda. *Taiwan Ginko* yang juga didirikan sejak 1899 ditujukan untuk mendukung perekonomian di Taiwan yang juga membuka kantor cabang di Surabaya tahun 1915. Sementara itu, *Mitsui Ginko* yang berdiri tahun 1876 adalah bank dari perusahaan bisnis Mitsui Zaibatsu. Bank ini juga membuka kantor cabang di Surabaya tahun 1925. *Yokohama Ginko* dan *Taiwan Ginko* disebut juga dengan *tokushu ginko* (bank khusus) yang mana pendirian kedua bank ini diatur oleh undang-undang khusus antara bank tersebut dengan pemerintah.<sup>38</sup>

36. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 186.

37. *Asia Raya* (Jakarta, 1942).

38. Shibata Yoshimasa, *The Monetary Policy in Netherlands East Indies under the Japanese Administration*, (Leiden: Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde, 1996), hlm. 182 – 183.

### Pendirian Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG)

Setelah ditutupnya bank-bank Belanda dan bank asing lainnya dan agar perekonomian dan keuangan dapat lebih dikendalikan, maka fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang, seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Harian Asia Raya mengabarkan bahwa bank-bank Jepang mulai beroperasi kembali di Jawa pada 10 Mei 1942.<sup>39</sup> Bank-bank tersebut langsung berada di bawah kendali penguasa militer Jepang dan melakukan kegiatan perbankan seperti penyimpanan deposito, simpan-pinjam dan pekerjaan lainnya yang diizinkan oleh pemerintah militer Jepang. Namun secara khusus Yokohama Specie Bank menjalankan tugas untuk mengawasi bank-bank lokal di daerah pendudukan.<sup>40</sup>

Untuk menggantikan DJB yang telah dibubarkan pemerintah militer Jepang, sebagai gantinya dibentuk Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) yang didirikan pada April 1943.<sup>41</sup> NKG didirikan dengan tujuan sebagai bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak uang di wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Selain itu tugas utama dari NKG adalah sebagai likuidator yang terdiri dari orang-orang Jepang yang dibantu oleh staf dan tenaga dari bank-bank bersangkutan. Tugas dari panitia likuidator ini adalah:

39. Bank-bank Jepang ini telah berdiri di Hindia Belanda jauh sebelum kedatangan Jepang, tetapi kemudian ditutup oleh Pemerintah Hindia Belanda karena pecahnya Perang Dunia II yang melibatkan Jepang. Ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia, pemerintah militer Jepang mulai membuka kembali bank-bank Jepang tersebut pada 10 Mei 1942. Lihat Asia Raya, 10 dan 20 Mei 2602.
40. Adrian E. Tschoegl, "The International Expansion of Singapore's Largest Banks". *Working Paper The Wharton Financial Institutions Center*, Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2001.
41. Dalam karya-karya lain Nanpo Kaihatsu Ginko disebut berbeda-beda. Ada yang menyebut Nanpo Kaihatsu Kinko, dan ada yang menyebut Nanpo Kaihatsu Ginko. Perbedaan ini merujuk pada sebuah institusi yang sama yakni Bank Pembangunan Daerah Selatan (Southern Development Bank). Lihat Shibata Yoshima, *Op.Cit.*, hlm. 177.

1. Menyelesaikan tagihan bank-bank yang ada. Usaha ini tidak mendatangkan hasil, sebagaimana telah dibayangkan sebelumnya.
2. Pembayaran kembali kepada kreditur-kreditur; dibayarkan kepada pemegang rekening yang bukan "musuh" sebesar 30 persen. Bagi yang tidak mau dan tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut, jumlah-jumlah yang seharusnya dibayarkan akan dipindahkan kepada NKG.
3. Penyelesaian simpanan-simpanan tertutup dan safe-loketten; simpanan tertutup dan *safe-loketten* yang tidak langsung berguna untuk balatentara Jepang akan dikembalikan kepada pemilik, namun dalam kenyataannya kalimat "tidak langsung berguna" tersebut ternyata sangat elastis, sehingga dalam praktiknya banyak barang-barang simpanan yang hilang atau kepada mereka diganti dengan semacam tanda memiliki tagihan-tagihan terhadap NKG.<sup>42</sup>

Ide mengenai pembentukan bank sentral di wilayah Pendudukan Jepang, terutama Indonesia, bermula ketika Direktur Biro Keuangan Pemerintah Militer Jepang menyetujui bahwa rencana mendirikan bank sentral merupakan hal penting dan harus segera dibentuk sesegera mungkin dalam landasan bahwa pendirian bank sentral yang baru sangat sesuai dengan situasi ekonomi di Jawa, dan dalam pandangan mengenai pengendalian mata uang, diharapkan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dapat menggantikan mata uang yang dikeluarkan pihak militer (*invasion money*).<sup>43</sup>

Sebagai sebuah bank sirkulasi, Nanpo Kaihatsu Ginko memusatkan kegiatannya pada sirkulasi uang-uang Jepang di Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya tersebut, NKG memilih Jakarta sebagai kantor pusat NKG. Hal ini karena mereka melanjutkan kegiatan

42. Noek Hartono, *Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1976), hlm. 28-29.

43. Shibata Yoshima, *Op.Cit.*, hlm. 189.

operasional DJB yang berpusat di Jakarta. Walaupun memusatkan kegiatannya di Jawa, secara khusus Jakarta, NKG juga membuka kantor-kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Salah satu tempat yang dipilih oleh NKG untuk membuka cabangnya adalah Pulau Sumatera, yang berada di beberapa kota yaitu: Medan, Palembang, dan Padang. Palembang menjadi kota yang dipilih sebagai kantor pusat kegiatan NKG di Sumatera.<sup>44</sup>

Di Sumatera, NKG memusatkan perhatian pada kota-kota tersebut karena di kota-kota tersebut pernah berdiri kantor cabang De Javasche Bank, yang berarti kota-kota itu memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera. Ketika Jepang masuk ke Sumatera, Gunseikanbu (pemerintah militer pusat) menerapkan kebijakan penyitaan atas institusi-institusi keuangan di daerah tersebut. Kota Medan memiliki sebuah kantor cabang de Javasche Bank; tiga bank komersial besar milik Belanda yaitu: Netherlandsche Handel Maatschappij (NHM), Netherlandsch-Indische Handelsbank, dan Netherlandsch-Indie Es-compto Maatschappij; dan beberapa kantor cabang bank asing lainnya seperti: Chartered Bank of India, the Australia, and China Bank, koperasi-koperasi kredit, dan dua bank Cina.

Sementara di Padang, juga terdapat beberapa institusi yang diambilalih oleh Jepang, di antaranya adalah: satu kantor cabang De Javasche Bank, satu bank komersial Belanda, koperasi-koperasi kredit, dan Bank Simpanan Padang. Dihadapkan dengan ancaman penutupan yang semakin dekat, kedua kantor cabang De Javasche Bank menarik deposit dalam skala besar dari bank-bank lainnya.<sup>45</sup>

Pada 12 Maret 1942, dalam laporan yang dikeluarkan oleh Yokohama Specie Bank, di Medan pemerintah militer Jepang telah menyita aset-aset kantor cabang De Javasche Bank memiliki uang tunai sebesar 6,091 juta gulden dan simpanan sejumlah 5,784 juta

44. Shibata Yoshima, *Ibid.*, hlm. 187.

45. *Ibid.*, hlm. 184.

gulden, sementara setiap bank-bank komersil lain memiliki sekitar 1,283 juta gulden uang tunai, 28,786 juta gulden dalam bentuk simpanan, dan 6,091 dalam bentuk pinjaman. Untuk kantor cabang De Javasche Bank Padang, kondisi yang hampir serupa juga terjadi di sana. Pada 10 Desember 1941, DJB Padang telah melarikan uang tunai sejumlah 6,875 juta gulden untuk menghindari penyitaan oleh Jepang. Hal ini membuat jumlah uang yang beredar di Padang menurun secara drastis sehingga hanya terdapat 165 juta gulden.<sup>46</sup>

Sebelum akhirnya secara resmi NKG dibentuk oleh pemerintah Jepang, tugas untuk mengawasi rekening-rekening perbankan di Sumatera diserahkan kepada Yokohama Specie Bank, yang mengambil alih tugas tersebut dari pemerintah militer Jepang di Jawa. Kemudian setelah NKG terbentuk, tugas dari Yokohama Specie Bank tersebut beralih ke NKG. Bank sirkulasi ini bertanggung jawab bukan hanya dalam mengawasi bank-bank di Sumatera, melainkan juga di seluruh Hindia Belanda. Sementara itu, di Semenanjung Malaya, selain mengeluarkan uang, NKG juga mendirikan Malay-Sumatra Banker's Association (Asosiasi Bankir Malaya-Sumatera) yang terdiri dari bank-bank asal Jepang, Cina, dan India, yang diperbantukan dalam mengontrol seluruh perbankan di wilayah Malaya dan Sumatera.<sup>47</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, dengan segera mereka melakukan kebijakan menutup seluruh bank-bank yang ada di Indonesia. Namun demikian pada beberapa pengecualian seperti misalnya bank-bank Cina diperbolehkan untuk beroperasi kembali, sementara bank-bank milik Belanda dan Eropa lainnya dibubarkan dan tidak diperbolehkan untuk beroperasi kembali. Kebijakan seperti itu juga berlaku di Sumatera. Koperasi-koperasi kredit dan bank-bank komersil yang dimiliki oleh Cina diperbolehkan untuk membuka kembali usahanya.

46. Laporan YSB, 'Zai Medan Tekisei Ginko' [Bank-bank musuh di Medan], 1942 dan 'Zai Padang Tekisei Ginko' [Bank-bank musuh di Padang, 1942, dalam Shibata Yoshima, *Op.Cit.*, hlm. 184-185.

47. Adrian E. Tschögl, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Di Sumatera, NKG juga mengedarkan uang-uang Jepang yang disebut uang Nanpatsu dengan pecahan yang sama dengan di wilayah lain di Indonesia. Namun secara khusus di Sumatera sendiri, NKG mencetak uang pecahan khusus, yakni 100 dan 1000 rupiah. Dikeluarkannya mata uang pecahan khusus untuk Sumatera oleh NKG disinyalir untuk menaikkan daya beli masyarakat akibat ekonomi yang terpuruk di Sumatera akibat perang.<sup>48</sup>

Selain mengedarkan uang, NKG juga bertugas untuk mengawasi peredaran uang di Sumatera. Akibat posisinya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Semenanjung Malaya, mengakibatkan banyaknya uang-uang dari Malaya yang beredar pula di Sumatera. Jadi selain gulden, NKG juga diharuskan mengawasi peredaran dolar Malaya yang dibawa oleh pedagang-pedagang asal Semenanjung Malaya. NKG berusaha untuk menjaga nilai kedua uang tersebut agar tetap dalam tingkat yang sama.

Meskipun NKG telah melakukan upaya terbaik mereka, keragaman uang tersebut semakin diperburuk oleh pasokan barang-barang yang tidak menentu di daerah pendudukan, ketidakseimbangan perdagangan di kedua wilayah, dan pengeluaran-pengeluaran militer yang berbeda di daerah masing-masing. Semua ini berkelit berkelindan yang membuat sangat sulit bagi pemerintah militer Jepang untuk menjaga keseimbangan antara dua uang tersebut.<sup>49</sup>

Tugas lainnya dari NKG di Sumatera adalah menyediakan dana kepada militer Jepang untuk keperluan pembelian barang-barang keperluan untuk militer Jepang. Hal ini dilakukan oleh NKG karena pembelian barang-barang tersebut dirasa penting demi kepentingan Jepang memenangkan perang. Terlebih lagi, barang-barang keperluan sehari-hari di Sumatera saat itu amat sulit akibat dari merosotnya ekonomi di daerah tersebut.<sup>50</sup>

48. Tim Penulis Bank Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 34.

49. Shibata Yoshima, *Op.Cit.*, hlm. 186.

50. *Ibid.*, hlm. 191.

## Peran dan Dampak NKG di Sumatera Utara

Tujuan utama pendirian NKG oleh pemerintah Jepang adalah untuk mengendalikan sirkulasi keuangan Indonesia sekaligus menjalankan berbagai aktivitas kebanksentralan termasuk mencetak dan mengedarkan uang yang selama ini diemban oleh DJB. Selain mencetak uang dan mengedarkan uang Jepang, tujuan lain dari pembentukan NKG adalah melikuidasi bank-bank asing dan lokal yang ada seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah DJB.<sup>51</sup>

Selain itu, Pemerintah militer Jepang menerbitkan sebuah kebijakan pelarangan penggunaan mata uang lain, selain mata uang “gulden Jepang” yang lebih dikenal dengan sebutan Rupiah Jepang. Kebijakan tersebut diambil selain untuk memudahkan pengawasan, pengontrolan peredaran mata uang, pemerintah juga mengharapkan agar mata uang Jepang nilainya tidak merosot, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga. Pemerintah Jepang juga melakukan kebijakan penarikan mata uang Belanda yang beredar di masyarakat.<sup>52</sup>

Sebelum NKG didirikan mata uang yang diberlakukan oleh pemerintah militer Jepang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang pendudukan (*invasion money*) atau uang militer (*gunpyo*). Ciri dari mata uang ini berupa tanda *De Japansche Regeering Betaalt aan toonder* (Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa) yang di atas uang tersebut. Uang pendudukan ini telah dipersiapkan oleh pemerintah militer Jepang jauh sebelum dilakukannya operasi pendudukan. Mata uang pendudukan tersebut adalah: gulden untuk Hindia-Belanda, straits dollar untuk Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara, rupee untuk Borma, peso untuk Filipina, dan pounds untuk wilayah Australia (*Australia Trust Territories*). Mata uang gulden, straits dollar, rupee dan peso

51. Noek Hartono, *Bank Indonesia: Sejarah dan Pertumbuhannya*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1976), hlm. 28 – 29.

52. Tim Penulis Bank Indonesia, *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia*, (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2007), hlm. 34

disamakan nilainya dengan satu yen Jepang. Sementara pounds, ditetapkan sama nilai tukarnya dengan sepuluh yen.<sup>53</sup>

Bagi Pemerintah Militer Jepang mata uang pendudukan memiliki arti yang sangat penting sebagai simbol dari kekuasaan mereka atas wilayah yang didudukinya. Sesaat sebelum operasi penaklukan Hindia-Belanda dilakukan uang militer tersebut didistribusikan di atas geladak kapal agar dapat langsung dibawa oleh tentara Jepang. Uang militer ini masih menggunakan satuan *gulden* dan ditulis dalam bahasa Belanda yang terdiri dari pecahan: 1 gulden, ½ gulden, 5 gulden, 10 gulden, 1 sen, 5 sen, dan 10 sen.<sup>54</sup>

Hingga pertengahan Januari 1942 sebesar 81.783 juta gulden telah dicetak oleh Departemen Keuangan, yang mana 58.873 gulden telah diedarkan di daerah pangkalan militer Jepang di Jawa, Sumatera, dan daerah Hindia-Belanda lainnya selama operasi militer berlangsung. Maret 1942 jumlah mata uang dengan nilai satu gulden yang diedarkan Jepang di Hindia-Belanda diperkirakan jumlahnya mencapai 26.445 gulden di Jawa dan 5.567 gulden untuk daerah Sumatera. Sementara itu, uang yang diedarkan De Javasche Bank jumlahnya mencapai 316 juta gulden. Peredaran uang milik pemerintah militer Jepang dan DJB dalam satu periode ini memicu terjadinya peningkatan yang luar biasa terhadap jumlah uang yang beredar serta tingginya kenaikan angka inflasi di Hindia-Belanda, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera.<sup>55</sup>

Mata uang yang dikeluarkan oleh NKG dikenal dengan uang *Nanpatsu* yang memiliki tanda *Dai Nippon Teikoku Seifu* (Administrasi Tentara Jepang) dengan nilai satuan rupiah yang terdiri dari pecahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah yang diedarkan keseluruh Indonesia. Khusus untuk daerah Sumatera NKG mengeluarkan uang pecahan 100 dan 1000 rupiah dengan tujuan untuk

53. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 179.

54. Tim Penulis Bank Indonesia, *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

55. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 179 – 180.

menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat perang. Pemerintah Jepang juga mengedarkan uang logam pecahan 1 sen, 5 sen, dan 10 sen dalam jumlah terbatas.<sup>56</sup> Agar proses penggantian mata uang yang telah beredar di masyarakat sebelum masa pendudukan berjalan lebih efektif, NKG membuka kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Di Sumatera, kantor cabang NKG ini terdapat di Medan, Palembang dan Padang.<sup>57</sup> Pemilihan ketiga kota ini disebabkan di kota tersebut pernah dijadikan sebagai kantor cabang DJB.

Selama masa pendudukan uang kertas dicetak dan diedarkan oleh Pemerintah Militer Jepang dan NKG di Indonesia beraneka ragam jenis dan nilainya. Ada seri *De Japansche Regeering* (Pemerintah Jepang), seri *Dai Nippon*, dan seri *Dai Nippon Teikoku Seiho* (Pemerintah Dai Nippon). Sementara itu untuk nilainya pemerintah militer Jepang mengeluarkan uang kertas dengan satuan nilai *cent* (sen), roepiah (rupiah), dan gulden. Seri *De Japansche Regeering* terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ gulden, 1 gulden, 5 gulden, dan 10 gulden. Seri *Dai Nippon* berupa pecahan 100 rupiah dan 1000 rupiah, dan seri *Dai Nippon Teikoku Seiho* terdiri dari pecahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah.<sup>58</sup> Uang kertas Jepang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang melalui NKG tersebut adalah sebagai berikut:

56. Tim Penulis Bank Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 34.

57. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm.hlm. 187.

58. Tim Penulis Bank Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 34.

Tabel 4.1  
Uang Kertas masa Pendudukan Jepang

No	Jenis Uang Kertas
1	 <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo Muka : Harga dan nama otoritas Belakang : Angka 1 dan guilose Nilai : 1 Cent</p>
2	 <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo Muka : Harga dan nama otoritas Belakang : Angka 5 dan guilose Nilai : 5 Cent</p>

No	Jenis Uang Kertas
3	 <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  Muka : Harga dan nama otoritas  Belakang : Angka 10 dan guilose  Nilai : 10 Cent</p>
4	 <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  Muka : Pohon pisang kipas  Belakang : Angka 1/2 dan guilose  Nilai : 1/2 Gulden</p>

No	Jenis Uang Kertas
5	<div data-bbox="186 223 944 566" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="186 602 609 725">           Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo            Muka : Pohon kepala            Belakang : Angka 1 dan gilose            Nilai : 1 Gulden         </p>
6	<div data-bbox="186 756 944 1147" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="186 1182 643 1305">           Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo            Muka : Pohon kelapa dan pepaya            Belakang : Angka 5 dan gilose            Nilai : 5 Gulden         </p>

No	Jenis Uang Kertas
7	 <p>The image shows the front and back of a 10 Gulden banknote. The front side (top) features a landscape with trees and a large tree trunk. The text on the front includes "DE JAPANSCH REGEERING" (The Japanese Government), "BETAALT AAN TOEGEDER" (Payable to order), "TIEN GULDEN" (Ten Gulden), and "SI". The number "10" is prominently displayed in the center and corners. The back side (bottom) features a landscape with palm trees and a large number "10" in the center and corners.</p> <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  Muka : Pohon Sukun dan kepala  Belakang : Angka 1 dan guilose  Nilai : 10 Gulden</p>

No	Jenis Uang Kertas
8	 <p>119 x 58 mm</p> <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  Muka : 2 naga bermahkota  Belakang : Harga dan ragam hias  Nilai : ½ Rupiah</p>
9	 <p>138 x 67 mm</p> <p>Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  Muka : Petani di sawah  Belakang : Pohon beringin  Nilai : 1 Rupiah</p>

No	Jenis Uang Kertas
10	<div data-bbox="186 232 940 643" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="186 674 609 797">                     Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo                      Muka : Rumah Minangkabau                      Belakang : Wanita Minangkabau                      Nilai : 5 Rupiah                 </p>
11	<div data-bbox="181 833 940 1207" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="186 1259 642 1382">                     Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo                      Muka : Penari wayang Gatotkaca                      Belakang : Arca Buddha dan stupa                      Nilai : 10 Rupiah                 </p>

No

## Jenis Uang Kertas

12



Percetakan : Djakarta Insatsu Kodjo  
Muka : Patung Wisnu di atas garuda  
Belakang : Wayang Arjuna  
Nilai : 100 Rupiah

No	Jenis Uang Kertas
13	<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>170 x 82 mm</p> </div> </div> <p>Percetakan : Percetakan Kementerian Keuangan Jepang  Muka : Rumah penduduk  Belakang : Pemuda dan 2 kerbau  Nilai : 100 Rupiah</p>
14	<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>170 x 81 mm</p> </div> </div> <p>Percetakan : Percetakan Kementerian Keuangan Jepang  Muka : 2 lembu menarik pedati  Belakang : Pemuda dan 2 kerbau  Nilai : 1000 Rupiah</p>

Mata uang yang telah digunakan sebelum masa pendudukan seperti gulden dan dollar tetap diizinkan peredarannya oleh Jepang dengan syarat nilai tukarnya disamakan dengan yen. Dibebaskannya peredaran uang-uang asing oleh Jepang menjadi salah satu penyebab masih beredarnya berbagai jenis mata uang di Sumatera Timur yang telah digunakan sebelum masa pendudukan. Jepang tetap

berusaha mempertahankan nilai mata uang gulden dengan tujuan untuk mempertahankan harga barang supaya tetap sama seperti sebelum perang. Selain itu, kebijakan moneter Jepang yang tetap menggunakan gulden bertujuan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit di Indonesia.<sup>59</sup> Tindakan pemerintah Jepang yang mengeluarkan uang kertas dalam nilai gulden pada tabel.4.1 di atas juga menjadi salah satu strategi Jepang untuk mendukung kebijakan moneternya.

Namun yang pasti, tujuan utama dari berbagai kebijakan Jepang dalam sistem moneter dan keuangan adalah untuk menghancurkan sistem moneter yang telah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada periode sebelumnya.

Uang pendudukan yang beredar di Sumatera hingga pertengahan 1945 mencapai 2.4 milyar, sedangkan mata uang gulden sebesar 1.4 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peredaran uang di Kalimantan dan Sulawesi. Dari semua uang tersebut NKG menambahkan sebanyak 87 juta gulden uang DJB yang belum sempat diedarkan sebelum proses likuidasi dilakukan. Pemerintah militer Jepang juga menyita 20 juta gulden koin perak milik DJB. Pendistribusian mata uang di Indonesia terus dilakukan oleh NKG dengan menambahkan lagi 2 milyar gulden pada 15 Agustus 1945. Uang-uang tersebut berasal dari uang curian tentara Jepang dari bank-bank Jepang di Sumatera dan sebagian dari DJB Surabaya dan beberapa tempat lainnya.<sup>60</sup>

Selain mencetak dan mendistribusikan mata uang NKG juga diberi tugas untuk mengawasi peredaran mata uang di daerah pen-

*Mata uang gulden dan dollar tetap diizinkan peredarannya oleh Jepang dengan syarat nilai tukarnya disamakan dengan yen untuk mempertahankan harga barang*

59. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*, hlm. 78.

60. Arsip Bank Indonesia, *Jaarverslag van de Javasche Bank*, (1946).

didudukan. Di wilayah Sumatera pengawasan difokuskan NKG pada mata uang gulden dan juga dollar straits di Semenanjung Malaya, di mana pada kedua daerah ini pertukaran kedua mata uang tersebut tidak dapat dihindari. Perlu diingat bahwa lalu-lintas peredaran uang antara Sumatera dengan Semenanjung Melayu telah terjadi jauh sebelum kebijakan “guldenisasi” dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di awal abad 20. Oleh karena itulah pemerintah militer Jepang juga memberlakukan proteksi terhadap masuknya uang dollar straits yang dibawa oleh pedagang dari semenanjung dan sebaliknya oleh pedagang Sumatera sendiri.<sup>61</sup> Sebagai bank sirkulasi, NKG juga bertugas menyediakan dana untuk pembelian berbagai barang kebutuhan militer Jepang yang sangat dibutuhkan dalam peperangan.<sup>62</sup>

*Kebijakan moneter Jepang yang tetap menggunakan gulden bertujuan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit di Indonesia*

Pada masa awal Pendudukan Jepang, tugas pengawasan terhadap peredaran mata uang di daerah pendudukan dilakukan oleh pemerintah militer yang kemudian dilanjutkan oleh Yokohama Ginko. Setelah NKG didirikan, sirkulasi dan pengawasan mata uang di seluruh wilayah Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab NKG. Untuk kawasan Semenanjung Malaya yang letaknya dekat dengan Sumatera, NKG juga membentuk *Malay-Sumatra Banker's Association* (Asosiasi Bankir Malaya-Sumatera) yang beranggotakan bank-bank Jepang, Cina, dan India yang ditugaskan untuk mengontrol seluruh perbankan di Malaya dan Sumatera.<sup>63</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah jitu yang di-

61. Shibata Yoshimasa, *Op.cit.*, hlm. 186.

62. Arsip Bank Indonesia, *Op.cit.*

63. Adrian E. Tschoegl, *The International Expansion of Singapore's Largest Banks, Working Paper The Wharton Financial Institutions Center*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2001).

lakukan oleh Jepang dalam melawan sekutu adalah dengan membalas embargo ekonomi yang diberlakukan oleh sekutu (dalam hal ini dikomandoi Amerika dan kemudian juga diikuti oleh Belanda) dengan menghancurkan sistem ekonomi dan keuangan di daerah jajahan negara Eropa yang tergabung dalam blok sekutu dengan tujuan untuk melemahkan pertahanan angkatan perang mereka. NKG dalam hal ini menjadi ujung tombak perjuangan Jepang dalam menghancurkan sistem ekonomi kolonial yang telah tertanam di Indonesia jauh sebelum masuknya kekuasaan Jepang.



# 5

## Berjuang dengan Uang Memper- tahankan Republik

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan untuk mempertahankan dan memajukan republik bertambah berat. Seluruh komponen bangsa saling bahu membahu berjuang mulai dari perjuangan fisik sampai perjuangan di bidang ekonomi. Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia (Hindia Belanda) berupaya untuk kembali dengan membonceng Sekutu yang bertugas melucuti militer Jepang. Di bidang ekonomi dan keuangan, salah satu strategi yang digunakan oleh Belanda untuk melemahkan perlawanan pejuang Indonesia adalah dengan memblokir perdagangan dan mencegah peredaran Uang Republik Indonesia (ORI). Dalam kondisi tersebut, para pejuang berupaya memperoleh bahan-bahan untuk mencetak ORI. Perjuangan menjadi bertambah berat karena harus memindahkan mesin-mesin pencetak uang dari Jakarta ke Yogyakarta akibat gempuran Belanda yang semakin berat. Dalam kondisi perang kemerdekaan yang masih berlangsung dan geografi Indonesia yang bersifat kepulauan, pendistribusian ORI menghadapi tantangan berat dan bahkan tidak bisa menjangkau daerah-daerah secara merata. Agar kegiatan ekonomi terus berjalan, pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mencetak Uang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

Periode pasca proklamasi kemerdekaan dalam periodisasi se-

jarah Indonesia lebih dikenal istilah masa revolusi fisik atau ada juga yang menyebutnya dengan zaman revolusi (1945 – 1950).

Revolusi yang menjadi alat untuk mencapai kemerdekaan bukan hanya sekadar rentetan kisah sentral bangsa dalam rekonstruksi sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Segala daya dan usaha dilakukan untuk mencari identitas baru, persatuan dan kebulatan tekad untuk melawan dominasi kekuasaan bangsa asing, serta mewujudkan tatanan hidup yang lebih adil dan sejahtera, berhasil dicapai pada masa ini.<sup>1</sup>

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya menyisakan kepingan-kepingan ribuan kisah dan peristiwa heroik melawan Belanda dengan senjata militer, namun juga memperlihatkan bagaimana uang sebagai senjata dalam perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi memainkan peran yang juga tak kalah hebatnya. Kedua alat perjuangan tersebut saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain hingga terwujudnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Uang dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan simbol sebuah negara yang berdaulat, namun lebih dari pada itu, uang juga merupakan senjata dalam menghadapi serangan ekonomi yang dilancarkan oleh Belanda kepada Indonesia. Berbagai taktik Belanda untuk menghancurkan ekonomi dan moneter Indonesia, seperti blokade dan pendistribusian uang NICA menuntut adanya strategi perlawanan di bidang ekonomi dan moneter termasuk perlawanan dengan instrumen uang, yang tak kalah heroiknya dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah.

Rakyat dengan semangat dan jiwa nasionalisme yang berkobar-kobar, sangat antusias menyambut kehadiran ORI atau lebih populer dengan sebutan “Oeang Putih” sebagai satu-satunya alat pembayar-

1. M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 446.

an yang sah di Indonesia. Seluruh rakyat baik di kota maupun di desa, dengan bangga menggunakan ORI dan dengan tegas menolak memakai uang NICA “Oeang Merah” sebagai alat pembayaran. “Uang kita menang” dengan penuh kebanggaan diteriakkan oleh rakyat di seluruh penjuru Republik Indonesia saat itu.<sup>2</sup>

Euforia tersebut juga diiringi dengan keberanian rakyat dalam mengatasi berbagai kesulitan untuk mencari bahan baku dan mesin pencetak uang serta proses pendistribusiannya ke berbagai daerah di tengah gempuran militer Belanda yang semakin hebat. Perjuangan mencetak dan mengedarkan uang pada masa revolusi kemerdekaan sangat menuntut keberanian dan mempertaruhkan jiwa raga. Oleh karena itulah tak salah jika generasi penerus juga memberikan penghormatan yang tinggi sekaligus meneladani para pejuang di bidang ekonomi dan keuangan tersebut. Para pejuang tersebut telah membuktikan strategisnya uang sebagai salah satu instrumen revolusi (*an instrument of revolution*). Uang sebagai instrumen perjuangan tidak hanya relevan pada zaman revolusi tetapi juga sangat penting untuk masa kini dan masa yang akan datang.

## **Kemerdekaan Indonesia dan Dekonstruksi Perekonomian Kolonial**

Di penghujung kekuasaan Jepang dan periode awal kemerdekaan kondisi perekonomian Indonesia sangat kacau. Peredaran mata uang Jepang yang sangat besar dan tidak terkendali—lebih dari dua milyar—menyebabkan terjadinya hiperinflasi di Indonesia yang baru merdeka.<sup>3</sup> Ledakan peredaran uang Jepang ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Jepang yang mengeluarkan mata uang pendudukan tanpa kendali dan tidak mempertimbangkan kestabilan

2. <http://brimuseum.blogspot.co.id>, diakses 9 Oktober 2016.

3. Golongan petani yang paling banyak menyimpan dan memiliki uang Jepang menjadi pihak yang sangat dirugikan akibat inflasi pada masa ini.

distribusi mata uang di Indonesia kala itu. Besarnya jumlah peredaran uang pendudukan tersebut juga diiringi dengan besarnya jumlah distribusi mata uang gulden yang semakin memperburuk sistem moneter Indonesia. Hingga pertengahan 1945, uang pendudukan yang diedarkan oleh Jepang di Sumatera jumlahnya mencapai 2.4 milyar rupiah Jepang, sementara itu mata uang gulden ada mencapai 1.4 milyar. Pemerintah militer Jepang kemudian menambahkan lagi peredaran uang gulden DJB sebanyak 87 juta gulden, dan 2 milyar gulden pada 15 Agustus 1945 yang berasal dari hasil penjarahan tentara Jepang dari beberapa kantor cabang DJB.<sup>4</sup>

*Berbagai program dan kebijakan untuk menciptakan kestabilan dan ketahanan ekonomi negara segera dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam bidang moneter dan keuangan*

Kekalahan beruntun yang dihadapi Jepang di berbagai medan pertempuran melawan Sekutu akhirnya mendorong angkatan darat dan angkatan laut Jepang untuk mengadakan pertemuan guna merancang pengalihan ekonomi kepada Indonesia pada bulan Juli 1945. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Pulau Jawa akan diberi kemerdekaan pada September diikuti oleh daerah-daerah lainnya secara bertahap.<sup>5</sup> Dalam kenyataannya, janji kemerdekaan tersebut hanyalah sebatas “janji kosong” yang tidak pernah ditepati, karena tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat setelah Kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh pasukan Sekutu. Kekosongan kekuasaan di Indonesia pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

4. Arsip Bank Indonesia, *Jaarverslag van de Javasche Bank*, (1946).

5. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 314.

Berbagai program dan kebijakan untuk menciptakan kestabilan dan ketahanan ekonomi negara segera dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam bidang moneter dan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi moneter Indonesia di awal kemerdekaan sangat kacau dan tidak ada pemasukan. Agar kas negara dapat terisi dalam waktu singkat, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan “Pinjaman nasional” sebesar satu milyar rupiah. Kebijakan ini ditempuh oleh Menteri Keuangan, Ir. Surachman dengan tujuan untuk menstabilkan sistem moneter negara.

Pinjaman nasional memberikan izin kepada negara untuk meminjam uang rakyat yang akan dikembalikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 40 tahun.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh penduduk Jawa dan Madura untuk menyetorkan uang mereka kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian mulai Juli 1946. Dalam tahap pertama pinjaman ini, pemerintah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Besarnya nilai pinjaman rakyat tersebut menjadi bukti besarnya dukungan yang diberikan oleh rakyat dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>7</sup>

*Untuk mencapai kestabilan sistem moneter negara, pemerintah memberlakukan kebijakan “Pinjaman nasional”.*

*Dalam tahap pertama pinjaman ini, pemerintah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Besarnya nilai pinjaman rakyat tersebut menjadi bukti besarnya dukungan yang diberikan oleh rakyat dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia*

6. Makmoer, No. 10., Thn. 1., (1946).

7. Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan*, (1947), hlm. 27.

Selain usaha untuk menembus blokade ekonomi Belanda dan pinjaman nasional di atas, pembenahan sirkulasi mata uang adalah persoalan yang paling *urgent* untuk dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya kestabilan ekonomi yang menjadi pondasi utama dalam mendukung stabilitas politik negara. Hal ini karena aktivitas politik dan sistem pemerintahan negara Indonesia yang baru saja terbentuk tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa adanya dukungan ekonomi yang mantap.

Belum adanya mata uang sendiri dan bank sirkulasi yang mengatur distribusi penyebaran uang pasca kemerdekaan, memaksa pemerintah untuk menetapkan beberapa jenis mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia melalui Maklumat No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang mengizinkan penggunaan beberapa mata uang, yakni:

#### A. Uang Kertas

1. Uang kertas "DJB" yang dikeluarkan antara tahun 1925 – 1941 yang terdiri dari: *f*1000,- (seribu rupiah); *f*500,- (lima ratus rupiah); *f*200,- (dua ratus rupiah); *f*100,- (seratus rupiah); *f*50,- (lima puluh rupiah); *f*25,- (dua puluh lima rupiah); *f*10,- (sepuluh rupiah); dan *f*5,- (lima rupiah).
2. Uang kertas Pemerintah Hindia-Belanda yang dikeluarkan tahun 1940 dan 1941 senilai: *f*2.50,- (dua rupiah lima puluh sen) dan *f*1,- (satu rupiah).
3. Uang kertas Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Jawa senilai: *f*100,- (seratus rupiah); *f*10,- (sepuluh rupiah); dan *f*5,- (lima rupiah); *f*1,- (satu rupiah); *f*0.50,- (lima puluh sen); *f*0.10,- (sepuluh sen); *f*0.05,- (lima sen); *f*0.01 (satu sen).

#### B. Uang Logam

Uang logam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda tahun 1942 berupa:

1. Uang emas senilai *f*10,- (sepuluh rupiah) dan *f*5,- (lima rupiah).
2. Uang perak yang terdiri dari: a) *ringgit* seharga *f*2.50,- (dua rupiah lima puluh sen); b) *perakan* seharga *f*1,- (satu rupiah); c)

*tengahan* seharga  $f0.50$  (lima puluh sen); d) *talenan* seharga  $f0.25$  (dua puluh lima sen); e) *picisan* seharga  $f0.10$  (sepuluh sen).

3. Uang nikel seharga  $f0.05$  (lima sen).
4. Uang tembaga atau brons: a) *gobangan* seharga  $f0.025$ ; b) *senan* seharga  $f0.01$  (satu sen); dan c) *peseran* seharga  $f0.005$  (setengah sen).<sup>8</sup>

*Anak-anak bangsa tidak hanya berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, namun juga dengan mata uang yang menjadi alat perjuangan*

Sebelum mengeluarkan Maklumat No. 1/10 di atas, pemerintah terlebih dahulu menetapkan berlakunya Maklumat tanggal 2 Oktober yang melarang penggunaan mata uang NICA (yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan uang merah) senilai  $f0.50$  yang berwarna merah satu sisi dan hijau di sisi satunya lagi. Maklumat pelarangan penggunaan uang NICA tersebut disambut dengan sangat antusias oleh rakyat Indonesia. Di Yogyakarta, para pelajar sekolah menengah dengan inisiatif sendiri mengumpulkan dan memusnahkan uang NICA hingga ke kampung-kampung di hari pemberlakuan maklumat. Hal yang sama dilakukan oleh Barisan Kaum Buruh yang menyatakan kebulatan tekad mereka untuk setia kepada Republik Indonesia dan menentang peredaran uang NICA.<sup>9</sup>

Sementara itu, para pedagang di pasar-pasar dengan tegas berani menolak pembelian barang dagangan mereka dengan uang NICA. Hal yang sama dilakukan oleh pembeli yang lebih memilih mata uang selain uang NICA sebagai alat pembayaran belanja kebutuhan sehari-hari. Memang tidak dapat dipungkiri, maklumat pelarangan uang NICA di atas, memicu konflik dan tindak kekerasan di antara bangsa Indonesia sendiri dan juga dengan orang-orang Be-

8. Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 5 Oktober 1945.

9. *Merdeka*, 7 Oktober 1945.

landa (tentara NICA).<sup>10</sup>

Terlepas dari pertentangan pasca Maklumat pelarangan uang NICA tersebut, yang harus dipahami dalam hal ini adalah betapa besarnya dukungan rakyat kepada pemerintah dalam melawan tekanan ekonomi Belanda. Anak-anak bangsa tidak hanya berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan senjata, namun juga dengan mata uang yang menjadi alat perjuangan dalam perlawanan terhadap dominasi kekuasaan asing. Mereka dengan sukarela mengikuti berbagai instruksi dan kebijakan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perlu untuk digarisbawahi bahwa kedatangan tentara NICA yang membongceng pasukan Sekutu untuk melucuti senjata tentara Jepang adalah salah satu strategi untuk mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Selain melakukan blokade laut, senjata ekonomi yang digunakan oleh tentara NICA untuk menghancurkan ekonomi Indonesia adalah dengan mendistribusikan milyaran uang Jepang yang diambil dari bank-bank Jepang serta Percetakan Kolff and Co., di Jakarta yang berhasil dikuasai NICA.<sup>11</sup>

Uang-uang tersebut digunakan oleh NICA untuk membiayai operasi militer dan gaji pegawai yang berasal dari kalangan pribumi. Orang-orang pribumi yang mau bekerja sebagai pegawai NICA akan

*Dijadikannya uang oleh NICA sebagai salah satu senjata untuk menghancurkan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, namun juga senjata utama dalam aksi penaklukan, penguasaan, dan perlawanan dalam ekonomi modern.*

10. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 46.

11. Saat Percetakan Kolff and Co., jatuh ke tangan NICA, tersimpan uang kertas rupiah Jepang yang belum sempat diedarkan ke masyarakat sebesar 2.5 milyar. Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi" dalam *Jurnal Sejarah*, (Vol. 6 No. 1, Agustus 2004), hlm. 44.

mendapatkan gaji sebesar 500 hingga 1000 gulden perbulan. Jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan pegawai pribumi yang hanya digaji oleh Sekutu sebesar 15 gulden per bulan, dan pegawai sipil serta militer RI yang kebanyakan tidak mendapatkan gaji akibat ketiadaan uang dalam kas negara. NICA menjadikan uang sebagai alat untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia (orang-orang republiken) agar berpihak pada NICA.<sup>12</sup>

Dijadikannya uang oleh NICA sebagai salah satu senjata untuk menghancurkan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, namun juga senjata utama dalam aksi penaklukan, penguasaan, dan perlawanan dalam ekonomi modern. Dengan kata lain, uang juga berperan sebagai senjata penegak kekuasaan dan kedaulatan bangsa. Saat Sumatera Timur masih menjadi bagian dari koloni Belanda, Inggris juga menggunakan strategi penyebaran mata uang ini untuk memperluas hegemoni ekonomi dan perlawanan terhadap otoritas Belanda yang ada di Sumatera, khususnya di kawasan pantai timur yang berhadapan langsung dengan wilayah Straits Settlements. Usaha ini berhasil menjadikan mata uang dollar sebagai alat pembayaran yang dominan digunakan masyarakat di Sumatera Timur. Melalui Straits Settlement, Inggris sukses mengontrol lalu lintas distribusi uang dan sistem moneter di Sumatera Timur yang kaya dengan hasil komoditas perkebunan yang laku di pasar dunia kala itu.

Taktik NICA untuk mengacaukan sistem moneter Indonesia tidak hanya dengan mengambur-hamburkan uang rupiah Jepang secara tak terbatas, tetapi juga mengedarkan mata uang baru yang disebut juga dengan mata uang NICA (uang merah) dalam jumlah yang sangat besar. Mata uang NICA ini dicetak di Amerika Serikat oleh percetakan *America Banknote Company* atas pesanan dari Kerajaan Belanda. Jika dikaitkan dengan Undang-undang *De Javasche Bank Wet* 1922 yang memberikan hak tunggal untuk mencetak dan

12. *Ibid.*

mengedarkan uang di Hindia-Belanda, keberadaan uang-uang NICA ini merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap kedudukan DJB sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang di Hindia-Belanda (Indonesia).

Aksi NICA dalam mengedarkan uang Jepang dan uang NICA tersebut memperburuk ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan semakin tingginya angka inflasi saat itu. Warisan inflasi dari masa pendudukan Jepang yang sangat tinggi memberi peluang kepada pemerintah NICA untuk semakin menghancurkan ekonomi Indonesia dengan terus menambah jumlah uang yang beredar. Dalam catatan De Javasche Bank, hingga tahun 1947 diperkirakan jumlah uang Jepang yang beredar di Pulau Sumatra mencapai 1.6 milyar, sementara itu di Pulau Jawa sebesar 2.4 milyar rupiah Jepang.

Uang NICA yang beredar di Indonesia pada masa revolusi ini terdiri dari pecahan 5 roepiah<sup>13</sup>/gulden, 2½ roepiah/gulden, 1 roepiah/gulden, dan pecahan terkecil sebesar 50 sen. Uang 50 sen NICA adalah uang yang paling banyak didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk menggantikan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintah NICA menetapkan untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa, 3 sen uang NICA sama nilai tukarnya dengan 1 rupiah Jepang.<sup>14</sup>

Bagian depan dan belakang sisi uang ditulis menggunakan aksara latin dalam bahasa Belanda dan Indonesia agar dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga orang-orang Belanda. Keempat emisi uang ini ditandatangani oleh Dr. H.J. v. Mook yang ditunjuk secara *de facto* sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Presiden De Javasche Bank, Dr. R.E Smits. Pada sisi muka uang dicantumkan lambang Kerajaan Belanda, foto Ratu Wilhelmina dan nilai uang, sementara sisi belakang tertulis teks undang-undang Kerajaan Belanda dalam dua bahasa, dan juga nilai uang.

13. Ejaan *Ophuysen* atau ejaan kolonial (1901 – 1947) yang dipopulerkan oleh Ch. A. van Ophuysen.

14. Uang ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan uang merah. *Ibid.*, hlm. 47.

Selain nilai uang yang tertulis, perbedaan keempat uang NICA ini terletak pada warnanya. Pecahan 50 sen berwarna merah (muka) dan hijau (belakang), 1 roepiah/gulden berwarna hitam (muka) dan abu (belakang), 2½ roepiah/gulden berwarna ungu (muka) dan hijau (belakang), 5 roepiah/gulden berwarna biru tua (muka) dan hijau (belakang) disertai dengan penambahan gambar pesawat tempur dan prajurit seperti yang tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 5.1  
Uang NICA yang beredar di Indonesia masa revolusi



Nilai uang	: 50 cent
Tanda tangan	: Dr. H.J. v. Mook dan Dr. R.E. Smits
Percetakan	: Amerika Banknote Company
Pengamanan	: Kertas Berbintik
Muka	: Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina
Belakang	: Teks undang-undang 2 bahasa
Nomor seri	: a. 2 huruf FX, 6 angka      b. 2 huruf FX, 6 angka 1 huruf



216 BERJUANG DENGAN UANG

- Nilai uang : 1 roepiah/gulden  
Tanda tangan : Dr. H.J. v. Mook dan Dr. R.E. Smits  
Percetakan : Amerika Banknote Company  
Pengamanan : Kertas Berbintik  
Muka : Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina  
Belakang : Teks undang-undang 2 bahasa  
Nomor seri : a. 2 huruf AX, 6 angka                      b. 2 huruf AX, 6 angka 1 huruf



- Nilai uang : 2½ roepiah/gulden  
Tanda tangan : Dr. H.J. v. Mook dan Dr. R.E. Smits  
Percetakan : Amerika Banknote Company  
Pengamanan : Kertas Berbintik  
Muka : Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina  
Belakang : Teks undang-undang 2 bahasa  
Nomor seri : a. 2 huruf BX, 6 angka                      b. 2 huruf BX, 6 angka 1 huruf



Nilai uang	: 5 roepiah/gulden
Tanda tangan	: Dr. H.J. v. Mook dan Dr. R.E. Smits
Percetakan	: Amerika Banknote Company
Pengamanan	: Kertas Berbintik
Muka	: Lambang Belanda dan Ratu Wilhelmina
Belakang	: Teks undang-undang 2 bahasa, pesawat tempur, prajurit
Nomor seri	: a. 2 huruf CX, 6 angka                      b. 2 huruf CX, 6 angka 1 huruf

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

Untuk memperluas peredaran uang NICA, Pemerintah NICA mengaktifkan kembali De Javasche Bank sebagai bank sentral Belanda di Indonesia mulai Oktober 1945. Mengawali tahun 1946, kantor cabang DJB di beberapa kota di Indonesia mulai beroperasi kembali, termasuk DJB Agentschap Medan pada 15 Mei 1946.<sup>15</sup> Selain untuk mengedarkan mata uang NICA, pembukaan kembali DJB Agentschap Medan tersebut juga dimaksudkan untuk menyela-matkan aset-aset milik pemerintah Hindia-Belanda dan perusahaan asing yang masih tersisa di Sumatera Timur pasca pendudukan Jepang. Besarnya jumlah aset ekonomi pemerintah Hindia-Belanda tersebut merupakan sumber keuangan yang potensial untuk mem-perbaiki kondisi ekonomi Belanda yang hancur akibat perang. Kekayaan sumber ekonomi inilah yang menjadi tujuan utama Be-landa ingin kembali berkuasa di Indonesia.

Di bawah pengawasan pemerintah NICA, DJB kembali men-jalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi untuk daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh tentara NICA. Tindakan pertama yang di-lakukan oleh DJB adalah dengan melikuidasi dan menyita semua aset milik bank-bank Jepang pada 15 Januari 1946.<sup>16</sup>

Jenis mata uang yang dikeluarkan oleh NICA dan didistribusikan

15. R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank pada Masa Peperangan* (Jakarta: Kantor Arsip Bank Indonesia, tidak diterbitkan), hlm. 6.

16. Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm.86.

melalui DJB pada masa ini yaitu: 50 sen (warna merah, dibaliknya warna hijau), 1 gulden (hitam, dibaliknya warna abu), 2½ gulden (ungu, dibaliknya warna hijau), 5 gulden biru tua (dibaliknya warna hijau), 10 gulden berwarna merah (depan) dan hijau (belakang), 25 gulden berwarna coklat (muka) dan hijau (belakang), 50 gulden hijau, 100 gulden coklat tua (depan) dan hijau (belakang), serta 500 gulden biru-abu (depan) dan hijau (belakang).

Di samping mengedarkan uang NICA, DJB juga menerbitkan beberapa mata uang setelah periode kemerdekaan Indonesia pada 15 Juli 1957. Mata uang ini terdiri dari 5 gulden (ungu-merah, dibaliknya lembayun dan hijau), 10 gulden (hijau dan merah), dan 25 gulden yang berwarna merah dan hijau. Bulan Mei 1948, De Javasche Bank kembali mengeluarkan seri mata uang Coen II dan uang seri Wayang yang telah diterbitkan sebelumnya dalam jumlah yang besar. Mata uang yang dirilis oleh DJB tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2  
Uang DJB yang beredar di Indonesia masa revolusi



Mata Uang De Javasche Bank tahun 1946



Mata Uang De Javasche Bank tahun 1948



Mata Uang Seri Wayang De Javasche Bank tahun 1948

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

Dukungan pasukan Sekutu yang mengakui mata uang NICA sebagai pengganti uang pendudukan di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh sekutu pada 6 Maret 1946 semakin mengukuhkan ekistensi ekonomi Belanda, dan sebaliknya semakin menjatuhkan

ekonomi Indonesia. Peran uang sebagai simbol dari kekuasaan dan kedaulatan sebuah bangsa atau negara dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemerintah NICA sebagai senjata ekonomi untuk mengembalikan otoritasnya menjadi penguasa Indonesia.

### **Arti Penting Bank Sentral Bagi Sebuah Bangsa yang Berdaulat**

Demi membantu kelancaran operasi moneter pemerintah dalam menyebarkan distribusi ORI, Juli 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan sebagai bank sentral/bank sirkulasi untuk wilayah Republik Indonesia. Bank Negara Indonesia adalah tandingan DJB yang berada di bawah kekuasaan tentara NICA. Selain berfungsi sebagai bank sirkulasi, BNI juga melayani aktivitas bank umum dalam memberikan layanan kredit kepada masyarakat. Dengan demikian di wilayah Indonesia periode 1946 terjadi dualisme bank sentral di Indonesia, yakni antara RI dengan BNI dan NICA dengan DJB.<sup>17</sup> Situasi ini tentu saja memicu terjadinya perang mata uang (*Currency War*) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda.

Usulan akan pentingnya pembentukan sebuah bank sentral yang sekaligus bertindak sebagai bank sirkulasi di Indonesia, pertama kali disampaikan oleh R.M. Margono Djojohadikusumo sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Urgensi pendirian sebuah bank sentral dan sirkulasi ini menurut Margono adalah karena sebuah bank akan menjadi mitra keuangan dan moneter dari kebebasan politik serta menjadi bagian dari organ-organ sebuah negara.<sup>18</sup> Ide Margono dalam mendirikan bank sentral ini ditentang oleh Menteri Kemakmuran Ir. Soerachman yang lebih memilih untuk mengambil-alih DJB setelah perang usai.

17. Erwien Kusuma, *op.cit.*, hlm.84.

18. Bank Negara Indonesia 1946, *35 Years bank Negara Indonesia 1946 5 Juli 1946 – 1981*, (Jakarta: 1981), hlm. 16.

Perdebatan mengenai pendirian bank sentral baru dan pengambil-alihan DJB ramai bermunculan di publik saat itu. Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, pentingnya keberadaan sebuah bank sentral di Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945, Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan: "... Berhubungan dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang."<sup>19</sup>

*sebuah bank sentral akan menjadi mitra keuangan dan moneter dari kebebasan politik serta menjadi bagian dari organ-organ sebuah negara*

Pendirian Bank Indonesia yang diprakarsai oleh Margono mendapat dukungan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan juga Menteri Keuangan melalui sebuah mandat tanggal 19 September 1945. Mandat tersebut memberikan kuasa kepada R.M. Margono Djohadikusumo untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pendirian bank sentral dan sirkulasi di Indonesia.

Sebagai rintisan, Margono terlebih dahulu mendirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai bank umum berupa: memberikan kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito, tabungan, serta memberi penerangan dan informasi segala hal yang berkaitan dengan ekonomi. Selain menjalankan fungsi sebagai bank negara, Yayasan Poesat Bank Indonesia juga bertugas mempersiapkan pendirian Bank Negara Indonesia. Modal awal Yayasan Poesat Bank Indonesia berasal dari dana pribadi Margono sendiri sebesar 5.000 gulden Hindia-Belanda.<sup>20</sup>

Pada awalnya Yayasan Poesat Bank Indonesia berkantor di sebuah gedung di Jalan Menteng 23, Jakarta. Pada saat pemerintahan

19. Erwien Kusuma, *op.cit.*, hlm. 80 – 81.

20. Bank Negara Indonesia 1946, *op.cit.*, hlm. 19

Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Kantor Jajasan Poesat Bank Indonesia juga ikut berpindah. Perpindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta karena NICA berhasil menguasai Jakarta. Meski demikian, kantor yang berada di Jakarta masih tetap dipertahankan sebagai kantor cabang. Kemudian dengan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 pada 5 Juli 1946, Jajasan Poesat Bank Indonesia dilebur dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI.<sup>21</sup>

Selama berada di Yogyakarta, Jajasan Poesat Bank Indonesia terus berbenah diri dan mengadakan persiapan pembentukan Bank Negara Indonesia. Setelah serangkaian persiapan oleh Jajasan Poesat Bank Indonesia berlangsung lebih dari setengah tahun, pemerintah akhirnya meresmikan berdirinya Bank Negara Indonesia pada 17 Agustus 1946. Pembentukan BNI tersebut merupakan realisasi dari rencana dan persiapan untuk mendirikan bank sirkulasi bagi negara Indonesia yang langkah-langkah awalnya telah dilakukan ketika Pemerintah Republik Indonesia masih berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 1 Perpu No. 2 Tahun 1946 tersebut, BNI merupakan bank sirkulasi, dan juga bertindak sebagai bank umum, dengan modal yang ditetapkan sebesar f10.000.000. Peresmian BNI dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di gedung De Javasche Bank Yogyakarta. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, BNI ternyata tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai bank sirkulasi.<sup>22</sup>

21. Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode 1: 1945–1959: Bank Indonesia pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005), hlm. 22–3.

22. Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode 1; dan BNI, Melangkah Ke Masa Depan*, hlm. 21–2. Sebagaimana terungkap dalam kawat yang dikirimkan BNI Yogya pada 19 Agustus 1946 kepada Gubernur sebagai berikut: “*Diberitahoeakan bahwa Poesat Bank Indonesia mendjelma mendjadi Bank Negara Indonesia pada tanggal 17 agoestoes j.l. dan segala oeroesan Poesat Bank dilandjoetkan oleh Bank Negara titik Nomor kawat Bank Negara dimoelai dengan nomor satoe titik BNI Jogja.*”

Sumber keuangan sebagai modal BNI adalah Obligasi Pinjaman Nasional 1946 (Undang-Undang No. 4 tahun 1946 tanggal 29 April 1946) yang penjualannya dilakukan oleh Jajasan Poesat Bank Indonesia. Obligasi Pinjaman Nasional 1946 adalah hasil penghimpunan dana sukarela dan merupakan tanggapan spontan masyarakat luas atas anjuran Pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat kekurangan dana untuk membiayai

*...menghadapi gempuran terhadap sistem moneter dan perbankan yang dilancarkan oleh Belanda tersebut, pemerintah Indonesia juga menjadikan uang sebagai alat perlawanan*

perjuangan fisik militer terhadap Belanda dan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan. Berkat Obligasi Pinjaman Nasional 1946 tersebut, keuangan negara dapat diperkuat dan selanjutnya Jajasan Poesat Bank Indonesia yang kemudian dilebur ke dalam BNI dapat segera ikut serta menggerakkan perkreditan secara teratur, baik bagi pertanian maupun kerajinan rakyat. Beberapa perkebunan, seperti perkebunan tebu, tembakau, teh, dan sebagainya juga diberi kredit.

Sebagai bank sirkulasi Indonesia, BNI bertugas mendistribusikan ORI yang telah siap dicetak ke seluruh wilayah Republik Indonesia. BNI adalah bank perjuangan, ujung tombak dalam melawan gempuran moneter uang NICA dengan menggunakan ORI bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk memudahkan perjuangan mendistribusikan ORI ke seluruh Indonesia, BNI kemudian mendirikan kantor cabang di Jawa dan Sumatera, antara lain: Malang (1946), Jember (1946), Purwokerto (1946), Garut (1946), Cirebon (1946), Pematang Siantar (November 1946), Bukittinggi (17 Agustus 1947), Kutaraja (September 1948).<sup>23</sup>

23. Bank Negara Indonesia 1946, *op.cit.*, hlm. 22.

Situasi yang kacau akibat perang menyebabkan peredaran uang ORI melalui BNI tidak berjalan optimal. Meskipun demikian, hingga 1947 BNI berhasil menarik simpanan dari masyarakat sebesar 2.045 juta gulden uang Jepang atau sekitar 40,9 juta ORI. Hal ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa dalam perjuangan menstabilkan kondisi moneter negara melalui *currency war*.<sup>24</sup>

### **Masa Penuh Tantangan dalam Memenuhi Kebutuhan Uang**

Guna menghadapi gempuran terhadap sistem moneter dan perbankan yang dilancarkan oleh Belanda tersebut, pemerintah Indonesia juga menjadikan uang sebagai alat perlawanan dan perjuangan terhadap ekspansi Belanda melalui Pemerintah NICA. Uang juga merupakan alat yang paling ampuh untuk menstabilkan dan menyelamatkan perekonomian bangsa. Ditambah lagi dengan fungsi uang sebagai atribut atau legitimasi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, menyebabkan kepemilikan mata uang sendiri sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat itu yang tidak hanya sebagai alat tukar semata.

Vitalnya kedudukan uang dalam sebuah negara sebenarnya telah disadari oleh pemerintah pasca kemerdekaan bulan Agustus 1945. Namun karena berbagai kendala dan rintangan akibat belum mapannya situasi politik dan ekonomi negara, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)<sup>25</sup> baru dapat diterbitkan satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pengesahkan berlakunya ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah menggantikan mata uang Jepang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada bulan oktober 1946. Penerbitan ORI ini tidak bisa langsung dilaksanakan setelah proklamasi

24. Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 94 – 95.

25. Ejaan *Ophuysen* atau ejaan kolonial (1901 – 1947) yang dipopulerkan oleh Ch. A. van Ophuysen.

kemerdekaan akibat kacaunya situasi negara yang disertai minimnya sarana, keahlian, dan dana yang dimiliki Indonesia saat itu.<sup>26</sup> Dalam hal prasarana, lambatnya penerbitan ORI karena sulitnya mendapatkan percetakan besar yang dapat mencetak uang dalam jumlah yang banyak, ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan mesin pencetak uang di masa perang.

Rencana penerbitan uang republik Indonesia dimulai dengan pembentukan Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia melalui Surat keputusan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis No. 3/RO tanggal 7 November 1945. Panitia ini terdiri dari Direktur dan staf Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan dan wakil-wakil Serikat Buruh Percetakan G. Kolff, yaitu: Ir. Soerachman (pengawas), T.R.B Sabarudin (Ketua: Direktur Bank Rakyat Indonesia), H.A. Pandelaki (anggota: Kementerian Keuangan), M. Tabrani (anggota: Kementerian Penerangan), S. Sugiono (anggota: Bank Rakyat Indonesia), E. Kusnadi (anggota: Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (anggota: Kementerian Keuangan), Oesman (anggota) dan Agoes (anggota), keduanya adalah wakil serikat buruh. Selain itu juga dibentuk sebuah kepanitian untuk mengatur sistem penerimaan, penyimpanan, dan pengedaran uang yang dipimpin oleh Enang Kusnadi dari Kas Negeri Jakarta.<sup>27</sup>

Setelah melakukan peninjauan ke berbagai daerah yang memungkinkan untuk mencetak uang, ditambah dengan pertimbangan hal-hal lainnya Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia memutuskan bahwa proses pencetakan uang akan dilakukan di Surabaya. Awal November 1945 master uang yang akan dicetak telah selesai dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Rencana pencetakan uang di Surabaya tersebut tidak pernah terlaksana akibat meletusnya pertempuran Surabaya. Pencetakan uang ini pun

26. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 47.

27. Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 73.

kemudian dipindahkan ke Jakarta.

Meskipun Jakarta menjadi ibukota Republik Indonesia saat itu, panitia menemui kesulitan dalam memperoleh berbagai bahan baku, seperti: kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan zinkografi, plat seng untuk master, dan mesin aduk untuk membuat tinta. Berkat bantuan dari para karyawan perusahaan percetakan dan penerbitan asing, bahan baku pembuatan uang Republik Indonesia berhasil didapatkan dengan membongkar gudang pabrik cat Pieter Schoen untuk mendapatkan tinta, dan percetakan Kolff & Co. yang memiliki banyak cadangan kertas.<sup>28</sup>

Pembuatan desain dan master cetak (negatif kaca) dilakukan di Percetakan Balai Pustaka dan Percetakan De Unie yang dilakukan oleh Boenjamin Soerjohardjo. Desain ORI pertama dibuat oleh Abdulsalam dan Soerono. Karena percetakan G. Kolff pada masa itu dikuasai oleh NICA, proses *offset* ORI ini dilakukan di Percetakan RI Salemba yang berada di bawah Menteri Penerangan.<sup>29</sup> Setelah semua rancangan master ORI selesai dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Wakil Presiden, proses pencetakan ORI untuk pertama kalinya dilakukan di Percetakan Balai Pustaka dengan nilai pecahan 100 rupiah. Di saat proses pencetakan mencapai akhir penyelesaian, pemerintah menetapkan perbandingan nilai ORI dengan mata uang yang berlaku, perlakuan terhadap mata uang lama, serta kedudukan utang piutang. Hingga akhir Desember 1945 pencetakan ORI dengan nilai 100 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, ½ rupiah, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen terus dilakukan.<sup>30</sup>

Pendudukan Belanda atas Jakarta pada bulan Januari 1946 mengakibatkan terjadinya pemindahan pusat pemerintahan ke Yo-

28. Nani Maesaroh, "Peranan Oeang Republik Indonesia (ORI) dalam Periode Revolusi Kemerdekaan 1946-1950", *Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang*, Vol. 1 No. 2 (2012), hlm. 14.

29. *Merdeka*, 30 Oktober 1946.

30. Rahmawati Fitriyanti, *Perjalanan Panjang ORI: Oeang Republik Indonesia, Mata Uang yang Lahir Sebagai Alat Revolusi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 16.

ogyakarta.<sup>31</sup> Situasi ini juga berdampak pada penundaan pendistribusian ORI siap cetak serta penghentian pencetakan ORI. Proses pencetakan kemudian dilanjutkan di Yogyakarta, Solo, Malang, dan Ponorogo.<sup>32</sup> Berbagai bahan baku dan perlengkapan pencetakan ORI dibawa dari Jakarta ke Yogyakarta. Bahan baku dari proses lanjutan pencetakan di Solo, Yogyakarta, dan Malang didapatkan dari Serikat Buruh Kertas Padalarang dan Leces Probolinggo. Sementara itu, bahan kimia pembuat tinta didatangkan dari Jakarta, Perusahaan Guladiri Kediri, laboratorium pabrik gula di Jawa Timur, dan laboratorium apoteker Departemen Kesehatan.<sup>33</sup>

Semua bahan baku dan peralatan pembuat ORI baik di Jakarta dan di pedalaman Jawa tidaklah didapatkan dengan mudah. Para pemuda dan pejuang kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi mengangkut mesin dan bahan pencetak uang ke daerah-daerah paling terpencil yang tidak terjangkau oleh tentara NICA. Kecerdikan serta keberanian sangatlah dibutuhkan dalam melanjutkan proses pencetakan ORI ditengah aksi patroli Belanda yang sangat ketat.

Setelah melalui berbagai perjuangan dan rintangan di antara asap mesiu dan ledakan bom, serta ancaman patroli militer Belanda, tanggal 1 Oktober 1946 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1946, ORI diberlakukan secara resmi penggunaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. ORI pertama ini adalah emisi Jakarta tertanggal 17 Oktober 1945. Pemerintah kemudian juga menetapkan Undang-Undang No.19 tahun 1946 yang berisi aturan nilai mata uang.<sup>34</sup>

Di wilayah Jawa dan Madura, nilai 1 rupiah ORI sama dengan

31. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 462.

32. Rahmawati Fitriyanti, *Perjalanan Panjang ORI: Oeang Republik Indonesia, Mata Uang yang Lahir Sebagai Alat Revolusi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 16.

33. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Penerbitan Naskah Sumber: Oeang Republik Indonesia (ORI)*, (Jakarta: ANRI, 2003), hlm. 6.

34. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 51 – 53.

Gambar 5.3  
ORI dengan nilai 1 rupiah emisi 17 Oktober 1945



Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

50 rupiah uang Jepang (1:5), sedangkan di Sumatera 1 rupiah ORI setara dengan 100 uang Jepang (1:10). Sementara itu, 10 rupiah ORI sama nilainya dengan 5 gram emas murni. Harga emas saat itu adalah 1 gram untuk 24 K beli rupiah dan jual 20,10 rupiah. Satu hal yang menarik dari ORI sebagai mata uang adalah ORI uang kertas pemerintah, bukan uang kertas bank dan nilainya tidak berdasarkan jaminan emas seperti uang-uang sebelumnya pernah diterbitkan pada periode sebelumnya oleh DJB, Jepang dan NICA.<sup>35</sup>

Penerbitan ORI merupakan salah satu cara yang paling logis ditempuh oleh pemerintah saat itu dalam membiayai revolusi kemerdekaan di saat sumber-sumber pembiayaan lainnya tidak memadai. Kebijakan ini dalam ekonomi moneter disebut sebagai cara inflatoir berupa *deficit-financing*, yaitu menciptakan daya beli melalui pengeluaran mata uang.<sup>36</sup> Meskipun kebijakan *deficit-financing* mendorong terjadinya peningkatan inflasi yang serius, kebijakan ini merupakan cara yang termudah, baik dan efisien untuk membiayai jalannya pemerintahan dan biaya perang di tengah minimnya pemasukan negara. Berkaitan dengan pentingnya mata uang dalam kebijakan *deficit-financing*, dapat ditegaskan bahwa ORI adalah alat pembiayaan revolusi melawan Belanda seperti halnya *continental money (greenbacks)* yang dikeluarkan oleh negara koloni Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris.<sup>37</sup>

Bersamaan dengan penetapan ORI, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1946 tertanggal 10 Oktober 1946 yang mewajibkan rakyat untuk menyimpan uang Jepang dan uang yang diedarkan DJB di bank. Pemerintah juga menetapkan aturan setiap orang hanya boleh memegang uang sebesar f50. Selain itu juga ditetapkan Peraturan peralihan penggunaan mata uang pendudukan kepada ORI untuk seluruh Indonesia yang hanya membolehkan setiap keluarga memiliki Rp. 300.00,- (tiga ratus rupiah) saja. Sementara yang tidak berkeluarga sejumlah Rp. 100.00,- (seratus rupiah).<sup>38</sup> Pemerintah juga menghimbau kepada perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyimpan uang mereka di bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam mengatur distribusi ORI. Siasat pemerintah ini berhasil menekan jumlah peredaran uang Jepang di tangan masyarakat yang awalnya berjumlah

35. Nani Maesaroh, *Op.Cit.*

36. Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 83.

37. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 55.

38. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 274 – 275.

Gambar 5.4  
Undang-undang tentang Pengeluaran ORI di *Kedaulatan Rakyat*



Sumber: <http://brimuseum.blogspot.co.id>

lebih dari 4 milyar menjadi setengahnya.<sup>39</sup>

Untuk menciptakan ketahanan moneter negara, pemerintah menerbitkan Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1946. Berdasarkan undang-undang tersebut mulai 22 Juni 1946 setiap orang tidak boleh membawa lebih dari f1000 (rupiah Jepang) dari keresidenan tertentu, yaitu daerah-daerah yang ibukotanya diduduki Belanda seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Priangan ke daerah-daerah

lain di Jawa dan Madura tanpa seizin dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, setiap orang juga tidak diperbolehkan membawa uang ke Pulau Jawa dan Madura melebihi f5000 tanpa seizin Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Melalui regulasi kepemilikan uang tersebut, pemerintah RI berusaha untuk menjaga kestabilan moneter negara.<sup>40</sup>

Peresmian penggunaan ORI sebagai alat pembayaran tunggal di Republik Indonesia saat itu disambut dengan antusias oleh seluruh rakyat. Seperti yang diuraikan oleh Rosihan Anwar berikut ini: "Sua-tu hal lain yang menggetarkan masyarakat Jakarta ialah keluarnya uang republik atau ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) atau dalam bahasa sehari-hari disebut "Uang Putih", untuk diedarkan dengan "Uang Merah" yakni uang NICA-Belanda". Dukungan terhadap ORI terus berlanjut, seperti yang tertulis dalam surat kabar "*Rakjat*" yang memuat berita yang berjudul "Uang kita menang, kata rakyat Jakarta". Dalam pemberitaan ini disebutkan bahwa tukang becak lebih memilih pembayaran 20 sen ORI dibandingkan 1 rupiah NICA. Se-

*ORI sebagai alat pembayaran tunggal di Republik Indonesia disambut dengan antusias oleh seluruh rakyat. Mereka dengan bangga memilih menggunkan ORI dari pada uang NICA-Belanda*

39. *Ibid.*, hlm. 51.

40. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 50.

mentara itu, harga ayam di pasar Tanah Abang tertanggal 30 Oktober 1946 hanya 50 sen ORI dan 10 rupiah untuk uang NICA.<sup>41</sup> Pemberitaan tersebut menunjukkan ORI memiliki nilai prestise yang sangat tinggi di mata rakyat. Mereka dengan bangga memilih menggunakan ORI dari pada uang NICA-Belanda.

Beberapa jenis mata uang ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat itu, yakni:

1. ORI Emisi I Jakarta 17 Oktober 1945 yang terdiri dari: 1 sen (hijau & abu-hijau) bergambar Soekarno, 5 sen bergambar banteng (ungu), 10 sen (coklat), ½ rupiah (hijau pink) , 1 rupiah (biru) bergambar Soekarno, 5 rupiah (hijau) bergambar Soekarno, 10 rupiah (biru dan hijau) bergambar Soekarno dan 100 rupiah (biru-hijau) bergambar Soekarno.
2. ORI Emisi II Jogjakarta 1 Januari 1947, terdiri dari: 5 rupiah (hijau-gambar Soekarno), 10 rupiah (biru-hijau, gambar Soekarno), 25 rupiah (biru-pink, gambar Soekarno), dan 100 rupiah (biru-hijau, gambar Soekarno).
3. ORI Emisi III Jogjakarta 26 Juli 1947 dalam pecahan ½ rupiah, 2½ rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, dan 250 rupiah.
4. ORI Emisi IV Jogjakarta 23 Agustus 1948 dalam pecahan 40 rupiah, 75 rupiah, 100 rupiah, dan 400 rupiah.
5. ORI Emisi V Jogjakarta 17 Agustus 1949 merupakan rupiah baru dalam pecahan 10 sen baru, ½ rupiah baru, dan 100 rupiah baru.
6. Ori Emisi Sumatera yang dikeluarkan tahun 1947:
  - a. Pematang Siantar (31 Maret 1947) terdiri dari pecahan: 1, 5, 10, dan 100 rupiah.
  - b. Bukittinggi (17 Agustus 1947) terdiri dari: ½, 1, 2½, 5, 10, dan 25 rupiah). Beberapa pecahan uang ORI edisi Sumatera terus dicetak di Bukittinggi hingga tahun 1948.

Eksistensi ORI sebagai mata uang Republik Indonesia pada tahun

41. <http://brimuseum.blogspot.co.id.>, diakses 9 Oktober 2016.

Gambar 5.5  
Uang Kertas ORI yang Berlaku di Provinsi Sumatera Tahun 1947



Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia

1948 telah diterima secara internasional. Dalam harian *Waspada*, edisi 5 April 1948 dimuat sebuah iklan nilai tukar (kurs) ORI terhadap mata uang berbagai negara besar seperti Amerika, Inggris, Belanda dan Australia. Iklan di harian tersebut mengartikan bahwa ORI merupakan mata uang yang telah diakui oleh pasar uang internasional

Gambar 5.6  
Kurs ORI terhadap mata uang internasional 1-4-1948

PASAR UANG		
Pasar uang di Djakarta tgl. 1-4-1948 adalah sbh. :		
	Beli	Djual
ORI 100.—	4.80	4.85
ORI 10.—	5.30	5.35
J.B. 100.—	75.—	75.25
J.B. 10.—	77.—	77.25
J.B. 1.-: 5.	91.—	91.25
J.B. 200.-: 1000.-	72.50	72.75
Amerika 1:	15.50	16.—
Engeland 1:	36.—	36.50
Nederland 10:	14.—	14.50
Straits 10:	46.—	46.50
Australia 1:	32.—	32.50
PASAR MAS		
Beli f 20.—, djual f 20.10 untuk mas 24 krt.		

Sumber: *Waspada*, 5 April 1948

meskipun harga jual dan belinya masih sangat rendah. Data ini juga menjadi penegas bahwa eksistensi ORI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk perlawanan dari sistem moneter penjajahan yang ingin dibangun kembali oleh Belanda.

Dijadikannya uang sebagai alat untuk membiayai perjuangan negara (rakyat) melawan Belanda di masa revolusi kemerdekaan Indonesia juga telah terjadi saat perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat (1775 – 1783). Pada masa itu untuk perjuangan kemerdekaan diterbitkan uang-uang koloni yang disahkan oleh Kongres Amerika. Dengan uang-uang koloni itulah segala biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan perang melawan Kerajaan Inggris. Jelas sudah bahwa uang berfungsi sebagai alat perjuangan revolusi "*an instrument of revolution*". Karena itulah ORI juga dapat dikatakan sebagai senjata kemerdekaan "*an instrument of revolution*"

yang kontribusinya sangat besar dalam mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>42</sup>

## Strategi Pengelolaan Uang Pada Masa Revolusi

Sulitnya distribusi ORI ke seluruh wilayah Republik Indonesia akibat suasana perang, pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada sebagian daerah untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah untuk digunakan secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Untuk itu, pada 26 Agustus 1947 dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengizinkan pemerintah daerah tingkat provinsi, keresidenan, dan kabupaten untuk menerbitkan Uang Republik Indonesia Daerah (URIDA) atau ORIDA.<sup>43</sup> URIDA yang pernah diterbitkan pada masa revolusi di Indonesia antara lain:

1. URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera)
2. URIDAB (Uang Kertas Darurat Untuk Daerah Banten)
3. Surat Tanda Penerimaan Uang untuk DI Yogyakarta
4. Kupon Penukaran Uang untuk Jambi
5. Tanda Pembayaran Yang Sah untuk Keresidenan Lampung
6. Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP)
7. Tanda Pembayaran Yang Sah berlaku untuk Sumatera Selatan
8. Bon Pemerintah Negara RI Kabupaten Asahan
9. Mandat Pertahanan untuk Daerah Keresidenan Lampung
10. Tanda Pembayaran Yang Sah berlaku untuk daerah Aceh.<sup>44</sup>

42. *Ibid.*, hlm. 70.

43. Di beberapa sumber terdapat beberapa penyebutan tentang uang daerah ini. Ada yang menyebut URIDA dan ORIDA. Perbedaan penyebutan ini dikarenakan perbedaan ejaan yang digunakan dalam penulisan sumber tersebut. URIDA adalah ejaan Suwandi (republik), sedangkan ORIDA adalah ejaan Ophysen (kolonial).

44. *DJB Masa Revolusi* dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 2 Agustus 2016, hlm. 9.

# 6

## Menjalankan Mandat dengan Penuh Amanah: Perjuangan Anak Bangsa di Sumatera

Kemerdekaan tak sekadar euforia yang membunyah pasca lepas dari pasungan penjajah. Makna kemerdekaan lebih dari itu, terutama bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah jauh-jauh hari disuarakan oleh para pemimpin bangsa di awal masa pergerakan. Kemerdekaan merupakan awal dari sebuah kerja keras tanpa henti untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tanggung jawab negara secara mandiri. Fase kemerdekaan ini bagaikan dua sisi mata pisau, di satu sisi bisa begitu tumpul namun di sisi lain bisa sangat tajam. Harus bijak dan benar mengasahnya agar kedua sisinya sama tajam. Seperti itu jugalah amanah kemerdekaan yang diemban oleh seluruh rakyat Indonesia dengan sebuah kata “Merdeka”.

Salah satu poin istimewa dari kemerdekaan dalam bidang moneter Indonesia adalah keberhasilan dalam mencetak dan mengedarkan uang sendiri yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai simbol negara yang berdaulat. Fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar tapi juga sebagai uang perlawanan terhadap sistem moneter warisan Jepang dan Belanda (NICA) yang uang-uangnya masih beredar saat itu. ORI juga berperan sebagai pengukuh identitas dan pembentuk solidaritas bangsa.

Blokade ekonomi dan kondisi perang fisik yang semakin hebat mendorong pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mencetak Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Strategi tersebut sangat penting untuk ditempuh agar

kegiatan ekonomi terus berlangsung dan para pejuang yang berperang secara fisik memperoleh dukungan pembiayaan untuk keperluan logistik dan persenjataan. Sumatera Utara yang pada zaman Hindia Belanda lebih dikenal sebagai Sumatera Timur, mempunyai kedudukan yang strategis. Hal ini antara lain posisi Sumatera Utara sebagai penghasil komoditas ekspor yang kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan hasil ekspor dari Pulau Jawa. Perjuangan di bidang ekonomi paling tidak meliputi dua hal, yaitu: pertama, strategi menembus blokade Belanda terhadap perdagangan ekspor Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi antara pengusaha/petani penghasil komoditas dengan tentara pejuang. Sebagian dari hasil ekspor tersebut disumbangkan untuk impor keperluan logistik dan perlengkapan senjata. Kedua, strategi untuk mengamankan pencetakan dan pengedaran ORIDA. Strategi di bidang ekonomi dan moneter tersebut sangat besar sumbangsinya dalam mempertahankan kemerdekaan yang belum lama diproklamirkan. Dalam kondisi Medan yang sulit dan suasana perang yang terus berkecamuk, perjuangan anak-anak bangsa dengan instrumen uang tersebut tidak kalah berat dan heroiknya dibandingkan dengan anak-anak bangsa yang berjuang dengan memanggul senjata.

### **Kondisi Ekonomi Sumatera Timur dan Blokade Ekonomi Belanda**

Proklamasi kemerdekaan menjadi babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia untuk bebas menentukan nasibnya sendiri. Selain bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi juga menjadi persoalan utama yang harus dibenahi sesegera mungkin oleh pemerintah. Kehancuran ekonomi akibat perang dan buruknya kebijakan moneter yang diberlakukan oleh Jepang selama masa pendudukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, membawa perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan berada pada titik terburuk.

Pasca kemerdekaan, Sumatera ditetapkan sebagai suatu provinsi dengan Medan sebagai ibukota dan Mr. T.M. Hasan sebagai gubernur. Meskipun bukanlah pusat pemerintahan, kedudukan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia didirikan lebih cepat dan lebih giat di Medan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa dan Sumatera.<sup>1</sup> Strategi kembalinya Belanda tersebut membuktikan bahwa kedudukan Sumatera Timur dengan Medan sebagai tumpuannya baik secara politis maupun ekonomi setelah “Era kapitalisasi” tetap menjadi yang terdepan di Indonesia. Letak geografis Sumatera yang berdampingan dengan Semenanjung Malaya menyisakan potret-potret perjuangan yang gagah berani dalam menegakkan kedaulatan negara. Tak kalah heroiknya dengan kisah-kisah perjuangan anak bangsa di daerah lainnya di Indonesia kala itu.

Potensi ekonomi Sumatera Timur yang kaya dengan hasil bumi dari perkebunan yang masih menjadi primadona dalam perdagangan internasional pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, menempatkan daerah ini sebagai target utama yang harus dikuasai oleh Belanda. Banyaknya aset-aset warisan kolonial di daerah ini yang dapat digunakan dalam menyelamatkan ekonomi Belanda pasca perang semakin menguatkan hasrat Belanda untuk menancapkan kembali kekuasaannya di Sumatera Timur.

Ratusan hektar lahan perkebunan dan pertanian rakyat rusak berat selama masa perang dan pendudukan Jepang di Sumatera Timur. Hal ini berdampak langsung pada kemunduran produksi tanaman ekspor. Kehancuran juga terjadi pada ratusan instalasi pabrik dan berbagai industri strategis lainnya yang menjadi tumpuan perekonomian. Perang terbukti tidak hanya memakan korban harta dan jiwa, namun juga memporak-porandakan perekonomian bangsa.

Kedatangan tentara Sekutu yang dibonceng oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang ingin kembali menegakkan

1. Anthony Reid, *Sumatera; Revolusi dan Elite Tradisional*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 209; 212.

kedaulatan Belanda di Indonesia pasca kekalahan Jepang adalah ancaman serius terhadap kemerdekaan Indonesia yang masih berusia muda. Pengembalian kekuasaan Belanda melalui tentara NICA tidak hanya dengan menginvasi Indonesia menggunakan kekuatan militer namun juga melalui sektor ekonomi. Propaganda ekonomi juga dilakukan oleh Belanda untuk mematikan perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dengan melakukan blokade laut yang bertujuan untuk mencegah lalu-lintas perdagangan dan senjata ke Indonesia.<sup>2</sup>

## **ORI dan Kendala Distribusi Uang Akibat Perang**

Pada 30 Oktober 1946, Pemerintah Republik akhirnya mengeluarkan mata uang resmi yang digunakan di wilayah Republik yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI). Dikeluarkannya ORI bertujuan untuk mengatasi inflasi karena banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat. Selain mengatasi inflasi, ORI dikeluarkan dengan tujuan untuk legitimasi kedaulatan RI. Dikeluarkannya ORI tidak serta merta membuat kondisi keuangan Republik membaik. Belanda yang berusaha mengambil kembali kekuasaan di Indonesia tidak tinggal diam, dengan berbagai cara Belanda berusaha agar kondisi ekonomi Republik semakin terpuruk. Usaha Belanda yang lainnya untuk melemahkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengeluarkan ORI palsu.

Urgensi kehadiran mata uang dalam suatu negara kemudian mendorong pemerintah Indonesia meresmikan penggunaan mata uang ORI mulai 30 Oktober 1946 sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura pemerintah menetapkan Rp 1 (satu rupiah) ORI sama dengan Rp100 (seratus rupiah) uang Jepang.<sup>3</sup>

2. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 273.
3. M. Hasan Basry, *Uang Kita Pernah Berupa Bon Kontan*, (Jakarta: Intisari, 1992), hlm. 1.

## Boks 1

## Tokoh-tokoh Penting dalam Penerbitan ORIDA di Sumatera Utara



Mr. TEUKU MOHAMMAD  
HASAN

Mr. Teuku Mohammad Hasan adalah salah satu tokoh nasionalis asal Aceh yang pernah menjadi gubernur Provinsi Sumatera pada awal kemerdekaan tahun 1945–1948. Salah satu kebijakan yang diambil pada masa pemerintahannya adalah dengan menerbitkan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS) yang emisi pertamanya tertanggal 11 April 1947 berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera No. 92/K.O tanggal 4 April 1947. Dalam maklumat ini ditetapkan bahwa URIPS berlaku di seluruh dan

sebagian wilayah Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini ditempuh setelah mendapat mandat dari Pemerintah RI melalui PP No. 19 Tahun 1947. Pencetakan URIPS pertama kali dilakukan di Pematang Siantar kemudian berpindah ke Bukittinggi akibat Agresi Militer I Belanda yang dilakukan di Pematang Siantar. URIPS emisi Pematang Siantar ini dijamin oleh pemerintah pusat RI dan dapat ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. Sebagai alat kontrol dan pengaman dari uang-uang palsu yang saat itu banyak beredar, maka ditempatkan cap atau tanda tangan dari pihak otoritas berwenang dan juga pemberian nomer kode uang. Kewenangan yang diberikan untuk mencetak uang sendiri dilakukan dengan pengendalian dan pengamanan yang baik sehingga dapat peredarannya dapat dikontrol dengan penuh tanggung jawab.

Manuver-manuver militer yang dilakukan Belanda sejak awal kemerdekaan menyebabkan terputusnya komunikasi normal antara pusat dan daerah yang berimbas pada tersendatnya



URIPS Rp 25



URIPS Rp 10

distribusi ORI ke Provinsi Sumatera. Untuk menjaga stabilitas perekonomian serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan uang di daerah, Mr. Teuku Mohammad Hasan menerbitkan URIPS di tengah-tengah kondisi keamanan yang sangat genting dan harus berhadapan dengan upaya intervensi yang dilakukan oleh NICA. Kebijakan penerbitan URIPS yang diambil oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan dan tentu berdasarkan izin pemerintah pusat tersebut merupakan tindakan heroisme dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. URIPS juga sebagai simbol eksistensi kedaulatan RI yang ada di daerah. Semasa kepemimpinannya, Mr. Teuku Mohammad Hasan telah menerbitkan sebanyak 88 jenis uang yang umumnya dicetak di Bukit Tinggi dan didistribusikan ke daerah-daerah. Setelah mandat untuk mencetak uang dicabut dan uang pemerintah yang resmi telah dikeluarkan, dengan sukarela masyarakat berbondong-bondong menukarkan URIPS mereka dengan uang yang resmi digunakan pada saat itu, yakni uang RIS.

Belum kondusifnya situasi keamanan negara akibat invansi tentara NICA yang ingin kembali berkuasa menyebabkan sulitnya pendistribusian ORI di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi ORI di wilayah Jawa dan Madura yang dikirim dengan menggunakan gerbong-gerbong kereta api yang dijaga dengan ketat. Akibat dari kondisi yang darurat, uang-uang ORI yang telah dicetak disimpan ke dalam keranjang-keranjang bekas sebelum diangkut dengan kereta api ke berbagai daerah. Selain kondisi keamanan yang kurang mendukung, dan pemalsuan uang ORI oleh NICA membuat pengedaran ORI di tahap awal ini sangat sulit dan tidak berlangsung sesuai dengan target yang diharapkan.<sup>4</sup>

*Urgensi mata uang dalam suatu negara inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia meresmikan penggunaan mata uang ORI mulai 30 Oktober 1946 sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah*

Peredaran berbagai jenis mata uang yang memicu inflasi besar-besaran di Indonesia juga secara langsung telah mempengaruhi kas Negara Republik Indonesia di mana pada masa awal kemerdekaan berasal dari *Fonds* Kemerdekaan Indonesia (FKI). Pemerintah Republik kemudian memiliki dua jalan terbuka dalam mengatasi siasat licik NICA yang telah mengacaukan perekonomian Indonesia. Adapun jalan pertama adalah dengan mengintensifkan aparat pemungutan pajak dan jalan kedua adalah mencetak uang. Pengintensifan aparat pemungutan pajak di masa awal tahun kemerdekaan begitu sulit terlaksana akibat kondisi keamanan yang tidak terjamin, ditambah hubungan kantor-kantor perpajakan di setiap daerah juga terhalang akibat pendudukan Sekutu.

Setelah beredar di Jawa dan Madura, peredaran ORI di Pulau Sumatera tidak sertamerta dapat terlaksana dengan baik. Belanda

4. Mohammad Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 54.

telah melakukan blokade ekonomi dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Pulau Sumatera. Pengiriman ORI yang direncanakan dilaksanakan lewat jalur laut pun terkendala keamanan sehingga pengiriman uang ke wilayah Pulau Sumatera harus ditunda untuk sementara waktu. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura, untuk sementara waktu tetap menggunakan uang Jepang. Namun seiring berjalannya waktu pengiriman ORI ke Pulau Sumatera tidak dapat terealisasi. Agresi militer Belanda I pada tahun 1947 justru mempersulit keadaan dan tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan pengiriman ORI. Di lain sisi, kebutuhan keuangan di Sumatera terus meningkat seiring dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sumatera serta untuk kebutuhan pendanaan pemerintahan daerah.

### **Strategi untuk Menembus Blokade Ekonomi Belanda**

Langkah pertama yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mematahkan blokade Belanda tersebut ditempuh secara politis dan ekonomis. Strategi politik yang dilakukan adalah dengan mengirimkan bantuan 500.000 ton beras kepada pemerintah India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Sebagai imbalan, pemerintah India akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Selain untuk menembus blokade ekonomi Belanda, tindakan pemerintah Indonesia dalam membantu India tersebut untuk mendapatkan simpati dan dukungan diplomatik dari India dan negara-negara lainnya di forum internasional.

Kebijakan lainnya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meruntuhkan blokade Belanda yaitu dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri. Usaha ini dilakukan oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die yang membentuk

5. *Makmoer*, No. 9., Thn. 1., (25 April 1946).

*Banking and Trading Corporation* (BTC) yang berhasil mengadakan kontrak dagang dengan pengusaha swasta Amerika, *Isbrantsen Inc.* Pada kontrak dagang tersebut disepakati bahwa Amerika Serikat akan membeli komoditas ekspor Indonesia berupa: gula, karet, dan teh. Kerja sama ini ternyata tidak membuahkan hasil, karena kapal Martin Behrmann yang mengangkut hasil ekspor Indonesia ke Amerika dari pelabuhan Cirebon berhasil disita oleh tentara NICA.<sup>6</sup>

Akibat sulitnya menembus blokade Belanda dari Pulau Jawa, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda di atas adalah menjadikan wilayah Pantai Timur Sumatera yang dekat dengan Singapura dan Semenanjung Malaya sebagai pusat penerobosan blokade. Letak geografis yang sangat dekat antara kedua wilayah tersebut dengan Pantai Timur Sumatera, serta kuatnya jaringan ekonomi yang telah terbentuk sejak masa kolonial menjadi faktor kunci ditempuhnya langkah ini.

Strategi melawan blokade Belanda dengan menempatkan Sumatera Timur sebagai ujung tombaknya mendorong vitalnya peran yang dimainkan daerah ini dalam upaya menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Dengan dukungan rakyat dan pemerintah daerah setempat, Indonesia berhasil melakukan perdagangan barter dengan Singapura dalam jumlah yang tidak sedikit dari pelabuhan-pelabuhan Pantai Timur Sumatera. Aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Singapura ini semakin meningkat setelah dibentuknya badan perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang diberi nama *Indonesia Office (Indoff)*.

Untuk memperkuat jaringan penembus blokade, Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri bernama Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Tugas utama dari lembaga ini adalah membeli senjata dan peralatan perang, serta mendistribusikannya ke Indonesia. KPULN dipimpin oleh Ali Jayeng-

6. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 276.

prawiro dengan tim yang terdiri dari: Suhardjo, Harmono, Kusmar-djo, Ferdy Salim, dan Darry Salim.<sup>7</sup> Usaha ini ternyata efektif dalam menambah jumlah persenjataan yang dimiliki Indonesia dalam melawan Belanda.

Oleh karena kas negara sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali di awal kemerdekaan, sistem barter antara hasil bumi Indonesia dengan senjata dan berbagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat menjadi transaksi ekonomi yang lazim digunakan oleh pemerintah. Tidak stabilnya kondisi politik dan ekonomi negara di tengah keterbatasan waktu yang tersedia menyebabkan pemerintah harus mengambil kebijakan yang cepat dan tepat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Keputusan pemerintah untuk mengadakan barter hasil bumi dengan senjata dan barang kebutuhan di atas ternyata sangat menguntungkan dalam aksi melawan kekuatan militer Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Hingga penghujung tahun 1946, telah berhasil diselundupkan hasil perkebunan Sumatera ke Singapura yang nilainya mencapai 20 juta dollar Straits Settlements. Sebuah angka yang sangat besar jika dibandingkan Pulau Jawa yang hanya mampu menghasilkan 1 juta dollar Straits Settlements. Sementara itu, barang-barang kebutuhan yang berhasil diselundupkan

*Di Pulau Sumatera, uang ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah sampai beredar ke tangan masyarakat.*

*Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran pemerintah pada tentara NICA yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan mata uang mereka.....*

*Hak otonomi untuk mencetak dan mengedarkan URIDA di daerah masing-masing disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat*

7. *Ibid.*, hlm. 277.

dari Singapura ke Sumatera jumlahnya mencapai 3 juta dollar Straits Settlements dan ke Jawa sebesar 2 juta dollar Straits Settlements.<sup>8</sup>

## **ORIDA sebagai Strategi untuk Memenuhi Kebutuhan Alat Pendukung Transaksi Ekonomi Domestik**

Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat uang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat vital. Eksistensi uang tidak hanya sebatas alat pembayaran yang sah di negara tersebut namun juga merupakan simbol yang melegalkan otoritas negara atas rakyat dan wilayahnya. Kebutuhan mendesak akan kesediaan uang milik Republik mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan ORI pada 30 Oktober 1946 sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura pemerintah menetapkan Rp 1 (satu rupiah) ORI sama dengan Rp100 (seratus rupiah) uang Jepang.<sup>9</sup>

Belum kondusifnya situasi keamanan negara akibat invansi tentara NICA yang ingin kembali berkuasa menyebabkan sulitnya pendistribusian ORI di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi ORI di wilayah Jawa dan Madura yang dikirim dengan menggunakan gerbong-gerbong kereta api yang dijaga dengan ketat. Selain itu, akibat kondisi keamanan yang kurang mendukung, dan pemalsuan uang ORI oleh NICA membuat pengedaran ORI di tahap awal ini sangat sulit dan tidak berlangsung sesuai dengan target yang diharapkan.<sup>10</sup>

Di Pulau Sumatera, uang ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah sampai beredar ke tangan masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran pemerintah pada tentara NICA yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan mata uang

8. Mr. Moh. Thayeb, *Blokade Ekonomi*, dalam *Mimbar Indonesia*, No. 1., Thn II, (1947), hlm. 10.

9. M. Hasan Basry, *Uang Kita Pernah Berupa Bon Kontan*, (Jakarta: Intisari, 1992), hlm. 1.

10. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 54.

mereka. Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 pemerintah daerah tingkat provinsi, keresidenan, dan kabupaten diberikan wewenang untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut.<sup>11</sup>

Hak otonomi untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA di daerah masing-masing disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Di Sumatera Timur, kebijakan penerbitan ORIDA ini menyebabkan terjadinya ledakan jenis alat pembayaran di Sumatera Timur pada masa revolusi fisik. Dalam waktu singkat berbagai daerah tingkat kabupaten di Sumatera Timur menerbitkan ORIDA dalam melayani kebutuhan transaksi perdagangan dengan mata uang.

Ada beberapa kategori ORIDA yang beredar di Sumatera Timur pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu:

## 1) Uang republik daerah

### a. URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera)

URIPS adalah URIDA pertama di Pulau Sumatera yang diterbitkan di Pematang Siantar. Emisi pertama URIPS yang dicetak tanggal 11 April 1947 didasarkan pada Maklumat Gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hassan No. 92/K.O tanggal 4 April 1947. Dalam maklumat ini ditetapkan bahwa URIPS berlaku di seluruh dan sebagian wilayah Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. URIPS emisi Pematang Siantar ini dijamin oleh pemerintah pusat RI dan dapat ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1.<sup>12</sup>

URIPS yang dikeluarkan di Pematang Siantar tersebut terdiri dari pecahan Rp.1, Rp.5, Rp. 10, dan Rp. 100. Uang ini ditandatangani oleh R.A. Herman dan R.M. Amin. Untuk pengamanan dari pemal-

11. *DJB Masa Revolusi* dalam diakses tanggal 2 Agustus 2016, hlm. 9.

12. Mohammad Iskandar, *op.cit.*, hlm. 58.

suan uang URIPS emisi Pematang Siantar menggunakan kode kontrol. Masing-masing nilai uang memiliki warna yang berbeda, ada yang berwarna biru dan hijau. Untuk sisi depan uang terdapat lukisan gambar Soekarno, gunung, aktivitas petani di sawah dan nilai uang. Gambar Soekarno yang dicantumkan pada berbagai emisi ORI dan ORIDA yang pernah diterbitkan pada masa revolusi kemerdekaan merupakan simbol semangat dan persatuan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sementara itu, di bagian belakang adalah gambar ornamen dan nilai uang seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.1

**Uang kertas Republik Indonesia Serikat (RIS) seri Sukarno**



250 BERJUANG DENGAN UANG

Nilai uang : Rp 5  
Emisi : Pematang Siantar, 31 Maret 1947  
Tanda tangan : R.A. Herman dan R.M. Amin  
Pengamanan : Kode Kontrol  
Warna : Hijau  
Nomor seri : Angka dan huruf



Nilai uang : Rp 10  
Emisi : Pematang Siantar, 31 Maret 1947  
Tanda tangan : R.A. Herman dan R.M. Amin  
Pengamanan : Kode Kontrol  
Warna : Biru  
Nomor seri : Angka dan huruf



- Nilai uang : Rp 100
- Emisi : Pematang Siantar, 31 Maret 1947
- Tanda tangan : R.A. Herman dan R.M. Amin
- Pengamanan : Kode Kontrol
- Warna : Biru
- Nomor seri : Angka dan huruf

Sumber: Koleksi Ichwan Azhari

Setelah jatuhnya Pematang Siantar ke tangan NICA pada agresi militer I (21 Juli 1947) tempat pencetakan URIPS dipindahkan ke Bukittinggi yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera setelah Pematang Siantar dikuasai Belanda. Emisi URIPS yang ditan-datangani oleh Tengku Mohammad Hassan tersebut diterbitkan di Bukittinggi sebanyak 13 kali hingga tahun 1948. Gencarnya aksi

polisionil yang dilancarkan oleh Belanda dalam agresi menyebabkan hubungan antara daerah-daerah republik di Sumatera dengan ibu-kota provinsi di Bukittinggi menjadi terputus, termasuk distribusi URIPS.<sup>13</sup> Situasi inilah yang nantinya mendorong daerah-daerah lain di Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Utara mengeluarkan ORIDA sendiri untuk dipakai sebagai alat pembayaran di daerah masing-masing berupa bon, bon sementara, spesial mandat atau mandat istimewa.

### b. Uang Republik Indonesia Pemerintah Sumatera Utara (URIPSU)

URIPSU pertama kali diterbitkan pada 1 Maret 1949 di Kutaradja yang peredarannya hanya berlaku khusus di Provinsi Sumatera Utara. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M Amin. Selama periode revolusi URIPSU yang diterbitkan oleh Pemerintah Sumatera Utara ini terdiri dari dua seri dengan nominal Rp.250,00.

Gambar 6.2

### Uang Republik Indonesia Pemerintah Sumatera Utara (URIPSU)



Sumber: Koleksi Museum Pers Medan

13. *Ibid.*

## Boks 2

## Tokoh-tokoh Penting dalam Penerbitan ORIDA di Sumatera Utara



Mr. SUTAN MUHAMMAD  
AMIN

Mr. Sutan Muhammad Amin merupakan tokoh nasionalis berdarah Batak asal Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Gubernur Muda Sub Provinsi Sumatera Utara tahun 1947 kemudian menjadi Gubernur Pertama Provinsi Sumatera Utara tahun 1948–1949. Pada masa pemerintahannya, Mr. S.M. Amin banyak menghadapi berbagai permasalahan keuangan dan ekonomi seperti kebanjiran uang palsu URIPS di Keresidenan Aceh yang dilakukan oleh NICA, ketidakmenentuan kebijakan pemerintah pusat terkait pendistribusian dan penarikan ORI atau URIPS di daerah, serta tingginya harga-harga bahan pokok di pasar. Oleh sebab itu Mr. S.M. Amin melalui keputusan yang ditetapkan oleh KNI Daerah Sumatera Utara menerbitkan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara (URIPSU) pada bulan Maret 1949 dan menghentikan pencetakan URIPS untuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kebijakan tersebut URIPSU berfungsi sebagai uang pembelian bahan-bahan untuk diekspor dan bahan-bahan makanan dari perusahaan yang telah disahkan oleh negara, sebagai dana bantuan kepada badan usaha pemerintah dan dana penyokong usaha pembangunan sarana prasarana untuk kepentingan rakyat. Kebijakan penerbitan URIPSU ini merupakan jawaban riil terhadap kebutuhan sekaligus permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Mr. S.M. Amin telah bertindak berani dan heroik demi mempertahankan kedaulatan dan menunjukkan eksistensi



NKRI melalui Provinsi Sumatera Utara meski harus berhadapan dengan NICA. URIPSU yang ditandatangani oleh Mr. S.M. Amin adalah sebanyak 2 seri dengan jumlah nominal Rp. 250. - Pada akhir 1949, berdasarkan



hasil Konferensi Meja Bundar yang menetapkan Republik Indonesia bergabung ke dalam RIS, maka yang dinyatakan sebagai uang yang sah di Indonesia adalah uang RIS. Berdasarkan keputusan tersebut, URIPSU dinyatakan tidak berlaku lagi. Para pemimpin politik di seluruh Indonesia, termasuk S.M. Amin, menerima keputusan politik tersebut dengan sukarela dan memberikan anjuran kepada rakyat untuk segera menukarkan uangnya dengan uang RIS yang resmi beredar.

### c. Uang Keresidenan Sumatera Timur-Selatan Rantau Prapat

Uang Keresidenan Sumatera Timur-Selatan Rantau Prapat ini ditandatangani oleh Residen Sumatera Timur Selatan. Tanggal penerbitan uang ini adalah 1 Januari 1948 dengan pengamanan cap bupati/residen. Corak pada bagian muka berupa pola geometris dengan nilai ½ rupiah.

## 2) Bon

Secara harfiah bon dapat diartikan sebagai bukti tertulis berupa kertas kecil mengenai peminjaman sejumlah uang atau barang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa saat perhubungan dengan Bukittinggi putus, URIPS emisi Bukittinggi tidak dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Sumatera. Oleh sebab itu, beberapa daerah termasuk di Sumatera Utara mengeluarkan beberapa jenis alat pembayaran sementara untuk dapat digunakan dalam berbagai transaksi dagang dan pembayaran di daerah masing-masing. Pemilik bon-bon ini dapat menukarkan sejumlah uang kepada kantor keuangan di masing-masing daerah di mana bon tersebut diterbitkan.

Bon-bon yang beredar di Sumatera Utara pada masa revolusi ini sangat beraneka ragam jenisnya, dilihat dari corak, pengesahan, waktu emisi, nilai mata uang, dan nomor seri dengan rincian sebagai berikut:

### a. ORIKA Kabupaten Asahan

ORIKA Kabupaten Asahan diterbitkan bulan Agustus 1947 oleh percetakan rumah gadai. Bon ini ditandatangani oleh Usman J.S, A. Eteng selaku Bupati Kabupaten Asahan. Untuk pengamanan bon ini hanya menggunakan cap Kabupaten Asahan. Nilai bon Asahan ini terdiri dari: 10 sen ORIPS, 50 sen ORIPS, 1 roepiah ORIPS, 2½ roepiah ORIPS, 5 roepiah ORIPS, 10 roepiah ORIPS, 25 roepiah ORIPS, 50 roepiah ORIPS, 100 roepiah ORIPS, 2500 roepiah ORIPS, dan 100.000 roepiah ORIPS.

Sisi depan dan belakang bon ORIKA Kabupaten Asahan ini bervariasi. Ada yang berupa lingkaran dengan angka 10, angka 2 de-

ngan lingkaran besar, angka 4 dan lingkaran, lingkaran dengan angka 10 dan pohon pisang, angka 25 dan pohon kelapa, bunga Padma, bunga-bunga, pegunungan, hiasan floral, gunung, serta cap bupati. Bon ORIKA Kabupaten Asahan juga bermacam warnanya, ada hitam, merah, hijau dan biru. Sementara itu untuk nilai serinya terdiri dari huruf dan angka.

Gambar 6.3  
ORIKA Kabupaten Asahan

(1)



Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947  
 Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng  
 Percetakan : Rumah gadai  
 Pengamanan : Cap Bupati  
 Muka : Lingkaran 10  
 Nilai : 10 Sen

(2)



- Warna : (1) Merah Cokelat (2) Hijau
- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : 2 lingkaran besar
- Nilai : 50 sen ORIPS

(3)



- Warna : (1) Hitam (2) Cokleat Tua
- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : 2 lingkaran besar
- Nilai : 1 rupiah ORIPS
- No Seri : Seri A 6 angka

(4)



**258** BERJUANG DENGAN UANG

- Warna : (1) Hitam (2) Cokleat Tua  
Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947  
Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng  
Percetakan : Rumah gadai  
Pengamanan : Cap Bupati  
Muka : 2 lingkaran besar  
Nilai : 2½ rupiah ORIPS  
Nomor Seri : a) Hijau (Seri a 6 angka) b) Biru (Seri A 4 angka)  
c) Biru (Seri A 5 angka) d) Biru (Seri A cap H 6 angka)

(5)



- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947  
Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng  
Percetakan : Rumah gadai  
Pengamanan : Cap Bupati  
Muka : 4 lingkaran  
Belakang : Cap Jabatan Kemakmuran  
Nilai : 5 rupiah ORIPS  
Nomor Seri : a) Hitam (Seri A 5 angka) b) Coklat (Seri A 6 angka)  
c) Hijau-ungu (Seri A cap H 5 angka)

(6)



- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : Lingkaran 10 dan pohon pisang
- Belakang : Cap Jabatan Kemakmuran
- Nilai : 10 rupiah ORIPS
- Nomor Seri : a) Coklat tua (Seri A cap H 5 angka)  
 b) Coklat tua (Seri A cap H 6 angka)  
 c) Merah (Seri A cap H 6 angka)

(7)



- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : 25 dan pohon kelapa
- Belakang : Cap Bupati
- Nilai : 25 rupiah ORIPS
- No Seri : a) Coklat tua (Seri A cap P 5 angka)  
 b) Hitam (Seri A cap P 5 angka)  
 c) Hitam (Seri A cap K 5 angka)  
 d) Hitam (Seri A 6 angka)  
 e) Merah (Seri A 5 angka)

(8)



- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : Bunga palma dan bunga
- Belakang : Cap Bupati
- Nilai : 50 rupiah ORIPS
- No Seri : a) Coklat (Seri A cap A, K 5 angka)  
 b) Coklat (Seri A 6 angka) c) Hitam (Seri A 6 angka)  
 d) Merah (Seri A 6 angka)

(9)



- Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947
- Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng
- Percetakan : Rumah gadai
- Pengamanan : Cap Bupati
- Muka : Kerbau dan pegunungan, bunga-bunga
- Belakang : Cap jabatan keuangan
- Nilai : 100 rupiah ORIPS
- No Seri : a) Seri A cap H, K, M 5 angka      b) Seri A 6 angka

(10)



Tanggal penerbitan : 21 Agustus 1947  
 Tanda tangan : Usman J.S, A. Eteng  
 Percetakan : Rumah gadai  
 Pengamanan : Cap Bupati  
 Muka : Keris, bunga-bunga, daun-daunan  
 Nilai : 2500 rupiah ORIPS  
 No Seri : a) Seri A cap H, 5 angka b) Seri A 6 angka

(11)



Percetakan	: Rumah gadai
Pengamanan	: Cap Bupati
Muka	: Hiasan floral
Belakang	: Cap Jabatan Keuangan
Nilai	: 100.000 rupiah ORIPS
No Seri	: a) Hijau (Seri A cap H 5 angka) b) Hijau (Seri A + strook)

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

### b. BON RI Barus

Bon RI Barus adalah alat pembayaran yang khusus digunakan di Barus pada masa revolusi. Bon ini memiliki nilai nominal yang berbeda dengan Bon ORIKA Kabupaten Asahan yang terdiri dari 500 rupiah ORIPS. Bon ini lebih sederhana dan sedikit jumlahnya (hanya 1 jenis). Berbeda dengan Bon ORIKA Kabupaten Asahan dan Mem-bang Moeda yang sangat beragam dan banyak jenisnya. Bon RI barus ditandatangani oleh M. Sitepu dengan tanggal emisi 26 Desember 1947. Bagian muka sisi uang ini hanya berupa teks yang bertuliskan nilai bon, tanggal, tempat bon dikeluarkan, dan cap bu-pati. Untuk nomor seri terdiri dari 4 angka.

Gambar 6.4

**Bon RI Barus**



Tanggal Penerbitan	: 26 Desember 1947
Tanda tangan	: M. Sitepu
Muka	: Teks
Nilai	: 500 rupiah ORIPS
Nomor Seri	: 4 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

### c. Bon Membang Moeda

Membang Moeda adalah sebuah daerah perkebunan karet di Sumatera Utara. Pada masa revolusi daerah ini memiliki beberapa alat pembayaran pengganti ORI. Salah satunya adalah Bon Membang Moeda. Bon Membang Moeda yang diterbitkan ada 11 jenis dengan nilai yang berbeda, yakni: 50 roepiah, 100 roepiah, 250 roepiah (ada 3 jenis), 5000 roepiah, 10.000 roepiah (2 jenis), 25.000 roepiah, 100.000 roepiah, dan 500.000 roepiah. Diperbolehkannya penggunaan ejaan Ophuysen (kolonial) dan ejaan Soewandi (republik) menyebabkan adanya perbedaan dalam penulisan alat pembayaran di Sumatera Utara pada masa ini. Ejaan ophuysen identik dengan "oe" dan ejaan Suwandi yang disahkan pemakaiannya mengubah "oe" menjadi "u".

Tingginya aktivitas perdagangan karet di daerah ini menyebabkan nilai Bon Membanga Moeda jumlahnya lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara kala itu. Bon Membang Moeda ditandatangani oleh X, Saridjan selaku wedana Membang Moeda dan dapat diuangkan di kantor wedana Membang Moeda.

Pengamanan bon ini sama dengan ORIDA lainnya berupa cap wedana di sisi bagian muka bon dengan nomor seri berupa angka dan huruf. Corak dan motif Bon Membang Moeda sangat beragam, seperti gambar batang padi, teks sesuai nilai bon, cap wedana, dua lajur pohon, pohon kelapa, bunga dan sawah, mercusuar, pohon kelapa dan pisang, pemandangan pantai, hiasan, dan lingkaran yang disertai dengan angka 250 ribu yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.5  
Jenis-jenis Bon Membang Moeda

(1)



- Tanggal penerbitan : 1 September 1947
- Tanda tangan : X, Saridjan
- Pengamanan : Cap wedana
- Muka : Batang padi
- Nilai : 50 roepiah
- Nomor seri : 5 angka 4 huruf

(2)



Tanggal penerbitan : 1 September 1947  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Pengamanan : Cap wedana  
 Muka : Cap wedana  
 Nilai : 100 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka

(3)



Tanggal penerbitan : Oktober 1947  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Muka : 2 lajur pohon  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 250 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka

(4)



266 BERJUANG DENGAN UANG

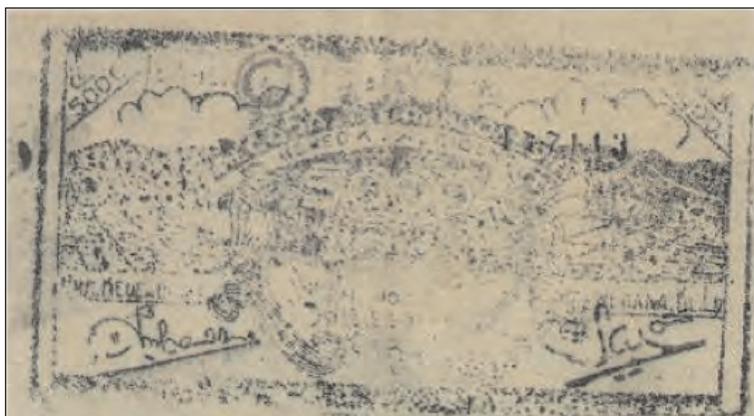
Tanggal penerbitan : Oktober 1947  
Tanda tangan : X, Saridjan  
Muka : Pohon kelapa  
Belakang : Cap wedana  
Nilai : 1000 roepiah  
Nomor seri : 5 angka

(5)



Tanggal penerbitan : 1 Januari 1948  
Tanda tangan : X, Saridjan  
Muka : Pohon kelapa  
Belakang : Cap wedana  
Nilai : 2500 roepiah  
Nomor seri : 5 angka

(6)



Tanggal penerbitan : 15 Januari 1948  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Muka : Bunga dan sawah  
 Nilai : 5000 roepiah  
 Nomor seri : a. 1 huruf 5 angka                      b. 1 huruf 6 angka

(7)



Tanggal penerbitan : 20 Januari 1948  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Muka : Mercuri  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 10.000 roepiah  
 Nomor seri : 1 huruf 6 angka

(8)



268 BERJUANG DENGAN UANG

Tanggal penerbitan : 10 Februari 1948  
Tanda tangan : X, Saridjan  
Muka : Kelapa dan pisang  
Belakang : Cap wedana  
Nilai : 10.000 roepiah  
Nomor seri : Seri DA 6 angka

(9)



Tanggal penerbitan : 22 Februari 1948  
Tanda tangan : X, Saridjan  
Muka : Pemandangan pantai  
Belakang : Cap wedana  
Nilai : 25.000 roepiah  
Nomor seri : Seri E 6 angka

(10)



Tanggal penerbitan : 3 Maret 1948  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Muka : Hiasan  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 50.000 roepiah  
 Nomor seri : Seri E 6 angka

(11)



Tanggal penerbitan : 15 Februari 1948  
 Tanda tangan : X, Saridjan  
 Muka : Lingkaran 250.000  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 250.000 roepiah  
 Nomor seri : Seri E 6 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

**d. Bon Laboehan Bilik**

Bon Laboehan Bilik diterbitkan tanggal 23 Desember 1947 sebagai alat pembayaran pengganti ORI. Bon ini ditandatangani oleh Abduldjalil, O. Effendi. Bon ini memiliki nomor seri yang terdiri dari 1 huruf dan 5 angka. Bagian muka dan belakang memiliki motif berbeda berupa teks, cap wedana, gambar bunga matahari dan angka 25, dua blok dengan angka 100, harga di atas pohon, pantai dan blok 10.000, serta pantai dan blok dengan angka 50.000. Bon

Gambar 6.6  
Jenis-jenis Bon Laboehan Bilik

(1) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 23 Desember 1947  
Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi  
Muka : 25 dan bunga matahari  
Nilai : 25 rupiah  
Nomor seri : 5 angka

(2)



Tanggal penerbitan : 23 Desember 1947  
Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi  
Muka : 25 dan bunga matahari  
Nilai : 25 rupiah  
Nomor seri : 5 angka

(3)



Tanggal penerbitan : 18 Januari 1948  
 Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi  
 Muka : Dua blok 100  
 Pengamanan : Cap wedana  
 Nilai : 100 rupiah  
 Nomor seri : 1 huruf 5 angka

(4)



Tanggal penerbitan : 19 Januari – Februari 1948  
 Warna : a. Hitam                      b. Biru muda                      c. Hijau  
 Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi & Abduldjalil, H.Sjahboedin  
 Muka : Dua blok 100  
 Pengamanan : Cap wedana  
 Nilai : 100 rupiah  
 Nomor seri : a. 1 huruf 5 angka                      b. 2 huruf 6 angka  
                     c. 2 huruf 6 angka

(5)



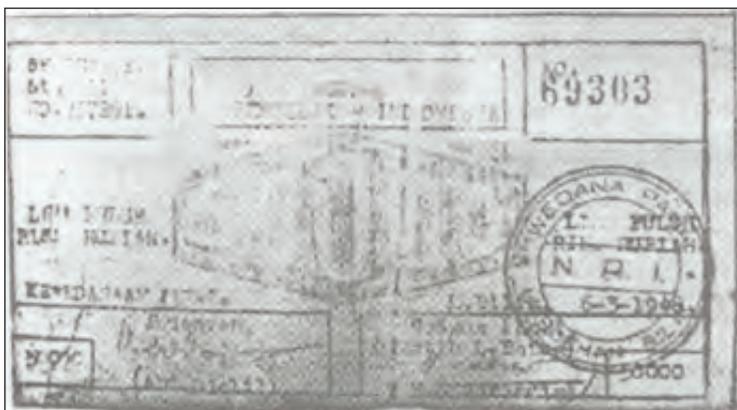
**272** BERJUANG DENGAN UANG

Tanggal penerbitan : 3 Februari – 14 Februari 1948  
Tanda tangan : Abduldjalil, H. Sjahboedin  
Muka : Harga diantara pohon  
Pengamanan : Cap wedana  
Nilai : 100 rupiah  
Nomor seri : 2 huruf 5 angka

(6) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 24 Februari 1948  
Warna : a. Coklat b. Oranye  
Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi  
Muka : Pantai dan blok 10.000  
Pengamanan : Cap wedana  
Nilai : 10.000 rupiah  
Nomor seri : 2 huruf 5 angka

(7)



Tanggal penerbitan : 6 Maret 1948  
Warna : Oranye  
Tanda tangan : Abduldjalil, O. Effendi  
Muka : Pantai dan blok 50.000  
Pengamanan : Cap wedana  
Nilai : 50.000 rupiah  
Nomor seri : 2 huruf 5 angka

(8) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 24 Februari 1948  
Warna : Merah  
Nilai : 100.000 rupiah

## (9) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 25 Maret 1948  
 Warna : Oranye  
 Nilai : 250.000 rupiah

## (10) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 9 April 1948  
 Warna : Oranye  
 Tanda tangan : Abduldjalil, H. Hoenain  
 Muka : Harga dan teks  
 Pengamanan : Cap wedana  
 Nilai : 500.000 rupiah  
 Nomor seri : a. 4 angka      b. 5 angka      c. 6 angka

## (11) Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 7 Mei 1948  
 Warna : Oranye  
 Tanda tangan : Abduldjalil, Zainoedin  
 Muka : Harga dan teks  
 Pengamanan : Cap wedana  
 Nilai : 500.000 rupiah  
 Nomor seri : 5 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

Laboehan bilik memiliki warga yang beragam seperti Bon ORIKA Asahan dan Membang Moeda, yakni hitam, biru muda, hijau, merah, oranye, abu, dan coklat. Nilai bon ini terdiri dari 10 rupiah, 25 rupiah, 100 rupiah (3 jenis), 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 250.000 rupiah, dan 500.000 rupiah (2 jenis).

### e. Bon Rantau Prapat

Bon Rantau Prapat adalah alat pembayaran pengganti ORI yang ada di Sumatera Utara. Bon ini diterbitkan tahun 1947 dengan tanda tangan A. Nasution dan G. Gautama. Bon ini memiliki kode seri yang terdiri dari 2 huruf dan 5 angka. Sebagai pengamanan bon ini diberi stempel atau cap bupati Rantau Prapat. Nilai Bon Rantau Prapat ini terdiri dari 2½ roepiah (2 jenis), 50 roepiah, 100 roepiah (2 jenis),

500 roepiah, 1000 roepiah (2 jenis), 2500 roepiah, 5000 roepiah, 10.000 roepiah (2 jenis), 50.000 roepiah, 100.000 roepiah, 250.000 roepiah, 5.000.000 roepiah (2 jenis), dan 25.000.000 roepiah (2 jenis). Corak dan motif yang tercantum di bon ini adalah teks dan nilai uang seperti: teks angka 5 dan 2 cap, teks angka 5 dan 2 cap,

Gambar 6.7  
**Jenis-jenis Bon Rantau Prapat**

Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 1947  
 Nilai : 2½ roepiah

Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 1947  
 Tanda tangan : A. Nasution, G. Gautama  
 Muka : 5, teks dan 2 cap  
 Pengamanan : Cap bupati  
 Nilai : 2½ roepiah  
 Nomor seri : 2 huruf 5 angka



Tanggal penerbitan : 1947  
 Tanda tangan : A. Nasution, G. Gautama  
 Muka : 50, teks dan 2 cap  
 Pengamanan : 2 cap bupati  
 Nilai : 50 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka



- Tanggal penerbitan : 1947
- Warna : a. Hitam b. Merah
- Tanda tangan : A. Nasution, G. Gautama
- Muka : 100, teks dan 2 cap
- Pengamanan : 2 cap bupati
- Nilai : 100 roepiah
- Nomor seri : a. 5 angka b. 3 huruf (S, AX) 4 angka  
c. 3 huruf (A, AX) 5 angka

Tanpa Gambar

- Tanggal penerbitan : 1947
- Tanda tangan : A. Nasution, Sjahboeddin
- Muka : Dua blok 500
- Pengamanan : 2 cap bupati
- Nilai : 500 roepiah
- Nomor seri : a. 3 huruf (S, ZA) 5 angka b. 2 huruf (S, T) 2 angka

Tanpa Gambar

- Tanggal penerbitan : 29 November 1947 – 14 Februari 1948
- Warna : a. Biru b. Coklat
- Nilai : 100 roepiah
- Nomor seri : a. 3 huruf (S, AX) 5 angka b. 4 angka



Tanggal penerbitan : 29 November 1947  
 Muka : 3 blok 1000  
 Pengamanan : 2 cap Bupati  
 Nilai : 1000 roepiah  
 Nomor seri : a. 3 huruf (S, Y, A) 5 angka



Tanggal penerbitan : 3 Desember 1947  
 Tanda tangan : A. Nasution, Sjahboeddin  
 Muka : Tiga blok 500  
 Pengamanan : 2 cap bupati  
 Nilai : 1000 roepiah  
 Nomor seri : 3 huruf (S, Y, A) 5 angka

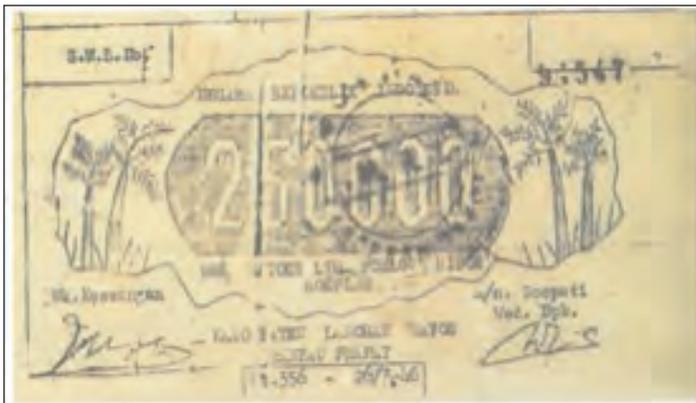




- Tanda tangan : ab - 1 Sjahboeddin, G. Gautama  
Ab - 2 A. Nasution, G. Gautama  
c. Harahap, x
- Muka : Lingkaran 10.000
- Pengamanan : Cap bupati
- Nilai : 10.000 roepiah
- Nomor seri : 4 huruf 5 angka



- Tanggal penerbitan : 13 Maret 1948
- Warna : a. Biru b. Hitam
- Tanda tangan : a. Harahap, x b. A. Nasution, x
- Muka : Pucuk pohon
- Pengamanan : Cap bupati
- Nilai : 50.000 roepiah
- Nomor seri : 6 huruf (S. WFT.AV) 5 angka



**280** BERJUANG DENGAN UANG

- Tanggal penerbitan : 26 Maret 1948  
Tanda tangan : a. A. Nasution, Sjahboeddin b. x, x  
Muka : 2 pohon kelapa di kanan dan di kiri  
Pengamanan : Cap bupati  
Nilai : 250.000 roepiah  
Nomor seri : 3 huruf (S.W.B) 5 angka



- Tanggal penerbitan : 9 April 1948  
Warna : a. Hitam b. Biru c. Kuning  
Tanda tangan : a. A. Nasution b. Harahap dan G. Gautama  
Muka : Pohon di kanan dan di kiri  
Pengamanan : Cap bupati  
Nilai : 5.000.000 rupiah  
Nomor seri : 2 angka 1 huruf



Tanggal penerbitan : 9 April 1948 – 24 April 1948  
 Warna : a. Hitam b. Biru c. Kuning  
 Tanda tangan : a. A. Nasution, x  
 b. Harahap dan G. Gautama  
 Muka : Pohon di kanan dan di kiri  
 Pengamanan : Cap bupati  
 Nilai : 5.000.000 rupiah  
 Nomor seri : 2 angka 1 huruf



Tanggal penerbitan : 9 April 1948  
 Tanda tangan : A. Nasution b, x  
 Muka : Harga  
 Pengamanan : Cap bupati  
 Nilai : 25.000.000 rupiah  
 Nomor seri : 2 huruf (SN) 1 angka/C (8/C) S rap 1 5 angka



**282** BERJUANG DENGAN UANG

Tanggal penerbitan : 9 April 1948  
Tanda tangan : Harahap, x  
Muka : Blok 5.000.000  
Pengamanan : Cap bupati  
Nilai : 5.000.000 rupiah  
Nomor seri : 2 huruf (WS) 1 angka (1) 2 huruf (AB) 6 angka



Tanggal penerbitan : 10 Mei 1948 – 12 Mei 1948  
Tanda tangan : A. Nasution, x  
Muka : Blok 25 milliun  
Pengamanan : Cap bupati  
Nilai : 25.000.000 rupiah  
Nomor seri : 3 huruf (SWF) 1 angka (2) 2 huruf (AD) 5 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

teks angka 100 dengan 2 cap, dua blok 500, tiga blok 500, 3 blok 1000, 2 blok dan 1 belah ketupat, dua lingkaran 5000, Pohon kelapa dan pohon pisang, lingkaran 10.000, pucuk pohon, 2 pohon kelapa di kanan dan di kiri, pohon kanan dan kiri, dan blok dengan harga bon yang mencapai 25 milyon.

**f. Bon Sementara Lima Poeloeh**

Daerah Lima Poeloeh adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kewedanaan Batu Bara setelah proklamasi kemerdekaan. Sama dengan daerah-daerah Sumatera Timur lainnya yang sibuk

dengan berbagai aktivitas industri perkebunan tanaman komoditas ekspor sehingga sangat membutuhkan keberadaan uang untuk transaksi dagang, Lima Poeloeh pada masa setelah kemerdekaan juga mengeluarkan URIDA sendiri yang disebut dengan Bon Sementara Lima Poeloeh.

Ada dua jenis emisi Bon Sementara Lima Poeloeh yang pernah diterbitkan pada masa revolusi fisik. Bon-bon sementara ini diterbitkan pada 1 September 1947 oleh kedewanaan Lima Poeloeh. Pengesahan bon ini sebagai alat pembayaran di Lima Poeloeh adalah tanda tangan H. Lubis Bahar dengan cap wedana sebagai pengaman. Desain Bon Sementara Lima Poeloeh ini sangat menarik dan berbeda dengan URIDA lainnya di Sumatera Utara.

Ketika URIDA di kedewanaan lainnya di Sumatera Timur angka dan huruf yang tertulis di bon dibuat dengan teknik cetak, maka Bon Sementara Lima Poeloeh ditulis dengan tulisan tangan menggunakan pena tinta berwarna merah. Motif bagian muka adalah gambar hati dan ketupat yang di dalamnya tertulis nilai bon tersebut. Untuk sisi bagian belakang dicantumkan cap pejabat. Nilai Bon Sementara Lima Poeloeh ini adalah 50 rupiah (Japan) dan 100 rupiah (Japan) seperti yang tertulis di bon. Bon 50 rupiah bergambar hati, sedangkan 100 rupiah berupa ketupat. Untuk nomor seri, bon sementara dengan nilai 50 rupiah terdiri dari 2 huruf empat angka. Sedangkan bon sementara 100 rupiah memiliki nomor seri 1 huruf 4 angka.

Satu lagi yang menjadikan Bon Sementara Lima Poeloeh ini sangat unik dibandingkan dengan URIDA lainnya adalah aksara yang tertulis di bon tersebut. Di saat URIDA lainnya dominan menggunakan aksara latin dalam bahasa Indonesia ejaan Suwandi dan ejaan ophuysen, Bon Sementara Lima Poeloeh menggunakan aksara latin berbahasa Indonesia juga menggunakan aksara Cina. Banyaknya masyarakat Cina yang bermukim di Lima Poeloeh mendorong komunitas Cina bersama dengan masyarakat pribumi di daerah ini menerbitkan Bon Sementara Lima Poeloeh agar dapat dipakai

Gambar 6.8  
Bon Sementara Lima Peoloh



- Tanggal penerbitan : 1 September 1947
- Tanda tangan : H. Lubis, Basahar
- Muka : Harga dalam hati
- Belakang : Cap pejabat
- Pengamanan : Cap pejabat
- Nilai : 50 rupiah
- Nomor seri : 2 huruf 4 angka



Tanggal penerbitan	: 1 September – September 1947
Tanda tangan	: H. Lubis, Basahar
Muka	: 100 dalam bentuk ketupat
Pengamanan	: Cap pejabat
Nilai	: 100 rupiah
Nomor seri	: 1 huruf 4 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

bersama-sama. Realitas ini menunjukkan bagaimana masyarakat pribumi dan Cina bekerja sama dalam berjuang menegakkan kedaulatan Republik Indonesia melalui URIDA.

#### **g. Bon Sementara Dolok Nanggar**

Bon sementara Dolok Nanggar diterbitkan oleh pemerintah Dolok Nanggar daerah Serbalawan, Simalungun pada 5 Agustus 1947. Bon Sementara Dolok Nanggar yang diterbitkan masa ini nilainya ada beberapa macam, yakni: 5 rupiah dengan nomor seri 2 angka, 50 rupiah (nomor seri 4 angka), 100 rupiah hijau/*green* (5 angka), dan 250 rupiah hijau/*green* (5 angka).

### **3) Tanda Pembayaran Yang Sah Pematang Siantar**

Jenis URIDA selanjutnya yang ada di Sumatera Utara adalah Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar. URIDA ini diterbitkan pada 31 Maret 1947 yang disahkan oleh tanda tangan R.A. Herman R.M. Amri. Penerbitan Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar ini bertujuan untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran. Dalam uraian sebelumnya telah disinggung bahwa di Pematang Siantar juga diterbitkan URIPS. Pemindehan pusat pemerintahan dari Pematang Siantar ke Bukittinggi menjadi penyebab diterbitkannya Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar untuk memenuhi kebutuhan moneter masyarakat, bukan sebagai tandingan dari URIPS.

Corak pada bagian muka Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar bernilai 1 rupiah adalah gambar Soekarno dan gu-

nung meletus. Sedangkan dibagian belakang terdapat dua lingkaran 1 dan teks. Nomor seri uang ini berupa 5 angka 3 huruf. Motif Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar lainnya adalah gambar Soekarno, Soekarno dengan petani, Soekarno dan gunung, dua lingkaran 5 dan teks, dua lingkaran 100 dan teks, dan dua lingkaran 10 dan teks.

Nilai mata uangnya terdiri dari: 1 rupiah, 5 rupiah biru, 100 rupiah, dan 10 rupiah biru. Sedangkan untuk nomor serinya, Tanda pembayaran yang sah Pematang Siantar ini ada tiga macam, yaitu: 5 angka 3 huruf, dan 6 angka 2 huruf seperti yang tampak pada gambar berikut:

Gambar 6.9  
Tanda Pembayaran yang Sah Pematang Siantar



Tanggal penerbitan	: 31 Maret 1947
Tanda tangan	: R.A. Herman R.M. Amri
Muka	: Soekarno, gunung meletus
Belakang	: Dua lingkaran 1 dan teks
Nilai	: 1 rupiah
Nomor seri	: 5 angka 3 huruf



Tanggal penerbitan : 31 Maret 1947  
 Tanda tangan : R.A. Herman R.M. Amri  
 Muka : Soekarno  
 Belakang : Dua lingkaran 5 dan teks  
 Nilai : 5 rupiah biru  
 Nomor seri : 5 angka 3 huruf



Tanggal penerbitan : 31 Maret 1947  
 Tanda tangan : R.A. Herman R.M. Amri  
 Muka : Soekarno  
 Belakang : Dua lingkaran 5 dan teks  
 Nilai : 5 rupiah biru  
 Nomor seri : 6 angka 3 huruf



- Tanggal penerbitan : 31 Maret 1947  
Tanda tangan : R.A. Herman R.M. Amri  
Muka : Soekarno dan gunung  
Belakang : Dua lingkaran 100 dan teks  
Nilai : 100 rupiah  
Nomor seri : 6 angka 2 huruf



- Tanggal penerbitan : 31 Maret 1947  
Tanda tangan : R.A. Herman R.M. Amri  
Muka : Soekarno dan gunung  
Belakang : Dua lingkaran 100 dan teks  
Nilai : 100 rupiah  
Nomor seri : 6 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan	: 31 Maret 1947	
Warna	: a. Biru	b. Hijau
Tanda tangan	: R.A. Herman R.M. Amri	
Muka	: Soekarno dan petani	
Belakang	: Dua lingkaran 10 dan teks	
Nilai	: 10 rupiah biru	
Nomor seri	: a. 5 angka 3 huruf	b. 6 angka 2 huruf

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

#### 4). Mandat Istimewa Membang Moeda

Membang Moeda, Pematang Siantar, Rantau Prapat adalah daerah-daerah di Sumatera Utara yang menerbitkan lebih dari satu jenis URIDA. Selain bon, Membang Moeda juga menerbitkan Mandat Istimewa Membang Moeda sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Membang Moeda. Mandat ini diterbitkan pada 15 April 1948 dengan nilai 10 juta rupiah dan 25 juta rupiah. Besarnya nilai URIDA Mandat Istimewa Membang Moeda inilah yang membuat alat pembayaran ini disebut Mandat Istimewa. Mandat ini hanya digunakan untuk transaksi hasil perkebunan karet yang ada di Membang Moeda. Membang Moeda sejak masa kolonial telah dikenal memiliki perkebunan karet dalam skala besar mencapai 3.104 ha milik *NV Rubber Cultuur-Mij. Amsterdam* (Belanda). Besarnya nilai transaksi karet menyebabkan nilai URIDA ini juga sangat besar, de-

ngan nominal 10 dan 25 juta rupiah.

Dijadikannya Sumatera Utara sebagai pusat penembusan blokade Belanda serta ujung tombak transaksi hasil perkebunan agar dapat mengisi kas negara dan membiayai perang, di tengah belum meratanya penyebaran ORI, menyebabkan penerbitan Mandat Istimewa Membang Moeda sangat dibutuhkan. Harus diingat bahwa hingga 1950an, produksi komoditas perkebunan menjadi penghasil utama devisa negara untuk pembiayaan perang dan roda pemerintahan. Untuk mendapatkan uang dalam membeli senjata dan barang kebutuhan perang, Pemerintah RI di Mambang Moeda akan membayar harga pembelian karet dari pengusaha perkebunan Mambang Moeda dengan menggunakan URIDA Mandat Istimewa Mambang Moeda. Karet tersebut kemudian diangkut dan dijual ke Malaysia dan Singapura untuk dijual.

Para pengusaha yang karetnya dibayar dengan Mandat Istimewa dapat menukarnya dengan ORI di kantor wedana yang memang untuk sementara difungsikan sebagai lembaga penukaran uang di masing-masing daerah.

Mandat Istimewa Mambang Moeda digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar, sedangkan untuk alat pembayaran sehari-hari masyarakat menggunakan Bon Membang Moeda. Sama seperti URIDA Bon Membang Moeda, Mandat Istimewa Membang Moeda juga ditandatangani oleh Saridjan selaku pejabat wedana. Bagian muka berupa motif teks, cap wedana, bunga dan rumah. Sementara itu, untuk nomor serinya adalah 1 huruf 5 angka, 1 huruf 6 angka, dan 5 angka 123 seperti gambar 6.10.

## 5). Alat Pembayaran

### a. Tanda pembayaran dan alat pembayaran Kabupaten Nias

Kabupaten Nias selama masa revolusi kemerdekaan menerbitkan beberapa jenis alat pembayaran. URIDA pertama adalah emisi Gunung Sitoli tertanggal 25 September 1947. Tanda pembayaran Kabupaten Nias ini bernilai satoe roepiah (ejaan ophuysen seperti

Gambar 6.10  
Mandat Istimewa Membang Moeda

Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 15 April 1948  
 Tanda tangan : Saridjan  
 Muka : Text  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 10.000.000 rupiah  
 Nomor seri : a. 1 huruf 5 angka                      b. 1 huruf 6 angka



Tanggal penerbitan : 15 April 1948  
 Tanda tangan : Saridjan  
 Muka : Bunga dan rumah  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 10.000.000 rupiah  
 Nomor seri : 1 huruf 6 angka

Tanpa Gambar

Tanggal penerbitan : 3 Mei 1948  
 Tanda tangan : Saridjan  
 Muka : Text  
 Belakang : Cap wedana  
 Nilai : 25.000.000 rupiah  
 Nomor seri : 5 angka 123

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

yang tertulis di tanda pembayarannya). Tanda tangan bupati Kabupaten Nias dijadikan sebagai pengaman URIDA ini. Bagian depan dan belakang berupa teks dengan nomor seri empat angka seperti yang tampak pada gambar 6.11.

Gambar 6.11

### Tanda Pembayaran yang Sah Kabupaten Nias



Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

Tanggal 20 Desember 1948 Kabupaten Nias kembali mengeluarkan tanda pembayaran dengan nilai 100 dan 200 rupiah.<sup>14</sup> Kedua URIDA ini menggunakan pengamanan dari tanda tangan bupati Kabupaten Nias. Motif yang terdapat pada Tanda Pembayaran Kabupaten Nias bernilai 100 rupiah adalah R 100 dan teks, dengan nomor seri 4 angka 2 huruf. Bagian depan Tanda Pembayaran Kabupaten Nias senilai 200 rupiah berupa R 200 dan daun-daunan. Se-

14. Ejaan Suwandi (Ejaan Republik Indonesia).



## Boks 3

## Tokoh-tokoh Penting dalam Penerbitan ORIDA di Sumatera Utara



P.R. TELAUMBANUA

Roos Telaumbanua atau yang lebih dikenal P.R. Telaumbanua adalah seorang pendeta asal Nias yang pernah menjabat sebagai Bupati Nias pada tahun 1946-1954. Di masa kepemimpinannya, Pulau Nias yang merupakan bagian dari daerah Keresidenan Tapanuli menjadi salah satu daerah yang cukup terpencil karena terbatas bahkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi akibat blokade militer Belanda di Pantai Barat Sumatera. URIPS yang dicetak di Bukittinggi sulit untuk didistribusikan ke Nias sehingga mengakibatkan kelangkaan uang resmi RI dan kegaduhan di dalam masyarakat. Maka atas izin Gubernur Sumatera, pada

tahun 1947-1949 P.R. Telaumbanua menerbitkan Uang Republik Indonesia Daerah Nias (ORIDA Nias) sebanyak 8 jenis. Kebijakan perekonomian yang diambil oleh P.R. Telaumbanua merupakan inisiatif yang sangat penting dan berani untuk menangani kegentingan ekonomi di Pulau Nias. Uang ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemenuhan segala kebutuhan pemerintahan sipil di Nias. Hal ini juga menjadi salah satu simbol kedaulatan dan eksistensi Pemerintahan RI di Nias melalui kebijakan ekonomi P.R. Telaumbanua di tengah-tengah gempuran



**b. Alat Pembayaran Keresidenan Tapanuli**

Alat pembayaran keresidenan Tapanuli terdiri dari nilai pecahan 5 roepiah, 10 roepiah, 25 roepiah, 50 roepiah, dan 100 roepiah. URIDA ini diterbitkan tanggal 8 Agustus 1947 oleh percetakan Bin Harun. Bagian muka dari URIDA ini memiliki motif yang bermacam-macam, seperti: teks dan cetakan dasar bunga harga R 5, teks harga R 25, tanggal dan no. ketetapan 464, serta teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan. Sementara itu bagian belakang adalah motif tanda tangan dan teks, teks dan angka 50, teks, tanda tangan, dan hiasan floral. Sebagai pengamanan alat pembayaran ini adalah tanda tangan bupati dan pejabat wedana, yaitu Tambunan dan Anwar Lubis, P. Hutagalung dan Simamora, M. Sidabutar dan Manullang, Hutahuruk dan M. Siregar. Sementara untuk nomor seri terdiri dari 5 angka 1 huruf dan 5 angka 2 huruf sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.13  
**Alat Pembayaran Keresidenan Tapanuli**



- Tanggal penerbitan : 8 Agustus 1947
- Percetakan : Bin Harun
- Tanda tangan : Tambunan dll, Anwar Loebis dll.
- Muka : Teks dan cetakan dasar bunga harga R 5
- Belakang : Tanda tangan dan teks

Pengamanan : Tanda tangan  
 Nilai : 5 roepiah  
 Nomor seri : a. 5 angka 1 huruf                      b. 5 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan : 8 September 1947  
 Percetakan : Bin Harun  
 Tanda tangan : Tambunan dll, Anwar Loebis dll.  
 Muka : Teks dan cetakan dasar bunga harga R 5  
 Belakang : Tanda tangan dan teks  
 Pengamanan : Tanda tangan  
 Nilai : 10 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 2 huruf

**Tanpa Gambar**

Tanggal penerbitan : 8 September 1947  
 Muka : Teks dan cetakan dasar bunga harga R 5  
 Nilai : 10 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 1 huruf



Tanggal penerbitan : 18 November 1947  
 Tanda tangan : P Hutagalung, Simamora dll  
 Muka : Harga R 25  
 Nilai : 25 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 1 huruf



Tanggal penerbitan : 18 November 1947  
 Tanda tangan : P Hutagalung, Simamora dll  
 Muka : Harga R 25  
 Nilai : 25 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan : 28 April 1948  
Tanda tangan : M. Sidabutar, Manullang dll  
Muka : Tanggal dan no. ketetapan 464  
Belakang : Teks dan angka 50  
Nilai : 50 roepiah  
Nomor seri : 5 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan : 28 April 1948  
Tanda tangan : M. Sidabutar, Manullang dll

Muka : Tanggal dan no. ketetapan 646  
 Belakang : Teks dan angka 50  
 Nilai : 50 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan : 11 Oktober 1948  
 Tanda tangan : Hutahuruk, M. Siregar dll  
 Muka : Teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan  
 Belakang : Teks, tanda tangan dan hiasan floral  
 Nilai : 100 roepiah  
 Nomor seri : 5 angka 2 huruf



### 300 BERJUANG DENGAN UANG

Tanggal penerbitan : 11 Oktober 1948  
Tanda tangan : Hutahuruk, M. Siregar dll  
Muka : Teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan  
Belakang : Teks, tanda tangan dan hiasan floral  
Nilai : 100 roepiah  
Nomor seri : 5 angka 2 huruf



Tanggal penerbitan : 23 November 1948  
Warna : a. Kuning b. Hijau  
Tanda tangan : Hutahuruk, M. Siregar dll  
Muka : Teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan  
Belakang : Teks, tanda tangan dan hiasan floral  
Nilai : 200 roepiah  
Nomor seri : 5 angka 2 huruf

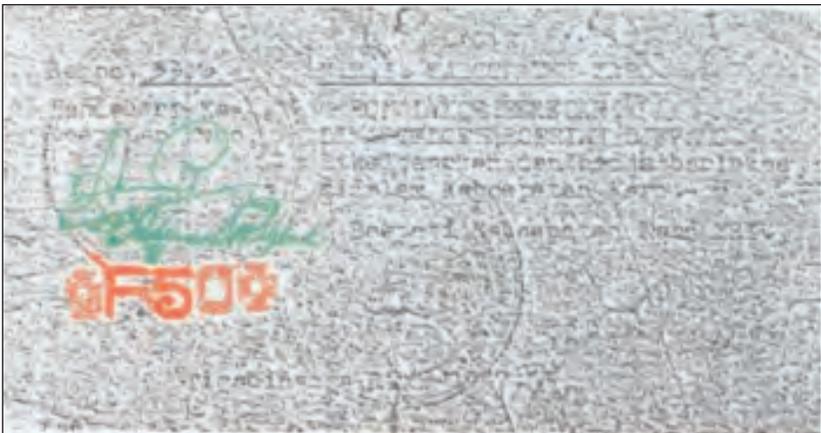
Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

### 6). Uang Tukaran Tiga Binaga Kabupaten Karo

Uang Tukaran Tiga Binaga Kabupaten Karo diterbitkan tanggal 17 September 1947 dengan nilai 50 roepiah, 100 roepiah, dan 1000 roepiah. Uang Tukaran ini ditandatangani oleh A. Rasjad dan Rangkoetta Sembiring B, B Damanik dan Rangkoetta Sembiring. Untuk pengamanan Uang Tukaran Tiga Binaga Kabupaten Karo memiliki proteksi yang paling baik di antara semua URIDA yang diterbitkan

Sumatera Utara, berupa angka timbul, cap, dan tanda tangan. Bagian muka berupa gambar harga dan teks, serta teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan. Sementara sisi belakang adalah gambar tanda tangan, teks dan hiasan floral. Untuk nomor seri, Uang Tukar Tiga Binaga Kabupaten Karo terdiri dari nomor seri empat angka dan lima angka. Selain pengamanan dan pemalsuan yang paling baik, corak dan warna dasar dari uang ini pun sangat menarik dan membuatnya berbeda dengan URIDA lainnya di Sumatera Utara.

Gambar 6.14  
Uang Tukaran Tiga Binaga Kabupaten Karo



Tanggal penerbitan	: 17 September 1947
Tanda tangan	: A. Rasjad, Rangkoetta Sembiring B
Pengaman	: Angka timbul, cap dan tanda tangan
Muka	: Harga dan teks
Nilai	: 50 roepiah
Nomor seri	: 4 angka



- Tanggal penerbitan : 20 November 1947
- Tanda tangan : A. Rasjad, Rangkoetta Sembiring B
- Pengaman : Angka timbul, cap dan tanda tangan
- Muka : Teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan
- Belakang : Tanda tangan, teks, dan hiasan floral
- Nilai : 250 roepiah
- Nomor seri : a. 4 angka b. 5 angka



- Tanggal penerbitan : 20 November 1947
- Tanda tangan : B Damanik, Rangkoetta Sembiring B
- Pengaman : Angka timbul, cap dan tanda tangan
- Muka : Teks dan cetakan dasar hiasan daun-daunan
- Belakang : Tanda tangan, teks, dan hiasan floral
- Nilai : 1.000 roepiah
- Nomor seri : a. 4 angka b. 5 angka c. 4 angka

Sumber: Katalog Oeang Nusantara (2015)

## Boks 4

## Tokoh-tokoh Penting dalam Penerbitan ORIDA di Sumatera Utara



RAKUTTA SEMBIRING  
BRAHMANA

Rakutta Sembiring Brahmana adalah salah seorang tokoh nasionalis di daerah asal Tanah Karo, Sumatera Utara, yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karo tahun 1946-1954. Berbagai permasalahan ekonomi muncul pada masa awal kepemimpinannya seperti kelangkaan ORI dan URIPS, masih beredarnya uang-uang Belanda, mahalinya harga bahan-bahan pokok, dan terputusnya hubungan antara daerah Karo dengan daerah lainnya akibat blokade militer Belanda. Rakutta Sembiring kemudian mengambil kebijakan yang tergolong berani dan heroik dengan menerbitkan uang Karo sebanyak 4 jenis dengan emisi pertama tanggal 17 November 1947 untuk mengatasi permasalahan ekonomi sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pendudukan Belanda yang masih berusaha mendistribusikan uang-uang gulden Belanda di Karo. Meski ORIDA Karo di cetak dengan sangat sederhana dan terbatas namun sama sekali tidak mengurangi nilai heroisme di dalamnya yang juga berfungsi sebagai penegak kedaulatan pemerintahan RI di daerah.



Uang kebon Rp 2.500 / f2.50

## Boks 5

## TOKOH-TOKOH LAIN PENANDATANGAN UANG REVOLUSI

Di samping ke empat tokoh yakni Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. S.M. Amin, P.R. Telaumbanua, dan Rakutta Sembiring yang berinisiatif membuat dan menandatangani uang daerah era revolusi di Sumatera Utara, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang belum dikenal. Mereka antara lain adalah R.A. Herman dan R.M. Amri (Pematang Siantar), Usman J.S. dan A. Eteng (Asahan), M. Sitepu (Barus), Saridjan (Mambang Muda), H. Lubis dan Basahar (Lima Puluh), Abduldjalil dan O. Effendi (Labuhan Bilik), A. Nasution, Sjahboeddin, A. Harahap dan G. Gautama (Rantau Prapat), serta Tambunan, P. Hutagaluh, Simamora, M. Sidabutar, Manullang dan Anwar Loebis (Tapanuli). Tokoh-tokoh yang berperan dalam menerbitkan dan menandatangani uang masa revolusi ini kebanyakan belum dikenal riwayat hidup dan perjuangannya. Di masa yang akan datang diperlukan penelusuran terhadap tokoh-tokoh ini dalam perjuangannya mempertahankan Republik Indonesia melalui penerbitan uang.

# 7

## Penataan Ekonomi Pasca Perang

Kondisi keamanan yang berangsur-angsur membaik membuka peluang untuk memperluas peredaran ORI di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, di masyarakat beredar beragam mata uang mulai dari ORIDA dan uang bon yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah sampai uang palsu. Pada awalnya penarikan seluruh mata uang tersebut dilakukan oleh DJB sebagai bank sirkulasi dan menggantinya menjadi uang RIS. Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah mengganti uang RIS menjadi uang Republik Indonesia. Pasca indonesianisasi DJB menjadi Bank Indonesia, seluruh uang yang berlaku di NKRI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengelolaan moneter terganggu dengan adanya keputusan pemerintah untuk menggabungkan bank sentral dengan bank-bank komersial milik negara menjadi bank tunggal sebagai alat revolusi dalam sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem tersebut, keputusan untuk mencetak dan mengedarkan uang didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung revolusi yang ditetapkan oleh pemerintah dan bukan oleh bank sentral berdasarkan kebutuhan riil perekonomian. Dalam kondisi tersebut, uang yang dicetak dan diedarkan jauh melebihi kebutuhan riil masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi sehingga mendorong terjadinya hiper inflasi yang pernah tercatat di atas 600% (YOY). Penataan kembali kondisi moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sejak dikukuhkan kembali menjadi bank sentral dengan Undang-undang No.13 Tahun 1968. Salah satu strategi yang

segera diambil untuk mencapai stabilitas ekonomi dan moneter adalah dengan kebijakan yang menjaga jumlah uang beredar sesuai dengan daya serap perekonomian. Mengingat jumlah uang yang beredar sedemikian banyak melampaui kebutuhan untuk transaksi ekonomi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan redenominasi uang rupiah.

### **Penarikan ORIDA: 1949-1950**

Hingga awal tahun 1950, saat Indonesia tergabung dalam RIS dan sebelum DJB diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, terdapat berbagai jenis uang beredar di masyarakat, yakni: uang NICA—yang tidak diakui oleh pemerintah, uang DJB, ORI, dan puluhan jenis ORIDA. Selain itu, banyaknya beredar ORI palsu semakin memperparah kesemrawutan peredaran mata uang yang memperlihatkan betapa tidak sehatnya ekonomi negara saat itu.

Untuk membenahi peredaran berbagai mata uang tersebut, pemerintah RIS kemudian mengeluarkan kebijakan penyeragaman jenis mata uang melalui penerbitan mata uang RIS (uang federal) dengan nilai Rp5 dan Rp10 emisi Januari 1950.<sup>1</sup>

Keputusan penerbitan mata uang RIS tersebut juga diikuti dengan Maklumat Meteri Keuangan yang menetapkan penarikan ORI, URIDA, dan mata uang lainnya dari peredaran. Seluruh mata uang tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia mulai 1 Mei 1950. Sistem penarikan ORI dan ORIDA yang kemudian diganti dengan mata uang RIS diatur oleh DJB sebagai bank sirkulasi mulai 27 Maret 1950 hingga 21 Juni 1950.

Beragamnya daya beli masyarakat di setiap daerah di Indonesia saat itu menyebabkan pemerintah menetapkan kurs (nilai tukar) ORI dengan uang RIS berbeda antara satu daerah dengan daerah lain-

1. M. Dawan Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia Dalam Kancah Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1955), hlm. 54.

Gambar 7.1  
Uang RIS tahun 1950



Sumber: [www.uang-kuno.com](http://www.uang-kuno.com) (diakses 11 Oktober 2016)

nya. Selain itu juga diputuskan bahwa setiap orang hanya diperbolehkan menukar uang ORI dengan uang RIS maksimal Rp50. Kelebihan ORI dan ORIDA harus diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) untuk dibekukan. Program penukaran ORI dan mata uang sejenis dengan uang RIS tersebut ternyata jumlahnya sangat rendah, yakni sebesar 60 juta rupiah. Hal ini disebabkan banyaknya uang ORI palsu yang beredar di masyarakat.<sup>2</sup>

2. Berkait dengan banyaknya ORI palsu yang beredar, pemerintah Indonesia dari awal

## RIS dan Otoritas Pengelolaan Uang Pada Masa Peralihan 1950-1953

Berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, De Javasche Bank ditunjuk sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Penetapan DJB sebagai satu-satunya bank sirkulasi RIS berdasarkan isi dari Pasal 19 (perbankan) KMB yang menyebutkan bahwa yang menjadi bank sirkulasi RIS adalah DJB. Dalam pasal ini juga tertulis bahwa selama RIS masih berhutang kepada Belanda, maka RIS memiliki kewajiban untuk bermusyawarah dengan Belanda berkait dengan: 1) perubahan undang-undang mata uang dan DJB yang berlaku pada waktu pengakuan kedaulatan, 2) pembuatan undang-undang mata uang dan bank sirkulasi yang baru.<sup>3</sup> Kesepakatan KMB ini juga menjadi akhir dari *currency war* (perang mata uang) yang berlangsung selama periode revolusi kemerdekaan antara Indonesia dengan Belanda yang diwakili oleh Pemerintah NICA.

Hasil KMB ternyata menimbulkan sedikit kekecewaan di berbagai pihak, khususnya kegagalan dalam memperjuangkan Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi bank sirkulasi RIS. Apalagi dalam kesepakatan tersebut ditekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan moneter dan keuangan RIS, baik itu penetapan sebuah kebijakan dan pelaksanaannya harus dimusyawarahkan dengan Kerajaan Belanda. Ditambah lagi dengan beban hutang pemerintah Hindia Belanda yang harus dibayar oleh RIS kepada Kerajaan Belanda sebesar 4.300 juta gulden benar-benar memukul perekonomian nasional. Belanda tetap saja menjadikan bidang ekonomi dan moneter sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan cita-cita kemer-

telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran ORI palsu, namun ternyata usaha tersebut tidak berjalan dengan efektif. *Ibid.*, hlm. 55.

3. Mohammad Iskandar, "Oeang Repoebliek dalam Kancan Revolusi" dalam *Jurnal Sejarah*, (Vol. 6 No. 1, Agustus 2004), hlm. 59 – 60.

dekaan Indonesia. Realitas ini menunjukkan bagaimana teguhnya Belanda dalam memegang prinsip kolonialisme “how to manage a colony for money” dan “gabus tempat mengapungnya kesejahteraan negeri induk”.<sup>4</sup> Prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Belanda sejak masa VOC (abad ke-17) hingga penghujung dekade keempat abad 20 (Persetujuan KMB).

Tidak sejalannya RIS dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, akhirnya mendorong usaha pemerintah untuk mengembalikan Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Peralihan ini membawa kendali negara sepenuhnya berada di tangan Indonesia tanpa campur tangan asing, khususnya dalam hal ekonomi yang menyangkut moneter dan perbankan negara.

Masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan membawa masalah yang sangat serius terhadap ekonomi dan moneter negara yang harus segera dibenahi. Untuk itu, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai program dan kebijakan agar dapat menstabilkan dan menguatkan ekonomi dan moneter negara. Salah satu program utama yang tempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menertibkan peredaran uang dan menasionalisasikan DJB menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951.<sup>5</sup>

Setelah nasionalisasi DJB, pemerintah RIS kemudian menerbitkan mata uang RIS (uang federal) dengan nilai Rp5 dan Rp10 emisi Januari 1950 sebagai pengganti ORI dan ORIDA.<sup>6</sup>

*Untuk mendukung penertiban jenis dan jumlah uang yang beredar, pemerintah juga memberlakukan kebijakan “Pembersihan moneter” yang lebih dikenal dengan “Gunting Sjafruddin” pada 18 maret 1950*

4. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 12.
5. Erwien Kusuma, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 110.
6. M. Dawan Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia Dalam Kancah Kilasan Sejarah Bangsa*,

Untuk mendukung penertiban jenis dan jumlah uang yang beredar, pemerintah juga memberlakukan kebijakan “Pembersihan moneter” yang lebih dikenal dengan “Gunting Sjafrudin” pada 18 Maret 1950. Gunting Sjafrudin adalah kebijakan Menteri Keuangan, Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang memotong uang kertas NICA dan uang kertas DJB bernilai Rp5 ke atas menjadi dua bagian dengan menggunakan gunting. Bagian kanan uang kertas yang digunting dapat ditukar dengan Obligasi Republik Indonesia 1950 yang berlaku sebagai pinjamaan pemerintah dengan bunga 3 % setahun. Sedangkan bagian kiri uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang nilainya turun menjadi setengahnya (menjadi Rp2.5). Bagian kiri uang ini juga dapat ditukar dengan uang RIS pecahan Rp2.5, Rp1, dan Rp0.5 hingga 16 April 1950.<sup>7</sup>

Peralihan bentuk negara dari sistem federal ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 dalam bidang moneter menyebabkan mata uang RIS atau uang federal tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai pengganti uang RIS pemerintah menerbitkan uang kertas baru berupa uang kertas dengan nilai Rp1, Rp2.5, 10 sen dan 25 sen. Selain itu juga dicetak uang logam berbahan nikel senilai 50 sen dan bahan aluminium bernilai 25 sen, 10 sen, serta 1 sen. Semua uang ini dicetak oleh percetakan Amerika, *Security Banknote Company*.

Mulai 1953, dengan ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 11 Tahun

*Kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mata uang RIS dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh uang NKRI yang dicetak pemerintah melalui Menteri Keuangan*

(Jakarta: LP3ES, 1955), hlm. 54.

7. Erwien Kusuma, *op cit.*, hlm. 97 – 98.

1953, maka seluruh mata uang yang berlaku di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan sirkulasi. Uang kertas pertama yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 1953 adalah seri "Pahlawan dan kebudayaan" dengan nominal Rp5, Rp25, Rp50, Rp100, dan Rp1000. Uang Rp5 memuat gambar Kartini, sementara uang Rp100 bergambar Pangeran Diponegoro. Sementara itu mata uang lainnya berhiaskan lukisan patung, relief, dan ornament kebudayaan Indonesia. Emisi pertama uang BI ini ditandatangani oleh Gubernur BI Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Direktur BI Mr. Indra Kusuma. Uang-uang ini dicetak oleh Percetakan Kebayoran (Perkeba), sebuah perseroan terbatas milik pemerintah RI dengan Johan Enschede dan *Zonen Grafische Inrichting NV* dari Harleem Belanda. Meskipun pencetakan uang telah mampu dilakukan di dalam negeri, sebagian mata uang Indonesia masih ada yang dicetak di percetakan *Security Banknote Company* milik Amerika dan percetakan Thomas de la rue & Co Ltd, London.<sup>8</sup>

### **Pengelolaan Uang Pada Masa Bank Indonesia Periode Awal 1953-1960**

Pada 1950an, Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di luar Jawa pada umumnya cenderung dilupakan oleh pemerintah pusat. Jawa mendapat prioritas lebih dari pemerintah pusat karena di pulau ini terdapat ibu kota negara, tempat mayoritas kaum politisi sipil berkumpul, dan jumlah penduduk lebih besar dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Contohnya adalah tindakan pemerintah mempertahankan nilai tukar rupiah pada nilai yang tinggi untuk menyubsidi perekonomian impor Jawa, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah luar Jawa yang berekonomian ekspor serta mendorong munculnya pasar-pasar gelap dan terjadinya penyelundupan.<sup>9</sup>

8. help.kintamoney.com., diakses 11 Oktober 2016.

9. M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm.

Gambar 7.2  
Uang Republik Indonesia Seri Pahlawan "Kartini" (1952)



Sumber: [www.uang-kuno.com](http://www.uang-kuno.com) (diakses 11 Oktober 2016)

Sumatera Utara adalah daerah yang terkenal sebagai penghasil komoditas perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, dan tembakau. Pada tahun 1953, produksi karet daerah ini mencapai 155.000 ton. Tiga tahun kemudian, produksi menurun menjadi 140.000 ton. Produksi kelapa sawit tahun 1953-1955 mengalami kenaikan, dari

150.000 ton menjadi 165.000 ton. Tapi, jumlah produksi kelapa sawit dan karet masih jauh di bawah jumlah produksi sebelum masa perang kemerdekaan. Begitu juga dengan produksi tembakau, rata-rata 3.500 ton pada awal 1950an, jauh di bawah produksi sebelum perang.<sup>10</sup> Penyelundupan hasil-hasil perkebunan ke Singapura telah mengurangi devisa pemerintah. Satuan-satuan tentara yang miskin ikut serta dalam penyelundupan tersebut.<sup>11</sup>

Lahan perkebunan di Sumatera Utara menjadi sengketa antara penduduk dan tuan kebun. Lahan perkebunan yang diduduki penghuni liar terus meluas, dari 80.000 hektar pada pertengahan 1954 menjadi hampir 115.000 hektar pada akhir 1956.<sup>12</sup> Luasnya lahan perkebunan yang diduduki membuat pihak perkebunan mengalami kerugian, tapi tidak dapat berbuat apa-apa.

Saat itu, industri perkebunan di Sumatera Utara masih dikuasi oleh usahawan-usahawan swasta Barat. Begitu juga dengan jenis industri lainnya yang kebanyakan dikuasai oleh usahawan asing. Padahal kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo (Juli 1953 sampai Juli 1955) telah menekankan pada Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi, tapi program tersebut kurang berhasil. Di Sumatera Utara misalnya, hanya ada 34 usahawan Indonesia yang bergerak dalam bisnis industri minuman.<sup>13</sup> Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah usahawan asing yang mencapai lebih dari seratus orang. Hal ini memperlihatkan bahwa secara ekonomi Indonesia masih belum merdeka.

T.D. Pardede adalah salah satu usahawan Indonesia yang muncul dari program Kabinet Ali. Pardede mendirikan industri perajutan *singlet* di kota Medan pada tahun 1953. Enam tahun kemudian, perusahaan Pardede dapat menghasilkan 50.000 lusin *singlet* per

10. Thomas Lindblad, "The Economic Decolonization of Sumatra", dalam *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 11, June 2009, hlm. 184.

11. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 489.

12. *Ibid.*

13. *Warta*, 8 Agustus 1959.

bulan, dan mempekerjakan sekitar 1.500 orang. Selain Pardede masih ada Timbang Siahaan, seorang usahawan pribumi yang bergerak dalam industri perajutan kaus kaki. Timbang Tambunan membangun pabriknya di pinggiran kota Medan, dekat Binjai. Pabrik perajutan Timbang Siahaan dapat menghasilkan 1.500 lusin kaus kaki dalam sebulan.<sup>14</sup>

Pada 1950an, kondisi ekonomi Sumatera Utara tidak menentu. Akibatnya, lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja terus meningkat sepanjang periode 1950-an, termasuk mereka yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan yang semakin banyak, para mantan pejuang gerilya, serta para mantan pejabat negara-negara federal dan republik. Pemerintah memberi kedudukan kepada banyak dari mereka di dalam birokrasi, dan jumlahnya terus membengkak. Mereka menjadikan pekerjaan di pemerintahan sebagai salah satu rebutan utama dari kekuasaan politik. Namun, tidak semua dari mereka dapat tertampung dalam birokrasi pemerintahan, terutama warga yang tidak memiliki pendidikan formal.

Selama 1951 sampai 1955, jumlah pencari kerja yang mendaftar ke Kantor Penempatan Tenaga Sumatera Utara mencapai kurang lebih 2.000 orang setiap setahunnya. Mereka yang mendaftar adalah tamatan sekolah-sekolah formal, mulai dari tingkat Sekolah Rakyat sampai Sekolah Menengah Atas.<sup>15</sup> Tingginya angka pengangguran setiap tahun membuat pemerintah berusaha menyediakan lapangan kerja. Namun, lapangan kerja yang disediakan pemerintah hanya untuk mereka yang terdaftar dalam Kantor Penempatan Tenaga Sumatera Utara. Mereka dipekerjakan dalam proyek-proyek pemerintahan dengan upah Rp6 sampai Rp7,50 sehari.<sup>16</sup> Namun bagi masyarakat kebanyakan, kondisi kehidupan semakin sulit karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka.

14. *Warta*, 8 Agustus 1959.

15. *Mestika*, 11 Juli 1951 dan 14 Desember 1955.

16. *Mestika*, 10 Mei 1952.

Pemulihan ekonomi pasca proklamasi kemerdekaan berjalan lambat, sementara pengeluaran pemerintah terus meluas. Akibatnya, inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Biaya hidup umum meningkat lebih dari 100% sepanjang tahun 1950-1957. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkatan tertentu akibat kenaikan harga. Barang-barang impor sulit diperoleh dan harganya naik mencapai 30% pada tahun 1954.<sup>17</sup> Para pegawai yang digaji dan para buruh upahan sangat terpengaruh, sedangkan para tuan tanah dan para petani produsen beras relatif diuntungkan. Dibandingkan dengan masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun revolusi, keadaannya lebih baik bagi sebagian besar rakyat Indonesia pada tahun 1950-1957, tetapi kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran umum yang diharapkan banyak orang.<sup>18</sup> Untuk mengantisipasi melonjaknya harga barang-barang di pasaran, pemerintah membentuk "Badan Pengendalian Harga". Badan ini menetapkan harga barang-barang kebutuhan pokok, dan menindak para pedagang yang menaikkan harga dari yang sudah ditentukan.<sup>19</sup>

Selama tahun 1950-1956, program-program infrastruktur pemerintah yang sangat penting untuk sektor ekspor (seperti jalan raya, pelabuhan, dan irigasi) umumnya memburuk, dan nilai tukar mata uang yang dibuat mendiskriminasikan para pengeksport. Menurunnya volume ekspor, terutama hasil-hasil perkebunan, mengakibatkan minimnya upah yang diterima para buruh. Hal ini membuat kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mendesak pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Pada awal Desember 1957, serikat buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan perkebunan asing yang ada di Sumatera Utara. Kondisi ini segera disikapi oleh panglima militer, A.H. Nasution, yang memerintahkan setiap Panglima Komando Militer

17. *Mestika*, 3 September 1954.

18. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 475.

19. *Mestika*, 29 Juni 1951, 28 Februari 1952, dan 24 Mei 1952.

Sumatera Utara untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang telah disita itu. Kolonel Simbolon yang menjabat sebagai Panglima Komando Militer segera mengambil alih semua perusahaan swasta Belanda yang disita serikat buruh. Meskipun di bawah pengawasan militer Indonesia, perkebunan tetap milik Belanda. Undang-undang tentang nasionalisasi milik Belanda baru diresmikan pada 27 Desember 1958, tetapi berlaku surut kembali sampai 3 Desember 1957. Para pejabat militer yang bertanggung jawab diharapkan dapat menggantikan keahlian tuan-tuan kebun Belanda. Namun selama kuartal pertama tahun 1958, kondisi perkebunan agak kacau karena orang Indonesia dengan sedikit atau tanpa pelatihan formal mengambil posisi manajemen dan pengawasan. Produksi karet dan kelapa sawit tahun 1958 menurun dibandingkan dengan produksi tahun 1957, masing-masing 6,5% dan 8%.<sup>20</sup>

Kekacauan ekonomi semakin parah pada masa demokrasi ter-pimpin (1957-1965). Penurunan nilai mata uang kertas kertas Rp500,00 dan Rp1.000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya pada akhir 1959, membuat banyak orang kaya, para birokrat, dan terutama sekali para pengusaha Cina serta pri-bumi sangat terpukul. Campur tangan tentara dalam perekonomian dan pemerintahan di Sumatera Utara juga semakin meningkat. Pada bulan Mei 1959, militer telah memutuskan bahwa orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan di daerah pedesaan mulai tanggal 1 Januari 1960. Walaupun ketetapan ini mengena ke para pedagang Arab dan India, tetapi pada dasarnya ketetapan ini merupakan langkah yang didorong oleh pihak tentara untuk memukul orang-orang Cina. Pada akhir tahun 1959, pihak tentara mulai memindahkan orang-orang Cina secara paksa dari daerah-daerah pedesaan ke perkotaan. Akhirnya, ribuan orang Cina di Sumatera Utara dipulangkan ke negerinya. Keluarnya orang-orang Cina dari daerah pedesaan dan dari Indonesia secara keseluruhan, serta

20. Thomas Lindblad, *op.cit.*, hlm. 186-187.

adanya ketentuan umum di dalam komunitas dagang yang sangat penting ini, mengakibatkan terjadinya disalokasi ekonomi, penimbunan barang, dan gelombang inflasi baru yang serius.<sup>21</sup>

Pada 1964, ketidakstabilan di dalam negeri semakin meningkat karena panen padi yang buruk dan inflasi meningkat tinggi. Satu tahun kemudian, struktur sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia hampir runtuh. Inflasi sangat tinggi, dengan harga barang-barang naik lebih dari 100% selama tahun 1965. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika jatuh dari Rp5.100,00 pada awal tahun 1965 menjadi Rp17.500,00 pada kuartal ketiga tahun 1965, dan Rp50.000,00 pada kuartal keempat.<sup>22</sup> Kekacauan ekonomi masih ditambah dengan kondisi politik yang suram. Percobaan kudeta pada akhir Desember yang gagal mengakibatkan ribuan masyarakat Sumatera Utara, simpatisan PKI atau anggota organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dibunuh dan dipenjarakan.

Kudeta yang gagal telah membuat Soekarno diturunkan oleh gelombang demonstrasi mahasiswa. Penggantinya adalah seorang Jenderal Angkatan Darat, Soeharto, yang mendapat dukungan penuh dari tentara. Di bawah pemerintahan Soeharto, perubahan ekonomi terjadi dengan cepat, yang memengaruhi kondisi politik dalam negeri. Inflasi terpangkas hingga sekitar 100% pada 1967; walau angkanya masih sangat tinggi tapi bisa digolongkan kemajuan besar mengingat inflasi yang terjadi sebelumnya. Pertukaran mata uang asing dibebaskan. Dari tahun 1966 hingga akhir 1968, rupiah dibiarkan mengambang secara bebas. Kebijakan semacam ini mengurangi ekspor gelap dan impor asing, serta mendorong pertambahan bantuan dan investasi luar negeri. Normalnya, pengusaha rantauan dan cukong yang memiliki akses dana luar negeri akan berusaha memperoleh keuntungan yang paling cepat dan paling tinggi, dan menyisakan lahan keuntungan yang lebih kecil bagi in-

21. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 528.

22. *Ibid*, hlm 552.

vestor pribumi. Kepercayaan pemerintah pada tingkat suku bunga tinggi untuk menahan inflasi menyebabkan para pengusaha pribumi yang tidak memiliki akses langsung ke modal asing sangat terpukul. Para pengusaha pribumi merasa disingkirkan bahkan dari bisnis yang secara tradisional milik mereka (contohnya, tekstil, makanan dan minuman, rokok kretek) oleh Cina dan pesaing asing lainnya yang memiliki akses ke uang yang lebih murah. Maka, para pengusaha pribumi, yang cenderung anti komunis, tergolong Islam yang taat, dan karena itu menjadi bagian dari koalisi awal yang mendukung Soeharto, mulai ragu apakah kepentingan mereka akan benar-benar dilayani oleh Orde Baru.<sup>23</sup>

## **Pengelolaan Uang Pada Masa Bank Tunggal 1960-1968**

Memasuki akhir tahun 1950-an, tuntunan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing membuat resah usahawan-usahawan Belanda yang bergerak dalam bisnis perbankan. Mereka enggan kehilangan usahanya yang sudah berjalan puluhan tahun di Indonesia. Sementara itu, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) terus melancarkan tuntutan agar pemerintah menasionalisasi bank-bank swasta milik usahawan Belanda. Dominasi bank-bank swasta Belanda dalam sistem perbankan Indonesia dianggap sebagai dalang keterpurukan ekonomi di negara yang baru merdeka ini.

Akan tetapi, politisi sipil dan pimpinan Bank Indonesia memberikan isyarat kepada pemerintah agar tidak begitu saja melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank swasta Belanda, karena banyak perusahaan-perusahaan milik pengusaha Indonesia yang mulai tumbuh berkat adanya bantuan modal yang dikururkan oleh bank-bank swasta Belanda.<sup>24</sup> Meskipun banyak perusahaan milik usahawan In-

23. *Ibid*, hlm. 575.

24. Darsono, dkk., *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 264.

Indonesia hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina yang disebut perusahaan "Ali Baba", di mana seorang Indonesia (Ali) mewakili seorang pengusaha Cina (Baba) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut.<sup>25</sup>

Dewan pimpinan Bank Indonesia tidak menolak nasionalisasi bank-bank swasta Barat karena secara politik tidak bijaksana, tapi realitas ekonomi Indonesia saat itu dianggap belum memungkinkan. Bank-bank swasta Belanda mempunyai aset dan modal dalam jumlah besar yang sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara Bank Umum Milik Negara dan bank swasta nasional belum memiliki modal yang cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>26</sup>

Tuntutan nasionalisasi bank-bank swasta Belanda semakin gencar disuarakan setelah perundingan mengenai masalah pengembalian Irian Barat mengalami kegagalan pada akhir November 1957. Belanda menolak mengembalikan Irian Barat dengan berbagai alasan. Gagalnya resolusi pengembalian Irian Barat mengakibatkan terjadinya radikalisme anti-Belanda yang dikobarkan oleh Presiden Soekarno. Pada awal Desember 1957, serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dagang Belanda. Begitu juga dengan SBBSI, serikat buruh ini mengambil alih kantor-kantor bank swasta Belanda yang ada di setiap daerah, termasuk Sumatera Utara. Namun, aksi SBBSI untuk mengambil alih ketiga bank swasta Belanda itu berhasil digagalkan oleh Bank Indonesia.<sup>27</sup> Pada pertengahan Desember 1957, A.H. Nasution selaku panglima militer mengambil alih keadaan tersebut dengan memerintahkan agar pihak tentara berse-

25. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 489.

26. Darsono, dkk., *loc.cit.*

27. Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 391.

dia mengelola perusahaan-perusahaan yang telah disita itu.<sup>28</sup> Tujuannya untuk menghindari agar perusahaan-perusahaan swasta Belanda tidak dikuasai oleh serikat-serikat buruh. Di Sumatera Utara, Kolonel Simbolon yang menjabat sebagai Panglima Komando Militer segera mengambil alih semua perusahaan swasta Belanda yang disita serikat-serikat buruh. Kini, tentara mulai berperan sebagai kekuatan ekonomi yang penting di Sumatera Utara.

Bank-bank swasta Belanda yang kantor cabangnya ada di Sumatera Utara seperti *Nederlandsch Handelsbank*, *Escompto*, dan *Naderlandse Handels-Maatschappij* ditempatkan di bawah pengawasan "Badan Pengawas Daerah" yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon selaku penguasa perang.<sup>29</sup> Badan ini hanya berperan sebagai pengawas, sementara pimpinan operasi sehari-hari ketiga bank swasta Belanda itu tetap dipegang direksi lama. Tetap dipertahankannya direksi lama dikarenakan pemerintah Indonesia ingin menyelamatkan cadangan devisa berupa "jaminan obligo impor" dan pembayaran ekspor yang jumlahnya mencapai ratusan juta dolar. Hanya direksi lama yang berwenang melakukan transfer di bank-bank tersebut, karena tanda tangan dan nama merekalah yang dikenal sebagai *authorized signatures* dan *authorized signatories*. Jika pemerintah mengambil alih operasional ketiga bank itu, maka koresponden di luar negeri akan menahan proses pembayaran. Akibatnya, cadangan devisa hilang. Setelah devisa dapat diamankan, barulah pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank swasta Belanda.<sup>30</sup>

Akan tetapi, aksi pengambil alihan bank-bank swasta Belanda yang dilakukan SBBSI telah membuat para bankir dan pemilik modal menghentikan bantuan kredit kepada perusahaan-perusahaan milik

28. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 516.

29. Penguasa Perang di Jakarta menempatkan bank-bank swasta Belanda di bawah pengawasan "Badan Pengawasan Bank" yang dipimpin oleh Koordinator Finek/Staf Harian Perang.

30. Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 292-293.

pribumi. Bahkan banyak proyek pembangunan di Indonesia yang terbengkalai karena para bankir membekukan bantuannya. Kondisi ini membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat tajam. Di Sumatera Utara contohnya, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Penempatan Tenaga (KPT) selama tahun 1957-1958 terus meningkat karena lowongan pekerjaan sangat sedikit.<sup>31</sup>

Nasionalisasi bank-bank swasta Barat secara resmi dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 1959, tapi operasional bank-bank itu sudah berada di bawah pengawasan pihak tentara sejak tahun 1957 untuk menyelamatkan cadangan devisa. Nationale Handelsbank dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1959, yang berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Bank ini diganti namanya menjadi Bank Umum Negara (BUNEG). Nasionalisasi Escompto Bank dilakukan dengan PP No. 13 Tahun 1960, yang berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1958. Escompto Bank kemudian diubah namanya menjadi Bank Dagang Negara (BDN). Selanjutnya, Nederlandsche Handel Maatschappij dinasionalisasi berdasarkan PP No. 44 Tahun 1960, yang berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Bank ini dilebur menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN).<sup>32</sup> Setelah ketiga bank swasta Belanda itu dinasionalisasi, kantor-kantor cabangnya di Sumatera Utara segera berganti nama dan direksinya diisi oleh orang Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda ternyata menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Laju inflasi tahun 1957-1959 terus meningkat akibat melonjaknya harga barang-barang pokok. Dalam rangka mengendalikan inflasi, maka pada akhir Agustus 1959 deposito-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan, dan mata uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya.<sup>33</sup> Penurunan nilai mata

31. *Waspada*, 30 Agustus 1957; *Mestika*, 3 November 1958.

32. Pada tahun 1958, Bank Koperasi Tani dan Nelayan sudah dipecah menjadi Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Oey Beng To, *op.cit.*, hlm. 367.

33. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 527.

uang membuat sepi aktivitas perdagangan di Sumatera Utara. Banyak toko-toko di kota Medan tutup karena para pemiliknya takut modalnya berkurang. Begitu juga aktivitas di pusat pasar kota ini, banyak pedagang yang tidak berjualan karena takut mengalami kerugian. Setelah Panglima Komando Militer Sumatera Utara mengultimatum para pedagang, barulah mereka kembali melakukan aktivitas perdagangan.<sup>34</sup> Para pedagang terpaksa menaikkan harga barang-barang yang mereka jual hampir dua kali lipat agar tidak mengalami kerugian.<sup>35</sup> Namun, sebagian warga dapat memanfaatkan kesempatan ekonomi yang muncul akibat penurunan nilai mata. Mereka menjadi penyedia uang tukaran dengan mengambil keuntungan sebesar 10% sampai 25%.<sup>36</sup>

Kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan inflasi membuat jumlah pasokan uang berkurang drastis, dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah. Krisis likuiditas ini begitu berat sehingga pemerintah terpaksa memperbolehkan penambahan hutang. Pada awal tahun 1960, jumlah pasokan uang kembali lagi ketingkat sebelumnya dan inflasi pun naik lagi. Kebijakan ekonomi menjadi bersifat tragis dan lucu dengan dicanangkannya suatu rencana pembangunan delapan tahun pada akhir tahun 1960. Rencana pembangunan tersebut merupakan omong kosong ritual besar yang dibagi menjadi 17 bagian, 8 jilid, dan 1945 pasal untuk melambungkan tanggal proklamasi kemerdekaan.<sup>37</sup>

Pada tahun 1963, Soekarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai pengejawantahan sistem ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, pelaksanaan sistem ekonomi ini justru lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonomis. Hal ini tercermin dari ide Soekarno untuk menyatukan semua lembaga perbankan milik negara dalam satu komando yang disebut

34. *Harian Lembaga*, 26 Agustus 1959.

35. *Warta*, 12 Februari 1960 dan 20 Februari 1960.

36. *Harian Lembaga*, 27 Agustus 1959.

37. M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 527-528.

sebagai “Bank Berdjoang–Bank Tunggal”. Alasannya karena bank-bank negara merupakan salah satu alat revolusi yang bertugas ikut memenangkan revolusi, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu komando. Ide tersebut disampaikan saat memperingati Hari Bank pada tanggal 5 Juli 1963.<sup>38</sup>

Dengan sistem Ekonomi Terpimpin, pemerintah berusaha menggerakkan bank-bank pemerintah sebagai alat revolusi secara terpimpin. Dengan demikian, diperlukan adanya kesatuan jiwa, pikiran, dan tindakan di kalangan bank-bank pemerintah. Sebagai langkah awal dari usaha tersebut, pada April 1964 dibentuk Badan Pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) yang terdiri dari para pembantu MUBS dan para direktur bank-bank pemerintah. Melalui badan tersebut para pemimpin bank pemerintah secara bersama-sama diikuti-sertakan dalam perumusan kebijakan-kebijakan perbankan. Selanjutnya, dengan tujuan untuk menyelaraskan antara tatanan ideal perbankan dengan tujuan dan cita-cita revolusi yang telah digariskan dalam Manipol dan Dekon, maka pada 1964 dilaksanakan Musyawarah Bank Berdjoang Sabang-Merauke untuk memposisikan perbankan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh pemimpin cabang bank pemerintah seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat, serta wakil-wakil perusahaan sejenis dan perbankan nasional swasta.

Dengan semangat gotong royong antar sesama warga perbankan, akhirnya musyawarah merumuskan suatu kesimpulan yang terangkum dalam “Doktrin Bank Berdjoang”. Doktrin tersebut pada intinya terdiri dari lima butir doktrin yang disebut Panca Sakti Bank Berdjoang, yaitu: 1) Bank sebagai alat revolusi wajib melaksanakan Deklarasi Ekonomi. 2) Mengadakan kesatuan jiwa di kalangan perbankan. 3) Menyyelenggarakan politik kepegawaian dan pendidikan

38. Hari Bank ditetapkan oleh Soekarno tanggal 5 Juli untuk memperingati hari Bank Negara Indonesia. Darsono, dkk., *op.cit.*, hlm. 269, 274.

demokratis yang bermutu tinggi dan yang ber-Manipol-USDEK. 4) Bank menumbuhkan suasana kekeluargaan di dalam perusahaan bank seperti yang dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945 5) Mengadakan integrasi antara perjuangan perbankan dengan perjuangan masyarakat.

Secara lebih kongkrit kelima butir doktrin tersebut diterjemahkan dalam Program Perdjooangan Bank Berdjooang, yaitu: 1) Bank Berdjooang berorientasi kepada Pembangunan Nasional Semesta bukan hanya berdasarkan pertimbangan untung-rugi dengan motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 2) Bank Berdjooang menuju kepada pemberian kredit berdasarkan atas rencana produksi yang diajukan. 3) Bank Berdjooang bersikap dinamis-aktif terjun ke tengah-tengah kehidupan ekonomi bangsa, terutama jika terjadi kemacetan-kemacetan.

Konsekuensi dari konsepsi Bank Berdjooang adalah proses integrasi antar bank pemerintah dalam membantu langsung program pemerintah dalam menangani perekonomian negara secara efisien. Pada akhir tahun 1964, MUBS mulai merintis pelaksanaan asas spealisasi di kalangan bank-bank pemerintah dengan menetapkan departemen yang harus dilayani oleh bank-bank pemerintah. BI, BKTN, BDN, BUNEG, dan BNI dilibatkan dalam penanganan program departemen pemerintah. Bank-bank tersebut menjadi semacam Bank Pembangunan yang bertugas membiayai proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh departemen pemerintah.

Proses integrasi bank-bank pemerintah mulai semakin jelas pada 11 April 1965, ketika Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum MPRS menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan kepada sistem Bank Tunggal. Dengan sistem tersebut diharapkan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan dipimpin demi suksesnya pelaksanaan program perjuangan pemerintah. Amanah ini kemudian disusul dengan terbitnya Penpres RI No. 8 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa dalam rangka penyederhanaan or-

ganisasi perbankan ke arah organisasi yang bersifat tunggal, ditetapkan pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan, yang akan dilakukan dengan penetapan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral.

Sebelum membentuk Bank Tunggal, terlebih dahulu dilaksanakan pengintegrasian bank-bank umum negara dan bank tabungan negara dalam bank sentral. Pengintegrasian tersebut ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 4 Juni 1965. Kemudian, pada tanggal yang sama dilakukan pengintegrasian BKTN dalam BI. Menyusul berikutnya pengintegrasian BUNEG, BTN dan BNI ke dalam BI pada 21 Juni 1965. Namun demikian pengintegrasian tersebut tidak berjalan sesuai dengan Penpres yang menetapkannya. Secara kongkret hanya BKTN saja yang benar-benar telah terintegrasi dengan BI, sementara ketiga bank pemerintah lainnya belum pernah secara kongkret berintegrasi dalam BI.

Selanjutnya pada 27 Juli 1965, dikeluarkan ketetapan pembentukan Bank Tunggal milik negara melalui Penetapan Presiden No. 17/1965 dengan nama Bank Negara Indonesia dengan tugas menjalankan aktivitas bank sirkulasi, bank sentral dan sekaligus bank umum. Penpres pembentukan bank tunggal tersebut kemudian dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. 65/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 dan mulai 17 Agustus 1965. Sejak saat itu, kantor-kantor bank yang dilebur dalam bank tunggal beroperasi dengan nama sebagai berikut: BI dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I, BKTN dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II, BNI dengan nama Bank Negara Indonesia Unit III, BUNEG dengan nama Bank Negara Indonesia Unit IV dan BTN dengan nama BNI Unit V.

Dalam pembentukan bank tunggal ini, BDN dan Bapindo tidak diikutsertakan. Absennya BDN dari bank tunggal disebabkan penolakan direktur utamanya, J.D. Massie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Ia menyatakan

ketidak-setujuannya atas pembentukan bank tunggal kepada Presiden Soekarno, padahal sebelumnya Massie bersama para pemimpin bank pemerintah lainnya turut menandatangani hasil musyawarah yang menyetujui pembentukan bank tunggal. Massie berpendapat bahwa konsep bank tunggal yang menyatukan bank sentral dengan bank-bank umum lainnya akan membingungkan para koresponden di luar negeri. Pendapat Massie tersebut cukup beralasan, sehingga Presiden Soekarno dapat menerimanya meski telah terlanjur menyetujui Bank Tunggal yang dimotori oleh Jusuf Muda Dalam sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Adapun Bapindo, karena bank tersebut tetap berfungsi sebagai bank pembangunan bukan bank umum sehingga tidak dilebur bersama bank pemerintah lainnya dalam bank tunggal.

Setelah secara resmi terbentuk, pemerintah segera menetapkan tujuan dari Bank Tunggal, yaitu: 1) Sebagai Alat Revolusi dan Abdi Ampera yang dijiwai oleh Dekon dan doktrin-doktrin revolusi lainnya, turut aktif dalam segala tingkat perjuangan revolusi guna membangun masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. 2) Sebagai Alat Revolusi melakukan usaha-usaha Bank Berdjoang, untuk menyelenggarakan dan mendorong kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan pemerintah. 3) Sebagai Alat Revolusi secara aktif, dinamis dan kreatif bersama-sama New Emerging Forces (NEFO) menggalang kerjasama di bidang ekonomi moneter menuju terwujudnya Dunia Baru yang bebas dari penghisapan atas manusia oleh manusia. 4) Sebagai Alat Revolusi membangkitkan dan memupuk daya cipta dan swadaya Buruh/Pekerja sebagai sokoguru Revolusi untuk melaksanakan Amanat Berdikari menuju terwujudnya Trisakti Tavip. 5) Sebagai Alat Revolusi, mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya sampai ke pelosok-pelosok untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif menggali potensi rakyat.

Selain menetapkan tujuan bank tunggal, pemerintah juga telah

menyiapkan garis besar struktur organisasi Bank Negara Indonesia dalam fase peralihan. Dalam organisasi peralihan tersebut dicantumkan tiga asas organisasi bank tunggal, yaitu sentralisasi, spesialisasi dan dekonsentrasi. Dengan asas sentralisasi, MUBS mendapatkan kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam memimpin bank tunggal dengan prinsip komando. Spesialisasi adalah pengarahan kegiatan pada obyek-obyek ekonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang manajemen ke daerah-daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Setelah dibentuknya bank tunggal, terjadilah Peristiwa 30 September 1965 yang memicu runtuhnya Sistem Terpimpin Soekarno dan diikuti dengan runtuhnya berbagai produk sistem lainnya, termasuk sistem Bank Tunggal. Setelah peristiwa itu dilakukan berbagai perubahan fundamental dalam bidang politik maupun bidang ekonomi. Dalam pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/66 disebutkan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya, serta pengawasan dan penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka harus segera ditetapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Bank Sentral. Sambil menunggu disahkannya kedua undang-undang tersebut, maka pada tahun 1966 telah ditetapkan bahwa Bank Negara Indonesia Unit I berfungsi kembali sebagai Bank Sentral, sedangkan unit-unit yang lain juga ditetapkan untuk menjalankan usahanya sebagaimana undang-undang pembentukannya terdahulu. Berdasarkan ketetapan tersebut, sistem bank tunggal secara praktis telah berakhir. Pada akhir tahun 1967, rancangan undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diselesaikan. Rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan oleh presiden menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 01/M/IV/1/1968 tertanggal 10 Januari 1968, maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

## Pengukuhan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia

Sepanjang 1968, pembahasan mengenai rancangan undang-undang lainnya terus dilanjutkan, dan akhirnya dalam bulan Desember 1968 sebuah rancangan undang-undang selesai dan disahkan pula oleh presiden menjadi undang-undang, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini semakin mengesahkan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas pokok BI berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1968, yaitu: 1) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah; 2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

*setelah  
era Bank Tunggal  
berakhir, kedudukan  
Bank Indonesia sebagai  
bank sentral kembali  
dikukuhkan.....*

Kini, BI dipimpin oleh direksi yang terdiri atas seorang Gubernur dan sekurang-kurangnya lima dan sebanyak-banyaknya 7 tujuh orang direktur. Tugas dan kewajiban direksi ialah melaksanakan segala pekerjaan BI, melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan BI. Sementara itu, Dewan Moneter terdiri atas tiga orang anggota, yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur BI. Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter, serta memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 13 tahun 1968, maka kantor perwakilan Bank Negara Indonesia Unit I di Sumatera Utara diganti menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia. Sistem

bank tunggal kini telah berakhir. Kantor perwakilan Bank Negara Unit II sampai IV yang ada di daerah ini juga dikembalikan fungsinya untuk menjalankan usaha sebagaimana pembentukan awalnya.

Kantor perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara dikembalikan fungsinya sebagai bank sentral yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala (pemimpin). Dalam menjalankan tugasnya, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dibantu oleh seorang Deputi Pimpinan yang mengkordinir bidang ekonomi dan moneter, bidang sistem pembayaran, serta sistem manajemen intern.

## Boks 7

## BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI ONLINE



Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya bank.

Bitcoin disebut *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanannya khusus dalam mengontrol manajemen dan pembuatan Bitcoin. Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan.

Bitcoin muncul akibat dari resesi ekonomi dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008. Bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Konsep di balik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional. Dengan memangkas biaya makelar ini, penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Dari sudut pandang pengguna, bitcoin serupa seperti uang tunai di dunia internet. Bitcoin tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet.

Untuk dapat menggunakan bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (software wallet), mobile wallet dan dompet web (web wallet). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada di mana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau software wallet, bitcoin akan tersimpan di dalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh

software wallet ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sistem kerja pada mobile wallet sama dengan software wallet hanya saja media yang digunakan adalah mobile phone. Pada web wallet menyediakan akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan online banking, dengan web wallet pengguna dapat melihat jumlah bitcoin yang tersimpan kapanpun dan di manapun.



Wallet ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat. Namun wallet juga memiliki perbedaan yaitu apabila sesuatu terjadi pada wallet pengguna seperti serangan hacker maka bitcoin yang tersimpan didalam wallet tidak ditanggung risikonya oleh pemerintah. Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Keberadaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak didukung oleh Bank Indonesia dan menyebabkan kekosongan hukum. Menurut Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia bitcoin dinilai belum sesuai dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-



Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang Mata Uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah.

Dengan pemakaian bitcoin yang semakin meningkat di Indonesia diharapkan Pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap pengaturan bitcoin sebagai alat pembayaran dengan mengeluarkan regulasi tentang pengaturan bitcoin sehingga kedudukannya jelas dan masyarakat yang menggunakannya mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian bitcoin sebagai alat pembayaran selama belum ada regulasi dari pemerintah atau Bank Indonesia dikarenakan tingkat sekuritas yang lemah serta belum adanya perlindungan hukum.

*Sumber: Tiara Dhana Danella, Dr. Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM. 2015. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online. Malang*



# 8

## Sumatera Utara di Era Modern

Wilayah Sumatera Utara yang dulunya dikenal sebagai Sumatera Timur pada zaman kolonial Belanda tetap mempunyai karakteristik perekonomian yang sama, dalam pengertian sebagai penghasil utama komoditas ekspor dan salah satu pintu perdagangan luar negeri Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh letak geografis Sumatera Utara yang berdekatan dengan pintu utama perdagangan global terutama Singapura.

Pada era modern saat ini, sebagaimana wilayah Indonesia yang lain, Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan yang pesat baik di sektor riil maupun finansial. Dari sektor riil, peran Sumatera Utara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional cukup signifikan terutama sebagai penyumbang ekspor komoditas seperti: kelapa sawit, karet, hasil tambang dan lain-lainnya. Upaya untuk memperbaiki struktur ekspor juga terus berlanjut antara lain dengan mendorong industri turunan sehingga memberikan dampak yang lebih luas baik dalam meningkatkan Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan perkembangan sektor riil, sektor finansial juga berkembang pesat yang antara lain ditandai dengan semakin banyaknya jumlah bank dan kantor-kantor bank serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara.

Bank Indonesia kantor perwakilan dalam negeri di wilayah Sumatera Utara secara aktif ikut memfasilitasi agar akselerasi pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dan stabilitas tetap terjaga. Dalam

konteks tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas dan seluruh stakeholders untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan yang ditetapkan. Terkait dengan “uang” yang merupakan darah bagi suatu sistem perekonomian, Bank Indonesia senantiasa berupaya agar uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan tersedia dalam kondisi segar dengan denominasi yang sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Disamping itu, Bank Indonesia akan selalu berjuang agar uang Rupiah yang merupakan simbol kedaulatan bangsa Indonesia, tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang digunakan di wilayah Indonesia dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

### **Karakteristik ekonomi Sumatera Utara sebagai Penghasil Utama Komoditas Unggulan di Indonesia**

Provinsi Sumatera Utara sebagai sebuah wilayah penting di Pulau Sumatera secara berkesinambungan menjalani proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Sumatera Utara terus berjalan, baik sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga periode kontemporer. Sumatera Utara tidak berhenti untuk mengembangkan ekonominya guna menuju Sumatera Utara yang sejahtera. Provinsi Sumatera Utara tersohor karena perkebunannya yang hingga kini tetap menjadi primadona perekonomian provinsi Sumatera Utara. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan yang dikelola baik oleh perusahaan swasta, negara maupun perkebunan milik rakyat yang berada jauh dari Kota Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga.

Selama masa kolonial Hindia Belanda, perkebunan memegang peranan yang amat penting dalam perkembangan wilayah di Sumatera Utara. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejak berabad yang lalu perkebunan telah menjadi tulang punggung yang menopang ekonomi di wilayah ini. Pada masa Pendudukan Jepang, perkebunan sempat ditinggalkan, karena pemerintah militer Jepang lebih mem-

fokuskan pada penanaman tanaman pangan yang dapat digunakan dalam upaya Jepang memenangkan Perang Dunia II. Walaupun sempat ditinggalkan pada masa Pendudukan Jepang, perkebunan tetap bertahan meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil daripada masa sebelum perang.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai menata ulang sektor perkebunan dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah

Indonesia dengan mendirikan perusahaan perkebunan PTPN sebagai inti dan perkebunan masyarakat sebagai plasma. Memasuki masa awal kekuasaan Orde Baru, pertanian merupakan fokus utama dari strategi dan prioritas pembangunan Orde Baru. Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perkembangan Indonesia sampai seperti sekarang ini. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang penting di Indonesia yang mempunyai potensi wilayah yang beragam dan kaya terutama di sektor pertanian yang menghasilkan komoditas ekspor yang dihasilkan oleh dari sektor perkebunan. Kini memasuki era modern, perkebunan tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi di Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah perdagangan, dengan ciri-ciri yang khas, ditinjau dari segi geografis maupun dari segi potensi ekonominya. Kedudukannya yang strategis, karena berada dalam jalur perdagangan internasional yakni Selat Malaka dan berdekatan dengan Singapura sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara membuat perdagangan yang terjadi di Sumatera Utara sangat masif. Kota Medan terutama dengan pelabuhan Belawan menjadi pintu gerbang keluar masuknya arus barang untuk wilayah Sumatera. Di

*Kedudukan Sumatera Utara dalam perekonomian nasional sangat strategis terutama melalui peranannya dalam mendukung ekspor komoditas, pusat perdagangan dan pintu masuk pariwisata*

samping itu, terdapat pula pelabuhan Sibolga sebagai pintu masuk arus barang untuk wilayah barat Sumatera Utara. Perdagangan yang terjalin bukan hanya dalam skala regional, tetapi dalam perdagangan bebas skala internasional.

Sumatera Utara mempunyai kekhususan dalam kerangka perekonomian nasional baik sebagai daerah agraris yang merupakan pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura, maupun sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata di Indonesia telah melaksanakan pembangunan daerah dengan hasil yang positif. Hasil pembangunan yang telah dicapai tidak hanya pada bidang ekonomi dan berbagai prasarana fisik tetapi juga pada bidang-bidang lainnya.

Sumatera Utara memiliki kedudukan sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia di luar minyak bumi. Oleh karena itu ditempuh kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor Sumatera Utara di luar negeri. Penetapan-penetapan standar beberapa komoditi ekspor diadakan oleh Departemen Perdagangan serta pengawasan terhadap mutu barang-barang ekspor umumnya, di samping usaha-usaha menggiatkan industri pengolahan ekspor.<sup>1</sup>

Upaya untuk meningkatkan ekonomi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui peningkatan hasil ekspor. Hal ini sejalan dengan Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) berdasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar.<sup>2</sup>

Hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dalam

1. *Sumatera Utara Membangun*, (Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1975), hlm 102.
2. Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

waktu belakangan ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan. Perdagangan internasional khususnya ekspor diyakini merupakan lokomotif penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekspor komoditas pertanian menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik khususnya hasil perkebunan. Komoditas perkebunan Sumatera Utara telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia.

Hasil dari subsektor perkebunan sebagian besar diekspor sehingga membuat perkebunan menjadi subsektor andalan dalam menyumbang devisa. Subsektor perkebunan merupakan salah satu pilihan pengganti migas, karena dapat menjadi sumber penghasil dan penghemat devisa.

Sebagai suatu daerah perdagangan, Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkannya komoditas perkebunan karena didukung berbagai syarat yang menjadikan komoditas ini dapat tumbuh dengan baik dan subur, diantaranya iklim yang sesuai, kesesuaian lahan, dan kesuburan tanah. Potensi dan kekayaan alam tersebut apabila dimanfaatkan dengan benar dan sesuai maka akan menciptakan keuntungan bagi Sumatera Utara khususnya, yang akan berdampak pada pendapatan daerah, petani, perusahaan, dan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Perkebunan sebagai salah satu subsektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, baik pada masa lalu, sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) mencantumkan bahwa pembangunan pertanian yang di dalamnya mencakup perkebunan bertujuan meningkatkan perluasan lapangan tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor.

Wilayah ini memegang peranan utama di bidang ekspor di In-

donesia. Jenis komoditas ekspor utama Sumatera Utara adalah kelapa sawit, karet, tembakau, kopi, udang, dan teh. Penetapan komoditi-komoditi tersebut sebagai unggulan didasarkan pada kemampuan bersaing dengan komoditi yang sama dari daerah lain bahkan dari luar negeri baik terhadap pemasarannya yang berkesinambungan maupun kemampuannya memberikan keuntungan kepada pengelolaanya.

Sebagai sebuah wilayah penghasil utama komoditas-komoditas perkebunan di Indonesia, Sumatera Utara memainkan peranan utama dalam ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional. Negara tujuan utama ekspor perkebunan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang dan Republik Rakyat Cina. Selain ketiga negara tersebut, Indonesia juga melakukan ekspor ke negara Korea dan Singapura serta negara-negara Eropa. Sementara itu di dalam kawasan regional, Indonesia melakukan kerjasama regional dengan beberapa negara ASEAN yakni Malaysia dan Thailand dalam bentuk segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand, dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama industri, pertanian, pariwisata, dan perdagangan.<sup>3</sup>

Dalam skala nasional, produksi perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada akhir tahun 1960 sampai awal 1990 produksi perkebunan meningkat 50%.<sup>4</sup> Kenaikan ini berkat perbaikan program pertanian Orde Baru terutama sub-sektor perkebunan untuk menghasilkan komoditas dengan harga bersaing,

*Sebagai sebuah wilayah penghasil utama komoditas-komoditas perkebunan di Indonesia, Sumatera Utara memainkan peranan utama dalam ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional....*

3. Bank Indonesia Medan, *Tinjauan Ekonomi, Moneter, dan Perbankan Sumatera Utara 1980-1985*, hlm. 34.
4. Hall Hill, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 180.

terutama program Revolusi Hijau. Di Sumatera Utara, kondisi perkebunan jauh lebih baik daripada wilayah lain di Indonesia.

Dalam hal jenis komoditas perkebunan, setelah pasca kemerdekaan jenis komoditas perkebunan di Sumatera Utara mengalami perubahan yang drastis. Sejak masa kolonial, wilayah Sumatera Utara terkenal dengan daerah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik dan terkenal hingga ke berbagai belahan dunia. Memasuki periode pasca kemerdekaan, popularitas tembakau menurun secara drastis. Primadona komoditas perkebunan saat ini adalah karet dan kelapa sawit. Hal ini terjadi karena naiknya permintaan pasar internasional atas kedua komoditas tersebut. Dampak dari fenomena tersebut adalah banyak perusahaan perkebunan yang mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit.

Salah satu perkebunan swasta di Sumatera Utara yang mengalihfungsikan lahan perkebunannya menjadi perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, atau yang dikenal dengan PT. Lonsum.<sup>5</sup> Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan perkebunan swasta terbesar yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. PT. London Sumatra memfokuskan kegiatannya pada budidaya tanaman perkebunan kakao, kopi dan teh sebagai tanaman produksi, di wilayah Deli Serdang, Langkat dan Asahan.

Dalam rangka mengembangkan usaha, perusahaan ini terus melebarkan sayapnya dengan melakukan perluasan lahan perkebunan tidak hanya untuk wilayah Sumatera, namun juga Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Pada 1974, PT. London Sumatra tidak lagi mengandalkan tanaman kopi, kakao dan teh, tetapi beralih pada budidaya tanaman karet. Kemudian sejak tahun 1980an, PT. Lonsum menggeser tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit hingga sampai saat ini. Dari hasil tanaman produksi kelapa sawit, maka PT.

5. PT. London Sumatra sebelumnya bernama Harrison & Crossfield Ltd, sebuah perusahaan perkebunan Inggris di Sumatera Utara yang didirikan tahun 1906.

Lonsum menjadi perusahaan perkebunan yang bertaraf internasional.

Pada dekade 1970, secara keseluruhan baik volume maupun nilai ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan. Kenaikkan ekspor Sumatera Utara tahun 1974 sebesar 932.509 ton, dengan nilai US\$ 411,7 juta dibandingkan dengan tahun 1973 sebesar 866.924 ton dengan nilai US\$ 264,8 juta, yang berarti untuk volume naik sebesar 7,5% dan untuk nilai naik 53,5%.<sup>6</sup>

Dari jumlah tersebut, komposisi komoditas ekspor yang dihasilkan bumi Sumatera Utara pada periode 1969-1974 adalah karet sebesar 47%, sedangkan kelapa sawit sebesar 29%, persentase sisanya adalah 24% berasal dari komoditas lainnya. Dua komoditas tersebut adalah penyumbang pemasukan terbesar dalam bidang perkebunan di Sumatera Utara. Berikut ditampilkan komoditas ekspor utama Sumatera Utara pada 1973 seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.1  
Komoditas Ekspor Utama Sumatera Utara Periode Tahun 1973

No	Jenis Barang	Volume (ton)	Nilai (ribuan US\$)	Persentase	
				Volume	Nilai
1	Karet	227.321	123.709	31,99	46,71
2	Kelapa Sawit	314.517	77.775	36,28	29,37
3	Tembakau Perkebunan	2.598	15.520	0,30	5,86
4	Udang	5.978	13.204	0,69	4,99
5	Teh	15.580	9.116	1,80	3,44
6	Kopi	11.824	10.593	1,36	4,00

Sumber: *Sumatera Utara Membangun* (Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1975), hlm. 83.

Mengenai neraca perdagangan ekspor secara umum, memasuki paruh kedua dekade 1970, neraca perdagangan luar negeri Sumate-

6. *Sumatera Utara Membangun, Op.Cit.*, hlm. 81.

ra Utara mengalami peningkatan pada akhir dekade dibandingkan dengan pertengahan, meskipun terjadi pasang surut yang dinamis terutama dari hasil ekspor yang dihasilkan oleh Sumatera Utara. Dari data neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terlihat bahwa secara total neraca perdagangan mengalami surplus sejak tahun 1975-1979. Surplus yang paling besar adalah tahun 1975 dengan surplus sebesar US\$ 141 juta ke 1976 dengan surplus US\$ 391 juta. Hal ini berarti terjadi kenaikan surplus sebesar US\$ 250 juta. Untuk lebih jelasnya mengenai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8.2  
Ekspor-Impor Provinsi Sumatera Utara 1975-1979 (dalam juta US\$)

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Surplus (Defisit)
1975	372	372	141
1976	466	175	391
1977	616	268	358
1978	649	253	496
1979	516	130	486

Sumber: Data diolah dari Tinjauan Ekonomi, Moneter, dan Perbankan Sumatera Utara 1980.

Untuk mendorong dan meningkatkan sektor perdagangan ekspor impor dan interinsuler maupun perdagangan lokal, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada 4 sasaran pokok, yaitu:

- a. Mendorong dan meningkatkan perdagangan luar negeri menuju peningkatan volume dan nilai ekspor dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah dan devisa negara.
- b. Mendorong dan melindungi produksi dalam negeri dalam usaha memperluas kesempatan kerja dan penghematan devisa negara.
- c. Menjaga dan mengawasi keseimbangan, kestabilan harga, dominasi pasar oleh segolongan pengusaha-pengusaha.

d. Membina pengusaha-pengusaha Swasta Nasional ekonomi lemah, agar dapat tumbuh dan tegak sejajar dengan pengusaha-pengusaha golongan lainnya, untuk memperkuat dasar dan kerangka ekonomi Nasional.<sup>7</sup>

Selain itu, untuk melancarkan mata rantai perdagangan di daerah Sumatera Utara, dilakukan pengawasan terhadap distribusi barang-barang penting, seperti komoditas perkebunan dan 9 bahan pokok agar tidak terjadi kendala-kendala yang mampu menghambat pembangunan ekonomi Sumatera Utara.<sup>8</sup>

Pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian di berbagai daerah di Indonesia terus melakukan upaya pembangunan daerah dengan cara pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Memasuki periode Repelita III dan IV, Sumatera Utara kian berbenah terutama di bidang infrastruktur. Pembangunan di bidang ekonomi selama periode ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang memungkinkan adanya upaya pemerataan. Struktur ekonomi di Sumatera Utara telah berkembang dengan struktur yang lebih kokoh.

Kegiatan pembangunan di berbagai bidang di Sumatera Utara antara tahun 1975 dan 1980 telah memungkinkan daerah ini memberikan sumbangan yang amat berarti dalam kegiatan ekonomi nasional. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah ini, menurut harga konstan tahun 1975, meningkat dari Rp688,3 milyar dalam tahun 1975 menjadi Rp1.083,9 milyar dalam tahun 1980, yang berarti pertumbuhan PDRB adalah rata-rata sebesar 9,5% pertahun. Pada periode ini, ekspor dari produksi perkebunan memberikan sumbangan sebesar 15% dari seluruh nilai ekspor non migas Indonesia.<sup>9</sup>

Agro industri mulai tumbuh dan berkembang terutama dalam periode tersebut di Sumatera Utara. Perusahaan-perusahaan perke-

7. Sumatera Utara Membangun, *Op.Cit.*, hlm 101.

8. *Ibid.*, hlm 104.

9. *Sejarah Sumatera Utara dalam Repelita*, (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), hlm. 4.

bunan terutama PT. Perkebunan Nusantara Wilayah I yang mencakup Sumatera Utara dan Aceh terus meningkat, baik jenis produksi, volume, maupun pemasarannya. Komoditas hasil perkebunan sebagai industri hilir yang diolah menjadi agro industri yaitu karet, minyak kelapa sawit, gula tebu, dan teh yang dipasarkan baik di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, salah satu komoditas industri hulu unggulan yang berasal dari bumi Sumatera Utara adalah kelapa sawit. Komoditas ini bernilai amat tinggi dalam perdagangan ekspor. Nilainya yang tinggi membuat banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang berinvestasi dengan membuka lahan-lahan perkebunan kelapa sawit. Sebelum tahun 1979, perkebunan kelapa sawit masih diusahakan hanya oleh perusahaan perkebunan besar milik negara dan swasta. Sejak dekade 1980, sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan perekonomian rakyat, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dari usaha perkebunan kelapa sawit rakyat yang bermitra dengan perkebunan besar.

Hal ini sesuai dengan anjuran Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menawarkan kepada para pengusaha yang berminat menjadi inti pada perkebunan rakyat. Perusahaan inti tersebut bersedia mendirikan pabrik pengolahan tidak jauh dari areal kebun rakyat, dan ikut membina petani dalam memperbaiki mutu bahan olah. Pola rayonisasi ini pada tahap pertama akan memanfaatkan proyek bantuan ADB (Bank Pembangunan Asia) untuk merehabilitasi tanaman perkebunan rakyat yang sudah tua seluas 75.000 hektar. Setiap perusahaan inti diharapkan mempunyai daerah binaan minimal 2.000-3.000 ha.<sup>10</sup>

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di 16 provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 1999, areal terluas di Pulau Sumatera (2.243.501 ha), khususnya di Propinsi Sumatera Utara (614.617 ha) dan Propinsi Riau (606.492 ha). Di Pulau Kalimantan luas areal perke-

10. *Kompas*, 19 Desember 1991.

bunan kelapa sawit pada tahun 1999 adalah 562.901 ha. Di samping Pulau Sumatera dan Kalimantan, perkebunan kelapa sawit terdapat di berbagai propinsi di pulau lainnya yaitu di Propinsi Jawa Barat (21.502 ha), Sulawesi Selatan (80.934 ha), Sulawesi Tengah (36.427 ha), dan Irian Jaya (29.855 ha).<sup>11</sup>

Sementara itu, perkembangan ekonomi wilayah Sumatera Utara yang semakin lama semakin maju membuat para investor baik dalam dan luar negeri tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Hal ini terlihat dari Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara yang mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 1980 sampai 1989, nilai PMDN meningkat dengan cepat. Peningkatan terbesar terutama terjadi pada tahun 1986, di mana nilai PMDN di Sumatera Utara sebesar Rp603.182,06 juta.

Perkembangan PMDN di Sumatera Utara mulai cerah sejak tahun 1988 sampai tahun sebelum krisis (1997). Bahkan di 1997 nilai PMDN Sumatera Utara sebesar Rp1.469.005,44 juta. Pada 1997 merupakan nilai tertinggi di Sumatera Utara selama 30 tahun terakhir. Pada tahun 1998 merupakan tahun yang sulit di mana nilai PMDN mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan di 1998 nilai PMDN di Sumatera Utara hanya sebesar Rp80.063,68 juta.

Sementara itu, perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang dinamis. Pada tahun 1981 nilai PMA Sumatera Utara sebesar US\$ 20.718 juta di mana terjadi penurunan sebesar 8,9% jika dibandingkan dengan nilai PMA Sumatera Utara pada tahun 1980, yaitu US\$ 22.745 juta. Pada tahun 1990 nilai PMA Sumatera Utara mencapai US\$ 531.019 juta. Di mana pada tahun ini merupakan nilai investasi asing paling besar nilainya jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya nilai PMA Sumatera Utara me-

11. Sya'ad Afifuddin dan Sinar Indra Kusuma, *Analisis Struktur Pasar Cpo: Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara*, (Naskah Tidak Diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 124.

ngalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dorongan pemerintah untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara khususnya.

Memasuki dekade 1990, kondisi ekonomi Sumatera Utara cenderung stabil. Ekonomi pada paruh pertama dekade 1990 menunjukkan suatu kenaikan berarti. Arah laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan tren positif sebagaimana terlihat dari PDRB Sumatera yang naik dari tahun ke tahun. Tren positif tersebut terus berlangsung hingga pada 1997 ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia. Kegemilangan ekonomi yang sudah didapat segera hancur akibat kondisi ekonomi yang kian buruk.

Pada 1998, mayoritas sektor ekonomi mengalami kemunduran dan kelumpuhan di mana ekonomi Indonesia maupun Sumatera Utara khususnya mengalami penurunan. Secara keseluruhan, PDB Indonesia pada tahun 1998 mengalami penurunan menjadi Rp1.314.202 miliar dari Rp1.512.780,90 miliar pada 1997, demikian juga pada PDRB Sumatera Utara mengalami penurunan 1998 menjadi Rp64.305,42 miliar dari pada 1997 yang telah mencapai Rp71.533,28 miliar.

Di balik kondisi ekonomi yang hancur, kondisi perkebunan justru mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari PDRB perkebunan Sumatera Utara mengalami peningkatan dari Rp5.781,22 milyar di tahun 1997 menjadi Rp6.243,58 milyar tahun 1998. Kondisi yang berkebalikan ini disebabkan oleh kenaikan nilai kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yang menjadi alat pembayaran utama dalam ekspor impor yang terjadi. Dolar Amerika Serikat yang naik beberapa kali lipat mendatangkan keuntungan lebih kepada para pengusaha perkebunan atas ekspor yang terjadi.

*Pada saat krisis, sektor perkebunan yang mengandalkan ekspor masih mencatat kinerja positif terutama karena faktor nilai tukar*

Tabel 8.3

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera Utara, dan Subsektor Perkebunan Sumatera Utara Tahun 1990-1999 (dalam miliar rupiah)**

Tahun	PDB Nasional	PDRB Sumatera Utara	PDRB Perkebunan Sumatera Utara
1990	946.641,10	43.353,76	2.905,88
1991	1.018.062,60	46.495,45	3.115,87
1992	1.061.248,00	50.085,73	3.562,87
1993	1.151.490,20	52.447,64	4.110,87
1994	1.238.312,30	57.416,67	4.592,80
1995	1.340.101,60	62.778,81	4.957,80
1996	1.444.873,30	68.284,94	5.357,75
1997	1.512.780,90	71.533,28	5.781,22
1998	1.314.202,00	64.305,42	6.243,58
1999	1.324.599,00	65.934,40	6.577,50

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 1990-1999.

Keterpurukan ekonomi Sumatera Utara sepanjang 1998 dapat dilihat dari pertumbuhan negatif pada hampir semua sektor, kecuali sektor pertanian. Dari subsektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang berdampak pula di Sumatera Utara, perbaikan ekonomi terus dilakukan. Perkebunan merupakan sektor yang paling sedikit mendapatkan imbas negatif dari terjadinya krisis ekonomi saat itu. Setelah krisis ekonomi berlalu, perlahan-lahan kondisi ekonomi semakin membaik.

Pada periode kontemporer hingga saat ini, sektor perkebunan tetap tumbuh menjadi salah satu andalan pemasok devisa bagi Sumatera Utara. Pasar internasional yang juga terus tumbuh membuat ekonomi perkebunan yang telah berjalan di Sumatera Utara selama lebih dari satu abad mampu terus berjalan dan mendatangkan banyak manfaat, terutama bagi perkembangan wilayah Sumatera Utara.

## **Peran KPwDN Sumatera Utara dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Sumatera Utara**

Sejak berdiri, De Javasche Bank Agentschap Ooskust van Sumatra telah melaksanakan perannya sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial. Sebagai otoritas moneter, salah satu tugas pokok DJB kala itu ialah mengendalikan peredaran uang di wilayah Sumatera Utara melalui politik guldenisasi. Langkah tersebut dilaksanakan oleh DJB untuk menegakan kedulatan ekonomi kolonial di wilayah pantai timur Sumatera. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, di Indonesia terjadi dualisme bank sentral, hal yang sama juga terjadi di Sumatera Utara. Pemerintah Belanda melalui DJB dan pemerintah Indonesia melalui Bank Negara Indonesia serta otoritas lokal bersaing dalam hal pengedaran uang di Sumatera Utara hingga akhirnya pada 1949 melalui hasil perjanjian KMB, DJB ditetapkan sebagai bank sentral Republik Indonesia Serikat. Namun, pada 1950 situasi politik Indonesia membuat DJB tidak lagi memiliki kewenangan sebagai bank sentral ketika RIS bubar digantikan NKRI. Kemudian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan hingga tahun 1953 berwenang sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia.

Setelah Indonesianisasi De Javasche Bank pada 1953, Bank Indonesia kemudian menggantikan DJB untuk melaksanakan peran sebagai penjaga stabilitas moneter. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan sebagai kepanjangan tangan dari Bank Sentral Pusat, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia pada masa kekuasaan Soekarno menjadi salah satu penyokong penyelenggaraan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

Perubahan tugas bank sentral terjadi pada rezim Soeharto. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Tunggal yang merupakan hasil integrasi dari bank-bank pemerintah ke dalam Bank Negara Indonesia secara resmi berakhir. Bank-bank tersebut dikembalikan kepada

kelembagaan semula dan kembali Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada perkembangannya, tidak lama setelah keluar Undang-undang Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968, Bank Indonesia segera mengambil langkah inovatif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu agen pembangunan bangsa.

Sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999, maka tugas Kantor Cabang Bank Indonesia Medan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang yang selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan utama Kantor Cabang. Kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu Bidang I (Perbankan, Ekonomi dan Statistik, Sistem Informasi, Kliring, Pasar Uang dan Modal, dan Luar Negeri); Bidang II (Perkreditan); Bidang III (Kas, Pengedaran, Akunting dan Anggaran); Bidang IV (Umum). Berdasarkan tugas-tugas ini, peran Bank Indonesia di tingkat lokal memiliki arti penting termasuk dalam hal pengelolaan uang yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas BI lainnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai salah satu agen pembangunan yang pada gilirannya turut serta dalam pembangunan ekonomi termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga turut membantu mengembangkan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan bantuan-bantuan proyek yang mampu menstimulus perekonomian pada tingkat yang paling bawah. Pada 1989, Bank Indonesia bersama LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) Bina Swadaya dan bank-bank pelaksana menciptakan proyek perintisan pengembangan swadaya masyarakat. Empat provinsi sebagai provinsi rintisan dari proyek swadaya tersebut, yang di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Untuk mendukung proyek perintisan tersebut, telah dikirimkan untuk dilakukan pelatihan sebanyak 60 orang petugas kredit dari sejumlah bank pelaksana dan

petugas-petugas lapangan LPSM dari keempat provinsi tersebut.

Program pengembangan swadaya masyarakat ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kelompok masyarakat miskin (kelompok non-formal), terutama di daerah pedesaan, agar mereka bisa berkembang maju seperti kelompok masyarakat lain. Bank Indonesia sebagai pemrakarsa proyek ini, menyalurkan dana likuiditas terbatas kepada bank-bank pelaksana untuk membantu pengembangan potensi masyarakat miskin. Untuk pendanaan proyek ini, pemerintah telah mendapatkan dana bantuan dari Jerman sebesar DM 500.000 atau sekitar Rp500 juta. Dana tersebut disalurkan bank-bank pelaksana kepada penduduk miskin di daerah pedesaan melalui dua cara, yakni pihak bank menyalurkan kepada warga melalui kelompoknya (KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat), atau bank menyalurkan terlebih dahulu kepada LPSM yang ditunjuk, untuk diteruskan kepada warga masyarakat.<sup>12</sup>

Pada perkembangan mutakhir, berdasarkan Surat Edaran No. 18/81/Intern tertanggal 30 September 2016, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam Kelompok A yang dikategorikan sebagai *large province level*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menjadi pusat dari kegiatan bank sentral di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi pula wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.

Kantor perwakilan provinsi dan kota/kabupaten di Sumatera Utara ini, memiliki tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara yang antara lain berkaitan langsung dengan pengelolaan uang, yakni tugas operasional kas/uang tunai, operasional sistem pembayaran non tunai, pengendalian inflasi daerah, dan pengembangan keuangan inklusi. Tugas-tugas pokok tersebut menegaskan posisi Bank Indonesia dalam mengendalikan peredaran uang, mengendalikan laju inflasi, dan memastikan hanya rupiah yang di-

12. *Harian Kompas*, 1 Februari 1989.

gunakan dalam transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat Sumatera Utara sebagai wilayah dengan nilai ekspor perkebunan dengan kegiatan transaksi internasional yang tinggi, salah satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang utama ialah implementasi peraturan tentang penggunaan rupiah di Sumatera Utara. Tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang menegaskan kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi yang dimaksud pada peraturan tersebut ialah setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya. Peraturan ini berlaku untuk transaksi tunai yang menggunakan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran serta transaksi nontunai yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai.<sup>13</sup>

Selain memastikan rupiah dijadikan alat pembayaran yang sah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pun mendukung berjalannya kegiatan perekonomian dalam hal pembiayaan dengan menerbitkan dan mengedarkan uang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank sentral melakukan kegiatan pengolahan dan peredaran uang mulai dari perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Secara umum, peredaran uang memperhatikan dua hal: yang pertama menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai; kedua memelihara integritas mata uang. Hal tersebut membuat kecenderungan suatu masyarakat menggunakan uang tersebut sebagai transaksi ekonominya. Adapun langkah-langkah operasional dalam pencapaian dua tujuan di atas yaitu, perhitungan jumlah uang yang

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dibutuhkan dalam perekonomian, pemetaan wilayah pengedaran uang, perhitungan jumlah uang rusak dan penyediaan stok uang yang optimal.

Ketersediaan uang dalam jumlah yang cukup amat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran ekonomi di suatu daerah, termasuk di Sumatera Utara. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara terus menjaga ketersediaan uang di tengah derasnya permintaan akan uang tunai. Di Sumatera Utara kebutuhan akan ketersediaan uang tunai amat tinggi. Kebutuhan seseorang dalam hal transaksi keuangan dilihat dari tingkat pendapatan, apabila tingkat pendapatan tinggi maka semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk keperluan melakukan suatu transaksi.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa ekonomi Sumatera Utara salah satunya bertumpu pada sektor perkebunan, yang memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi Sumatera Utara. Dalam sektor perkebunan, transaksi yang terjadi tentu saja berkaitan dengan kegiatan ekspor untuk pasar internasional. Untuk itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara terus mengawal penerapan kebijakan penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan yang terjadi di Indonesia. Penggunaan dolar Amerika sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI termasuk di Sumatera Utara berangsur mulai diganti dengan penggunaan rupiah melalui sosialisasi dan penyediaan uang dalam jumlah yang cukup.

Selain itu, dalam sektor perkebunan juga membutuhkan ketersediaan uang tunai dalam jumlah yang besar untuk memperlancar kegiatan ekonomi perkebunan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, pada sektor perkebunan kebutuhan akan uang tunai menjadi sebuah keharusan. Perusahaan perkebunan dalam melakukan pembayaran upah pada para buruh menggunakan uang tunai, karena dianggap lebih mudah diakses oleh para buruh tersebut. Hal ini terjadi karena biasanya lokasi perkebunan jauh dari pusat kota yang membuat akses perbankan sangat sulit.

Kegiatan lain yang membutuhkan uang tunai dalam jumlah

banyak adalah kegiatan jual beli antara pemilik kebun dengan para pedagang pengumpul. Berapapun hasil kebun dari para pemilik kebun –terutama perkebunan rakyat–, walaupun belum jatuh masa panen atau dalam jumlah yang sedikit akan tetap dibeli oleh para pedagang pengumpul. Dalam melakukan kegiatan pembayaran ini, para pedagang pengumpul menggunakan uang tunai. Untuk itu ketersediaan uang tunai dalam untuk memperlancar aktivitas ekonomi sehari-hari pada sektor perkebunan amat mutlak dibutuhkan.

Selain untuk aktivitas ekonomi, kebutuhan akan uang tunai dalam jumlah yang banyak, di Sumatera Utara, juga diperlukan untuk kegiatan-kegiatan adat atau pesta, seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Pada masyarakat Sumatera Utara, penyelenggaraan suatu kegiatan adat atau pesta dilakukan dengan menggunakan transaksi tunai. Penduduk Sumatera Utara lebih merasa nyaman untuk melakukan pembayaran kegiatan adat dan pesta tersebut dengan menggunakan uang tunai. Misalnya saja pada pesta pernikahan adat Batak, atau ritual kematian di Nias yang seluruhnya menggunakan transaksi tunai dalam melakukan kegiatan pembayaran. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan uang tunai amat tinggi di Sumatera Utara.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mengingat kondisi geografis di Sumatera Utara terutama pada wilayah yang jauh dari kota-kota di mana terdapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia seperti Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga, Bank Indonesia membuka kantor kas titipan dan melaksanakan kegiatan kas keliling yang mampu menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan penyediaan uang tunai suatu daerah akibat hambatan letak geografis dan kesulitan akan akses perbankan.

Kas titipan dilakukan oleh masing-masing kantor perwakilan Bank Indonesia. Di Sumatera Utara, Bank Indonesia membuka kas titipan di beberapa kota, seperti Tebing Tinggi, Balige, Padang Sidim-

puan, Gunung Sitoli, dan Rantau Prapat. Di kantor kas titipan Tebing Tinggi, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BNI cabang Tebing Tinggi. Penyelenggaraan kas titipan di kota Tebing Tinggi dikaji berdasarkan beberapa faktor antara lain perekonomian daerah, perkembangan perbankan dan kegiatan perbankan. Bahkan, perekonomian kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun alami peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat dari peningkatan PDRB sebesar 11,14% atas dasar harga berlaku dan 4,44% atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014.<sup>14</sup>

Kemudian kantor perwakilan BI Sibolga membuka kas titipan ketiga di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Balige kabupaten Toba Samosir (Tobasa) setelah Padang Sidempuan dan Gunung Sitoli. Pada Agustus 2016 diketahui plafon kas titipan Balige mencapai Rp100 Miliar.<sup>15</sup> Kantor perwakilan BI Pematangsiantar membuka kas titipan di Rantau Prapat dengan mengalokasikan uang sebesar Rp1,8 triliun tahun 2013 bagi perbankan di kota tersebut salah satunya Bank Mandiri cabang Rantau Prapat.<sup>16</sup>

Selain membuka kantor kas titipan, Bank Indonesia melaksanakan pula kas keliling sebagai penyedia kas dan berperan pula dalam *clean money policy*. Penyediaan uang layak edar dilakukan melalui proses distribusi uang yang terintegrasi secara nasional agar masyarakat dapat menggunakan uang tunai dalam kondisi yang baik, mengingat uang kartal merupakan salah satu identitas suatu Negara yang harus dijaga. Salah satu bentuk integrasi yang dilakukan adalah dengan kas titipan.

Kas keliling/kas mobil dioperasikan secara periodik dengan

14. <http://medan.tribunnews.com/2016/09/02/galakkan-clean-money-policy-bi-sumut-resmikan-kas-titipan-di-tebingtinggi> (Diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 17.14 WIB)
15. <http://harian.analisadaily.com/sumut/news/bi-resmikan-kas-titipan-di-balige/228213/2016/04/08> (Diakses pada 2 November 2016 pukul 11.01 WIB)
16. <http://sumut.antaranews.com/berita/115848/bi-pematangsiantar-buka-layanan-penukaran-uang-pecahan> (Diakses pada 3 November 2016 pukul 10.33 WIB)

daerah operasi meliputi pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar di mana masyarakat luas banyak melakukan transaksi. Daerah operasi kas mobil Bank Indonesia Medan, selain pasar-pasar yang ada di dalam kota Medan yang mencakup 24 pasar, juga meliputi daerah-daerah luar kota seperti Binjai, Sidikalang dan bahkan sampai Kutacane yang termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Daerah Kutacane tetap dilayani oleh Bank Indonesia Medan karena dari segi kondisi geografis dan sarana perhubungan lebih memungkinkan bila dilayani Bank Indonesia Medan dibandingkan bila harus dilayani oleh Bank Indonesia Lhokseumawe. Selain itu, kas keliling juga dilaksanakan untuk pelayanan penukaran yang bersifat *wholesale* (partai besar), antara lain kepada BPR dan kantor pos di daerah-daerah pedalaman.

Tabel 8.4

#### Frekuensi Kas Keliling di setiap wilayah operasional Sumatera Utara

Kas Mobil/Kas Keliling	Dalam Kota	Luar Kota	Dropping
1980/1981	208 kali	52 kali	n.a
1981/1982	208 kali	52 kali	4 kali
1982/1983	260 kali	104 kali	4 kali
1983/1984	312 kali	104 kali	4 kali
1984/1985	312 kali	156 kali	4 kali
1985/1986	204 kali	132 kali	n.a
1986/1987	216 kali	144 kali	n.a
1987/1988*	n.a	n.a	n.a
1989/1990*	n.a	n.a	n.a
1990/1991	69 kali	75 kali	n.a
1991/1992	151 kali	98 kali	n.a
1992/1993	214 kali	98 kali	n.a
1993/1994	54 kali	43 kali	n.a

Sumber: Arsip Bank Indonesia Medan, Program Kerja Bank Indonesia Cabang Medan (1980-1989) dan Nota Penyerahan Pemimpin Cabang/Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara (1990-1993)

Kegiatan kas mobil tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi dilakukan juga oleh bank-bank pelaksana atau bank-bank umum. Perbedaannya terletak pada sasaran dari kegiatan tersebut. Bank Indonesia sasarannya adalah masyarakat luas secara keseluruhan dengan maksud untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tersedianya uang kartal yang bersih serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan sasaran kegiatan kas mobil bank pelaksana terbatas pada nasabah bank yang bersangkutan, seperti pelayanan penarikan dan atau penyeteroran tabungan serta jasa-jasa perbankan lainnya yang semuanya dimaksudkan sebagai upaya untuk melayani para nasabah dalam masa persaingan pelayanan jasa bank yang semakin ketat.

Peranan penting lain Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah dalam pengendalian inflasi untuk wilayah Sumatera Utara. Secara nasional, pada masa Orde Baru penanganan inflasi di daerah dilaksanakan oleh setiap instansi dalam Pemerintah Daerah, misalnya Departemen Keuangan, melalui programnya masing-masing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia saat itu pun terlibat dalam penanganan inflasi, meskipun tidak langsung bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan belum ada sinergis dalam pelaksanaan langkah penanganan inflasi. Barulah setelah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ tertanggal 2 April 2013 tentang "Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah", program-program pengendalian inflasi di daerah tersinergikan. Dengan demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia berdasarkan data-data dan analisis moneter yang dimiliki, melaksanakan salah satu tugasnya sebagai pemberi saran bagi pemerintah daerah sebagai wakil ketua dalam TPID. Tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia ini dalam rangka pengendalian inflasi memperlihatkan bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia tidak dapat dipungkiri masih berinteraksi langsung dengan sektor sektor riil.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara se-

bagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengendalikan laju inflasi pada tingkat wajar. Hal ini dilaksanakan untuk mempertahankan daya saing barang produksi dalam negeri di pasaran luar negeri dan terhadap barang impor. Tim ini melakukan berbagai upaya sinergis dalam menyusun kebijakan moneter yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal untuk membatasi permintaan.

Setiap tahunnya, sebagai salah satu program pengendalian inflasi, TPID Sumatera Utara mencanangkan program stabilitas harga. Khususnya sejak 2010, program stabilitas harga tidak hanya dilakukan untuk komoditas yang krusial tetapi juga komoditas yang memiliki derajat persistensi inflasi tinggi. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia membentuk klaster-klaster komoditas dengan persistensi inflasi tinggi agar pasokan dan kualitas dari komoditas tersebut terus meningkat. Salah satu klaster yang dibangun saat itu adalah cabai.<sup>17</sup>

Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai bagian dari TPID turut serta mengawal inflasi di Sumatera Utara dengan merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah. Misalnya pada 2012, dirumuskan langkah-langkah tersebut, yakni optimalisasi pemantauan harga barang-barang kebutuhan pokok dan penyumbang inflasi terbesar; pemanfaatan riset mengenai inflasi dan harga, terutama terkait dengan produksi, distribusi dan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga; peningkatan manajemen ekspektasi masyarakat dan komunikasi publik; pemantauan harga pangan dan menjaga kelancaran pasokan barang-barang kebutuhan pokok; dan percepatan pembangunan infrastruktur.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan, TPID se-provinsi Sumatera Utara telah mencetuskan beberapa komit-

17. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara*, Triwulan III, 2010, hlm. 65.

18. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara*, Triwulan I, 2012, hlm. 40.

men pengendalian inflasi dengan mengacu pada kerangka prinsip 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi untuk menghindari ekspektasi yang salah.<sup>19</sup>

Di Provinsi Sumatera Utara, TPID tingkat Kota/Kabupaten yang telah terbentuk hingga 2013 sejumlah 20 TPID Kota/Kabupaten, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Kabupaten Sedang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Tebing Tinggi, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batu Selatan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Langkat.

Pada 2014, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan dinobatkan sebagai TPID terbaik dalam hal pengendalian inflasi 2014. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada 27 Mei 2015 di Jakarta. Penghargaan diberikan Jokowi pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI TPID.

## **Tantangan dan Peluang**

Era globalisasi yang terjadi saat ini membawakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam hal tata pengelolaan uang di Indonesia. Sebagai otoritas yang berwenang dalam pengelolaan moneter di Indonesia, Bank Indonesia menghadapi globalisasi dengan penuh persiapan. Telah lebih dari satu abad Bank Indonesia – sejak masa DJB – melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan bersama-sama pemerintah menata dan mengelola ekonomi moneter di Indonesia. Untuk menghadapi globalisasi yang

19. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara*, Triwulan II, 2015, hlm. 30.

terjadi, Bank Indonesia berusaha untuk melakukan beberapa upaya memperkuat ekonomi Indonesia. Integrasi yang kuat ke dalam rantai nilai perdagangan global membawa Indonesia ke dalam arena persaingan global antar negara di dunia.

Dalam keseluruhan spektrum kebijakan publik di tanah air, Bank Indonesia memiliki peran khusus. Peranan Bank Indonesia berfokus pada tiga elemen penopang kesinambungan pembangunan ekonomi, yaitu 1) stabilitas moneter, 2) stabilitas sistem keuangan, dan 3) terselenggaranya sistem pembayaran yang handal.<sup>20</sup>

Dalam hal stabilitas moneter, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di Indonesia. Upaya BI dalam menghadapi tantangan dari usaha pengendalian harga adalah melakukan beberapa kerjasama baik dengan Pemerintah maupun kerjasama internasional. Bank Indonesia tetap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejalan dengan kondisi bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan tetapi juga dari sisi penawaran. Koordinasi juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif melakukan

*Dalam keseluruhan spektrum kebijakan publik di tanah air, Bank Indonesia memiliki peran khusus. Peranan Bank Indonesia berfokus pada tiga elemen penopang kesinambungan pembangunan ekonomi, yaitu (a) stabilitas moneter, (b) stabilitas sistem keuangan, dan (c) terselenggaranya sistem pembayaran yang handal*

20. Pidato Gubernur Bank Indonesia pada Rapat Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014, diunduh dari <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Documents/BD%202014%20Indonesia.pdf>. Diakses pada 4 November 2016 pukul 09.30 WIB

kerjasama dengan bank sentral dan lembaga keuangan lainnya, baik di tataran bilateral, regional maupun internasional.

Seperti seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada tingkat daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi terus berusaha untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Utara dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut koordinasi antara berbagai elemen di dalam TPID, baik pihak Bank Indonesia maupun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus terus diperkuat.

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh Bank Indonesia adalah upaya menjadikan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi di Indonesia. Upaya tersebut telah tertuang ke dalam Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 yang menegaskan kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi yang dimaksud pada peraturan tersebut ialah setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya. Peraturan ini berlaku untuk transaksi tunai yang menggunakan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran serta transaksi non tunai yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara non tunai.<sup>21</sup>

Di bidang sistem pembayaran, tantangan strategis yang harus dihadapi oleh Bank Indonesia adalah menerbitkan beberapa kebijakan dalam sistem pembayaran pada transaksi keuangan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan agar sistem pembayaran In-

21. Arsip Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

donesia dapat berjalan dengan lancar, aman dan efisien, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di antaranya adalah menerbitkan ketentuan mengenai penggunaan teknologi chip dan *Personal Identification Number* (PIN) pada kartu ATM dan kartu debit. Dengan berlakunya ketentuan ini, penerbit kartu ATM/Debet di Indonesia diwajibkan untuk mengoperasikan kartu ATM/Debet dengan sistem chip paling lama tanggal 31 Desember 2015. Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, terutama mengenai kerjasama penyelenggara APMK dengan pihak lain, khususnya dalam pelaksanaan penagihan kartu kredit, serta pengetatan persyaratan untuk memperoleh kartu kredit. Selain itu, pengembangan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System (BI-SSSS) Generasi II, peningkatan efisiensi pengelolaan rekening Pemerintah, dan upaya pembentukan National Payment Gateway (NPG) juga terus dilakukan. Sementara kebijakan pengedaran uang tetap ditujukan untuk mendukung ketersediaan uang rupiah dalam nominal yang cukup serta layak edar, serta meningkatkan layanan kas sehingga dapat menjangkau wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Selain itu, Bank Indonesia dan pemerintah terus berusaha untuk menggalakkan transaksi non tunai. Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society/lcs*). Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pengurangan penggunaan uang tunai di Indonesia serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peredaran uang palsu, Bank Indonesia mencanangkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Dalam meluncurkan gerakan ini BI bekerja sama dengan pihak perbankan dan pemerintah. GNNT ditujukan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Dari segi efisiensi, gerakan ini mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak uang.

Latar belakang dari penerapan kebijakan ini adalah saat ini kondisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dalam hal pembayaran dengan kartu uang elektronik. Di Indonesia, pembayaran tunai transaksi ritel masih mencakup 99,4%, sementara transaksi non tunai baru mencapai 0,6% dari total transaksi ritel yang terjadi. Kondisi yang paling dekat dengan Indonesia adalah Thailand di mana transaksi ritel tunai masih 97,2%. Negara terbaik dalam penggunaan non tunai di Asia Tenggara adalah Singapura di mana pembayaran tunai hanya sebesar 55,5% dari total transaksi ritel.<sup>22</sup>

Di Sumatera Utara, Bank Indonesia bersama pihak perbankan terus mensosialisasikan Gerakan Nasional Non Tunai di Sumatera Utara. Seperti pada 29 Agustus 2014, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah IX Sumatera Utara-Aceh bersama lima bank, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA) dan Bank CIMB Niaga melakukan sosialisasi Gerakan Non Tunai di kawasan kampus Universitas Sumatera Utara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran.<sup>23</sup>

Selain terdapat tantangan, terdapat pula berbagai hambatan dalam upaya Bank Indonesia dalam tata kelola moneter di Indonesia.

22. *Majalah Gerai Info BI Edisi 50 Tahun 2014*, hlm. 2. Diunduh dari [http://www.bi.go.id/id/publikasi/gerai-info/Documents/GeraiInfoBI\\_5014.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/gerai-info/Documents/GeraiInfoBI_5014.pdf) pada 4 November 2016 pukul 13.30 WIB

23. <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/01/114805/bi-dan-perbankan-sosialisasikan-gerakan-non-tunai-di-usu/> diakses pada 4 November 2016 pukul 15.00 WIB

Salah satu hambatan dalam upaya tersebut adalah keengganan masyarakat untuk beralih menggunakan uang non tunai dalam melakukan transaksi. Masyarakat Sumatera Utara lebih merasa nyaman apabila membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika mereka akan melakukan kegiatan transaksi.

Penggunaan transaksi non tunai masih sangat minim akibat dari ketimpangan teknologi antara kota dan wilayah pedesaan. Di kota-kota besar, kondisi teknologi sudah memungkinkan untuk melakukan transaksi non tunai yang amat bertumpu pada teknologi informasi. Sehingga penerapan kebijakan tersebut menjadi mudah diimplementasikan. Sementara di pedesaan, keterbelakangan kecanggihan teknologi dan ketidakmerataan infrastruktur menjadi penyebab penerapan kebijakan non tunai sulit untuk dilakukan. Selain itu, tingkat pengetahuan dan penguasaan penduduk terhadap teknologi informasi amat mempengaruhi kemauan penduduk untuk melakukan transaksi non tunai. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi di pedesaan, maka upaya Bank Indonesia bersama pemerintah dalam mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai akan mampu berjalan dengan baik.

Selain itu terdapat pula hambatan budaya dalam pengelolaan peredaran uang di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Di wilayah Nias misalnya, penduduk Nias menganggap kepemilikan uang dalam jumlah banyak merupakan patokan kekayaan seseorang. Semakin banyak seseorang memiliki uang tunai, maka masyarakat akan semakin menganggap orang tersebut sebagai orang kaya. Hal ini membuat penduduk Nias enggan untuk menyetorkan uangnya ke bank-bank yang ada di wilayah itu. Hambatan budaya seperti ini harus ditanggapi secara bijak, terutama dengan melakukan sosialisasi tentang resiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak serta potensi peredaran uang palsu kepada masyarakat secara intensif.

Satu hal penting yang harus menjadi perhatian Bank Indonesia,

terutama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara adalah keterbatasan akses penduduk terhadap perbankan akibat dari kondisi geografis Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara yang luas dengan kontur geografi yang beragam, membuat perbedaan akses penduduk terhadap perbankan. Di kota-kota besar, akses perbankan dapat mudah diakses oleh penduduk, sehingga penduduk mendapatkan informasi mengenai perbankan dengan mudah. Hal yang berbeda terjadi pada penduduk wilayah di luar kota-kota besar, terutama di pedalaman Sumatera Utara. Kondisi geografis menjadi hambatan bagi pihak Bank Indonesia dan perbankan untuk menyebarluaskan aksesnya.

Untuk menanggulangi keterbatasan akses perbankan di Sumatera Utara, salah satu cara yang digunakan oleh perbankan di Sumatera Utara adalah dengan melaksanakan kegiatan bank keliling dengan menggunakan mobil. Melalui bank keliling ini, bank-bank berusaha menjangkau penduduk di wilayah pedalaman untuk mempermudah akses perbankan. Penduduk dapat melakukan simpanan dan penarikan, serta membuka tabungan baru tanpa harus mendatangi kantor cabang bank terdekat.

Hal penting lain yang patut diperhatikan dalam perkembangan ekonomi adalah *financial inclusion* (keuangan inklusif)<sup>24</sup> di Indonesia. Di Sumatera Utara, upaya memperkenalkan keuangan inklusif menciptakan beberapa peluang dalam pengembangan ekonomi dan dunia perbankan. Belum akrabnya masyarakat Sumatera Utara dengan sistem perbankan, terutama masyarakat wilayah pedalaman, menciptakan peluang dalam mengembangkan keuangan inklusi.

Karakteristik Sumatera Utara yang salah satunya bertumpu pada

24. *Inklusi keuangan (financial inclusion)* adalah suatu pemikiran untuk mengembangkan akses perbankan pada masyarakat luas. Pemikiran ini menekankan pada keikutsertaan perbankan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses yang lebih mudah bagi rakyat banyak, khususnya keluarga kurang mampu, kepada lembaga keuangan atau lembaga bank di manapun adanya.

sektor perkebunan menciptakan peluang melalui peningkatan akses pada perbankan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan yang biasanya berada di wilayah yang jauh dari kota. Bank Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk berkolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk membuat pusat-pusat penarikan uang yang didekatkan dengan perkebunan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat wilayah perkebunan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sistem pembayaran di wilayah perkebunan.

Di Sumatera Utara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Utara meminta perbankan terus memperluas layanan keuangan mereka, terutama untuk sembilan kabupaten/kota. Pasalnya, kesembilan daerah ini masih memerlukan pendalaman layanan perbankan. Kesembilannya yakni Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir dan Gunung Sitoli.<sup>25</sup>

Peluang lain yang mampu dimanfaatkan dari perluasan akses perbankan bagi masyarakat Sumatera Utara adalah dengan memperbanyak pembukaan Laku Pandai.<sup>26</sup> Laku Pandai dapat dijadikan solusi untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat tanpa bank harus mendirikan kantor di wilayah tersebut. Melalui Laku Pandai, masyarakat dapat melakukan pembayaran-pembayaran non tunai dengan mudah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menggalakkan penggunaan transaksi non tunai melalui program GNNT.

Secara nasional, pada Mei 2016, terdapat total 1.216.952 agen Laku Pandai di seluruh Indonesia. Sementara itu, telah ada 2.721 agen Laku Pandai di Sumatera Utara.<sup>27</sup> Pihak OJK menargetkan akan

25. <http://koran.bisnis.com/read/20160721/445/567921/9-daerah-butuh-laku-pandai> diakses pada 8 November 2016, pukul 10.00 WIB

26. Laku Pandai adalah singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

27. <http://koran.bisnis.com/read/20160721/445/567921/9-daerah-butuh-laku-pandai>

ada 6.000 agen baru di Sumatera Utara pada 2016 dari tahun sebelumnya sekitar 2.700 agen. Berkaitan dengan hal tersebut tiga bank besar yaitu BRI, Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dan Bank Central Asia (BCA) diharapkan dapat mendukung program ini.<sup>28</sup>

diakses pada 8 November 2016, pukul 10.00 WIB

28. <http://medan.tribunnews.com/2016/05/17/ojk-targetkan-6000-agen-laku-pandai-dari-tiga-bank-di-sumut> diakses pada 8 November 2016 pukul 10.30 WIB

## Boks 6

### MESIN CETAK ORIDA NIAS

Mesin cetak uang ini pernah digunakan selama dua tahun untuk mencetak Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) Nias atau ORIN pada masa kepemimpinan Residen Roos Telaumbanua. Penerbitan ORIDA Nias ini dilatar belakangi oleh terbatasnya jumlah Oeang Republik Indonesia (ORI) yang sampai ke Nias sekaligus sebagai simbol perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda. Pada tahun 1947, PR Telaumbanua meminta izin kepada pemerintah agar Nias diberi izin untuk mencetak uang sendiri. Mesin cetak uang ini dibeli dari China dengan merek Yao Kung Fee dengan desain yang sederhana dan mesin digerakkan secara manual.



Selain mesin cetak ini, masih banyak mesin-mesin cetak lain yang memiliki peranan besar dalam pemenuhan uang di daerah-daerah di Indonesia. Perlu dicatat bahwa situasi pencetakan uang yang terjadi saat itu jauh dari kata baik. Selain alat cetak yang dimiliki masih sangat sederhana, juga tidak dicetak dalam kondisi yang nyaman dan aman. Mereka seringkali harus memindahkan mesin-mesin cetak ini dari satu tempat ke tempat lain yang dirasa lebih aman guna menghindari kejaran Belanda. Seringkali pemindahan mesin ini melalui medan-medan yang berat demi keberlangsungan ketersediaan uang di daerah tersebut.

# 9

## Heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

### **Keragaman Heritage Bangunan Eropa di Kota Medan**

Provinsi Sumatera Utara sejak awal pembentukannya pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948, tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi yang terdiri dari: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan Sumatera Utara terdiri beberapa keresidenan: Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Dari keputusan tersebut, ditetapkan Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Penetapan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena dilatarbelakangi oleh status Kota Medan sebagai kota penting di Pulau Sumatera yang telah mengalami perkembangan sejak berabad yang lalu. Menurut catatan sejarah, eksistensi Kota Medan pertama kali ditemukan sejak tanggal 1 Juli 1590.<sup>1</sup> Prakiraan waktu berdirinya ini didasarkan pada tempat pusat pemerintahan Kerajaan Haru yang pernah berdiri di sekitar wilayah Timur Pesisir Pantai Sumatera pada akhir abad ke-13.

Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Tome Pires dalam karyanya *Suma Oriental* yang menyatakan bahwa kerajaan ini adalah penguasa terbesar di wilayah Sumatera yang memiliki wilayah kekuasaan luas dan memiliki pelabuhan yang sering dikunjungi para

1. Istilah Medan berasal dari Bahasa Tamil Moidhan atau Moidhana, yang artinya adalah tanah lapang atau tempat yang luas.

pedagang asing.<sup>2</sup> Selanjutnya terjadi peralihan kekuasaan di Kota Medan, dari yang sebelumnya dipimpin Kerajaan Haru kemudian digantikan oleh Kesultanan Melayu Deli pada 1623. Pendiri kesultanan tersebut yang kemudian menetapkan Kota Medan sebagai salah satu pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Deli.<sup>3</sup> Kronologis tentang perjalanan Kota Medan terus berlanjut di abad ke-19 pada masa Hindia Belanda, melalui penelusuran seorang Penjelajah Inggris yang menemukan sebuah kampung yang dinamakan Kampung Medan dalam kunjungannya ke Deli pada 1883.

Berselang empat tahun kemudian, status Medan ditingkatkan menjadi sebuah kota dan ditetapkan menjadi Ibukota Karesidenan Sumatera Timur sekaligus Ibukota Kesultanan Deli pada 1887. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum awal abad ke-19, Keresidenan Sumatera Timur tidak dijadikan oleh pemerintah pusat di Batavia sebagai wilayah prioritas yang dianggap strategis dengan sumber daya alam berlimpah. Prioritas pemerintah saat itu masih berpusat di Pulau Jawa dan Batavia sebagai sentral perekonomiannya.

Sebelum kedatangan Belanda, wilayah Sumatera Timur merupakan hutan belantara yang memiliki keuntungan ekonomis yang kecil.<sup>4</sup> Kondisi mulai berubah seiring dengan ditemukannya lahan-lahan perkebunan tembakau yang subur di kawasan Deli pada menjelang akhir abad ke-19. Popularitas tembakau Deli mulai mengemuka setelah contoh tembakau dibawa ke Rotterdam untuk diuji kualitasnya. Setelah pengujian tersebut pemerintah lalu me-

2. Terdapat perbedaan pendapat mengenai letak geografis dari Kerajaan Haru. Winstedt menerangkan bahwa Haru berlokasi di wilayah Deli, sementara menurut Groeneveldt Haru terletak di muara Sungai Barumun (Padang Lawas), dan Gilles menafsirkannya ada di wilayah Belawan.
3. Pendiri Kesultanan Melayu Deli tersebut bernama Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, dan mendirikan pusat pemerintahannya di wilayah pada saat itu dinamakan dengan Tanah Deli.
4. Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture an Export Growth : An Economic History of East Sumatra, 1863- 1942*, (Winsconsin: The University of Winsconsin, 1969), hlm. 1-2

ngambil kesimpulan bahwa ternyata daun tembakau dari Deli sangat baik dan berkualitas tinggi untuk digunakan sebagai pembungkus cerutu, dan oleh sebab itu perhatian terhadap pembangunan Kota Medan mulai menarik pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1870 sendiri adalah dasar dari mulai berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta untuk memanfaatkan wilayah Hindia Belanda sebagai sebuah tempat eksploitasi baru dibidang perkebunan.<sup>5</sup>

Selanjutnya kemajuan pembangunan Kota Medan juga mulai terasa sejak munculnya usaha perkebunan sebagai salah satu komoditas utama di Tanah Deli, Sumatera Timur. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perintis dan perusahaan pertama yang terlibat dalam mengelola komoditas tersebut dikenal dengan nama Deli Maatschapij, yang pengusahanya adalah seorang Belanda yang bernama Nienhuys. Deli Maatschapij pada saat itu telah mampu memproduksi jenis tembakau Deli yang kualitasnya sangat baik hingga terkenal hingga ke seluruh Eropa. Pesatnya perkembangan perekonomian juga berhasil mengubah Deli menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia Bagian Barat yang ramai dengan para pelintas. Bahkan Deli sempat mendapatkan julukan sebagai "*Het Dollar land*". Perluasan lahan perkebunan pun mulai dilakukan seperti yang terjadi di daerah Martubung, Sunggal pada 1869, serta sungai Beras dan Klumpang pada 1875.

Komoditas tembakau ini juga yang akhirnya mengangkat citra Kota Medan hingga berhasil membawanya ke arah masa kegemilangan ekonomi Kota Medan. Sebagai dampak dari peningkatan ekonomi adalah banyak pedagang dan pengusaha asing yang berkunjung ke Kota Medan untuk mengadakan perluasan usaha perkebunan di kota tersebut. Tidak hanya itu, para pengusaha tembakau dari Eropa juga banyak yang ke Kota Medan dan meminta Kesultanan Deli untuk membangun perkebunan baru di lahan-lahan

5. Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditia media, 1992), hlm. 22.

yang saat itu memang berada di bawah penguasaan Sultan. Seiring dengan kesuksesan perdagangan dari hasil perkebunan Deli Maatschappij di dunia internasional, Kota Medan mulai berkembang menjadi kota perdagangan dan perekonomian di bawah kendali Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya pemerintah bekerjasama dengan pengusaha swasta dan Kesultanan Deli, dan mulai memberikan intervensi yang lebih kuat terhadap pembangunan Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Timur.

Pembangunan tersebut diwujudkan melalui pendirian infrastruktur kota yang diharapkan dapat menunjang fungsi kota sebagai tempat penghasil komoditas ekspor yang laku dijual di pasaran internasional, sepertinya hal komoditas tembakau. Pembangunan infrastrukturnya pun tidak hanya terbatas pada sarana-sarana logistik, seperti pelabuhan dan kantor-kantor perdagangan, namun juga hingga menyentuh ke tatanan yang paling bawah dalam kehidupan masyarakat di Kota Medan. Dengan tujuan utama untuk memenuhi fungsi-fungsi fasilitas perkotaan sehingga menunjang proses pengerukan sumber daya alam, pemerintah pusat banyak mendirikan bangunan-bangunan publik dengan berciri khas arsitektur kolonial. Bangunan-bangunan penting juga banyak yang turut didirikan dengan menggunakan rancangan-rancangan arsitektur yang telah memiliki reputasi internasional pada masa itu. Bangunan-bangunan penting yang pada akhirnya menjadi ikon dari Kota Medan di antaranya mencakup Gedung London Sumatera, Kantor Pos, RS Tembakau Deli (RSTD), Stasiun Kereta Api Medan, Gedung Bank Mandiri (Bank Eksport-Import), Gedung Balai Kota, Hotel Inna Dharma Deli, Jakarta Lloyd (Asuransi Jasindo), Gedung AVROS dan Kantor PTPN IX.

## **Ikon Heritage Bangunan Eropa di Kota Medan**

### **Gedung London Sumatera**

Gedung lima lantai yang disingkat dengan istilah Lonsum ini pertama kali dibangun pada tahun 1906 oleh perusahaan perkebunan karet asal Inggris yang bernama H&C (Harrisons & Crosfield Company). Namun perusahaan besar yang didirikan oleh tiga orang pengusaha Inggris<sup>6</sup> ini juga bergerak di bidang importir dan perdagangan kopi, sehingga fungsi awal gedung ini memang akan dijadikan sebagai kantor perdagangan dan perkebunan. Pembangunan gedung Lonsum sendiri pada awalnya berkaitan erat dengan proses perluasan perkebunan di Sumatera Timur oleh H&C, yang didorong oleh pemberlakuan kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda mengundang pengusaha (investor) untuk membuka sebanyak mungkin lahan-lahan perkebunan baru di Sumatera Timur, dengan menggunakan sistem yang dinamakan konsesi. Pada akhir abad ke-19 sebelum melonjaknya harga karet semasa Perang Dunia II, H&C memang mulai tertarik untuk mengembangkan investasi usaha perkebunan karet dan mengoperasikan beberapa lahan perkebunan karet baik di Malaysia, Srilanka, Papua, India Selatan hingga ke Pulau Sumatera. Pertimbangan dari H&C untuk kemudian memperluas usaha perkebunannya ke bidang teh, kopi, coklat, dan kelapa sawit adalah karena melihat adanya prospek yang menguntungkan dari penggunaan fungsi lahan perkebunan di Kota Medan yang memang memiliki tingkat kesuburan tanah cukup tinggi.

Lokasi Gedung Lonsum ini berada di Jalan Ahmad Yani (Kesawan) dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa lokasinya cukup strategis mengingat letaknya yang tepat berada tepat di sebelah La-

6. Tiga orang pengusaha tersebut masing-masing bernama Daniel Harrison, Smith Harrison dan Joseph Crosfield.

pangan Merdeka. Gedung Lonsum juga dikelilingi oleh gedung-gedung bersejarah lainnya, seperti restoran, bank, dan kantor-kantor perusahaan dagang. Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah Kesawan merupakan salah satu distrik komersial dan juga pusat ekonomi di kota Medan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Bangunan heritage ini memiliki corak arsitektur kolonial yang jenisnya adalah berbentuk transisi atau sama dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa di masa itu, misalnya seperti bentuk rumah-rumah di London pada abad ke-18 sampai 19.

Pengaruh gaya Eropa yang juga terlihat sangat kental adalah bentuk jendela rumah yang terdapat di sisi kiri dan kanan bangunan. Sementara pengaruh gaya Belanda tercermin dari wujud jendela-jendela panjang dan lebar serta disertai tiang-tiang tangga besar di depan pintu masuknya. Gedung ini terlihat megah dengan gaya bangunan bercorak Neo Klasikal, gaya lama yang mengadopsi arsitektur Yunani. Dibangun dengan lima lantai, gedung yang dahulu bernama Gedung Juliana ini bercat putih krem dan berbentuk simetris dengan dinding atau tembok yang dibuat dengan ukuran tebal. Tidak sebatas itu, Lonsum juga merupakan bangunan pertama di Kota Medan yang telah dilengkapi oleh fasilitas *lift* yang berbentuk seperti sangkar besi bermotif bunga dengan dekorasinya yang berbentuk *art-deco*.

Gedung Lonsum sebelum tahun 1945 digunakan sebagai kantor perusahaan perkebunan H&C kemudian dijual kepada pemerintah Belanda, dan namanya diubah menjadi Juliana Building atau yang disesuaikan dengan nama Ratu Belanda saat itu. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, terjadi peralihan kepemilikan gedung dari H&C kepada Pemerintah Republik Indonesia. Nama London Sumatera pun juga diubah menjadi PT. PP London Sumatera, yang pengelolannya sejak saat itu berada di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia. Pada 1982, H&C kembali menjual sahamnya kepada Sime Darby yang merupakan salah satu investor utama dari pengusaha perkebunan kelapa sawit di Malaysia, hingga puncaknya pada 1994

Gambar 9.1  
Gedung London Sumatera, Medan (2016)



Sumber: koleksi Penulis

H&C menjual semua aset perkebunannya di Sumatra kepada London Sumatra Plantations Ltd (PT. London Sumatra Tbk). Pada akhirnya hingga saat ini, gedung Juliana ini kemudian dijadikan sebagai kantor London Sumatra Tbk dan sekaligus sebagai kantor British konsulat dan perpustakaan British council.

### **Kantor Pos**

Lokasi dari kantor pos Kota Medan ini cukup strategis karena terletak di titik nol km Kota Medan dan oleh karena itu menjadikan tempat ini mudah dijangkau dari pusat kota. Bangunan ini mulai dibangun sejak 1909 dan baru selesai pembangunannya pada 1911 di bawah

kepemimpinan Residen J. Ballot. Arsiteknya adalah Orang Belanda yang bernama Ir. S. Snuyf dan berasal dari Biro Usaha BOW (*Burgerlijk Openbare Werken*), atau setingkat dengan Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda. Corak arsitektur kantor pos ini adalah mengikuti pola gedung Eropa kuno sehingga menimbulkan kesan megah di bagian luarnya. Fungsi utama dari kantor pos ini selain untuk melayani kepentingan komunikasi<sup>7</sup> penduduk Kota Medan, juga dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk bertukar informasi dengan sesama penduduk daerah lain di Pulau Sumatera atau Jawa.

Bangunan kuno yang terletak di Jalan Balai Kota ini berhadapan dengan *Hotel De Boer* (Hotel Inna Dharma Deli) dan *de Esplanade* (Lapangan Merdeka), yang juga merupakan salah satu ikon Kota Medan saat itu. Bangunan yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda ini dibangun dengan gaya Kolonial Tropis, dengan menggunakan struktur konstruksi bangunan geometris. Lantai dari gedung tua ini dicor menggunakan beton dengan menggunakan material jenis marmer, serta dilindungi oleh genteng yang berbentuk kuda-kuda kayu serta memakai tiang beton yang bertulang. Sementara warna putih dominan yang menjadi latar dari kantor pos ini memperlihatkan keunikan bangunan ini, yang juga disertai dengan dinding yang terbuat dari bahan baku bata (plester). Bentuk bangunan kantor pos ini sengaja dibentuk tinggi menjulang supaya mengikuti pola bangunan-bangunan kolonial pada umumnya, dan dengan maksud supaya sirkulasi udara di dalam ruangan kantor pos ini dapat menjadi lebih teratur dan baik.

Keunikan lain juga terdapat pada sisi-sisi depan dari bangunan, yang memperlihatkan logo burung merpati dalam bentuk bola dunia yang di masa Hindia Belanda memang merupakan logo khas dari pelayanan jasa kantor pos. Selanjutnya pada sisi kanan gedung juga terlihat tulisan "ANNO 1911", yang dapat ditafsirkan bahwa bang-

7. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut berupa pengiriman barang, uang, surat dan wesel.

Gambar 9.2  
Gedung Kantor Pos Medan (2016)



Sumber: koleksi Penulis

unan tersebut telah berdiri sejak 1911. Bangunan megah yang berdiri disudut lapangan merdeka ini sendiri memiliki luas bangunan 1200 M<sup>2</sup> dengan tingginya yang mencapai 20 m, panjang 60 m dan lebar 20 m. Bangunan ini memiliki *vocal point* berupa ruang tengah utama yang berbentuk segi delapan, dengan langit-langitnya berupa dua kubah sehingga memperlihatkan kesan yang megah di atasnya. Lokasinya pun juga strategis karena berada tepat disudut persimpangan jalan yang menghadap ke arah air mancur yang dulunya merupakan air mancur Nienhuys.

Meskipun tidak mengalami banyak perubahan bentuk, namun terjadi perbedaan dalam hal pemanfaatan fungsi-fungsi ruangan di dalam gedung. Misalnya saja di ruang setengah lingkaran yang ter-

dapat pada ruang utama. Fungsi ruangan dengan loket-loket berbentuk jendela oval yang di masa kolonial diperuntukkan sebagai tempat aktifitas surat-menyurat, kini sudah berubah fungsi menjadi tempat pengambilan uang dan tempat pengurusan administrasi para pegawai pensiunan Kantor Pos. Namun pada akhirnya meskipun kantor pos dibangun pada masa kolonial, namun desain dari bangunan ini sebenarnya telah berbentuk modern. Sebabnya adalah karena tidak lagi menunjukkan adanya paduan sulur-sulur ataupun bentuk-bentuk lengkungan seperti yang terdapat di Gedung Bank Indonesia ataupun Gedung Balai Kota.

### **Stasiun Kereta Api Medan**

Pembangunan jaringan Kereta Api di tanah Deli merupakan inisiatif J.T. Cremer yakni manajer perusahaan Deli (Deli Maatschappij) yang menganjurkan agar jaringan Kereta Api di Deli segera mungkin dapat di bangun dan direalisasikan, mengingat pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan di Deli.<sup>8</sup> Tujuan utama lainnya adalah untuk mendukung proses perjalanan logistik perusahaan, sehingga dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan dalam proses pengiriman komoditas maupun barang-barang lainnya. Stasiun dan rel kereta api dipilih sebagai opsi terbaik karena jalur transportasi sungai dinilai cukup lambat dalam proses angkutan hasil produksi perkebunan menuju pelabuhan Belawan.<sup>9</sup> Proses pembangunan fasilitas transportasi ini memang cukup unik dan menarik, mengingat seluruh proses pengerjaannya dilakukan oleh perusahaan perkebunan Deli yang pada masa itu dikerjakan oleh Deli Spoorweg Maatschappij.<sup>10</sup> Deli Spoorweg Maatschappij se-

8. Kartono Kartodirjo, 1987, *Sejarah Indonesia dari imperium ke emporium*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka umum), hlm. 687
9. Hadiwandoyo, Sauki, Dkk, *Perbudakan abad 18-20 di Hindia Belanda kasus koeli kontrak*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia)
10. Merupakan suatu jawatan kereta api yang mendukung usaha perkebunan dan juga mengatur sarana transportasi umum kereta api.

Gambar 9.3  
Stasiun Kota Medan (2016)



Sumber: koleksi Penulis

bagai perusahaan swasta ternyata menyumbangkan dasar pembangunan ekonomi wilayah Pantai Timur Sumatera, di mana kegiatannya berawal dan berakhir sebagai hubungan politik antara Indonesia-Belanda.<sup>11</sup> Pembangunan jaringan rel kereta api tersebut didorong oleh pemberlakuan UU Agraria Tahun 1870 sehingga kemudian memungkinkan pengusaha-pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah dalam waktu yang relatif lama. Sewa tanah itu tidak hanya terbatas di sektor perkebunan, namun juga termasuk aspek

11. Jacobus Weisfelt, *De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in a Economische Ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra*, (Rotterdam: Broder Offset NV, 1972), hlm. 212–219.

transportasi di dalamnya.

Minimnya fasilitas jalur transportasi darat dituding sebagai salah satu sebab dari munculnya perlambatan proses angkutan hasil produksi perkebunan yang akan dikirimkan menuju tujuan akhir ke Pelabuhan Belawan. Di sisi lain percepatan pembangunan jalur rel kereta api juga didorong oleh perkembangan pesat pelabuhan Belawan, yang di periode sebelum 1870 sudah berkembang menjadi bandar pelabuhan kapal terbesar di Sumatera Timur. Dalam masa itu, seluruh hasil komoditas dari hasil-hasil perkebunan di Sumatera Timur di ekspor dan dikirimkan ke Eropa melalui kapal-kapal dagang yang banyak singgah dan melintas di pelabuhan Belawan. Kondisi-kondisi tersebut yang kemudian menuntut adanya pembangunan jaringan rel kereta api yang dapat menghubungkan seluruh daerah-daerah perkebunan di Sumatera Timur.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda, maka penetapan dan permohonan konsesi dari perusahaan-perusahaan swasta untuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Belawan-Medan-Delitua-Timbang Langkat (Binjai), mulai direalisasikan pada tanggal 23 Januari 1883. Pada bulan Juni 1883 izin konsesi tersebut dipindahtangkankan pengerjaannya, dari yang semula di bawah Deli Matschappij kemudian digantikan oleh Deli Spoorweg Matschappij (DSM).<sup>12</sup> Proses pembangunan ini memerlukan waktu selama tiga tahun dan baru diresmikan penggunaannya untuk jalur Medan-Labuhan oleh presiden komisaris DSM, Peter Wilhem Janssen, pada tanggal 25 Juli 1886.<sup>13</sup> Perluasan jaringan stasiun ini juga sejalan dengan ekspansi pengusaha-pengusaha perkebunan yang memperluas cakupan wilayahnya ke arah selatan Sumatera Timur.

12. Darmawati Halawa, *Perkembangan Transportasi Kereta Api di Perkebunan Deli (Sumatera Utara) Tahun 1880-1891*, (Sidoarjo: Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo, 2013), hlm. 2.

13. Muhammad Rani, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia*, (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1978), hlm. 44.

Pada 1888 kawasan-kawasan penting di Belawan, Deli, dan Binjai telah dapat dilalui oleh jaringan rel kereta api. Pada 1902 pembangunan rel kereta api lalu dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan Lubuk Pakam-Bangun Purba, dan sudah dapat dipergunakan sejak 1904. Selanjutnya pada 1916 mulai dibangun jaringan Kereta Api yang dapat menghubungkan kawasan Medan-Siantar, yang di periode itu telah menjadi salah satu pusat perkebunan teh. Ekspansi jaringan rel terus berlangsung dan sejak 1929 hingga 1937 juga mulai dibangun jaringan kereta api yang menghubungkan Kisaran-Rantau Prapat. Pasca kemerdekaan 1945 tepatnya di tahun 1950, Pemerintah Indonesia di bawah presiden Soekarno memutuskan untuk melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset dari perusahaan asing. Sejak saat itu jaringan Kereta Api Deli (DSM) yang berlokasi di Jalan Stasiun Kereta Api No. 1 di Kelurahan Kesawan Medan Barat ini, dialihfungsikan menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api sebelumnya akhirnya berubah nama menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Divisi Regional-I Sumut-NAD.

### **RS Maatschappij – RS Tembakau Deli (PTPN)**

Rumah sakit Maatschappij, yang kini dinamakan dengan Rumah Sakit Tembakau Deli (RSTD) ini sesuai dengan namanya berada di bawah pengelolaan perusahaan Deli Maatschappij, yang bernama lengkap Ziekenhuis Deli Maatschappij. Perusahaan Deli Maatschappij sendiri berpusat di kota Rotterdam ini dan bergerak dalam bidang penyediaan tembakau rokok sejak 1869 di Kota Medan. RSTD ini berbatasan di sebelah timur dengan Sungai Deli, batas di sebelah utaranya adalah RS Kesdam I Bukit Barisan, dan di sebelah batas baratnya adalah Jalan Putri Hijau. Luas dari RSTD ini adalah sebesar 38.619 m<sup>2</sup> atau mencapai 3,8 hektar. RSTD mempunyai enam bangsal dengan kesemuanya dihubungkan dengan koridor-koridor yang luas. Saat melakukan peninjauan ke lapangan, masih ditemukan beberapa papan informasi di setiap bangsalnya, seperti tulisan-tulisan berupa Poli Kardiologi, Ruang PPDS, Unit Chemoter-

Gambar 9.4  
Rumah Sakit Umum Tembakau Deli (2016)



Sumber: koleksi Penulis

apy, Stroke center, dan beberapa ruangan beserta papan nama dokter yang pernah bertugas.

Tidak hanya sebatas itu, RSTD juga memiliki fasilitas instalasi pengolahan limbah cair dan padat medis yang lokasinya berdekatan dengan ruangan dapur dan ruangan cuci. Di dekat ruang *laundry* juga ditemukan beberapa pipa besar yang fungsinya adalah untuk menyambungkan parit yang akan berguna untuk menampung limbah RSTD. Keotentikan dari kondisi bangsal-bangsalnya sendiri masih terjaga keasliannya, yang walaupun terdapat perubahan hanya berupa penggantian seng dan atap. Fasilitas lain dari RSTD adalah berupa ruang bawah tanah yang ujungnya dapat menuju ke Istana Maimun dan kantor direksi RSTD. Pintu ruang bawah tanah ini

berlokasi dekat dari ruang ICU yang kondisinya saat ini sudah ditutup karena telah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar.

Dengan maksud untuk menjamin kesehatan para pegawainya yang memang berjumlah cukup banyak, maka perusahaan memuluskan untuk mendirikan beberapa fasilitas rumah sakit yang memadai. Fasilitas-fasilitas kesehatan ini ditujukan kepada masyarakat sekitar yang bekerja di bawah perusahaan, diantaranya seperti RS Deli Maatschappaij di Putri Hijau, Tanjung Selamat dan di Binjai. Penyediaan dari fasilitas kesehatan ini sudah dirintis sejak 1885, dengan diprakarsai oleh pendirinya yang bernama Mr. Ingerman dan M. J Broedner.<sup>14</sup> Keberadaan dokter asing di rumah sakit ini sudah dimulai sejak 1871 ketika perusahaan mendatangkan sejumlah dokter dari Belanda. Pada masa-masa awal beroperasinya, pihak rumah sakit memberikan keringanan kepada para pasiennya berupa hak khusus dalam potongan harga sebesar 2% apabila telah dirawat selama sebulan lamanya. Pada 1901, terjadi perluasan bangunan di RS Deli Maatschappaij di sisi sayap bangunan dengan maksud untuk mengakomodir pasien-pasien yang menderita penyakit parah. Dalam proyek perluasan itu General Manager dari Deli Batavia Maatschappaij, Tuan Schmid, menyumbangkan dana pribadinya untuk membantu perluasan gedung tersebut.

RSTD sebagai rumah sakit yang pertama kali berdiri di Sumatera Timur dan Hindia Belanda kini sudah tidak lagi beroperasi sejak 2011 dengan alasan selalu merugi. Penutupan RSTD sendiri bukannya tanpa kendala, karena beberapa pegawainya telah melaporkan masalah tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu sejumlah aktivis Kota Medan juga sudah membentuk Aliansi Gerakan Penyelamat RSTD. Sebab utamanya adalah karena adanya laporan dari beberapa mantan karyawan yang mengaku bahwa sejak 2003 pihak

14. Mr. Ingerman menjabat sebagai General Manager di perusahaan Deli Maatschappaij, sementara M. J. Broedner adalah rekannya yang berasal dari perusahaan Dominee.

perusahaan telah melakukan pemotongan gaji yang diperuntukkan untuk luran Dana Pensiun mereka.<sup>15</sup> Namun setidaknya warisan gedung ini sebagai salah satu peninggalan cagar budaya sudah dilindungi keberadaannya oleh UU Nomor 11 tahun 2010, sehingga termasuk sebagai salah satu ikon sejarah kesehatan Kota Medan yang harus dilestarikan oleh pemerintah.

### **Gedung Bank Mandiri (Bank Ekspor-Impor, Bank Exim)**

Peninggalan gedung warisan sejarahnya berikutnya adalah Gedung Bank Ekspor-Impor (Bank Exim) yang saat ini dipakai sebagai Kantor Bank Mandiri. Gedung ini berada tepat di Jalan Balaikota, dan berseberangan dengan Gedung London Sumatera, tepatnya di lingkungan Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan lingkungan VII. Bangunan ini dibangun oleh pemerintah Belanda dengan seorang arsitek bernama Van Oywend. Tujuan awal pendiriannya adalah sebagai kantor Nederlansche Maatschappij yang pada masa penjajahan jepang gedung ini dipakai sebagai kantor Gunseikanbu. Gedung ini dirancang oleh Van Oywend pada 1924 dengan mengacu pada arsitektur Modern Eropa yang menggunakan model atap dari beton, berlantai jenis marmer, dan memakai dinding bata bergaris-garis horizontal di sepanjang dindingnya.

Gedung tua yang berada di persimpangan Jalan Raden Saleh dan Jalan Balaikota ini didominasi dengan warna putih dan saat ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan salah satu situs yang wajib dilindungi di Kota Medan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945 gedung ini diambil alih sebagai kantor Bank Ekspor Impor, dan juga dipakai untuk kantor pemasaran bersama PT Perkebunan Nusantara I sampai IV Cabang Medan. Saat ini pemanfaatan bangunan tersebut digunakan oleh Bank Mandiri cabang Kota Medan.

15. Diakses dari [beritasumut.com/peristiwa/Satma-Gempita-Sumut-Demo-PTPN-II](http://beritasumut.com/peristiwa/Satma-Gempita-Sumut-Demo-PTPN-II), pada 10 November 2016 pukul 11.00 WIB.

Gambar 9.5  
Gedung Bank Mandiri eks-Gedung Bank Expor Impor (2016)



Sumber: koleksi Penulis

### **Gedung Balai Kota**

Gedung heritage bercorak khas kolonial ini didirikan sejak 1908 oleh dua orang arsitek yang juga mendirikan Gedung Bank Indonesia Kota Medan, Hulswit dan Fermont. Sementara desainnya dikerjakan oleh seorang arsitek bernama C. Boon.<sup>16</sup> Pengerjaannya pun masih

16. C. Boon adalah arsitek yang bekerja di Perusahaan Deli Maatschappij sejak 1889 sampai dengan 1911. Awalnya konsep yang diajukan untuk pendirian gedung Balai Kota ini diperuntukkan sebagai kantor Japasche Bank, namun ditolak oleh Direktur Japasche Bank. Sejak saat itu gedung ini dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan sering digunakan sebagai gedung pertemuan untuk para petinggi Belanda yang berada di Kota Medan.

Gambar 9.6  
Gedung Balai Kota Medan (2016)



Sumber: koleksi Penulis

di bawah dari Biro Usaha *N.V.Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam*. Dalam rencana awalnya tempat ini akan dijadikan sebagai Kantor De Javasche Bank Agentschap Medan, namun tidak terealisasi sehingga kemudian beralih fungsi menjadi gedung Balai Kota. Berse- lang lima belas tahun kemudian atau tepatnya pada 1923, gedung ini sempat mengalami renovasi yang dilakukan di bawah komando arsitek Eduard Cuypers.

Desain arsitektur gedung ini bergaya Eropa dan menggunakan pilar-pilar yang bercorak Yunani di bagian depan bangunannya, dengan dilapisi warna serba putih sehingga membuatnya terkesan mewah dan elegan.

Dapat dilihat adanya penebalan-penebalan sebagai unsur dekoratif yang kemudian mempertegas bentuk elemen-elemen pendukung bangunan. Penebalan secara horizontal juga terdapat pada kaki-kaki bangunan sehingga mempertegas pemisahan badan bangunan dengan atapnya. Arsitektur Eropa juga tercermin dari material lantai yang terbuat dari marmer, dan dinding batu bata yang terdapat di atap dan beton. Atapnya sendiri cukup menarik karena memiliki ekspresi arsitektur yang kuat sehingga menjadi pemandangan kota yang sangat menarik dan kontekstual. Tidak sebatas itu, jendela-jendela di gedung ini juga menggunakan lengkungan khas bergaya Romawi dan seperti pada umumnya bangunan-bangunan di Eropa, sebagian dari lantai dasar letaknya berada di bawah tanah. Kombinasi arsitektur bergaya Eropa tersebut semakin dipercantik dengan tambahan menara jam atau lonceng buatan Firma Van Bergen. Lonceng itu sendiri disumbangkan oleh seorang pengusaha sekaligus bankir dan kapiten Cina yang bernama Tjong A Fie.

Pasca kemerdekaan, gedung Balai Kota ini dijadikan sebagai kantor Walikota Medan hingga tahun 2005 silam. Saat ini bangunan tersebut telah beralihfungsi menjadi D'Heritage Cafe yang letaknya berada di dalam kompleks hotel-perkantoran Grand Aston City Hall Medan. Secara keseluruhan gedung ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Gedung ini juga dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Bagi, yang merusak dan mengubah bentuk dan warna cagar budaya bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Meski telah beralihfungsi menjadi kafe, namun arsitektur bangunannya masih tetap terjaga keasliannya hingga saat ini.

### **Hotel Inna Dharma Deli**

Hotel Inna Dharma Deli yang dulunya bernama hotel De Boer beralamat di Jalan Balai Kota No. 2 Kelurahan Kesawan, Kecamatan

Gambar 9.7  
Hotel Inna Dharma Deli yang Dahulu Bernama Hotel De Boer



Sumber: [hotelindonesiagroup.co.id](http://hotelindonesiagroup.co.id)

Medan Barat, Kota Medan. Bangunan kolonial ini pertama kali dibangun tahun 1898 dan dipergunakan sebagai bangunan hotel De Boer, salah satu hotel pertama di Asia Tenggara yang didirikan oleh Aeint Herman De Boer, pemilik bisnis dari restoran “GRIM” di Surabaya. Kondisi gedung De Boer ini sendiri masih tampak utuh meski terdapat beberapa bagian yang sudah di renovasi oleh manajemen Hotel Dharma Deli. Pembangunan awalnya di 1898 bermula dari ruangan makan dan bar yang menjadi satu, serta tujuh buah kamar tamu saja. Namun sejalan dengan perluasan hotel, maka jumlah kamar tamu yang saat ini tersedia telah mencapai 130 kamar. Hotel yang dibangun dengan gaya kolonial klasik dan berlantai keramik dengan dinding bata ini mengalami masa kejayaannya bebera-

pa tahun setelah beroperasi. Sebabnya karena terdapat sejumlah fasilitas yang dirancang dengan sangat baik dan modern, seperti kondisi gedung yang dirancang bebas dari nyamuk-nyamuk tropis. Terlebih setelah pada tahun 1909 pihak manajemen hotel berinisiatif untuk meningkatkan usaha dengan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), dengan maksud untuk membangun hotel yang baru dikarenakan terbatasnya jumlah kamar yang tersedia.

Penambahan ruangan ini sejalan dengan pertumbuhan Kota Medan yang dalam periode itu telah berkembang pesat sebagai pusat administrasi perkebunan di Sumatera Timur. Dampaknya banyak tamu-tamu yang datang dari luar Hindia Belanda yang lalu memutuskan untuk menginap di Hotel De Boer dikarenakan ketenaran dan fasilitas bagus yang hotel miliki. Di antara tamu-tamu penting yang pernah bermalam di hotel tersebut antara lain Raja Leopold dari Belgia dan Pangeran Schaumburg-Lippe, kemenakan Ratu Wilhelmina dari Belanda. Pada akhirnya sejalan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di 1957, maka pada 14 Desember 1957 pemerintah mengambil alih pengelolaan Hotel De Boer dan mengubah namanya menjadi Hotel Dharma Bakti.<sup>17</sup> Seiring dengan semakin meningkatnya kepopuleran hotel tersebut, saat ini pihak manajemen hotel telah memperluas bangunan dan meninggikannya menjadi 8 lantai. Pihak manajemen hotel juga menggabungkan bangunan lama tersebut dengan bangunan yang baru di sebelah kanannya.

### **Jakarta Llyod (Asuransi Jasindo)**

Gedung Jakarta Llyod terletak di lingkungan Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan. Dalam proses sejarahnya, Bangunan yang berada di depan Lapangan Merdeka ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1920an, dan dipergunakan untuk kantor

17. Diakses dari <http://www.pemkomedan.go.id/artikel-14870-hotel-de-boer-inna-dharma-deli.html> pada tanggal 10 November 2016 pukul 11.45 WIB.

Gambar 9.8  
Gedung Jakarta Llyod (2016)



Sumber: koleksi Penulis

“Stoomvaart Maatschappij Nedherland” dan “Rotterdamshe Lloyd”. Stoomvaart Maatschappij Nedherland sendiri adalah perusahaan kapal uap terbesar di Belanda, sementara Rotterdamshe Lloyd adalah perusahaan jasa pelayaran yang tugasnya adalah memfasilitasi para penumpang ataupun barang-barang yang hendak diangkut dari Belanda ke Indonesia ataupun sebaliknya. Arsitektur gedung ini bergaya kolonial tropis, dan dapat terlihat dari penggunaan atapnya yang tinggi sehingga ruang di bawah atapnya dapat meredam suhu panas yang masuk ke dalam ruangan. Atapnya berbentuk perisai, dengan dinding-dinding tembok yang dipenuhi jendela agar dapat meredam panas matahari yang masuk ke dalam gedung. Lantainya pun terbuat dari marmar dan menggunakan dinding-dinding bata

yang kokoh. Pada akhirnya pasca kemerdekaan 1945 pengelolaan gedung ini menjadi milik Djakarta Lloyd, perusahaan pelayaran samudera dan setelah itu diteruskan kepada perusahaan swasta Asuransi Jasindo.

### **Kantor PTPN IX-Gedung AVROS**

Bangunan tua kantor PTPN IX adalah kantor yang sejak abad ke-19 dioperasikan oleh perusahaan perkebunan Deli Maatschappij. Peresmiannya sendiri adalah pada 1869 sesaat setelah Deli Maatschappij memindahkan kantor pusatnya dari yang sebelumnya di Labuhan ke Kampung Medan. Kantor baru ini yang kemudian dibangun di pinggir sungai Deli dan tepatnya berada di kantor PTPN II (eks PTPN IX).

Sementara Gedung AVROS adalah (*Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera* atau Asosiasi Pemilik Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra) yang dibangun pada 1918-1919. Arsiteknya bernama G.H. Mulder dan karyanya ini sangat dipengaruhi oleh gaya rasionalisme yang saat itu sedang begitu populer di abad ke-19. Bangunan empat lantai dalam konstruksi beton ini juga memiliki dekorasi sederhana dalam bentuknya yang menyerupai gaya *art-nouveau*, di mana setiap lantai memiliki balkon berupa galeri terbuka.<sup>18</sup> Galeri ini dirancang untuk melindungi ruangan dalam dari terpaan panasnya matahari, sehingga kesejukan ruangan akan tetap terjaga. AVROS sendiri berada di bawah kepemilikan dari BKS-PPS, yaitu Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (*Sumatera Planters Association*).

Pada 1930an Gedung AVROS dipakai untuk membayar uang upah sejumlah imigran dan buruh kontrak (kuli) perkebunan karet dan tembakau.<sup>19</sup> Fungsi lain dari AVROS adalah untuk mediator kerja

18. Diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/kisah-di-balik-kubah-megah-gedung-avros-medan> pada tanggal 10 November pukul 12.00 WIB.

19. Diakses dari <http://www.pemkomedan.go.id/artikel-15234-bangunan-bersejarah-bksppsavros.html>, pada , pada tanggal 10 November pukul 13.00 WIB.

Gambar 9.9  
Gedung AVROS yang Kini Menjadi Gedung BKS-PPS



Sumber: [www.ihsanlie.blogspot.com](http://www.ihsanlie.blogspot.com)

yang terdiri dari 150 perusahaan perkebunan, baik yang berasal dari kepemilikan swasta domestik, kepemilikan asing swasta, dan kepemilikan negara.<sup>20</sup> Di dalam AVROS juga terdapat 300 anggota perkebunan yang mayoritas berasal dari perusahaan Belanda, dan diikuti oleh perusahaan Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, dan Belgia. Kini, gedung AVROS, atau BKS-PPS, dipakai sebagai fasilitator untuk menentukan aturan-aturan umum bagi buruh, seperti upah harian sesuai peraturan Badan Kerja Sama Pengusaha Perkebunan Sumat-

20. Kepemilikan swasta mengacu kepada perusahaan lokal milik pribumi, kepemilikan asing berarti berasal dari perusahaan Belanda, dan kepemilikan negara berada di bawah kendali Kesultanan Deli.

era (BKS-PPS), upah tidak dibayar bila mangkir, mendapat fasilitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), keluarga sakit mendapat pengobatan di klinik perusahaan, mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dan bonus tahunan sesuai peraturan BKS-PPS, mendapat hak cuti, atau mendapat catu beras sesuai peraturan BKS-PPS.<sup>21</sup>

## Gedung dan Arsitektur BI Medan

Gedung BI Medan merupakan salah satu saksi sejarah peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Gedung ini dibangun bersamaan dengan perkembangan Kota Medan sebagai wilayah perkebunan tembakau di masa kolonial. Saat ini Gedung BI Medan terletak di Jalan Balai Kota No. 4 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini berada di antara Balai Kota Lama Medan dan Inna Dharma Deli Hotel.<sup>23</sup> Di masa kolonial, Bank Indonesia Medan merupakan kantor Cabang De Javasche Bank yang ke-11. Kantor ini mulai dibuka pada 30 Juli 1907, Sementara itu Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Bangunan ini digunakan sebagai pusat perbankan Belanda di wilayah Keresidenan Sumatera Timur di bawah pimpinan L. Vonhemert. Namun, akibat adanya pengaruh resesi dunia 1930an, Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura akhirnya terpaksa ditutup.

Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda, yaitu Hulswit, Fer-

21. Diakses dari <http://www.lenteratimur.com/2011/12/medan-dan-para-kuliyang-datang-dari-jauh/> pada tanggal 10 November pukul 13.25 WIB.
22. Diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumut/profil/Contents/KBI.aspx> pada Selasa, 15 November 2016 Pukul 16.00 WIB.
23. Biro konsultasi arsitektur Ed. Cuyper & Hulswit sudah sejak lama (sebelum tahun 1910), bekerja di Indonesia. Pendiri dan pemiliknya dua orang arsitek berasosiasi, nama masing-masing dijadikan nama perusahaannya yaitu Architecten Bureu Ed. Cuyper & Hulswit. Selama bekerja di Indonesia, mereka merencanakan banyak sekali bangunan-bangunan penting di kota-kota besar, salah satunya *De Javasche*

most, dan Cuypers dan dibangun selama satu tahun.<sup>23</sup> Eduard Cuypers dilahirkan di Roermond, Belanda pada tahun 1859 dan sejak tahun 1876 ia bekerja pada studio arsitek milik pamannya yang juga merupakan seorang arsitek besar di Belanda bernama P.J.H. Cuypers.<sup>24</sup> Pada masa inilah ia berkenalan dengan M.J. Hulswit seorang arsitek yang nantinya akan berasosiasi bersamanya membentuk sebuah Biro arsitek di Hindia Belanda. Keterlibatannya dengan De Javasche Bank dan Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1906 saat ia mendapatkan penugasan untuk merancang sebuah kantor bagi bank tersebut di Medan. Setelah penugasan pertamanya itu, ia kemudian juga mendapatkan penugasan untuk merancang kantor-kantor De Javasche Bank di kota-kota lain di Hindia Belanda. Kedatangannya ke Hindia Belanda pada 1909 kemudian membuat dirinya bertemu dan berasosiasi dengan rekan lainnya, yaitu M.J. Hulswit. Keduanya kemudian bersepakat untuk membentuk suatu biro yang bernama N.V. Architectenbureau Ed. Cuypers en Hulswit.<sup>25</sup>

Perancangan kantor De Javasche Bank oleh Biro Cuypers dan Hulswit sendiri dilakukan dalam konteks arsitektur yang terjadi di masa pergantian dari abad ke-19 ke abad ke-20. Di abad ke-19, *Le Style Empire* merupakan sebuah langgam<sup>26</sup> dari Klasikisme, yang merupakan sebuah gerakan yang muncul dan menjadi dominan di abad ke-18 dan abad ke-19. Gerakan tersebut, sebagaimana yang tersurat pada istilah itu sendiri, merupakan gerakan yang mengangkat kembali kaidah-kaidah desain Klasik (Yunani dan Romawi). Sedangkan langgam *Le Style Empire* kerap dihubungkan dengan Napoleon. Langgam yang merupakan pengaruh Prancis ini masuk ke Indonesia saat Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

*Bank di Medan.*

24. Nadia Purwestri dkk., *Warisan De Javasche Bank Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia, 2009), hlm. 59.

25. *Ibid.*

26. Bentuk atau motif umum yang mencirikan sebuah bangunan atau elemennya.

Saat berkuasa, Napoleon merasa bahwa ia mempunyai sebuah misi untuk menyebarkan ide-ide pasca Revolusi Prancis, yang diyakininya memiliki nilai universal yang dapat mencerahkan umat manusia.<sup>27</sup> Ketika Hindia dikuasai oleh Prancis (1808–1811) di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Hindia menjadi sebuah tempat penyebaran ide-ide pasca revolusi tersebut.<sup>28</sup> Sedangkan pemakaian langgam Imperial pada bangunan umum merupakan cara untuk menyampaikan ide pasca Revolusi di Hindia. Setelah masa kekuasaan Prancis yang pendek itu berakhir, Neo-Klasik tetap menjadi Bahasa arsitektural yang dominan. Pada abad ke-20, Hindia Belanda kedatangan arsitek-arsitek profesional yang mendapatkan pendidikan arsitektur formal, untuk menggantikan para arsitek di Hindia yang sebelumnya adalah para perwira Zeni. Dari Eropa, mereka juga membawa ide-ide seni maupun seni arsitektur yang baru. Namun tidak hanya membawa pengaruh dari pendidikan forma dan juga ide-ide baru yang mereka bawa ke Hindia, melainkan mereka juga membawa ide-ide romantisisme dan historisisme, yang akhirnya dominan di Barat pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20.

Romantisisme-Historisisme merupakan sebuah pandangan yang mengasumsikan adanya keotentikan, atau kemurnian budaya. Kondisi seperti ini yang dirasa belum terjadi di Hindia Belanda awal abad ke-20. Para arsitek yang baru datang ke Hindia Belanda pun banyak yang mempertanyakan tentang keberadaan dan dominasi langgam Neo-Klasik/Imperial di Hindia Belanda. Misalnya ketika arsitek Moojen pernah menyerang Neo-Klasisisme di Hindia Belanda sebagai “sebuah tiruan Hellenisme<sup>29</sup> yang buruk”.<sup>30</sup> Pernyataan itu dilon-

27. *Ibid.*, hlm. 65.

28. M. J. van Reenen, *Daendel's Self-Tempered Vice Royal Ambitions; a Comparative Architectural Analysis of the Gouvernment House in Weltevreden*, (Leiden: Leiden University Press, 2005), hlm. 32-34.

29. Sebuah gerakan yang berpaling ke Klasikisme Yunani

30. Nadia Purwestri dkk., *Op. Cit.*, hlm. 66.

tarkan terhadap sebuah dominasi langgam yang tidak otentik untuk Hindia Beanda. Sejak saat itu, ada usaha untuk mencari arsitektur yang sesuai bagi Hindia Belanda. Beriringan dengan hal itu, ide-ide dari arsitektur modern mulai muncul dan masuknya bersamaan dengan adaptasi modernisme terhadap iklim tropis.

Pencarian akan keotentikan langgam-langgam yang dirasa sesuai dengan Hindia Belanda inilah yang kemudian menjadi dasar dari perancangan arsitektur kantor De Javasche Bank Agentschap Medan. Secara umum memang terlihat adanya kemiripan antara tampilan umum bangunan tersebut dengan beberapa bangunan berlanggam *Le Style Empire* di Prancis. Akan tetapi, berbagai elemen yang terdapat pada bangunan ini nampak seperti merangkum perkembangan arsitektur di Hindia Belanda pada masa akhir kolonialisme. Tampilan *Le Style Empire* pada kantor De Javasche Bank mewakili narasi arsitektur Hindia Belanda dari abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20.<sup>31</sup> Hanya saja jika tampilan *Le Style Empire* nampak cukup kuat pada sisi eksterior, sisi interior kantor tersebut justru menunjukkan langgam-langgam yang lebih baru.

Apabila mengamati bangunan-bangunan hasil rancangan keduanya, maka akan terlihat adanya suatu evolusi dalam arsitekturnya. Proyek-proyeknya dibangun di 1910an, dan lebih banyak bercirikan klasik Eropa, baik dalam ornamen maupun elemen-elemen bangunannya. Kemudian dalam periode berikutnya mulai terlihat adanya percampuran antara unsur-unsur klasik-modern. Selanjutnya pada masa-masa akhir penjajahan Belanda atau di 1930an, bangunan-bangunannya lebih banyak dipengaruhi unsur modernisme. Meskipun berubah-ubah, tetapi Ed. Cuypers dan Hulswit tidak pernah meninggalkan unsur-unsur tradisional dan tropis. Dalam rancangannya selalu terdapat unsur tradisional, seperti misalnya hiasan-hiasan candi, bentuk-bentuk atap, konstruksi yang menunjukkan elemen-elemen horizontal dan vertikal dari balok<sup>32</sup> dan kolom-kolom gedung.

31. *Ibid.*, hlm. 68.

Hasil rancangan biro arsitek Cuypers dan Hulswit merupakan sebuah percampuran beberapa langgam (motif umum yang mencirikan sebuah gaya atau aliran). Perpaduan beberapa langgam ini kemudian menghadirkan keunikan tersendiri, di mana prinsip perancangan bermacam langgam digabungkan dalam perancangan DJB Agentschap Medan; *Le Style Empire* yang merangkum gaya Klasik (yang berasal dari Yunani dan Romawi) serta Renaissance, *Wienerwerkstatte*, *Nieuwkunst* dan juga pengutipan elemen-elemen seni klasik Indonesia yang terlihat di dalam arsitektur gedung.<sup>33</sup>

Pembangunan gedung DJB Medan hampir sama dengan gedung-gedung DJB lainnya, yakni dengan mengikuti ciri arsitektur Eropa yang khas pada zamannya, dengan ditengarai oleh adanya kubah yang ada di puncak atap bangunan.<sup>34</sup>

Salah satu ciri gedung BI medan lainnya adalah terdapatnya sebuah bel di Menara yang merupakan sumbangan dari Tjong A Fie, seorang pengusaha ternama sekaligus pemimpin komunitas Tionghoa di Kota Medan pada awal abad ke-20. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, DJB kemudian diambil alih melalui proses Indonesianisasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral sesuai dengan Undang-Undang (UU) Bank Sentral tahun 1953. Dengan perubahan tersebut, De Javasche Bank berubah menjadi bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

### **Arsitektur Gedung Kantor Bank Indonesia Medan**

Dalam perkembangan arsitektur dari segi masa, perubahan bentuk dapat dibedakan dalam dua hal. Hal pertama adalah perubahan se-

32. Sebuah elemen struktur pada bangunan. Peletakannya cenderung horizontal. Fungsinya adalah untuk menahan beban dari arah atas. Biasanya, balok menyangga beban dari atap. Pada bangunan yang mempunyai beberapa lantai, balok juga menyangga beban dari lantai di atasnya.

33. Diakses dari [http://www.culture.gouv.fr/culture/actualities/celebrations2004/Le\\_style.htm](http://www.culture.gouv.fr/culture/actualities/celebrations2004/Le_style.htm) pada tanggal 16 November 2016 pukul 13.01 WIB.

34. Pada tahun 1956, Kubah yang berada di atas gedung BI Medan dihilangkan dan

cara pelan-pelan atau evolusioner, dan yang kedua secara cepat. Termasuk di dalam kategori pertama adalah arsitektur klasik dan tradisional, yang berkembang dan mengalami perubahan dalam waktu berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kedua adalah arsitektur modern, yang berkembang dan berubah cepat, sejalan dengan cepatnya perkembangan teknologi dan penduduk. Arsitektur kolonial termasuk ke dalam kategori kedua. Arsitektur kolonial di Indonesia adalah fenomena budaya yang unik, yang tidak terdapat di lain tempat juga di negara-negara bekas koloni Belanda lainnya. Dikarenakan demikian karena terjadi percampuran budaya antara penjajah dengan budaya Indonesia yang beranekaragam. Oleh karena itu, arsitektur kolonial di berbagai tempat di Indonesia dengan tempat-tempat lainnya apabila diteliti lebih jauh pasti mempunyai perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri tersendiri.

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengalami pengaruh *Occidental* (Barat) dalam berbagai segi kehidupan termasuk kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk tata ruang kota dan bangunan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa para pengelola kota dan arsitek Belanda tidak menerapkan konsep lokal atau tradisional di dalam rencana dan pengembangan kota, pemukiman, dan bangunan-bangunan. Sejarah mencatat bahwa De Javasche Bank Medan merupakan salah satu kantor penting yang dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan perkebunan tembakau di Nusantara, khususnya di Sumatera Timur. Seperti kota-kota besar lainnya di masa kolonial, pembangunan fasilitas publik dibangun di jalan utama tanpa halaman depan. Oleh karena itu menarik untuk diperhatikan bahwa kantor pusat De Javasche Bank Medan mempunyai pengecualian, yaitu mempunyai halaman depan cukup luas.

Gedung bank yang sudah ada sejak tahun 1900an ini, mempunyai dua lantai, unit utamanya berbentuk L. Bagian depan bangunan simetris, dibentuk oleh adanya tiga buah unit yang menonjol,

satu di tengah dua kembar lainnya diujung-ujungnya. Ketiganya mempunyai gaya arsitektur *Renaissance*. Selain bentuk secara keseluruhan, ciri arsitektur *Renaissance* dapat ditandai dengan hiasan-hiasannya. Dinding bagian bawah berkesan motif bergaris-garis alur horizontal. Masing-masing mempunyai tiga *oculus*,<sup>35</sup> untuk ventilasi ruang pada lantai bawah dan pilaster<sup>36</sup> pada sudut-sudutnya. Ciri ini juga beralur-alur horizontal sehingga memberikan kesan konstruksi tumpukan batu-batu besar seperti pada banyak bangunan *Renaissance*. Ciri *Renaissance* lainnya terlihat pada *balustrade* sebagai hiasan pada atap, *amortizement*<sup>37</sup>, dan penempatan molding.<sup>38</sup>

Pintu masuk utamanya cukup menarik untuk diperhatikan karena keunikan yang dimiliki. Dari halaman depan para nasabah dapat langsung ke lantai dua melalui pintu masuk utama kembar di kiri dan kanan. Keduanya mengapit unit menonjol tengah. Seperti pada kebanyakan pintu masuk pada umumnya, di sini juga terlindung oleh tritisan, dalam hal ini melengkung. Susunan ini dikatakan unik karena biasanya pintu masuk utama hanya satu yaitu di tengah. Masing-masing pintu mempunyai tangga untuk menuju lantai dua. Tangga ini terdapat di balik dinding, sehingga ruang-ruang di depan bangunan yang menghadap ke Timur ini dapat terlindung dari terik matahari pagi langsung.

Pada lantai dua dibuat dinding-dinding partisi yang memisahkan ruang secara transparan, lebih kurang setinggi tiga perempat dinding. Partisi-partisi tadi dari rangka kayu dipolitur, kaca, panil serta kayu untuk memisahkan ruang-ruang sesuai dengan fungsinya. Elemen-elemen bangunan berciri klasik Eropa ini dipadukan sangat harmonis dengan unsur tradisional seperti misalnya pada kepala kolom. Kolom-kolom ini sepintas selalu kelihatan seperti bergaya ko-

baru dibangun kembali pada tahun 2002.

35. Oculus adalah jendela atau ventilasi yang berbentuk lingkaran.

36. Pilaster adalah bagian bangunan untuk memperkuat dinding, berfungsi sebagai penguat atau kolom, menyatu dengan dinding pada jarak-jarak tertentu.

37. Bagian atas yang curam dari bagian luar bangunan yang menonjol.

38. Molding adalah bagian dari konstruksi atau dekorasi dari berbagai tepian atau per-

rintia tetapi apabila diamati lebih jauh, maka ternyata motifnya adalah Buddhis seperti yang banyak terdapat di Candi Borobudur.

Hal lain yang ditemui pada kantor De Javasche Bank Medan adalah keberadaan elemen-elemen yang berbeda dengan elemen-elemen yang secara formal sudah dikenal lama oleh arsitektur Barat. Misalnya seperti pada kapital<sup>39</sup> kolom yang terdapat di dalam bangunan. Kapital tersebut terinspirasi oleh kapital berlanggam *korintia*<sup>40</sup>, sebuah longgam kapital Yunani Kuno yang bermotif *vegetative*. Akan tetapi, kapital yang terdapat pada DJB Medan ini dibentuk melalui sebuah situasi yang khas, yang membedakannya dengan kapital *korintia* pada umumnya. Selain adanya elemen melingkar dari kapital Yunani yang lain, nampaknya ada usaha untuk menampilkan stilisasi yang terilhami oleh stilisasi ukiran candi-candi Jawa.

DJB Medan memiliki bentuk bujur sangkar dengan panjang 20 m<sup>2</sup> dan lebar 17 m<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, arsitektur DJB Medan banyak dipengaruhi oleh gaya *Renaissance* yang dalam hal ini dipadukan dengan gaya Yunani,<sup>41</sup> yang juga terlihat di bagian depan *fasade*.<sup>42</sup> Selain bentuk atap yang sedemikian rupa, dan adanya sebuah Menara kecil yang menekankan elemen pusat pada *fasade*, ada sebuah kesan *introvert* pada bangunan ini. Kesan ini muncul karena ada kesan masif pada bagian luarnya, dan seakan-akan tembok-tembok luar bangunan ini melindungi atau menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Hal ini cukup menarik mengingat di satu sisi *fasade* DJB Medan berperan secara visual sebagai sebuah proyeksi citra korporasi De Javasche Bank. Namun di sisi lain, sebagai

mukaan berupa garis-garis atau kontur.

39. Bagian "kepala" sebuah kolom, yang mencirikan jatidiri atau gaya kolom tersebut.

40. Gaya kolom yang berasal dari Yunani. Di kuil-kuil Yunani, kolom Korintia hanya ditempatkan di dalam kuil. Tetapi pada kuil-kuil Romawi, Kolom Korintia kadang ditempatkan di sisi luar kuil. Berupa motif dedaunan akantus.

41. Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 140.

42. Fasade adalah tampak muka sebuah bangunan yang menghadap jalan.

sebuah bank bangunan ini perlu memiliki sebuah kesan yang tertutup.

Lantai satu digunakan untuk ruang arsip, penyimpanan, dengan menggunakan almari besi yang berdinding setebal 65 cm. Pada lantai dua yang merupakan lantai utama, digunakan untuk kantor, kasir dan ruang tunggu. Seperti pada kantor pusatnya di Jakarta, pada lantai utama ini pembagian ruang menggunakan dinding-dinding “transparan” dari rangkai kayu dan kayu. Untuk naik ke lantai dua pengunjung melalui tangga langsung dari halaman depan, sama dengan kedua bangunan tersebut di atas.

Pada lobi utama, terdapat sebuah rusuk lengkung<sup>43</sup> (atau *barrel vault*,<sup>44</sup> struktur berbentuk seperti silinder yang berusuk yang dipotong dua secara melintang) pembentuk ruang yang cukup monumental. Rusuk lengkung seperti ini sebetulnya sering digunakan pada bangunan-bangunan publik berlanggam Neo-Klasik. Pola *coffered ceiling* yang Nampak pada rusuk lengkung kantor merupakan sebuah pola yang kerap muncul pada bangunan-bangunan Neo Klasik. Penempatan kolom-kolom yang menyangga *barrel vault* itupun menunjukkan logika Neo-Klasik, di mana kolom-kolom tersebut disejajarkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah ritme.

Namun mengingat bangunan ini dirancang pada masa awal abad ke-20, maka juga terlihat pola-pola perancangan awal abad ke-20. Secara keseluruhan, nuansa lobi utama DJB Medan merupakan sebuah nuansa *Wienewerkstatte*, dan hal ini terlihat dari kuatnya penggunaan unsur garis dan bidang.<sup>45</sup> Pengaruh modernisme juga tampak dari tampilan kolom dan balok pada ruang lobi dan be-

43. Elemen arsitektur berbentuk busur, yang dikembangkan di zaman Romawi. Konstruksinya bergantung pada sebuah batu kunci, yang terletak di puncak sebuah lengkung.

44. Sebuah struktur berbentuk seperti silinder yang dipotong dua secara melintang. Struktur ini ditopang oleh kolom, tembok, atau *arcade*.

45. Sebuah elemen dasar dalam arsitektur, berupa permukaan dua dimensi.

berapa ruang lainnya yang senada dengan rancangannya. Kolom dan balok tidak ditutup-tutupi, tetapi dibiarkan tampil dengan bentuk dasarnya. Bentuk dasar ini tidak disamarkan dengan banyak unsur dekoratif, tetapi justru ditonjolkan. Nuansa seperti ini juga nampak pada desain ruang *frontgebouw*, bangunan depan, tempat pelayanan nasabah.

Bagian depan samping dan belakang seperti pada kebanyakan bangunan Renaissance berbentuk simetris. Kolom-kolom luar lantai dua berdiri di atas dinding lantai satu. Dinding ini dihias oleh alur-alur horizontal, yang juga banyak terdapat pada bangunan Renaissance. Berbeda dengan dinding lantai satu yang masif dan hanya sedikit mempunyai jendela-jendela kecil, dinding di atasnya dipenuhi oleh jendela-jendela yang tinggi dan lebar. Masing-masing terletak di antara setiap dua kolom. Hiasan kolom ini bergaya Yunani *doric order*.<sup>46</sup> Percampuran gaya-gaya klasik Eropa lainnya terlihat pada pintu masuk utama di tengah, yang berpelengkung Romawi dan dipit oleh dua pasang kolom kembar Yunani *doric* kiri dan kanannya. Di atasnya terdapat *tympanum*,<sup>47</sup> dihias oleh relief bergaya campuran antara yang ada di Candi Borobudur dan klasik Eropa.

Sekeliling bagian atas dinding-dinding, dihias oleh *balustrade*.<sup>48</sup> Hiasan semacam ini dalam arsitektur klasik sering disebut mahkota yang menghiasi ujung-ujung atapnya. Mirip dengan kantor DJB cabang Bandung, pada bagian tengah atapnya terdapat sebuah *lantern* berbentuk *imperiale*. Keempat sisinya mempunyai jendela kaca, berfungsi untuk memasukkan cahaya dan udara alami sehingga ruang di bawahnya sangat terang pada siang hari. Konstruksi di puncak bangunan ini, ditutup oleh sirap dan dihias oleh *amortizement* pada titik pusat atasnya. Kolom-kolom *latern* dari beton,

46. Kolom yang dirancang oleh kaum Doria Yunani dan bercirikan kapital sederhana.

47. Konstruksi dinding berbentuk segitiga, atau setengah lingkaran diletakkan di atas pintu atau jendela sebagai hiasan.

48. Balustrade adalah pilar-pilar kecil pembentuk pagar pembatas Balkan atau koridor

menerus sampai lantai dasar menjadi satu dengan kolom utama. Adanya keempat kolom utama di tengah ini, mungkin mendapat inspirasi dari soko guru dalam rumah Joglo Jawa.

Ciri klasik Eropa lainnya, terlihat pada wajah utamanya yang melebar dan monoton. Bentuk tersebut juga khas *Renaissance*, terdiri dari dinding bagian bawah dengan deretan pelekung-pelekung dan bagian atas oleh jendela-jendela dan kolom-kolom. Kesan lain yang dapat ditimbulkan oleh wajahnya adalah lantai atas yang menumpuk pada lantai bawahnya dengan pintu masuk utama yang berada di tengah. Dekorasinya, bentuk jendela dan peletaknya berada di antara kolom-kolom *doric* identik dan sama dengan yang di Bandung dan Medan. Demikian juga dekorasinya yang terdiri dari *etablement*, *cornice*,<sup>49</sup> *moulure*, dan *balustrade* menghias bagian atas dinding. Bagian bawah luar terdapat juga gang yang dalam hal ini berfungsi sebagai trotoir karena letaknya yang langsung di jalan.

Pada akhirnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan adalah bangunan *heritage* yang ditampilkan oleh pembuatnya dengan menggunakan citra tertentu. Pada sisi luarnya menampilkan langgam *Le Style Empire*, yang terdapat sifat ketertutupan yang ada untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Namun ruang-ruang di dalamnya seperti lobi utama telah menampilkan pengaruh langgam-langgam yang lebih modern dengan menampilkan citra yang lain. Di ruang-ruang yang cukup besar itu pengunjung menyaksikan kesan akomodatif, tetapi sekaligus formal. Langit-langit yang tinggi dan garis-garis yang tegas memperkuat kesan formal tersebut. Tampilan dari arsitektur inilah yang kemudian mencitrakan KPwBI Medan sebagai tempat yang dikesankan melindungi, formal, dan kokoh.

49. Hiasan berupa molding yang memahkotai *entablature*. Bentuknya sesuai dengan aliran atau gaya seperti misalnya *Corinthian*, *Doric*, *Ionik*, dll.

## Upaya Menjadikan Gedung KPwBI Sumatera Utara Menjadi Sebuah *Heritage* Berkelas Dunia

### Pemaknaan Istilah *Heritage*

Berbicara masalah *heritage* pada dasarnya berkaitan dengan wujud dan fisik dari sejumlah bangunan/situs tua yang tentu memiliki cerita sejarahnya masing-masing, terlepas dari keunikan dan ciri khas tertentu dari arsitektur suatu gedung. Konsep *heritage* pertama kali diterjemahkan oleh Oxford sebagai sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara selama bertahun-tahun lamanya sehingga dianggap sebagai bagian penting dari karakter suatu bangsa.<sup>50</sup> Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) mengartikan konsep *heritage* sebagai warisan budaya masa lalu dan sudah seharusnya dilestarikan kepada generasi-generasi selanjutnya.<sup>51</sup>

Peter Howard mengartikan *Heritage* sebagai segala sesuatu yang ingin diselamatkan, yang mencakup di dalamnya adalah budaya alam dan budaya material.<sup>52</sup> Selanjutnya Hall dan McArther memberikan definisi yang lebih spesifik, yaitu warisan budaya berwujud kebendaan seperti monumen, arsitektur bangunan, tempat peribadatan, peralatan, kerajinan tangan, dan warisan budaya yang tidak berwujud kebendaan seperti atribut dari suatu kelompok masyarakat, cara hidup, norma, dan tata nilai yang dianut sekelompok masyarakat tertentu.<sup>53</sup> Davidson memberikan penafsiran yang lain, di mana menurutnya *heritage* dapat diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi yang berbeda dan bentuk spiritual, dalam bentuk nilai-nilai masa lalu yang kemudian menjadi elemen

50. Oxford Dictionary, hlm. 202.

51. Penjelasan tentang definisi tersebut dapat ditemukan di dalam piagam pembukaan UNESCO; Lihat Daftar Pustaka.

52. Peter Howard, *Heritage Interpretation: Theory and Practice (Issues in Heritage Management)*, (Routledge, 2005), hlm.

53. *Ibid.*, hlm.

pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa.<sup>54</sup>

Sementara itu, padanan Bahasa Indonesia menerjemahkan istilah *heritage* sebagai warisan atau pusaka.<sup>55</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata ‘warisan’ biasanya mengacu pada sesuatu yang bersifat material, karena ketika berdiri sendiri kata tersebut menunjuk pada ‘harta peninggalan’, yaitu harta yang ditinggalkan atau diberikan oleh seseorang pada orang lain (biasanya kepada keturunannya, sanak saudara, atau orang yang dianggap berhak) sebelum, ketika, atau setelah dia meninggal. Kata pusaka sendiri lebih sering dimaknai sebagai benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan atau memiliki tuah, seperti misalnya keris, tombak, pedang, dan sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa makna dari bangunan *heritage* adalah satu kesatuan yang utuh dan merujuk kepada satu bangunan peninggalan sejarah yang selama masa berdirinya telah menjadi saksi sejarah, atau menyimpan dan merekam banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di periode berdirinya bangunan *heritage* tersebut. Konsep *heritage* pun memiliki keterkaitan yang kuat terhadap nilai-nilai pelestarian, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi bangunan tertentu. Dalam proyeksi jangka panjang, keberhasilan dalam pelestarian situs-situs *heritage* akan memberikan suatu nilai tambah dalam pemanfaatan tata ruang perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek pariwisata daerah. Terlebih dengan adanya cerita sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kemudian menjadi dasar dari asal usul suatu situs *heritage*, dan hal itu akan menambah nilai-nilai kesejarahan dari suatu bangunan dan situs *heritage*.

Tujuan dari upaya-upaya pelestarian situs *heritage* dimaksudkan agar generasi-generasi penerus bangsa selanjutnya dapat mengetahui dan tidak melupakan proses-proses dinamika sejarah, yang di

54. Daniel Davidson, *Culture*, (San Fransisco: Krupskaya, 2002), hlm. 37.

55. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.

masa silam telah membangun suatu peradaban di dalam lingkup tata ruang perkotaan. Dalam konteks kekinian kebutuhan akan pelestarian situs-situs *heritage* menjadi semakin penting mengingat mulai bertambahnya beban perkotaan, yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk perkotaan. Sebagai konsekuensi, kebutuhan dan permintaan terhadap pemanfaatan lahan-lahan di perkotaan semakin meningkat dan kemudian akan semakin mengancam eksistensi dari situs dan bangunan-bangunan *heritage*. Dalam kajian arsitektur khususnya yang berkaitan dengan *heritage*, hubungan dengan sejarah bangunan adalah persyaratan utama untuk menciptakan karya arsitektur yang proposional, baik di masa sekarang ataupun yang akan datang. Sebabnya karena suatu bangunan kadang-kadang dapat menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian yang terjadi di masanya, baik di dalam gedung ataupun sekitarnya.

Oleh karena itu, bangunan selain mempunyai nilai arsitektural (ruang, keindahan, konstruksi, teknologi, dll.) juga mempunyai nilai-nilai kebudayaan. Semakin lama bangunan tersebut berdiri, maka semakin membuktikan eksistensi dan tingginya nilai sejarah serta budaya suatu gedung, sehingga tentu sangat disayangkan jika terjadi banyak bangunan yang bernilai arsitektur/budaya dan sejarah yang kemudian dibongkar tanpa alasan yang jelas. Banyak dari negara maju di dunia yang kemudian menyesali kebijakan pembongkaran/pengrusakan bangunan *heritage* tersebut, baik karena faktor perang ataupun dorongan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu sejak era milenia banyak dari negara-negara di dunia yang berusaha melindungi sejarah bangunannya dengan berbagai peraturan maupun undang-undang yang diterapkan secara konsisten.

### **Ruang Lingkup *Heritage***

Pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan politik, dan derasnya arus teknologi informasi, memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi perlindungan pusaka budaya yang berfungsi sebagai pengukur kemajuan atas peradaban suatu bangsa. Hal ini

ditandai dengan keterbatasan terhadap pemahaman dan penghargaan kekayaan pusaka dan budaya Indonesia. Guna menghadapi masalah tersebut, dibutuhkan sebuah usaha pembelajaran akan arti dan urgensi dari kekayaan pusaka dan budaya Indonesia bagi generasi yang ada saat ini dan setelahnya. Pemahaman pusaka yang awalnya hanya bertumpu pada satu atau beberapa artefak, pada dua dekade terakhir ini juga telah mengalami perkembangan. Pusaka juga dapat mencakup suatu saujana (*cultural landscape*) yang luas dan bahkan lintas wilayah, dan juga dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak (*intangible*).

Pembagian jenis warisan budaya di Indonesia telah diatur berdasarkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto, 13 Desember 2003. Pada piagam tersebut dijelaskan bahwa pusaka Indonesia meliputi Pusaka Alam, Pusaka Budaya, dan Pusaka Saujana (*cultural landscape*). Jika ditilik secara hukum, Pusaka Budaya dapat dilihat dari beragam sudut pandang. Pusaka Budaya dapat dilihat sebagai benda cagar budaya menurut UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun demikian, peninjauan dari sudut pandang ini kurang mumpuni, karena hanya mengatur Pusaka Budaya yang berwujud (*tangible*).

Maka dari itu, diperlukan suatu peninjauan kembali yang bersumber pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam peraturan ini, Pusaka Budaya dapat mencakup hal yang tidak berwujud, seperti *folklore*.<sup>56</sup> Pada Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 UUHC, *folklore* diartikan sebagai ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun individu dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk diantaranya;

56. Secara etimologis, istilah *folklore* berasal dari gabungan kata *folk* dan *lore*. *Folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan yang sama, sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Sementara *lore* adalah kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan, gerak isyarat, atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*)

cerita, puisi, lagu, tarian, permainan, dan musik instrumen.<sup>57</sup>

UUHC juga menjelaskan bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, peninggalan sejarah, dan benda budaya lainnya. Negara juga memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang dimiliki secara kolektif, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.<sup>58</sup> UU ini juga mewajibkan adanya izin dari instansi terkait bagi warga negara asing yang ingin memperbanyak ciptaan tersebut. Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang dianggap merusak atau pemanfaatan komersial tanpa izin pemerintah sebagai pemegang hak cipta. Hal ini diterapkan guna menghindari adanya tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Pada lingkup internasional, istilah *folklore* sering digunakan secara bergantian dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expression*) oleh Organisasi Properti Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization – WIPO*). Apabila ditinjau dari segi pengekspresiannya, WIPO membagi *folklore* ke dalam empat kelompok; ekspresi verbal (cerita rakyat, istilah, dan pantun), ekspresi musikal (lagu dan musik instrumen), ekspresi melalui tindakan (tarian, drama, ritual, dan penampian artistik), dan ekspresi yang berwujud atau *tangible expression* (karya seni; lukisan, patung, ukiran, keramik, mosaik, seni kayu, seni logam, perhiasan, tekstil, kerajinan tangan, alat musik, dan arsitektur).

WIPO juga memiliki enam syarat terhadap sebuah produk budaya untuk digolongkan sebagai *folklore*. Pertama, produk tersebut diwariskan secara turun temurun melalui lisan atau peniruan. Kedua, produk tersebut merefleksikan identitas sosial dan budaya dari suatu kelompok masyarakat. Ketiga, produk tersebut memiliki unsur yang

57. James Danandjaja. *Folklor Indonesia*. (Jakarta: Grafiti, 1986), hlm. 1-2.)

58. Penjelasan tersebut didapat dari UU No. 19 tahun 2002 tentang Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)

mencirikannya sebagai pusaka budaya dari suatu kelompok masyarakat. Keempat, produk dibuat oleh individu atau kelompok yang tidak diketahui lagi identitasnya. Kelima, produk dibuat bukan dengan tujuan komersil, melainkan ditujukan lebih kepada sebagai sarana ekspresi budaya dan keagamaan. Keenam, produk budaya ini secara konstan mengalami perkembangan dan diciptakan secara berulang oleh masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan hak kekayaan intelektual, WIPO berpandangan bahwa relevansi dan justifikasi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap Pusaka Budaya lahir karena hal tersebut berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan pusaka sebagai sumber dari kreatifitas dilihat sebagai bentuk kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi di lingkup masyarakat tradisional. Hal ini dapat dicontohkan melalui pendirian sebuah bentuk usaha yang memproduksi suatu produk budaya, di mana perusahaan tersebut merekrut masyarakat lokal yang ahli dalam pembuatan produk budaya tersebut.

Dalam hal ini, peran hak kekayaan intelektual adalah memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan suatu kelompok masyarakat mengomersilkan pusaka budaya dari tindakan komersialisasi produk yang sama oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (*exclude free-riding competitor*). Namun demikian, WIPO memandang bahwa tidak ada satupun model atau solusi yang sesuai dan bisa diterapkan untuk semua kelompok masyarakat dalam pengaturan hak kekayaan intelektual terhadap *folklore*. Setiap negara memiliki perbedaan perlakuan dalam menangani kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Apabila WIPO memandang *folklore* dari segi perlindungan hukum dalam kaitannya dengan komersialisasi pusaka budaya, maka UNESCO memiliki pandangan berbeda terhadap hal tersebut. UNESCO melihat bahwa diperlukan suatu usaha untuk melestarikan produk budaya dan memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memproduksi *folklore*. UNESCO mendorong pemerintah dari

negara anggotanya untuk melakukan sedikitnya dua hal dalam rangka perlindungan pusaka budaya yang dimiliki, konservasi dan preservasi.

Kegiatan konservasi meliputi dokumentasi tradisi rakyat yang bertujuan untuk memberikan akses kepada peneliti dan masyarakat yang berkepentingan ke informasi yang memungkinkan mereka memahami proses terjadinya perubahan tradisi. Dalam hal ini UNESCO berpendapat bahwa *folklore* yang hidup (*living folklore*) tidak selalu dapat dilindungi secara langsung. Meski demikian, UNESCO menekankan bahwa *folklore* yang berwujud harus dilindungi secara efektif, misalnya melalui pendiri pengarsipan skala nasional khusus *folklore*, museum khusus *folklore* atau bagian khusus *folklore* dalam suatu museum, pelatihan untuk pengumpulan data dan penelitian *folklore*, dan memberikan kontrol pengamanan produk *folklore* dari tindak kriminal.

Kegiatan preservasi, meliputi perlindungan tradisi rakyat untuk menjamin status dan dukungan ekonomi dalam jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang memiliki pusaka budaya tersebut. Tindakan nyata yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat kurikulum pada bidang pendidikan, menjamin hak bagi masyarakat pemilik *folklore* untuk mengakses folklorinya, mendirikan suatu badan pada tingkat nasional yang khusus menangani *folklore*, menyediakan dukungan ekonomi untuk kegiatan terkait *folklore*, dan mengadakan penelitian ilmiah terhadap *folklore* dalam berbagai tema.

Oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian dan usaha pembelajaran dan pemahaman atas pentingnya pusaka dan budaya Indonesia, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan *International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, telah mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003. Ini merupakan piagam pertama yang dimiliki Indonesia dalam hal kesepakatan yang berkaitan dengan etika dan

moral dari pelestarian pusaka. Isi kesepakatan tersebut antara lain:<sup>59</sup>

1. Jenis pusaka di Indonesia yang dibagi menjadi tiga aspek, yaitu pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
  - a. Pusaka alam (*natural heritage*) adalah hasil bentukan alam yang dipandang memiliki keistimewaan tersendiri
  - b. Pusaka budaya (*cultural heritage*) adalah hasil ciptaan, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dan berasal dari sekitar 500 suku bangsa di Indonesia baik secara komunal maupun sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia dalam interaksi dengan hasil budaya lain sepanjang keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka yang berwujud (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*)
  - c. Pusaka saujana (*cultural landscape heritage*) adalah gabungan antara pusaka alam dengan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Pusaka saujana menitikberatkan pada keterkaitan antara suatu budaya dengan alam dan merupakan fenomena kompleks dengan identitas yang berwujud dan tidak berwujud.<sup>60</sup>

Sebagai wujud kepedulian terhadap infrastruktur, UU No. 5 tahun 1992 juga mengatur bahwa setiap gedung atau bangunan yang berusia lebih dari 50 tahun dapat dimasukkan sebagai cagar budaya yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan.

### **Syarat-syarat Pengajuan Suatu Bangunan Menjadi Sebuah Heritage**

Dalam masalah pengajuan sebuah bangunan untuk menjadi cagar budaya, pemerintah telah mengatur hal tersebut melalui Undang-undang no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Masyarakat diizinkan untuk mendaftarkan bangunan yang memenuhi kri-

59. Poin-poin tersebut tertulis di dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003.

60. Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia. *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia: Merayakan Keanekaragaman*, (Ciloto, 2003), hlm. 1-4.

teria-kriteria tertentu sebagai cagar budaya. Secara umum, pengajuan dapat dibagi ke beberapa tahap; pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten atau kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Selanjutnya, pemerintah akan melaksanakan verifikasi terhadap Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau bangunan yang tidak diketahui lagi pemiliknya, sehingga setiap bangunan harus dilengkapi dengan dokumentasi dan deskripsi.

Tidak semua bangunan yang didaftarkan dapat diterima sebagai Cagar Budaya. Sedikitnya ada empat kriteria yang harus dipenuhi menurut UU Cagar Budaya pasal 5: a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Bagi benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia, walaupun tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya menurut UU Cagar Budaya pasal 11. Sebagai pendukung, pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya baik secara manual maupun digital.

Selanjutnya, hasil pendaftaran akan diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau tidak. Pengkajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sendiri ditentukan oleh keputusan menteri di tingkat nasional, keputusan gubernur untuk tingkat provinsi, dan

keputusan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi, dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Bagi benda yang menjadi bagian koleksi museum, pendaftaran dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Tahap selanjutnya adalah penetapan. Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Kemudian bagi penemu Cagar Budaya sendiri juga akan mendapatkan kompensasi.

Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah. Mengenai letak Cagar Budaya, apabila Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya tersebut terletak di antara dua kota/kabupaten atau lebih, maka ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi. Sedangkan bagi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang terletak di antara dua provinsi atau lebih, maka ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Tahap berikutnya adalah pencatatan. Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya. Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya. Hal yang sama juga berlaku bagi benda koleksi museum. Pemerintah juga melakukan upaya aktif

mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Registrasi Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi pemerintah dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemeringkatan terhadap Cagar Budaya akan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, setelah tahap pencatatan telah dilakukan. Terdapat syarat berbeda di setiap tingkatan wilayah.

Suatu Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai: a) wujud kesatuan dan persatuan bangsa, b) karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Bangsa Indonesia, c) Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, d) bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup, dan e) menjadi contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah. Pemeringkatan pada tingkat ini diterapkan melalui Keputusan Menteri.

Selanjutnya, penetapan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya peringkat provinsi ditetapkan apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut: a) mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota, b) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi, c) langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi, d) sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang sudah punah maupun yang masih hidup saat ini, dan/atau e) berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. Pemingkatan pada tingkat ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Terakhir, suatu Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a) sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota, b) mewakili masa gaya yang khas, c) tingkat ketereancamannya tinggi, d) jenisnya sedikit, dan/atau e) jumlahnya terbatas. Pemingkatan pada tingkat ini diterapkan melalui keputusan bupati atau walikota. Cagar Budaya yang memiliki peringkat tingkat nasional dapat diusulkan oleh pemerintah menjadi warisan budaya dunia. Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memenuhi persyaratan, peringkatnya dapat dikoreksi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan. Peringkat Cagar Budaya sendiri dapat dicabut apabila Cagar Budaya tersebut musnah, kehilangan wujud dan bentuk aslinya, kehilangan sebagian besar unsurnya, atau tidak lagi sesuai dengan syarat pemingkatan.

Cagar Budaya yang sudah tercatat pada Register Nasional juga dapat dihapus melalui Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pemerintah. Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya tersebut musnah, hilang dan dalam jangka waktu enam bulan tidak ditemukan, mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya, atau di kemudian hari baru diketahui bahwa statusnya bukan Cagar Budaya. Penghapusan Cagar Budaya dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya, kecuali jika Cagar Budaya tersebut hilang, di mana pen-

catatan ulang harus dilakukan.

Mengenai pelestarian dan pemeliharaan, kegiatan pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan pelestarian ini harus berkoordinasi dengan tenaga ahli dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara pelestarian ini harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

### **Langkah konkrit BI Menjadikan Gedung KPwBI Medan Menjadi Sebuah *Heritage***

Gedung KPwBI Medan merupakan eks gedung De Javasche Bank yang di masa kolonial merupakan salah satu aset penting pemerintah Hindia Belanda, dan bertugas dalam mengatur pengelolaan mata uang Kota Medan di masa itu itu. Perjalanan sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Medan sendiri sudah berlangsung lama sejak Pemerintah Belanda mendirikan Kantor Cabang De Javasche Bank (DJB) di Medan pada tanggal 30 Juli 1907 sebagai KC DJB yang ke-1. Pada 1912 dibangun gedung baru di Jl. Balai Kota No. 4. Pendirian KC Medan diikuti dengan pendirian KC Tanjung Balai dan KC Tanjung Pura berturut-turut pada 15 Januari 1908 dan 03 Februari 1908. Pembukaan KC Medan, Tanjung Balai, Tanjung Pura, dan Bengkalis lahir sebagai kebutuhan untuk menunjang kebijaksanaan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul DJB) yang pada waktu itu memberlakukan "*guldenisasi*" bagi "*Residentie Oostkust van Sumatera*" atau Keresidenan Pantai Timur Sumatera.

Melalui pertukaran pendapat serta surat menyurat beberapa kali, baik dengan Gubernur Jenderal maupun dengan Direktur Keuangan (Menteri Keuangan), di samping dibicarakan secara internal di dalam rapat direksi sebanyak tidak kurang dari tujuh kali,

khususnya yang berkaitan dengan tata cara yang akan ditempuh dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, akhirnya terbit Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 tanggal 13 Maret 1907. Surat memberikan izin kepada DJB untuk mendirikan KC Medan sebagai “kantor induk” dan kantor koresponden di Bengkalis.

Setelah pendirian KC di Medan ini barulah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dalam wilayah Asahan dan di Tanjung Pura dalam wilayah Langkat. Permohonan pendirian kedua kantor ini diajukan kepada Gubernur Jenderal dengan Surat No. 796 tanggal 20 September 1907 yang persetujuannya diberikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 17 tertanggal 9 November 1907. Dengan berkembangnya kegiatan KC Medan dan adanya pengaruh resesi dunia pada tahun 1930-an, KC Tanjung Balai, Tanjung Pura, dan Pematang Siantar akhirnya ditutup, masing-masing pada tanggal 31 Maret 1938, 1 April 1927, dan 31 Maret 1932. KC Medan sempat ditutup pada tahun 1941 s.d 1946 yakni pada masa Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang.

Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat itu keadaan tidak menentu dan Direksi DJB dipaksa oleh tentara pendudukan Jepang untuk menandatangani penyerahan seluruh kekayaan bank-bank tanpa syarat. Pada tanggal 11 April 1942 pemerintah militer Jepang melakukan likuidasi<sup>61</sup> dalam bentuk moratorium yang berlaku bagi semua bank milik Belanda, termasuk DJB, milik Inggris, milik Cina, dan bank-bank asing lainnya. Setelah pembubaran bank tersebut, tiga bank Jepang yang telah beroperasi di Hindia Belanda yakni

61. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban mereka kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (KBBI, Edisi III, Departemen Pendidikan Nasional).

Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank menggantikannya. Khusus untuk DJB dibentuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang bertugas sebagai Bank Sirkulasi<sup>62</sup> meskipun kenyataannya lembaga ini hanya bertugas sebagai koordinator karena yang sesungguhnya beroperasi di beberapa kota adalah Yokohama Specie Bank untuk Pulau Jawa dan Taiwan Bank untuk luar Jawa.

Sejak September 1944 pemerintah Jepang telah menggedarkan uang Jepang baru sebanyak 5 pecahan mulai 50 sen hingga 100 rupiah, kemudian saat itu istilah gulden telah diubah menjadi rupiah walaupun istilah rupiah sudah digunakan sejak tahun 1833. Setelah Perang Pasifik usai dan Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, KC DJB Medan dibuka kembali pada 20 Juni 1946. Adapun Pemimpin Cabang Medan yang pertama adalah L. von Hemert, dan pada 1951 saat Indonesianisasi dilakukan, pemimpin cabang adalah M. Plantema dan putera Indonesia pertama yang mengendalikan KCBI Medan adalah M. Rifai.

Berdiri sejak 1906, hingga kini Gedung Bank Indonesia (BI) Medan masih gagah berdiri tanpa terlihat sedikit pun perubahan. Dari awal didirikan, perubahan hanya terlihat pada perluasan sayap kanan dan kiri. Namun, penambahan itu pun sudah dilakukan sebelum De Javasche Bank diambilalih oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini juga diakui oleh Pensiunan Bank Indonesia, Samsul Bahri (77 tahun) yang telah bekerja di Biro Divisi Perdagangan (BDP) pada 1959, saat kantor BPD juga berada di Gedung Bank Indonesia. "Saya masuk 1959, gedung BI memang sudah begitu sampai saat ini untuk bagian luar tidak ada perubahan, kecuali cat dindingnya saja krem dan putih. Tapi saya lihat foto lamanya awalnya itu sayap kanan dan kiri tidak selebar sekarang. Saya tidak tahu kapan renovasinya, saya masuk sudah seperti saat ini, mungkin pada masa Belanda sudah ditambah," ujarnya.<sup>63</sup> Samsul mengaku pada 1969 ia pun mencoba peruntungan

62. Bank sirkulasi adalah bank yang berfungsi mengatur peredaran uang.

63. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Samsul di KPwBI Medan.

dan akhirnya diterima menjadi karyawan Bank Indonesia.

Usaha Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian situs-situs bangunan miliknya sudah berjalan sejak lama. Keseriusan Bank Indonesia dalam melakukan perawatan terhadap bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) berdasarkan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2012 ini pun cukup konsisten. Sejak lebih dari satu dasawarsa lalu Bank Indonesia telah menaruh perhatian besar dalam melestarikan gedung bersejarah, dengan salah satunya mengkonservasi Gedung KPwBI Medan.<sup>64</sup> Upaya-upaya itu diwujudkan melalui perawatan gedung secara berkala dengan tanpa mengurangi nilai-nilai kesejarahan dari bangunan *heritage* tersebut. Bahkan dalam mendukung program tersebut, sejak September 1990 BI telah menetapkan pemakaian bangunan 10 lantai yang baru di bagian belakang bangunan lama<sup>65</sup> seluas 8.598 m<sup>2</sup>.

Contoh lainnya adalah seperti renovasi besar-besaran yang dilakukan tahun 2000 di Bank Indonesia cabang Medan, dimana pada saat itu bagian kubah yang sejak tahun 1956 dihilangkan kembali dipasangkan kembali seperti sedia kala. Upaya pelestarian bangunan bersejarah ini tidak hanya dalam perspektif regenerasi dan revitalisasi fisik semata, namun juga dalam perspektif memfungsikan sektor kultural. Tidak sebatas itu, pemindahan kantor KPwBI ke gedung yang baru juga dimaksudkan supaya beban dan fisik dari bangunan KPwBI yang lama dapat bertahan lebih panjang sehingga upaya perawatan dan perbaikan dari ruangan-ruangan di dalamnya dapat dilakukan secara maksimal.

Alasan utama yang dijadikan dasar atas upaya Bank Indonesia dalam menjadikan Gedung KPwBI Medan sebagai bagian dari *her-*

64. Diakses dari [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita\\_khusus/Pages/UKMBI\\_04012011.aspx](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita_khusus/Pages/UKMBI_04012011.aspx), , tanggal 14 November 2016 pukul 11.25 WIB.

65. Luas Bangunan lama KPwBI sendiri seluas 1.680 m<sup>2</sup> yang terdiri dari dua lantai bangunan.

*itage* adalah karena tingginya nilai sejarah yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Selain karena faktor sejarah, pelestarian gedung ini sebagai salah satu *heritage* juga bertujuan sebagai upaya pembelajaran terhadap peninggalan bangunan-bangunan tua di masa kolonial kepada generasi yang akan datang. Kepentingan lainnya adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap peninggalan-peninggalan situs *heritage* di Kota Medan yang belum semuanya mendapatkan status dan pelestarian yang sama secara berkala.

Salah satu tolak ukur dalam menilai karya arsitektur adalah lamanya bertahan, dalam maksud mendapat penghargaan spontan dari masyarakat. Gedung yang dapat dikategorikan baik dan berhasil dengan sendirinya tidak mempunyai kecenderungan untuk dibongkar tetapi sebaliknya cenderung dilestarikan. KPwBI adalah salah satu gedung *heritage* yang masih utuh dalam bentuk aslinya, meskipun sudah melampaui masa yang cukup lama. Untuk dapat menghasilkan karya bangunan yang bermutu, arsitek atau siapa saja yang akan membangun haruslah belajar dari alam, lingkungan, budaya tat acara masyarakat.

Hal yang penting juga adalah belajar dari keberhasilan bangunan yang sudah ada. Dengan kata lain arsitek hendaknya belajar dari masa lampau untuk membangun masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu bangunan lama yang sudah diuji keberhasilannya melalui perjalanan sejarah baik yang tradisional dan modern, hendaknya dilestarikan. Bangunan tersebut, dapat menjadi bahan bukti peninggalan sejarah pada umumnya dan khususnya sejarah perkembangan arsitektur dan budaya bangsa.

# 10 Epilog

Uang mempunyai dinamika yang panjang mulai dari bahan sampai dengan fungsinya. Dari sisi bahan, uang pada awalnya dibuat dari bahan-bahan yang dianggap mempunyai nilai sepadan dengan barang atau jasa yang dipertukarkan seperti: kulit binatang, kerang, perak, emas dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan waktu, nilai uang tidak didasarkan pada nilai bahannya tetapi pada jaminan otoritas yang mengeluarkannya. Dari sisi ekonomi, fungsi uang cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan di mana fungsi pokoknya tetap sebagai alat pembayaran transaksi, satuan hitung dan penyimpan nilai. Secara politik, uang dipakai sebagai bentuk penegasan kedaulatan suatu bangsa. Persinggungan dari dua sisi tersebut, uang sudah lama dipraktikkan sebagai instrumen untuk mencapai hegemoni, melalui upaya memperkuat perekonomian sendiri sekaligus memperlemah bahkan menghancurkan kekuatan ekonomi negara lain yang menjadi targetnya.

Dalam kondisi perang secara militer, uang juga dapat difungsikan sebagai salah satu senjata untuk memenangkan pertempuran. Berbagai strategi ditempuh mulai dari memalsukan uang negara lawan sampai dengan menghancurkan kemampuan negara lawan mencetak dan mengedarkan uangnya. Pada era damai, perang mata uang juga dapat berlangsung antara lain melalui upaya-upaya untuk menjadikan mata uang negara sendiri lebih kondusif dalam memperkuat fondasi dan struktur perekonomiannya. Dalam konteks ini, setiap bangsa dituntut untuk terus berjuang agar mata uangnya

menjadi penegas kedaulatan sekaligus kebanggaan setiap warganya serta mendukung daya saing untuk memajukan dan memperkuat perekonomiannya.

Pada tataran yang sangat mikro, uang pernah difungsikan sebagai alat bagi perusahaan untuk alat penukar yang berlaku hanya di lingkungan perusahaan tersebut. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berkembang “uang kebon” yang dicetak dan diedarkan oleh masing-masing perusahaan dan hanya berlaku di lingkungan tersebut. Pada era modern, pencetakan dan peredaran barang yang difungsikan seperti uang yang berlaku di lingkungan terbatas perusahaan yang bersangkutan sangat lazim dengan bahan yang semakin canggih. Era koin semakin ditinggalkan dan digantikan dengan uang digital. Bagi otoritas, pencetakan uang tersebut dapat didukung sepanjang hanya diberlakukan untuk mendukung kelancaran transaksi terbatas pada internal perusahaan dan tidak dijadikan alat untuk menyandera para pekerja sebagaimana dilakukan pada era berlakunya “uang kebon”.

Dalam pergaulan bangsa-bangsa, terbukti bahwa dominasi mata uang berbanding lurus dengan besarnya peranan dalam perdagangan global. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, mata uang yang dominan beredar di masyarakat Sumatera Timur atau Sumatera Utara saat ini, justru mata uang dollar Spanyol dan straitsettlement Inggris. Strategi guldenisasi yang ditempuh pemerintah Hindia Belanda untuk menegaskan kedaulatannya terbukti hanya berhasil secara politis dan tidak cukup efektif secara ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk meningkatkan peran mata uang suatu negara di kancah perekonomian global adalah dengan memacu peningkatan kontribusinya di perdagangan internasional.

Di kancah domestik, uang yang merupakan darah bagi kehidupan perekonomian sangat penting dijaga agar tersedia sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian dan transaksi dapat dilakukan secara lancar, efisien, aman dan nyaman. Studi ini membuktikan bahwa

upaya untuk menghancurkan fondasi perekonomian suatu bangsa tidak hanya dilakukan dengan melakukan blokade perdagangan tetapi juga melakukan sabotase terhadap peredaran uang. Strategi yang dilakukan oleh NICA terkait hal tersebut adalah dengan membanjiri perekonomian dengan uangnya sendiri (gulden) atau yang lebih dikenal dengan uang merah dan memalsukan ORI. Strategi ini menyebabkan jumlah uang yang beredar jauh melampaui kebutuhan riil masyarakat sehingga harga-harga melambung sangat tinggi. Kondisi ini juga diperparah dengan semakin langkanya pasokan barang akibat blokade ekonomi.

Di masa perjuangan untuk mempertahankan republik, uang tidak hanya diperlukan untuk mendukung transaksi ekonomi tetapi juga sangat strategis untuk mendukung pembiayaan kebutuhan logistik dan persenjataan militer. Dengan demikian, perjuangan anak-anak bangsa yang mempertaruhkan jiwa raga demi tetap tersedianya kebutuhan uang tersebut tidak kalah heroiknya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan secara militer. Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja lahir sudah barang tentu belum memiliki infrastruktur dan alat-alat yang canggih untuk mencetak dan mengedarkan ORI. Apalagi NICA semakin membabi buta membombardir tempat-tempat strategis termasuk merebut ibu kota. Upaya penyelamatan republik dengan memindahkan pemerintahan ke Yogyakarta juga harus diikuti dengan memindahkan mesin-mesin cetak uang dan perlengkapannya. Pindahan ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena juga termasuk objek-objek vital yang menjadi incaran NICA untuk dilumpuhkan dan dihancurkan. Dengan semangat juang yang tinggi dan rela mempertaruhkan jiwa raga menghadapi risiko tertangkap oleh Belanda, para pejuang ini berhasil menjaga nadi perekonomian tetap berdenyut dengan tetap beredarnya ORI meski dalam skala yang terbatas. Semangat para pejuang dengan amunisi ORI tersebut semakin berkobar karena dukungan masyarakat yang memilih ORI atau uang putih. Pemerintah tidak hanya berhasil meyakinkan masyarakat

untuk menggunakan ORI sebagai alat transaksi namun juga menjadi kebanggaan dan simbol kedaulatan bangsa.

Strategi NICA untuk menghancurkan perekonomian juga dilakukan dengan memblokade wilayah-wilayah Indonesia agar tidak dapat memperoleh dan menggunakan ORI serta mengisolasi dari perdagangan internasional terutama melalui Selat Malaka. Sumatera Utara menjadi salah satu target utama strategi NICA tersebut karena peranannya dalam mendukung ekspor komoditas dan hasil tambang. Pemerintah pusat menyadari sulitnya menembus blokade NICA tersebut terutama dalam mengedarkan ORI. Di tengah situasi yang sulit tersebut, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mencetak dan mengedarkan ORI daerah atau ORIDA.

Dalam hal strategi pengelolaan ORI, pemerintah pusat menghadapi beberapa kendala bahkan yang bersifat agresi uang secara simultan. Dari sisi agresi uang, NICA dengan sengaja membanjiri dengan uang NICA atau oleh masyarakat dikenal dengan uang merah dan pemalsuan ORI oleh NICA. Di sisi lain, infrastruktur pendukung mulai dari percetakan, jaringan kantor dan lain-lain yang masih sangat terbatas di tengah sengitnya gempuran tentara NICA. Dalam kondisi tersebut, pendelegasian otoritas kepada pemerintah daerah untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA di masing-masing wilayahnya menjadi pilihan yang dinilai paling tepat.

Kondisi medan yang relatif lebih sulit dibandingkan dengan wilayah Jawa menjadikan perjuangan anak-anak bangsa di wilayah Sumatera bagian utara ini menghadapi tantangan yang lebih berat. Apalagi tentara-tentara NICA juga rajin berpatroli untuk memblokade baik dari laut maupun darat. Namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pejuang untuk mempertahankan agar nadi perekonomian tidak putus dan menjadi kekuatan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan logistik dan peralatan perang para pejuang militer.

Pemberian otoritas kepada pemerintah daerah untuk mencetak dan mengedarkan ORIDA, pada prinsipnya adalah kebijakan darurat yang berlaku secara temporer. Oleh karena itu, pemerintah pusat segera melakukan penarikan seluruh ORIDA dan kewenangan dikembalikan kepada bank sentral sebagai bank sirkulasi. Lancarnya penarikan ORIDA tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan masyarakat menjadikan ORIDA tersebut sebagai bagian dari instrumen perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada keinginan untuk terus menggenggam kewenangan tersebut.

Pada era modern, tantangan untuk menjadikan Rupiah sebagai penggerak ekonomi sekaligus menjadi kebanggaan dan penegas kedaulatan bangsa tidaklah ringan. Bentuk dan variasi tantangan akan mengikuti perubahan kemajuan zaman sehingga otoritas harus lebih sigap dalam melakukan langkah-langkah tertentu yang diperlukan. Fenomena beredarnya *bitcoin* bisa menjadi pembelajaran bagaimana otoritas dan masyarakat memberi respons secara tepat sehingga tidak menimbulkan ancaman yang tidak perlu di kemudian hari sebaliknya bisa menarik kemanfaatan jika hadirnya fenomena seperti itu sebagai suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Arsip Bank Indonesia. *Gedenboek van De Javasche Bank Deel I-II*, 1928.
- Arsip Bank Indonesia. *Jaarverslag van de Javasche Bank*, 1946.
- Arsip Bank Indonesia. *Laporan Tahun Pembukuan Bank Indonesia 1952-1953*.
- Arsip Bank Indonesia. *Laporan Tahun Pembukuan Bank Indonesia 1957-1958*.
- Arsip Bank Indonesia. *Laporan Tahun Pembukuan Bank Indonesia 1959-1960*.
- Arsip Bank Indonesia. *Laporan Tahun Pembukuan Bank Indonesia 1960-1965*.
- Arsip Bank Indonesia. Bank Negara Indonesia (Unit I), *Laporan Tahun Pembukuan*, 1968.
- Arsip Bank Indonesia. *Laporan Tahunan De Javasche Bank 1951-1952*
- Arsip Bank Indonesia. *Notulen Vertrouwelijk Directie Vergaderingen*, 11 Februari 1907 dan 18 Februari 1907.
- Arsip Bank Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955*.
- Arsip Bank Indonesia. *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Bank Indonesia Medan, Tanjung Balai, dan Tanjung Pura*. 1990.
- Arsip Bank Indonesia. *Sekilas Sejarah Kantor Cabang Bank Indonesia Bengkalis 27 Juni 1907 – 31 Maret 1932*. 1991.
- Arsip Bank Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 1953*.
- Arsip Bank Indonesia. *Undang-undang No. 13 Tahun 1968*.
- Arsip Bank Indonesia. *Verslag van de President van De Javasche Bank*.

*Arsip DJB No. 1502.*

Arsip Bank Indonesia. *Oendang-Oendang No. 322/1942, 5 Juli 1942.*

Arsip Nasional Belanda. *Gemeente Medan, 1909-1934.*

Arsip Nasional Belanda. *Verslag Betreffende de Gemeente Medan, 1919*

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip Sumatra Westkust/SWK, 1824.*

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip Binnenland Bestuur, 1912.*

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1880-1907.*

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 5 Oktober 1945.*

### Artikel Koran

*Asia Raya, 1942.*

*Harian Lembaga, 1959.*

*Kan Po, 1942-1944*

*Makmoer, No. 10., Thn. 1., (1946).*

*Mestika, 1951-1958*

*Warta, 1959-1960*

*Waspada, 30 Agustus 1957.*

### Buku

Anonim. 1930. *De Kolonial Roeping van Nederland.* Amsterdam: Drukkerij M. Lindenbaum & Co.

Anderson, John. 1971. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823,* Oxford in Asia Historical Reprints. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Anwar, Mohammad Arsyad dan Sri-Edi Swasono. 1986. *Ekonomi Indonesia: Masalah dan Prospek 1986/1987.* Jakarta: UI Press.

Arief, Sritua. 1977. *Indonesia: Growth, Income Disparity and Mass Poverty.* Jakarta: Sritua Arief Associates.

- Atkins, James. 2010. *The Coins and Tokens of the Possessions and the Colonies of the British Empire (Classic Reprint)*. New York: Forgotten Books.
- Barlow, Colin and Thee Kian Wie. 1988. *The North Sumatran Regional Economy: Growth with Unbalanced Development*. Singapore: ISEAS.
- Basarshah, Tuanku Luckman Sinar. 2006. *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Basry, M. Hasan. 1992. *Uang Kita Pernah Berupa Bon Kontan*. Jakarta: Intisari.
- Boersma, R. 1919. *Oostkust van Sumatra*, Jilid I. *De Ontluiting van Deli*. Batavia.
- \_\_\_\_\_. 1922a. *Oostkust van Sumatra*, Jilid I. *De Ontluiting van Deli*. Deventer.
- \_\_\_\_\_. 1922b. *Oostkust van Sumatra*, Jilid II: *De Ontluiting van Deli*. Deventer.
- Boezemer, T.J. 1921. *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Bree L De. 1928. *Gedenkboek van De Javasche Bank 1828–24 Januari 1928 Tweede Deel*. Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Breman, Jan. 1997a. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- Burger, D. H dan Parajudi Atmosudirdjo. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- \_\_\_\_\_. 1970. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Charlesworth, Harold Karr. 1959. *A Banking System in Transition*:

- The Origin, Concept and Growth of The Indonesian Banking System*. Jakarta: The New Nusantara Publishing Co.
- Colombijn, Freek., et al. (eds). 2015. *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Colombijn, Freek and Joost Cote. 2015. *Cars, Conduit, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Cruetzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen (eds). 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak.
- Darsono, dkk. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dick, Howard, et al. 2002. *The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Hawaii: Allen & Unwin and University of Hawaii Press.
- Djafar, Zainuddin. 2006. *Rethinking the Indonesian Crisis*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojohadikoesoemo, Soemitro. 1947. *Beberapa Soal Keoeangan*, Djakarta: Poestaka Rakjat.
- Erwin dan T. Sabrina. 1999. *Sejarah Tembakau Deli*. Medan: PTP. Nusantara II (Persero).
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gonggong, Anhar dan Sutrisno Kutoyo (eds). 1977. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gooszen, Hans. 1999. *Demographic History of the Indonesian Archipelago 1800-1942*. Leiden: KITLV Press.

- Hamid, Datuk Abdul. 2011. *Sejarah Langkat Mendai Tuah Berseri*. Medan: Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.
- Hartono, Noek. 1976. *Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Husny, Tengku H.M. Lah. 1978. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jennifer Cushman and Wang Gungwu (eds). 1988. *Changing Identities of Southeast Asian Chinese Since World War II*. Hongkong: Hongkong University Press.
- Ji, Zhaojin. 2003. *History of Modern Shanghai Banking*. New York: An East Gate Book.
- Kahin, Audrey. 1989. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990a. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1990b. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Masyarakat & Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang tak Terceritakan*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kusuma, Erwien. 2014. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Lansen, A.J. & L.T. Wells Jr. 2001. *Plantage-, Handels-, en Mijngeld*

- van Nederlands-Indie*. Vriezenveen: Mevius Numisbooks Int. B.V.
- Leirissa, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 –1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_, et al. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Lindblad, J Thomas (ed). 1993. *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Lindblad, J. Thomas dan Peter Post (eds). 2009. *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. Leiden: KITLV Press.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2008. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- Meuraxa, Dada. *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara*. Medan: Penerbit Sastrawan.
- Moor, J A De. 2015. *Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muljana, Bernardus Sugiarta. 1972. *The Role of Agricultural Exports in Indonesia's Economic Development*. Disertasi University of Iowa. Iowa: University of Iowa.
- Nasoichah, Churmatin. 2010. *Uang Kebon: Mata Uang Lokal di Perkebunan Deli*.
- Papendrecht, A. Hoyneck van. 1972. *Gedenkschrijft van de Tabak Maatschappij Arendsborg, Tergelegenheid van het 50-jarig Bestaan, 1877-1927*. Rotterdam: van Hove.
- Paulus, J. 1917. *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*. Leiden: EJ Brill.
- Pelly, Usman, Rata. R, dan Soenyata Kartadarmadja. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Sumatra Utara Kotamadya Medan*. Jakarta: Depdikbud.

- Pelzer, Karl J. 1985. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863–1947*. Jakarta: Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawiranegara, Sjafruddin. tt. *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Prawiro, Radius. 1998. *Kiprah, Peran, dan Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Propinsi Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Penerangan, Tanpa Tahun.
- Purwanto, Bambang dan Thomas Lindblad. 2010. *Merajut sejarah ekonomi Indonesia: essays in honour of Thee Kian Wie: 75 years birthday*. Yogyakarta: Ombak.
- Purwestri, et al. 2009. *Warisan De Javasche Bank: Bank Indonesia Kota*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ravesteijn, Wim and Jan Kop (eds). 2008. *For Profit and Prosperity: the Contribution Made by Dutch Engineers in Indonesia 1800-2000*. Leiden: Aprillis and KITLV Press.
- Reid, Anthony. 2010. *Soematera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rothe, Cecil. 1949. *Arbeid in de Landbouw: De Landbouw in de Indische Archipel, Vol. I*. Den Haag.
- Said, Mohammad. 1977. *Suatu Zaman Gelap di Deli: Koeli Kontrak*

- Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Waspada.
- Schwarz, Adam. 2000. *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. Boulder: Westview Press.
- Yoshimasa, Shibata. 1996. *The Monetary Policy in Netherlands East Indies under the Japanese Administration*. Leiden: Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde.
- Smith, Anthony L (ed). 2001. *Gus Dur and the Indonesian Economy*. Singapore: ISEAS.
- Solikin dan Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA.
- Suprayitno. 2001. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia: Dari Federalisme ke Unitarisme Studi tentang Negara Sumatera Timur 1947-1950*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Tim Penulis. 2005a. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1949*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2005b. *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia*. Jakarta: Museum Bank Indonesia.
- To, Oey Beng. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Varma, M.A. Nitin. 2011. *Producing Tea Coolies?: Work, Life And Protest In The Colonial Tea Plantations Of Assam, 1830s-1920s*. Disertasi Doktor Sejarah Pada Universitas Berlin. Berlin: University Of Berlin.
- Vissering, G. 1920. *Muntwezen en Circulatie-Banken in Nederlandsch-Indie*. Amsterdam: J.H de Bussy.

- Wie, Thee Kian. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863–1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Explorations in Indonesian Economic History*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yasmis. 2007. *Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli – Sumatera Timur Tahun 1880-1915*. Tesis Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

### Jurnal

- Adrian E. Tschoegl, Tschoegl, Adrian E. 2001. "The International Expansion of Singapore's Largest Banks". *Working Paper The Wharton Financial Institutions Center*. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Ahyat, Ita Syamtasiah. 1995. "Tanah dan Kapitalisme di Sumatera Timur." *Laporan Penelitian Departemen Sejarah Universitas Indonesia*.
- Airriess, Christopher. 1995. "Port-Centered Transport Development In Colonial North Sumatra." *Journal Indonesia, Vol. 59*.
- Akashi, Yoji. 1970. "Japanese Policy Towards the Malayan Chinese 1941-1945". *Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 1, No. 2*.
- Amigó, María Florencia. 2010. "Small Bodies, Large Contribution: Children's Work in Plantations of Lombok, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology Vol. 11, No. 1*.
- Bennet, Michael S. 1995. "Banking Deregulation in Indonesia." *University of Pennsylvania Journal of International Business Law, Vol. 443*.
- Booth, Anne. 2011. "Splitting, Splitting and Splitting Again: A Brief History of the Development of Regional Government in Indonesia Since Independent." *Journal of Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Vol. 167, no. 1*.
- \_\_\_\_\_. 2015. "A century of Growth, Crisis, War, and Recovery

- 1870-1970." Dalam .  
 \_\_\_\_\_ . 1999. "The Historical Development of the Indonesian Statistical System." *Asian Historical Statistic Project, Hitotsubashi University, Discussion Paper*.
- Colombijn, Freek. 2005. "A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870." *Journal of Modern Asian Studies Vol. 39, No. 1*.
- Cribb, Robert. 1981. "Political Dimensions of the Currency Question 1945-1947". *Indonesia Vol. 31, April 1981*.
- Dillon, H. S. 1985. "Development of Rubber Smallholders in North Sumatera." Dalam Proceedings of an international workshop held at the University of Adelaide, South Australia 18-20 February 1985.
- Fane, George. 1996. "Deregulation in Indonesia: Two Steps Forward, One Step Back." *Journal of Agenda Vol. 3, No. 3*.
- Fatimah. 2005. "Pembukaan Perkebunan Tembakau Sumatera Timur." *Historisme Edisi Khusus, No. 21. Tahun X*.
- Feenstra, Alberto. 2014. "Dutch Coins For Asian Growth: VOC-Duiten To Assess Java's Deep Monetisation And Economic Growth, 1724-1800." *Journal Of Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis Vol. 11, No. 3*.
- Frey, Marc. 2003. Control, Legitimacy, and the Securing of Interests: European Development Policy in South-east Asia from the Late Colonial Period to the Early 1960s." *Journal of Contemporary European History, Vol. 12, No. 4*.
- Henley, David. 2004. "Conflict, Justice, and the Stranger-King: Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere." *Journal of Modern Asia Studies Vol. 38, No. 1*.
- Hill, Hall. 2013. "The Political Economy of Policy Reform: Insights from Southeast Asia." *Asian Development Review, Vol. 30, No. 1*.
- Huff, Gregg, and Shinobu Majima. 2013. "Financing Japan's World War II Occupation of Southeast Asia." *The Journal of Economic History, Vol. 73, No. 4*.

- Indera dan Suprayitno. 2004. "Pengaruh Pertumbuhan Industri Karet Terhadap Kuli Kontrak Di Sumatera Timur 1904-1920." *Lecture Paper Universitas Sumatera Utara*.
- Iskandar, Mohammad. 2004. "Oeang Republik" dalam *Jurnal Sejarah: Pemikiran, Konstruksi, dan Persepsi, Vol.6., No. 1*.
- Jessup, Helen. 1985. "Dutch Architectural Visions of the Indonesian Tradition." *Jurnal Muqarnas Vol. 3*.
- Kalo, Syafruddin. 2004. "Di Bawah Cengkeraman Kapitalisme: Konflik Status Tanah Jaluran Antara Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatra Timur Jaman Kolonial." *Lecture Paper Universitas Sumatera Utara*.
- Kuncoro, Ari and Budy P. Resosudarmo. 2006. "Understanding The Political Economy of Indonesian Economic Reforms: 1983-2000." *Journal of Oxford Development Studies, Vol. 34, No. 3*.
- Langenberg, Michael van. 1982. "Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatera," *Indonesia No. 33*.
- Leeuwen, Bas van and Foldvari, Peter. 2008. "*Human capital and economic growth in Asia 1890-2000: a time-series analysis*." *Asian Economic Journal, Vol.22, No.3*.
- Lindblad, Thomas. 2009. "The Economic Decolonization Of Sumatra." *New Zealand Journal Of Asian Studies, Vol. 11, No. 1*.
- Matsui, Kazuhisa. 2003. "Decentralization in Nation State Building of Indonesia." *IDE Working Paper No. 2*.
- McCoy, Alfred W. "Southeast Asia Under Japanese Occupation", *Monograph Series No.22, Yale University*.
- Mead, David. 2011. "Coins of Realm: Some Coin of the Dutch Colonial Period." *Sulang Language Data and Working Papers: Topics in Lexicography, No. 4*.
- Mr. Moh. Thayeb. 1947. "Blokade Ekonomi" dalam *Mimbar Indonesia, No. 1, Thn II*.
- Muhsin, Mumuh. 2011. "Dinamika Sosial Ekonomi Priangan Abad ke-19". *Jurnal Sosiohumaniora Vol. 13, No. 1*.

- Nasoichah, Churmatin. 2010. "Uang Kebon: Mata Uang Lokal Perkebunan di Tanah Deli." *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, Vol. 13, No.25.
- Nurhamidah. 2005. "Sejarah Buruh Perkebunan di Sumatera Timur." *Historisme Edisi Khusus*, No. 21. Tahun X.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Perkembangan Kota Medan 1909-1951." *Lecture Paper Universitas Sumatera Utara*.
- Nordholt, Henk Schulte. 2011. "Indonesia In The 1950s: Nation, Modernity, And The Post-Colonial State." *Journal of Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, no. 4.
- Passchier, Cor. 1991. "Medan, Hoofdstad van Noord-Sumatra." *Bulletin KNOB*, Vol. 4.
- \_\_\_\_\_. 1995. "Medan: Urban Development By Planters And Entrepreneurism 1870-1940." Research School CNWS.
- Reid, Anthony. 1980. "The Structure of Cities in Southeast Asia, Fifteenth to Seventeenth Centuries." *Journal of Southeast Asia Studies*, Vol. 11, No. 2.
- Robinson, Richard. 1988. "Authoritarian States, Capital-Ownning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia." *Journal of World Politics*, Vol. 41, No. 1.
- Sairin, Sjafri. 1997. "Kebijakan Perburuhan di Perkebunan Sumatera Timur Pada Masa Kolonial", *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 52, Tahun 1997.
- Santoso, R. Hardjo. *De Javasche Bank pada Masa Peperangan*. Jakarta: Kantor Arsip Bank Indonesia, tidak diterbitkan.
- Sato, Shigeru. 2000. "Labour Relations in Japanese Occupied Indonesia." *Clara Working Paper* No. 8.
- Sinar, Tengku Lukman. 1994. "Sejarah Perkebunan Sumatera Timur Abad ke-19 dan Dampak Sosial-Ekonominya," *Makalah Musyawarah Kerja Nasional Sejarah XII, Medan, 12-15 Juli 1994*.
- Stoler, Ann Laura. 1985. "Perceptions of Protest: Defining the Dangerous in Colonial Sumatra." *Journal of American Ethnologist*, Vol. 12, No. 4.

- \_\_\_\_\_. 1987. "Sumatran Transition: Colonial Capitalism and Theories of Subsumption", dalam *International Social Science Journal*, November 1987.
- Suroto, Suri. 1984. "Gerakan Buruh dan Permasalahannya." *Prisma*, No. 11, Tahun 1984.
- Suwirta, Andi. 2002. "Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah", dalam *Historia Jurnal Pendidikan Sejarah*, No. 5, Vol. III.
- The Economic Review of Indonesia*, March 1948, Vol. II, No. 3, hlm. 34.
- Tschoegl, Adrian E. 2001. "The International Expansion of Singapore's Largest Banks". *Working Paper The Wharton Financial Institutions Center*, Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Uhlin, Ander. 2002. "Globalization, Regime Transition, and the Indonesian State." Paper for Annual Meeting of American Political Science Association, August 29 – September 1.
- Weber, Robert, Heiko Faust, dan Werner Kreisel. 2002. "Colonial Interventions on Cultural Landscape of Central Sulawesi by Ethical Policy." *STORMA Discussion Paper Series No. 2*.
- White, Nicholas J. 2011. "Surviving Sukarno: British Business in Post-Colonial Indonesia 1950-1967." *Journal of Modern Asian Studies* Vol. 46, No. 5.
- Wolters, Willem G. 2008. "Heavy and light money in the Netherlands Indies and the Dutch Republic: dilemmas of monetary management with unit of account systems." *Journal of Financial History Review*, Vol. 15, No.1.
- Yacob, Shakila. 2007. "Model of Welfare Capitalism? The United States Rubber Company in Southeast Asia, 1910–1942." *Journal of Enterprise and Society*, Vol. 8, No. 01.
- Yoshimasa, Shibata. 1996. "The monetary policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 152, No. 4.
- Zainun, Nazarudin. 2006. "Depresi Ekonomi Dunia 1929-1935: Pe-

- rubahan Dasar Ekonomi, Hala Tuju Dan Involusi Pertanian Di Pulau Jawa." *Jurnal Ekuitas Vol. 10, No. 1*.
- Zanden, Luiten van. 2010. "Colonial state formation and patterns of economic development in Java, 1800-1913." *Journal of Economic History of Developing Regions Vol. 25, No. 2*.
- Zanden, Luiten van. 2011. Economic growth in Java 1820-1940 Is it possible to reconstruct the historical national accounts of (19<sup>th</sup> century) Java?" *Paper for the workshop "Economic growth and institutional change in Indonesia, 19th and 20th centuries", IISG, Amsterdam*.

### Sumber Internet

- Bank Indonesia Museum (2008). "DJB [De Javasche Bank] during the Japanese Occupation (1942 – 1945)". Bank Indonesia Museum. <http://www.bi.go.id/en/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi/Pages/historybeforebi5.aspx>, diakses pada 11 April 2016 pukul 15.00 WIB).
- DJB Masa Revolusi* dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 2 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB
- Museum Bank Indonesia. "DJB [De Javasche Bank] during the Japanese Occupation (1942 – 1945)", Museum Bank Indonesia, 2008. <http://www.bi.go.id/en/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi/Pages/historybeforebi5.aspx>, diakses pada 11 April 2016 pukul 15.00 WIB
- <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html> diakses pada 20 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB
- [www.plantagegeld.nl](http://www.plantagegeld.nl) diakses pada 10 Juni 2016 pukul 09.00 WIB

# BERJUANG DENGAN UANG

**MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA:  
SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA**

**Prof. Dr. Bambang Purwanto**

(Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada)

Uang memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu negara. Selain dapat digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan alat penyimpan kekayaan, uang juga memiliki fungsi politis yakni sebagai instrumen perjuangan dan salah satu simbol kedaulatan suatu bangsa. Buku dengan judul “Berjuang dengan Uang” ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi memainkan peranan tersendiri dalam upaya bangsa mempertahankan kemerdekaan.

**Prof. Dr. Gusti Asnan**

(Guru Besar Sejarah Universitas Andalas)

Sebagai sebuah wilayah kajian, Sumatera Utara sangat menarik untuk diteliti dengan beragam tema kajian. Pemilihan tema uang sebagai alat perjuangan merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Tidak banyak peneliti yang membahas mengenai bagaimana peredaran dan peranan moneter dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Buku ini merupakan salah satu sumbangan yang amat berharga untuk memahami dinamika sejarah Sumatera Utara umumnya dan jejak perjuangan masyarakat Sumatera Utara pada khususnya.



**BANK INDONESIA**

ISBN 978-979-8086-57-1



9 789798 086571